

LEMBARAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No. 4, 2024 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Sasaran Pokok adalah gambaran kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 3

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
   a. RPJPN;
   b. RTRW; dan
   c. RPJPD Provinsi Banten.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 4

(1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. bab 1 memuat pendahuluan;
   b. bab 2 memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab 3 memuat permasalahan dan isu strategis;
   d. bab 4 memuat Visi dan Misi Daerah;
   e. bab 5 memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
   f. bab 6 memuat penutup.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pasal 5

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 wajib dipedomani dalam perumusan Visi dan Misi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pencapaian:
   a. sasaran Visi;
   b. Arah Kebijakan; dan
   c. Sasaran Pokok.

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

(4) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam:

a. perubahan RPJPD Tahun 2025-2045; dan/atau

b. penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

BAB VI

PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 7

(1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Daerah; dan/atau

b. terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:

1. bencana alam;
2. goncangan politik;
3. krisis ekonomi;
4. konflik sosial budaya;
5. gangguan keamanan;
6. pemekaran Daerah; dan/atau
7. perubahan kebijakan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (4,53/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 27 November 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta segenap komponen masyarakat telah diupayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup. Untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, maka proses pembangunan perlu didasarkan pada suatu perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RPJP kabupaten/kota memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

Perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada arah pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan arah pembangunan jangka panjang.

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki arti strategis dalam rangka perencanaan karena akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan jangka menengah Daerah. Selain itu, aspek perencanaan di Daerah juga harus selalu terintegrasi dengan perencanaan di tingkat nasional. RPJPD Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah atas (*bottom-up*). RPJPD Tahun 2025-2045 disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 151

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 5
1.3.1.Dokumen Perencanaan Pembangunan 5
1.3.2.Rencana Tata Ruang Wilayah 6
1.4. Maksud dan Tujuan 7
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH 9
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 9
2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah 9
2.1.2.Demografi 41
2.1.3.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 45
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 65
2.2.1.Kesejahteraan Ekonomi 65
2.2.1.Kesejahteraan Sosial Budaya 88
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 95
2.3.1.Daya Saing Ekonomi Daerah 95
2.3.2.Daya Saing Sumber Daya Manusia 112
2.3.3.Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah 122
2.3.4.Daya Saing Iklim Investasi 127
2.4. Aspek Pelayanan Umum 139
2.4.1.Indeks Reformasi Hukum 140
2.4.2.Indeks Reformasi Birokrasi 141
2.4.3.Indeks Pelayanan Publik 141
2.4.4.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 142
2.4.5.Indeks Kapabilitas dan Inovasi Daerah 143
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 143
2.5.1.Pencapaian Indikator Makro selama Periode RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 143
2.5.2.Pencapaian Arah Kebijakan (Sasaran Pokok) RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 146

2.5.3. Pencapaian RPJMD selama Periode RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 171
2.5.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Berdasarkan Evaluasi RPJMD 175
2.5.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Menurut Persepsi Masyarakat. 176
2.5.6. Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 181
2.5.7. Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 185
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 199
2.6.1. Proyeksi Kependudukan 199
2.6.2. Rasio Ketergantungan / *Depedency Ratio* (DR) 202
2.6.3. Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 203
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 210
2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045 211
2.7.2. Pusat Pertumbuhan dan Arahan Kewilayahan berdasarkan Rencana Tata Ruang 216

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 221
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 221
3.1.1. Kualitas SDM Belum Unggul dan Berdaya Saing Global 224
3.1.2. Pengembangan Perekonomian Kota Belum Optimal, Berdaya Saing Global dan Berkeadilan 227
3.1.3. Tata Kelola yang Profesional dan Kolaboratif Belum Optimal 229
3.1.4. Infrastruktur dan Layanan Perkotaan Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif 230
3.1.5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Belum Optimal 233
3.2. Isu Strategis Daerah 235
3.2.1. Isu Global dalam RPJPN Tahun 2025-2045 235
3.2.2. Isu Nasional dan Tantangan Perkotaan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 239
3.2.3. Isu Regional Provinsi Banten 241
3.2.4. Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025- 2045 243
3.2.5. Potensi Daerah/Modalitas Daerah 243
3.2.6. Isu Strategis Daerah Kota Tangerang Selatan 244

BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH 258
4.1. Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 258
4.1.1. Sasaran Visi 260
4.1.2. Metadata dan Definisi Operasional Indikator Sasaran Visi 263
4.2. Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 268

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 275
5.1. Arah Kebijakan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 275
5.1.1. Fokus Arah Kebijakan Periode I (Tahun 2025-2029) 277
5.1.2. Fokus Arah Kebijakan Periode II (Tahun 2030-2034) 282
5.1.3. Fokus Arah Kebijakan Periode III (Tahun 2035-2039) 288
5.1.4. Fokus Arah Kebijakan Periode IV (Tahun 2040-2044) 293
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 298
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah 298
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi 301
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Sasaran Pokok 306
5.2.4. Metadata dan Definisi Operasional Indikator Utama Pembangunan 312

BAB 6 PENUTUP 357
6.1. Kaidah Pelaksanaan 357
6.1.1.Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan 358
6.1.2.Kerangka Pengendalian dan Evaluasi 361
6.1.3.Sistem Insentif 363
6.1.4.Mekanisme Perubahan 364
6.1.5.Komunikasi Publik 364
6.2. Pendanaan Pembangunan 365

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan 10
Tabel 2.2. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan 11
Tabel 2.3. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan 12
Tabel 2.4. Kondisi klimatologi di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 14
Tabel 2.5. Curah Hujan Kota Tangerang Selatan tahun 2023 14
Tabel 2.6. Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan tahun 2022 15
Tabel 2.7. Luas Penggunaan Lahan 2017-2022 Kota Tangerang Selatan 17
Tabel 2.8. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan 18
Tabel 2.9. DAS di Kota Tangerang Selatan 18
Tabel 2.10. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 19
Tabel 2.11. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan 20
Tabel 2.12. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Danau Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 20
Tabel 2.13. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan 21
Tabel 2.14. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Tangerang Selatan 23
Tabel 2.15. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan 23
Tabel 2.16. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 24
Tabel 2.17. Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan 25
Tabel 2.18. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat 26
Tabel 2.19. Tingkat Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan 27
Tabel 2.20. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan 27
Tabel 2.21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan 37
Tabel 2.22. Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 41
Tabel 2.23. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan kelompok usia 42
Tabel 2.24. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023 42
Tabel 2.25. Angka migran seumur hidup dan migran risen menurut klasifikasi generasi di Kota Tangerang Selatan 2020 44
Tabel 2.26. Jenjang pendidikan yang ditamatkan pada klasifikasi generasi Kota Tangerang Selatan (persen) 45
Tabel 2.27. Pembagian Sub-DAS di Kota Tangerang Selatan 46
Tabel 2.28. Ketersediaan Air di Kota Tangerang Selatan 47
Tabel 2.29. Total Kebutuhan Air Kota Tangerang Selatan (Liter/detik) 48
Tabel 2.30. Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan per Kecamatan 48
Tabel 2.31. Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan Per Kecamatan 49
Tabel 2.32. Ketersediaan Pangan berdasarkan Nilai Kalori 51
Tabel 2.33. Angka Kecukupan Energi 52
Tabel 2.34. Kebutuhan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2022 52
Tabel 2.35. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 53
Tabel 2.36. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018 55

Tabel 2.37. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan 55
Tabel 2.38. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018..... 57
Tabel 2.39. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan 57
Tabel 2.40. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 58
Tabel 2.41. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan 58
Tabel 2.42. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018..... 60
Tabel 2.43. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan..... 60
Tabel 2.44. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018..... 62
Tabel 2.45. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 berdasarkan Kecamatan 62
Tabel 2.46. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018..... 64
Tabel 2.47. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan..... 64
Tabel 2.48. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023..... 65
Tabel 2.49. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi, Nasional, Kab/Kota di Provinsi Banten dan Kab/Kota Berdekatan dengan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2023 66
Tabel 2.50. Potensi Sektoral Perekonomian Kota Tangerang Selatan berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2022 s.d Tahun 2023..... 67
Tabel 2.51. Matriks Tipologi Klassen 68
Tabel 2.52. Tipologi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2022-2023)..... 69
Tabel 2.53. Jumlah PMDN dan PMA menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 70
Tabel 2.54. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan Maret Tahun 2021-2023..... 71
Tabel 2.55. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023..... 73
Tabel 2.56. Kondisi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2023 75
Tabel 2.57. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok Usia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan 77
Tabel 2.58. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan 77
Tabel 2.59. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan..... 78
Tabel 2.60. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Fasilitas BAB Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan..... 79
Tabel 2.61. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Status Bekerja Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan..... 79
Tabel 2.62. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan 79
Tabel 2.63. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Sumber Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan..... 80
Tabel 2.64. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan 80
Tabel 2.65. Garis Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Ekstrem Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023 80

Tabel 2.66. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023 81
Tabel 2.67. TPT Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2023..... 82
Tabel 2.68. IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023..... 84
Tabel 2.69. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023 85
Tabel 2.70. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023 85
Tabel 2.71. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023 86
Tabel 2.72. Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023 87
Tabel 2.73. Jumlah Prasarana Olahraga di Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2022 89
Tabel 2.74. Jenis Cabang Olah Raga Dan Organisasi Cabang Olah Raga di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 90
Tabel 2.75. Jumlah Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kota Tangerang Selatan 91
Tabel 2.76. Indeks Keluarga Sehat di Kota Tangerang Selatan 91
Tabel 2.77. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2022-2023 92
Tabel 2.78. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 93
Tabel 2.79. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 93
Tabel 2.80. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 94
Tabel 2.81. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2023..... 95
Tabel 2.82. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023 96
Tabel 2.83. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023..... 97
Tabel 2.84. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 97
Tabel 2.85. PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 . 98
Tabel 2.86. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah Berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023 99
Tabel 2.87. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 (Milyar Rp)..... 100
Tabel 2.88. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 (Milyar Rp)..... 101
Tabel 2.89. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 101
Tabel 2.90. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2018-2023..... 102
Tabel 2.91. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 103
Tabel 2.92. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 104
Tabel 2.93. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022 (%) 105
Tabel 2.94. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 106
Tabel 2.95. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023..... 106

Tabel 2.96. Perkembangan PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 108
Tabel 2.97. Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023..... 108
Tabel 2.98. Perkembangan Perubahan Inventori Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023..... 109
Tabel 2.99. Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023..... 110
Tabel 2.100. Perkembangan Impor Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023..... 110
Tabel 2.101. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023..... 110
Tabel 2.102. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 111
Tabel 2.103. Rasio Kewirausahaan Kota Tangerang Selatan 112
Tabel 2.104. TPAK Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2023 113
Tabel 2.105. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja Agustus Tahun 2021-2022..... 114
Tabel 2.106. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan 2019-2023 116
Tabel 2.107. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Agustus Tahun 2020-2022..... 117
Tabel 2.108. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Agustus Tahun 2022-2023 118
Tabel 2.109. Komposisi Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2020-2023 119
Tabel 2.110. Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Peserta Didik di Kota Tangerang Selatan 121
Tabel 2.111. IPLM Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2023..... 122
Tabel 2.112. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan (km)..... 123
Tabel 2.113. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Tangerang Selatan (km) 123
Tabel 2.114. Persentase rumah tangga menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Tangerang Selatan 124
Tabel 2.115. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Untuk minum di Kota Tangerang Selatan 125
Tabel 2.116. Jumlah Restoran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2021..... 125
Tabel 2.117. Jenis dan Jumlah Hotel di Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022 . 126
Tabel 2.118. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023 126
Tabel 2.119. Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023..... 127
Tabel 2.120. *Incremental Capital Output Ratio* (*ICOR*), Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023..... 128
Tabel 2.121. Data Daftar Pemilih Tetap Kota Tangerang Selatan 129
Tabel 2.122. Ringkasan hasil pemilihan umum Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2020..... 130
Tabel 2.123. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, 2022 131
Tabel 2.124. Data Polsek di bawah Wilayah Kerja Polres Tangerang Selatan 131
Tabel 2.125. Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Banten, 2022..... 132
Tabel 2.126. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) di Provinsi Banten, 2022..... 133
Tabel 2.127. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) di Provinsi Banten, 2022 133
Tabel 2.128. Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia di Provinsi Banten, 2022..... 133
Tabel 2.129. Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi Banten, 2022..... 134

Tabel 2.130. Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Banten Tahun 2022 135
Tabel 2.131. Indeks Demokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2022 136
Tabel 2.132. Indeks Persepsi Korupsi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023 136
Tabel 2.133. Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023 137
Tabel 2.134. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2022 137
Tabel 2.135. Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2023 .. 139
Tabel 2.136. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 141
Tabel 2.137. Capaian indeks pelayanan publik Kota Tangerang Selatan 142
Tabel 2.138. Capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Tangerang Selatan 142
Tabel 2.139. Capaian Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan 143
Tabel 2.140. Hasil pencapaian indikator Makro RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Form 4) 145
Tabel 2.141. Penjabaran dan Capaian Sasaran Pokok Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 Berdasarkan Indikator RPJMD yang Relevan 148
Tabel 2.142. Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 Berdasarkan Penjabaran Arah Kebijakan (Form 5) 158
Tabel 2.143. Ulasan dengan faktor pendukung paling berkontribusi di masing-masing topik 177
Tabel 2.144. Ulasan dengan faktor penghambat paling berkontribusi di masing-masing topik 179
Tabel 2.145. Permasalahan dan Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 185
Tabel 2.146. Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 189
Tabel 2.147. Data penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2045 200
Tabel 2.148. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 201
Tabel 2.149. Proyeksi penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 202
Tabel 2.150. Proyeksi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin tahun 2025-2045 202
Tabel 2.151. Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2025-2045 202
Tabel 2.152. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 204
Tabel 2.153. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 205
Tabel 2.154. Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 206
Tabel 2.155. Proyeksi timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 207
Tabel 2.156. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 208
Tabel 2.157. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 210
Tabel 3.1. Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah 221
Tabel 3.2. Perumusan Isu Strategis Daerah RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 244
Tabel 4.1. Perumusan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 258
Tabel 4.2. Penyelarasan Visi Kota Tangerang Selatan dengan Nasional dan Provinsi Banten 260
Tabel 4.3. Sasaran Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 261
Tabel 4.4. Pemetaan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi 262
Tabel 4.5. Perumusan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 268

Tabel 4.6. Keterkaitan Misi dengan Sasaran Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 273
Tabel 4.7. Penyelarasan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2045 274
Tabel 5.1. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045..... 299
Tabel 5.2. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 307

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Rencana PembangunanLainnya 5
Gambar 1.2. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang 7
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan 10
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan 11
Gambar 2.3. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan..... 13
Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 16
Gambar 2.5. Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan 2017-2022 17
Gambar 2.6. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan..... 19
Gambar 2.7. Peta Geologi Wilayah Kota Tangerang Selatan 22
Gambar 2.8. Diagram Capaian Prioritas Hasil Pengukuran IKD 25
Gambar 2.9. Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan..... 28
Gambar 2.10. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan..... 29
Gambar 2.11. Peta Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan 30
Gambar 2.12. Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan 31
Gambar 2.13. Peta Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan 32
Gambar 2.14. Peta Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan 33
Gambar 2.15. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan . 34
Gambar 2.16. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan 35
Gambar 2.17. Peta Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan..... 36
Gambar 2.18. Rata-rata Suhu Udara (^{0}C) Kota Tangerang Selatan 38
Gambar 2.19. Perubahan Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan 2005-2018 39
Gambar 2.20. Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan (^{0}C) Selama Kurun Waktu 2005-2018 39
Gambar 2.21. Suhu Permukaan Tanah wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 40
Gambar 2.22. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023 43
Gambar 2.23. Peta DAS di Kota Tangerang Selatan 45
Gambar 2.24. Peta Sub DAS di Kota Tangerang Selatan..... 46
Gambar 2.25. Peta Ketersediaan Air Kota Tangerang Selatan 47
Gambar 2.26. Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan 49
Gambar 2.27. Peta Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan 50
Gambar 2.28. Proyeksi Perbandingan Kebutuhan Air Total dengan Ketersediaan Air 50
Gambar 2.29. Daya Dukung Air Kota Tangerang Selatan 51
Gambar 2.30. Daya Dukung Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2022 53
Gambar 2.31. Proporsi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air..... 55
Gambar 2.32. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018..... 56
Gambar 2.33. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 59
Gambar 2.34. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 61
Gambar 2.35. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 63
Gambar 2.36. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 .. 65
Gambar 2.37. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan per Kapita, Kota Tangerang Selatan Maret 2016-2023 71

Gambar 2.38. Karakteristik Penduduk Miskin Menurut Sektor Pekerjaan dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 76
Gambar 2.39. Karakteristik Penduduk Miskin Menurut Status Bekerja Kabupaten/Kota Tahun 2022 76
Gambar 2.40. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 81
Gambar 2.41. TPT menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023 83
Gambar 2.42. TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022 83
Gambar 2.43. Perkembangan Penduduk Kota Tangerang Selatan Usia 65 Tahun ke Atas Tahun 2020-2023 120
Gambar 2.44. Risiko Penduduk Menjadi Korban Tindak Kejahatan (Crime Rate) di Provinsi Banten, 2022 135
Gambar 2.45. Sebaran Indikator pada Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 171
Gambar 2.46. Predikat Capaian Per Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 172
Gambar 2.47. Predikat Capaian Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 172
Gambar 2.48. Sebaran Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi RJPMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 173
Gambar 2.49. Predikat Capaian Per Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 174
Gambar 2.50. Predikat Capaian Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 174
Gambar 2.51. Word cloud faktor pendorong 176
Gambar 2.52. Coherence score untuk penentuan topik pada faktor pendorong 177
Gambar 2.53. Word cloud faktor penghambat 178
Gambar 2.54. Coherence score penentuan topik pada faktor penghambat 179
Gambar 2.55. Functional Region Sumatra-Jawa..... 211
Gambar 2.56. Integrasi antara Functional Region Sumatra-Jawa dengan Backbone System Banten-DKI-Jawa Barat 212
Gambar 2.57. Rencana Pengembangan Pulau Jawa 212
Gambar 3.1. Kerangka kerja bonus demografi (Demographic Dividend Framework) yang memuat sektor dan subsektor yang perlu diintervensi untuk mengkapitalisasi bonus demografi..... 247
Gambar 3.2. Korelasi pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/kota di Provinsi Banten 2022 249
Gambar 4.1. Rumusan Visi berdasarkan FGD Foresight Planning..... 258
Gambar 4.2. Penyelarasan Visi Kota Tangerang Selatan dengan Nasional dan Provinsi Banten 260
Gambar 4.3. Komponen Pembentuk Indeks Daya Saing Daerah..... 266
Gambar 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 .. 275
Gambar 6.1. Kerangka Pengawalan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045 357
Gambar 6.2. Kerangka Kerja Logis RPJPD-Dokumen Turunannya 360
Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 362

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Dengan akan habisnya masa berlaku RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, maka paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD tersebut berakhir, dilaksanakan penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Dalam Penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman adalah:

1. Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kota Tangerang Selatan yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan Visi Provinsi Banten dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.
2. Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan visi RPJPD Kota Tangerang Selatan

Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan Misi Provinsi Banten dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

3. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi empat tahap pembangunan per-lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.
4. Sasaran Pokok RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Sasaran Pokok ini memperhatikan arah (tujuan) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan Provinsi Banten dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.
5. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
6. Isu Strategis dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan karena dampaknya dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis ini memperhatikan isu strategis global, nasional dan regional sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

Selain itu dalam menyusun RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, hal-hal yang diperhatikan adalah:

1. Memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan periode sebelumnya dan digunakan sebagai masukan/bahan refleksi dalam penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045.
2. Memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis sebagai bentuk komitmen dan langkah strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Berpedoman pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Substansi RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 yang dipedomani yaitu tujuan dan arah kebijakan pengembangan wilayah.

Hal yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan dalam penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah pelibatan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Melalui proses partisipatif dalam menggali gagasan

(*Foresight planning*) dan *Fokus Group Discussion* (*FGD*) serta penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, merupakan ruang yang telah diberikan seluas-luasnya kepada seluruh *stakeholder* di Kota Tangerang Selatan dalam menyampaikan gagasan, masalah dan harapan terhadap Kota Tangerang Selatan 20 tahun mendatang. Semua pihak telah berupaya secara maksimal berkontribusi sesuai dengan peran dan kewenangannya. Dalam pelaksanaan RPJPD sebagai bagian dari pembangunan nasional, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memperhatikan dan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

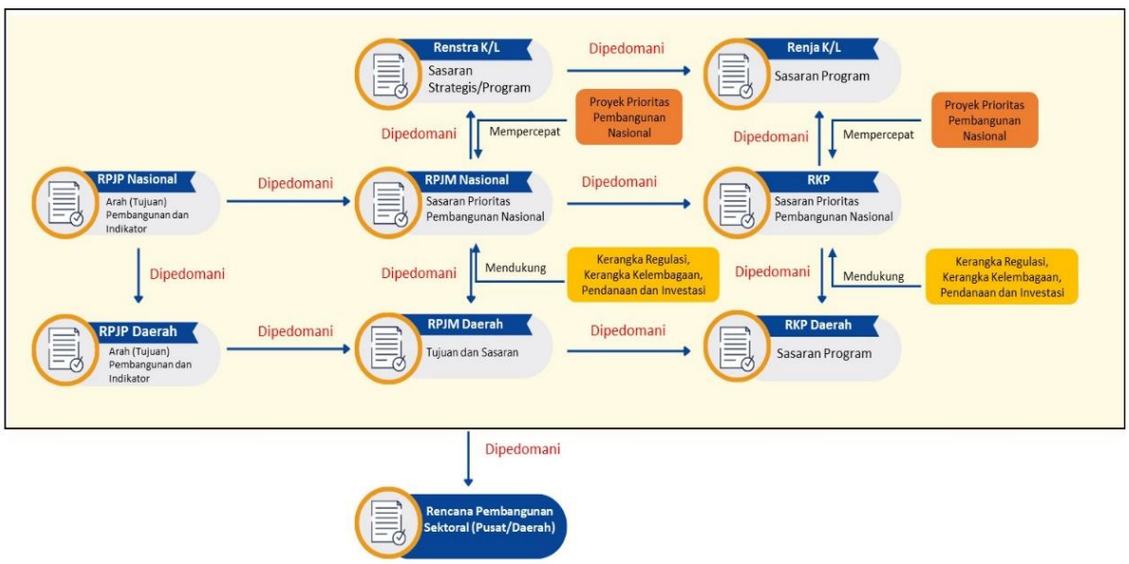
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). RPJP Nasional, yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. RPJP Nasional harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk lembaga-lembaga negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Gambaran keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Konsistensi antara RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 secara spesifik adalah sebagai berikut:

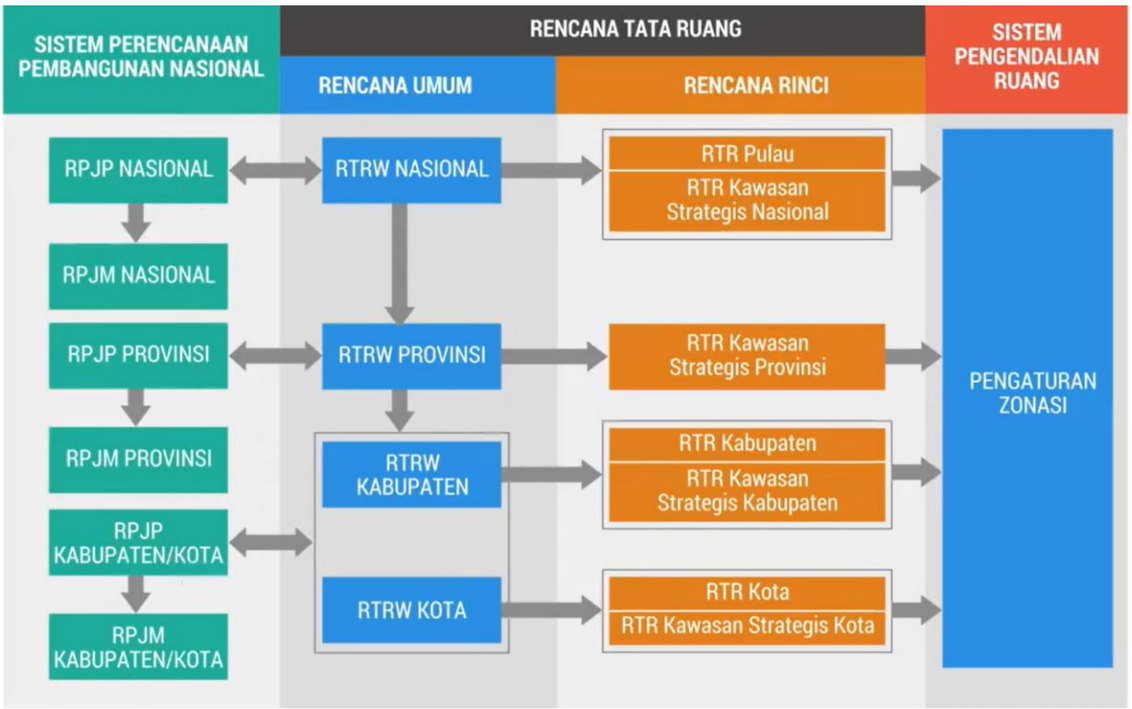
1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Nasional ke RPJP Daerah di mana periodisasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 mengikuti RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045.

2) Arah kebijakan dan indikator pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.

Selain penyelarasan dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 juga diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Dalam hal sinkronisasi dan penyelarasan tersebut, penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 mempedomani Inmendagri RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI No. 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan No. 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil dari perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Amanat Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menghendaki keterpaduan dan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah harus terpadu dan sinergi dengan peraturan-peraturan lainnya. Secara umum gambaran keterkaitan antara Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut, di mana dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Nasional maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) disinkronkan dengan tujuan dan prioritas pembangunan RPJP Daerah.



Gambar 1.2. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sesuai dengan Gambar 1.2 di atas, maka RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2025 disusun melalui penyelarasan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Banten, RTRW Kota Tangerang Selatan dan RTRW Kawasan Jabodetabekjur

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai kaidah-kaidah perencanaan yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024. Tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah 1) merumuskan kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; 2) memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional; serta 3) memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025-2045
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
3.2. Isu Strategis Daerah

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045
4.2. Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045
5.2. Sasaran Pokok Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan
6.2. Pembiayaan Pembangunan

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada tahun 2008 di Provinsi Banten merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangunan kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Kota Tangerang Selatan secara geografis berada pada 06˚13’30”- 06˚22’30” lintang selatan dan 106˚38’0”-106˚47’0” bujur timur. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan (Perwal RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022). Secara rinci batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

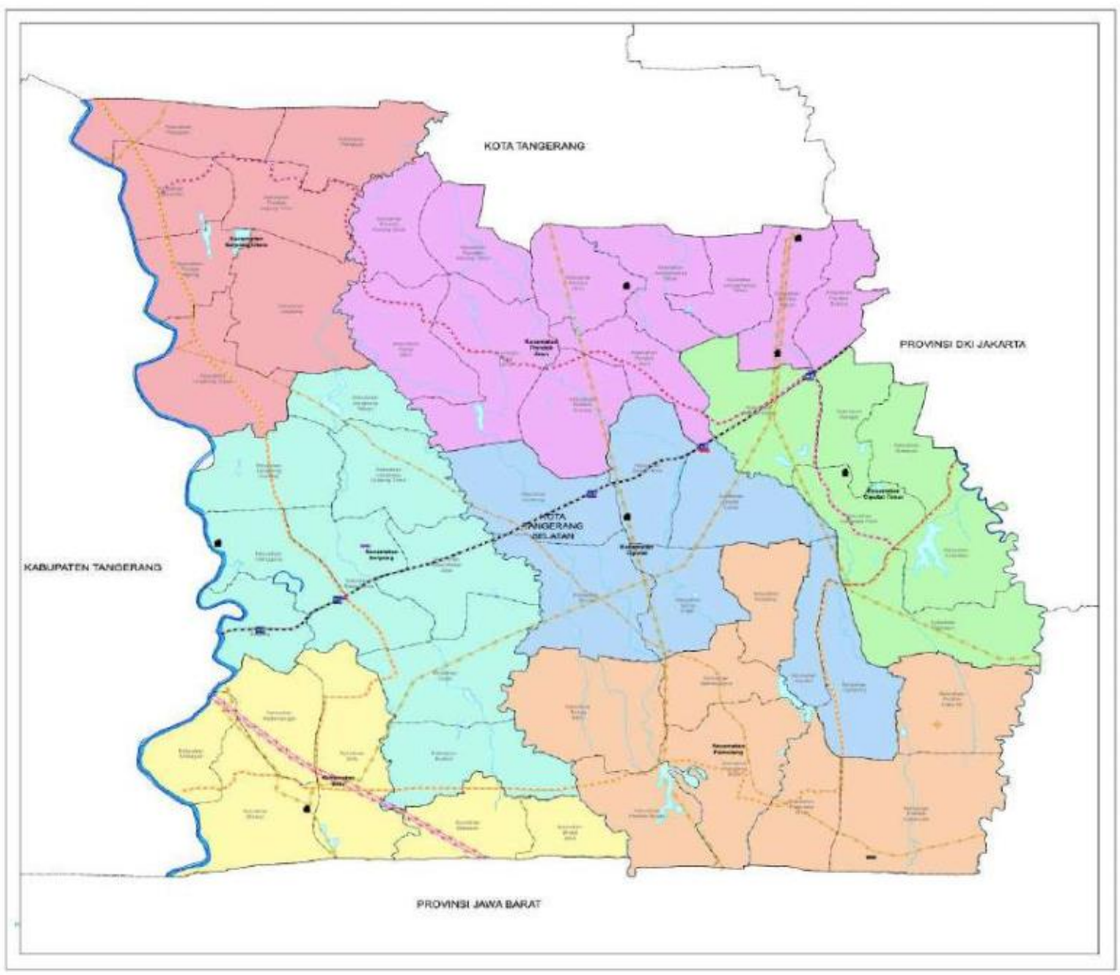
Sebelah Utara	:	Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang di Kota Tangerang Provinsi Banten
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari di Kota Depok serta Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Sebelah Barat	:	Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Kota Tangerang Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 164,86 km² di mana wilayah terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 29,78 km² (18,06%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 16,73 km² (10,15%). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km^2)	Persentase	Jarak ke Ibukota Kab/Kota
1	Setu	Kademangan	6	16,73	10,15	7,8
2	Serpong	Serpong	9	28,44	17,25	10,1
3	Pamulang	Pamulang Barat	8	28,65	17,38	5,5
4	Ciputat	Sawah	7	21,03	12,76	6
5	Ciputat Timur	Pondok Ranji	6	17,97	10,90	18,67,8
6	Pondok Aren	Perigi Baru	11	29,78	18,06	9,3
7	Serpong Utara	Pondok Jagung	7	22,26	13,50	11,7
Kota Tangerang Selatan			**54**	**164,86**	**100**	

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2022 dan Perwal RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022

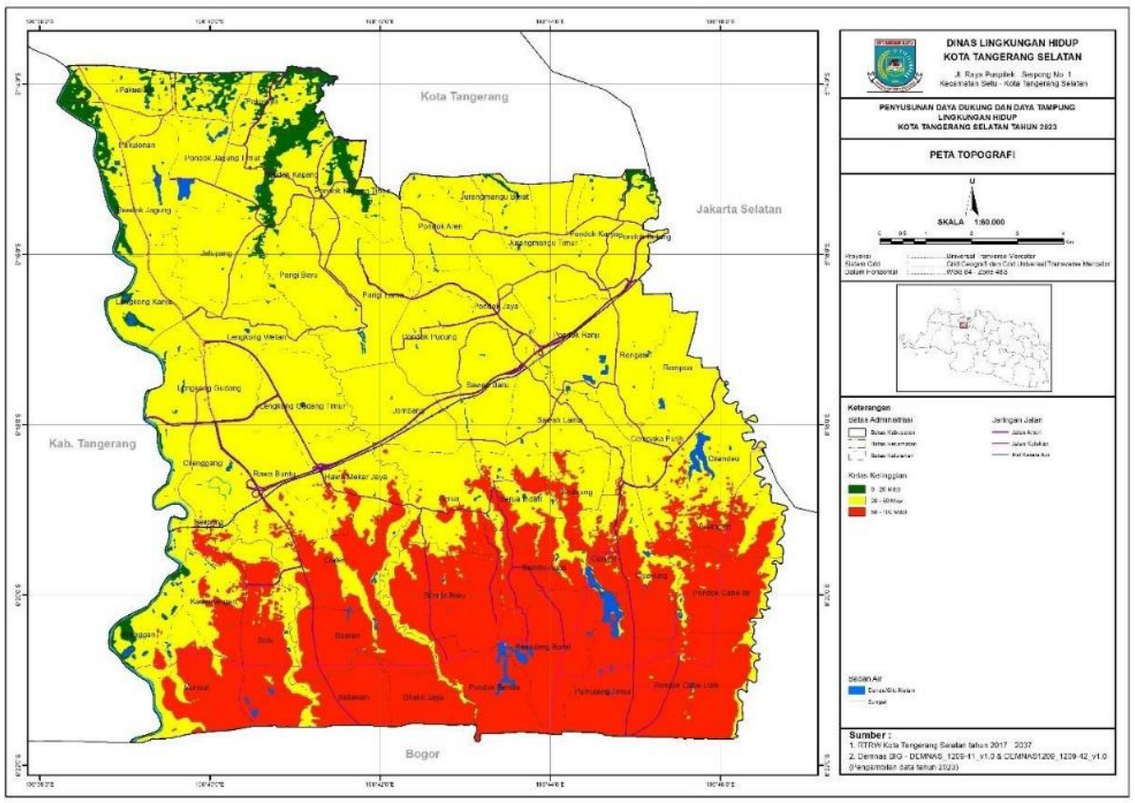


Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan

Sumber: Perwal RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022

2.1.1.2. Topografi

Topografi merupakan penggambaran permukaan bumi berdasarkan parameter tertentu seperti, perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut, bentuk wilayah dan kemiringan lereng. Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng landai/berombak yang diikuti oleh kelas lereng agak miring/bergelombang, kelas lereng datar, dan kelas lereng miring berbukit. Untuk peta topografi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Untuk distribusi luas kelas elevasi dan untuk distribusi luas kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
Ciputat	20 - 50 Mdpl	1.624,14
	50 - 100 Mdpl	491,66
Ciputat Timur	0 - 20 Mdpl	0,34
	20 - 50 Mdpl	1.570,18
	50 - 100 Mdpl	213,50
Pamulang	20 - 50 Mdpl	383,06
	50 - 100 Mdpl	2.485,30
Pondok Aren	0 - 20 Mdpl	155,11
	20 - 50 Mdpl	2.822,51
Serpong	0 - 20 Mdpl	35,04

Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
	20 - 50 Mdpl	2.156,08
	50 - 100 Mdpl	652,73
Serpong Utara	0 - 20 Mdpl	353,68
	20 - 50 Mdpl	1.863,87
Setu	0 - 20 Mdpl	63,05
	20 - 50 Mdpl	548,66
	50 - 100 Mdpl	1.066,61
Jumlah		**16.485,52**

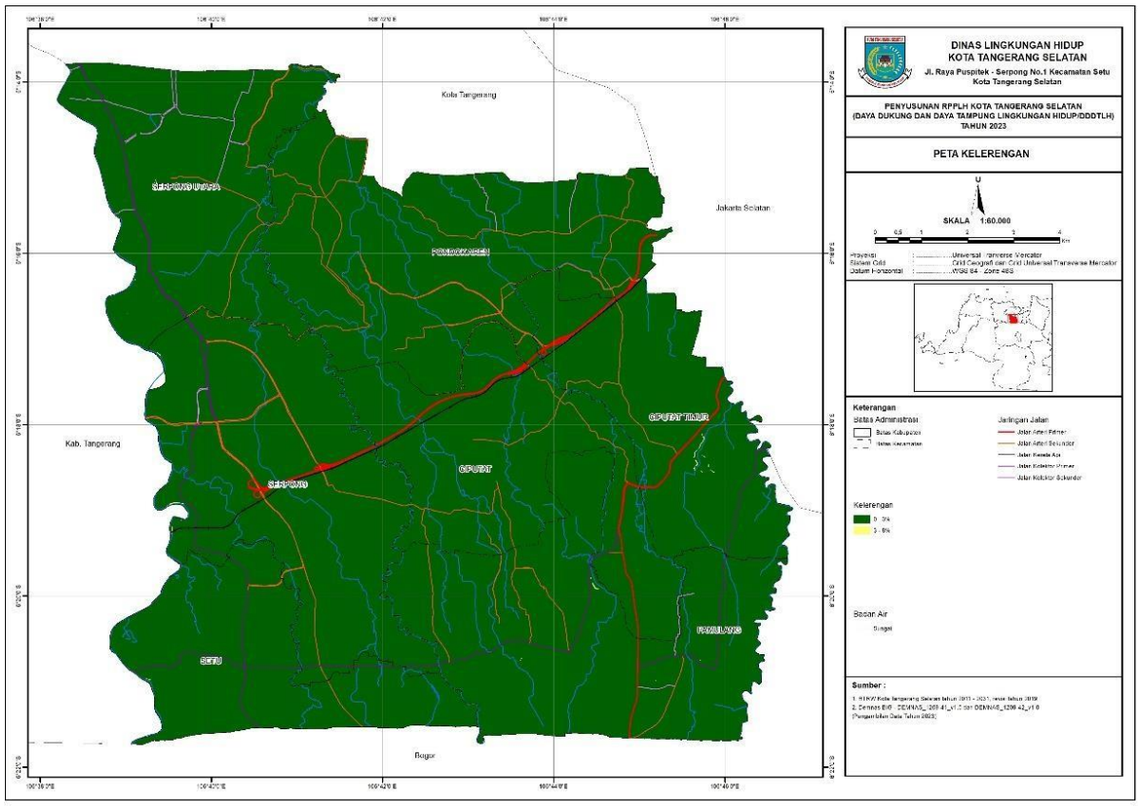
Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Tabel 2.3. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelas Kelerengan	Luas (ha)
Ciputat	0 - 3%	2.115,80
Ciputat Timur	0 - 3%	1.782,14
	3 - 8%	1,88
Pamulang	0 - 3%	2.867,63
	3 - 8%	0,73
Pondok Aren	0 - 3%	2.977,62
	3 - 8%	0,00
Serpong	0 - 3%	2.842,53
	3 - 8%	1,32
Serpong Utara	0 - 3%	2.217,33
	3 - 8%	0,21
Setu	0 - 3%	1.678,12
	3 - 8%	0,20
Jumlah		**16.485,52**

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng sebesar 0-3% yang diikuti oleh kelas lereng 3-8% dari total luas wilayah. Dari Kelas elevasi wilayah kota Tangerang Selatan pada dasarnya hanya terdiri dari kelas dataran rendah (< 50 mdpl) dan kelas dataran rendah pedalaman (50-100 mdpl) menurut data Analisis GIS 2023. Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, kelas elevasi terluas di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kelas dataran rendah dengan luas mencapai 11.576,26 ha atau 70.22% dari total luas wilayah.



Gambar 2.3. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Hasil pengamatan distribusi kelas elevasi pada Gambar 2.3 di atas menunjukkan pola gradien ketinggian wilayah yang naik dari arah Utara di Kecamatan Serpong Utara dan Pondok Aren ke arah Selatan di Kecamatan Pamulang dan Setu. Pola ini mengikuti kondisi gradien elevasi bentang alam pada skala yang lebih luas yakni dari arah Utara di wilayah pesisir pantai Utara/Teluk Jakarta ke arah Selatan di wilayah dataran tinggi/pegunungan di Bogor. Informasi pola gradien ketinggian ini juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah hulu-hilir suatu daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari wilayah pegunungan yang tinggi ke wilayah pesisir yang lebih rendah. Wilayah dataran rendah biasanya menjadi wilayah dataran banjir (*flood plain*) DAS yang tentunya secara alami akan lebih rentan / berisiko terhadap banjir daripada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri dilalui oleh 2 (dua) DAS, yakni DAS Cisadane dan DAS Angke-Pesanggrahan.

2.1.1.3. Klimatologi

Keadaan iklim Kota Tangerang Selatan diukur dengan parameter suhu, kelembapan, dan curah hujan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4. Kondisi klimatologi di Kota Tangerang Selatan tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22,80	29,6	35,4	50,0	71,3	98,0
Februari	22,80	28,3	34,4	44,0	77,0	98,0
Maret	22,4	29,3	35,6	53,0	75,7	98,0
April	23,8	30,8	37,2	45,0	69,0	100,0
Mei	24,2	30,8	36,0	49,0	70,6	99,0
Juni	23,4	30,6	36,0	45,0	69,0	99,0
Juli	23,8	30,4	35,2	32,0	65,8	97,0
Agustus	23,8	30,8	35,8	37,0	62,7	96,0
September	23,0	31,6	37,5	31,0	60,2	96,0
Oktober	25,0	32,7	39,4	36,0	60,6	95,0
November	24,1	31,2	37,0	46,0	70,8	98,0
Desember	22,8	30,8	38,0	37,0	70,6	98,0

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.5. Curah Hujan Kota Tangerang Selatan tahun 2023

Kecamatan	Intensitas	Luas (ha)
Ciputat	2000 - 2500 mm	1.983
	2500 - 3000 mm	133
Ciputat Timur	2000 - 2500 mm	1.784
Pamulang	2000 - 2500 mm	648
	2500 - 3000 mm	2.221
Pondok Aren	2000 - 2500 mm	2.978
Serpong	2000 - 2500 mm	2.142
	2500 - 3000 mm	702
Serpong Utara	2000 - 2500 mm	2.217
Setu	2000 - 2500 mm	2
	2500 - 3000 mm	1.676
Jumlah		**16.486**

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2023

Suhu rata-rata Kota Tangerang Selatan antara 28,3°C-30,1°C. Suhu rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Agustus dan suhu rata-rata terendah terjadi pada Bulan Desember. Kelembaban rata-rata Kota Tangerang Selatan antara 74,7%-83,3% di mana kelembaban rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Desember dan kelembaban rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juli. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada Kecamatan Pamulang sebesar 2500 - 3000 mm/tahun pada luas wilayah curah hujan 2.220,57 ha.

2.1.1.4. Penggunaan Lahan

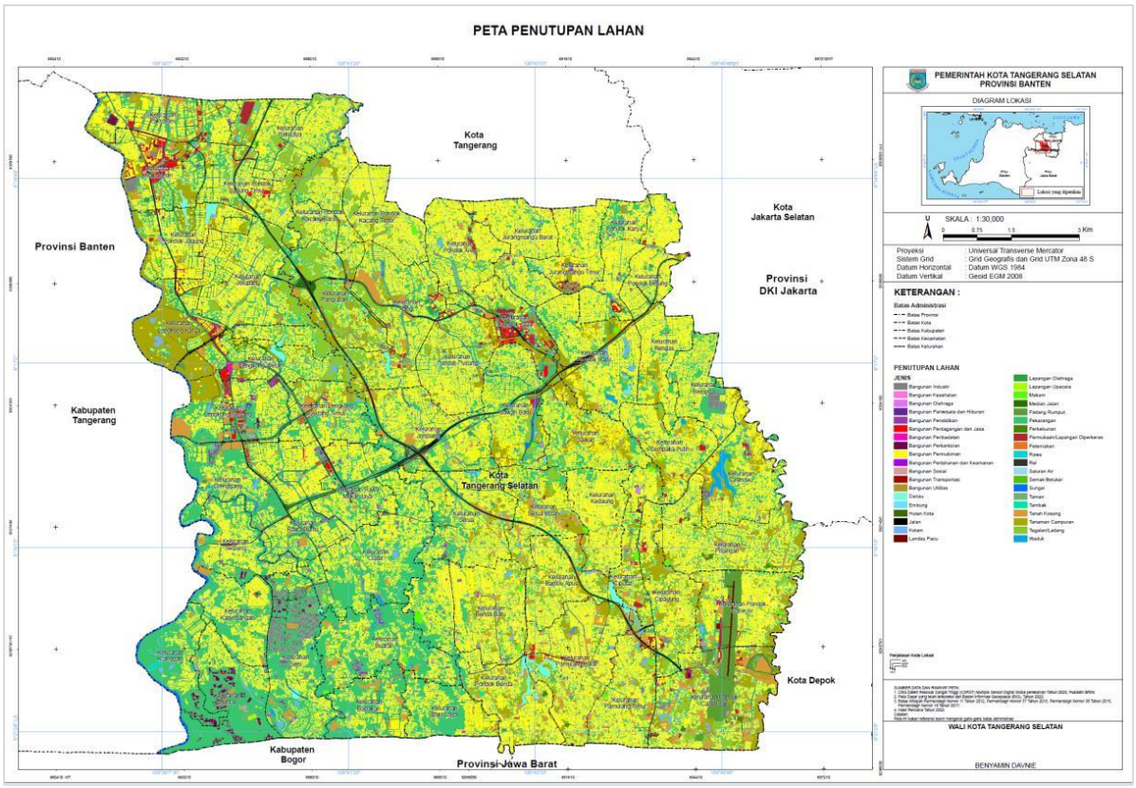
Penggunaan lahan kawasan di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kawasan terbangun, yang digunakan antara lain untuk permukiman, industri, sarana sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran swasta dan pemerintahan. Pemanfaatan lahan di Kota Tangerang Selatan meningkat seiring dengan tingginya aktivitas perkotaan, yang menyebabkan harga lahan tinggi. Penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Bangunan Industri	89,65	0,544%
2	Bangunan Kesehatan	7,64	0,046%
3	Bangunan Olahraga	9,37	0,057%
4	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	4,79	0,029%
5	Bangunan Pendidikan	58,63	0,356%
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	73,38	0,445%
7	Bangunan Peribadatan	31,16	0,189%
8	Bangunan Perkantoran	52,62	0,319%
9	Bangunan Permukiman	5.150,91	31,244%
10	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	2,99	0,018%
11	Bangunan Sosial	4,83	0,029%
12	Bangunan Transportasi	6,78	0,041%
13	Bangunan Utilitas	2,63	0,016%
14	Danau	63,29	0,384%
15	Embung	7,99	0,048%
16	Hutan Kota	0,43	0,003%
17	Jalan	1.323,14	8,026%
18	Kolam	102,50	0,622%
19	Landas Pacu	10,61	0,064%
20	Lapangan Olahraga	25,76	0,156%
21	Lapangan Upacara	1,69	0,010%
22	Makam	41,29	0,250%
23	Median Jalan	62,97	0,382%
24	Padang Rumput	135,46	0,822%
25	Pekarangan	6.490,95	39,373%
26	Perkebunan	11,56	0,070%
27	Permukaan/Lapangan Diperkeras	156,95	0,952%
28	Peternakan	0,22	0,001%
29	Rawa	4,82	0,029%
30	Rel	16,72	0,101%
31	Saluran Air	3,68	0,022%
32	Semak Belukar	4,10	0,025%
33	Sungai	125,42	0,761%
34	Taman	87,15	0,529%
35	Tambak	2,01	0,012%
36	Tanah Kosong	487,54	2,957%
37	Tanaman Campuran	1.307,68	7,932%
38	Tegalan/Ladang	483,33	2,932%
39	Waduk	33,29	0,202%
	Total	**16.485,52**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Peta penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Gambar 2.4.



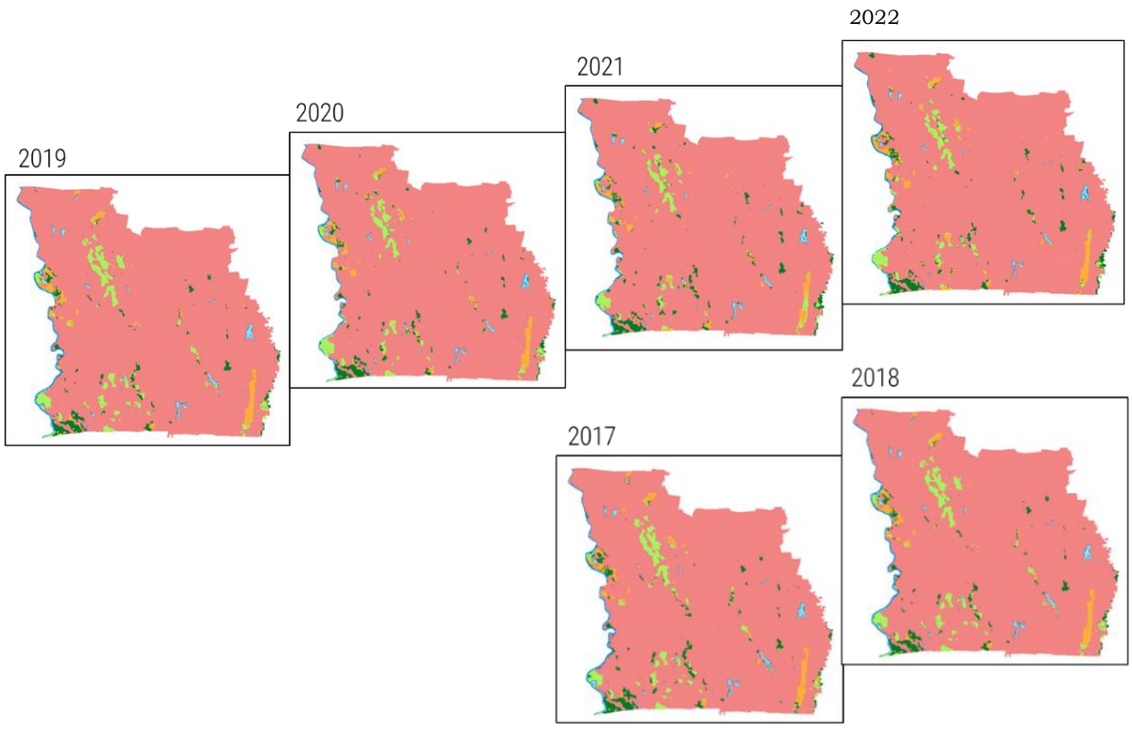
Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pada peta penggunaan lahan dan Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa Penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan didominasi peruntukan bangunan permukiman sebesar 31,244 persen. Sedangkan Lahan yang belum terbangun di Kota Tangerang Selatan berupa tanah kosong hanya tersisa 2,957 persen atau 487,54 ha.

Penggunaan lahan dalam konfigurasi ruang merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat perubahan antar waktu dalam perkembangan suatu kota atau wilayah. Jika dilihat secara spasial pada Gambar 2.5, data yang diolah dari Sentinel menunjukkan sejak tahun 2017 penggunaan lahan terbangun dan permukiman menempati luas lahan yang tinggi mencapai 90% lebih dari total luas wilayah. Perkembangan luas ini terus meningkat di tahun 2019 dengan laju pertambahan sekitar 30%, sementara lahan pertanian dan tutupan vegetasi cenderung mengalami penurunan luas lahan. Pada tahun 2018, tutupan semak belukar/lahan kering dan lahan terbuka di wilayah Kota Tangerang Selatan semakin berkurang dan digantikan oleh lahan terbangun. Perubahan lahan yang paling mencolok pada tahun 2018 adalah pembangunan jalan tol yang membelah utara-selatan pusat kota bagian barat Tangerang Selatan, yang semula merupakan semak belukar/lahan kering pada tahun 2013. Arah perubahan tutupan lahan yang dibangun oleh Tangerang Selatan berasal dari Kota Jakarta, dari arah timur menuju ke arah barat menjauhi Kota Jakarta dan menuju ke arah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Tutupan vegetasi dengan kerapatan tinggi, lahan semak belukar/lahan kering dan lahan pertanian cenderung terus berkurang setiap tahunnya, diiringi dengan bertambahnya luas lahan

terbangun. Gambar 2.5 berikut, menunjukkan tingkat perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2017 sampai 2022, yang menunjukkan kecenderungan perkembangan lahan terbangun dan permukiman yang semakin tinggi. Kecenderungan penurunan luas lahan terbangun di tahun 2020 sampai 2021 sebagian disebabkan intensitas pembangunan yang tidak berjalan, hal tersebut disebabkan kontraksi pembangunan akibat pandemi Covid-19.



Gambar 2.5. Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan 2017-2022

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan

Tabulasi hasil klasifikasi tipe tutupan penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Luas Penggunaan Lahan 2017-2022 Kota Tangerang Selatan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vegetasi tutupan rapat	403,3	402,3	292,2	350,8	427,5	384,6
2	Vegetasi rawa	0,5	0,5	0,1	0,9	0,4	3,1
3	Lahan pertanian	532,4	530,4	477,4	462,4	411,7	416,8
4	Belukar	0,0	0,0	2,1	0,2	0,2	0,1
5	Lahan pengembalaan	312,6	315,6	267,4	273,5	259,3	357,3
6	Lahan Terbuka dan permukiman	15.015,7	15.015,7	15.240,1	15.200,5	15.184,4	15.162,0
7	Tubuh air	220,5	220,5	205,7	196,7	201,6	161,2
Total Luas (ha)		**16.486**	**16.486**	**16.486**	**16.486**	**16.486**	**16.486**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Tangerang Selatan dilintasi oleh Sungai Kali Angke, Sungai Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Keadaan hidrologi umumnya berkaitan dengan fisiografi daerah yang berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas:

Air permukaan, yaitu diartikan sebagai air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran air permukaan yang terdapat di wilayah ini berupa aliran air Sungai Cisadane, Sungai Angke dan sebagian wilayah dilewati Sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-saluran alam yang dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase. Saluran semacam ini cenderung meluap pada musim hujan.

Air tanah, wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas memiliki kondisi air tanah yang baik, hal ini menyebabkan banyak penduduk yang masih menggunakannya sebagai air bersih. Kota Tangerang Selatan dialiri oleh tiga sungai dan termasuk pada DAS Angke-Pesanggrahan dan DAS Cisadane, dengan masing-masing debit yang bervariasi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8, Tabel 2.9 dan Gambar 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.8. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan

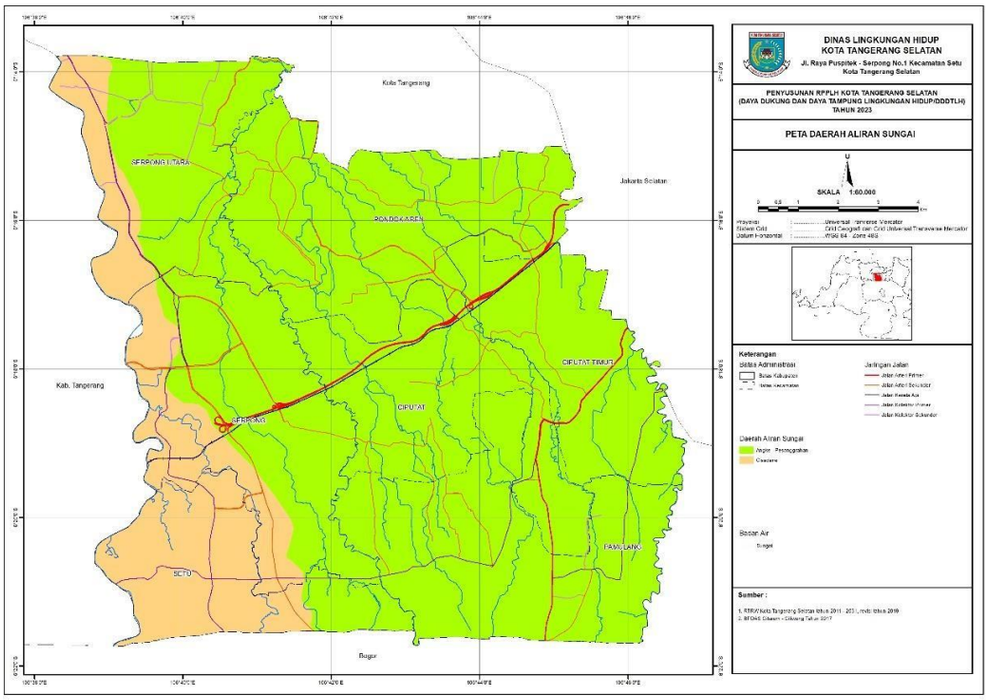
No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m^3/dtk)
1	Sungai Kali Angke	+ 62,5	2,62
2	Sungai Cisadane	+ 122	76,22
3	Sungai Pesanggrahan	+ 71,8	1,53

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2.9. DAS di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Ciputat	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.115,80
Ciputat Timur	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.784,02
Pamulang	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.868,36
Pondok Aren	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.977,62
Serpong	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.950,50
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	893,35
Serpong Utara	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.645,75
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	571,79
Setu	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	300,88
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	1.377,44
Jumlah		**16.485,52**

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.6. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, *Total Phosphat* (*TP*), dan *Fecal Coliform*, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan hasil pemantauan air sungai di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada 25 titik pantau, terdapat sebanyak 20 titik pantau menunjukkan nilai status mutu air dengan kategori memenuhi baku mutu dan sebanyak 5 titik pantau dengan kategori cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No.	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Kali Jalentreng Tengah	0,954	Memenuhi BM
2	Kali Jalentreng Hulu	0,800	Memenuhi BM
3	Kali Jalentreng Hilir	0,755	Memenuhi BM
4	Kali Cisalak Hulu	1,084	Cemar Ringan
5	Kali Cisalak Hilir	0,715	Memenuhi BM
6	Sungai Cisadane Hulu	0,709	Memenuhi BM
7	Sungai Cisadane Tengah I	0,746	Memenuhi BM
8	Sungai Cisadane Tengah Ii	0,655	Memenuhi BM
9	Sungai Cisadane Hilir	0,586	Memenuhi BM
10	Sungai Angke Hulu	0,748	Memenuhi BM
11	Sungai Angke Tengah 1	0,755	Memenuhi BM
12	Sungai Angke Hilir	0,765	Memenuhi BM
13	Sungai Pesanggrahan Hulu	0,762	Memenuhi BM
14	Sungai Pesanggrahan Tengah	0,899	Memenuhi BM
15	Sungai Pesanggrahan Hilir	0,725	Memenuhi BM
16	Kali Legoso Hulu	0,946	Memenuhi BM
17	Kali Legoso Hilir	1,073	Cemar Ringan

No.	Nama Aliran	Pij	Kategori
18	Kali Cirompang Hulu	1,145	Cemar Ringan
19	Kali Cirompang Hilir	1,014	Cemar Ringan
20	Kali Ciledug Hulu	0,741	Memenuhi BM
21	Kali Ciledug Hilir	0,830	Memenuhi BM
22	Kali Kedaung Hulu	1,053	Cemar Ringan
23	Kali Kedaung Hilir	0,893	Memenuhi BM
24	Kali Baru Hulu	0,757	Memenuhi BM
25	Kali Baru Hilir	0,864	Memenuhi BM

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pemantauan kualitas air selain dilakukan pada air sungai, juga dilakukan pada air danau/situ yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki 9 Situ, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.11. Hasil pemantauan kualitas air situ terhadap 13 titik pantau air adalah sebanyak 5 titik pantau berkategori status mutu air memenuhi baku mutu dan sebanyak 8 titik pantau berkategori status mutu air cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.11. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan

No.	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
1	Situ Legoso/Situ Kuru	Ciputat Timur	0,54
2	Situ Pamulang	Ciputat dan Pamulang	25,8
3	Situ Bungur	Ciputat Timur	2,91
4	Situ Rompong	Ciputat Timur	1,77
5	Situ Parigi	Pondok Aren	4,14
6	Situ Ciledug	Pamulang	23,05
7	Situ Kayu Antap	Ciputat Timur	1,64
8	Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk	Serpong Utara	7,59
9	Bendungan Gintung	Ciputat Timur	22,57

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

Tabel 2.12. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Danau Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No.	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Situ Ciledug Inlet	1,021	Cemar Ringan
2	Situ Sasak Inlet	1,036	Cemar Ringan
3	Situ Perigi Inlet	0,955	Memenuhi BM
4	Situ Pondok Jagung Inlet	1,047	Cemar Ringan
5	Situ Pondok Jagung Outlet	0,933	Memenuhi BM
6	Situ Bungur Inlet	1,055	Cemar Ringan
7	Situ Bungur Outlet	1,039	Cemar Ringan
8	Situ Rompang Inlet	1,121	Cemar Ringan
9	Situ Rompang Outlet	1,015	Cemar Ringan
10	Situ Gintung Inlet	0,816	Memenuhi BM
11	Situ Gintung Outlet	0,787	Memenuhi BM
12	Situ Kuru Inlet	1,548	Cemar Ringan
13	Situ Kuru Outlet	0,951	Memenuhi BM

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

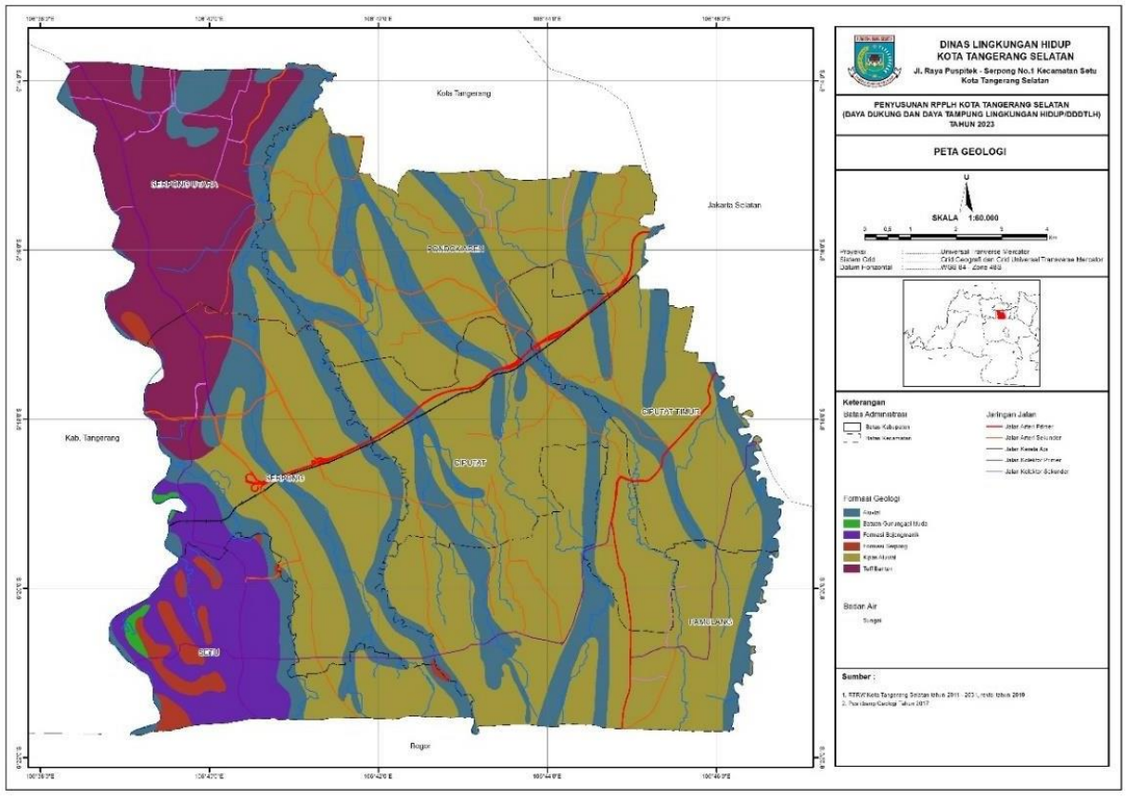
2.1.1.6. Geologi

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar, adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang, serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi Geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvial, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari *United Soil Clasification System*, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau *work ablility* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik, sehingga wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan. Pada konteks wilayah kota Tangerang Selatan, informasi karakteristik geologi dan jenis tanah berguna untuk menilai kelayakan pembangunan konstruksi infrastruktur permukiman wilayah perkotaan, kelayakan sipil bangunan, serta untuk menekan risiko dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas pembangunan yang ditimbulkannya. Peta geologi dan tabel distribusi luas kelas geologi litologi wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.13 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.13. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
Ciputat	Aluvial	684,79
	Kipas Aluvial	1.662,20
Ciputat Timur	Aluvial	452,40
	Kipas Aluvial	1.331,62
Pamulang	Aluvial	399,04
	Formasi Serpong	3,42
	Kipas Aluvial	2.234,71
Pondok Aren	Aluvial	809,63
	Kipas Aluvial	2.168,00
Serpong	Aluvial	835,90
	Batuan gunungapi muda	10,37
	Formasi Bojongmanik	155,49
	Formasi Serpong	5,11
	Kipas Aluvial	1.423,48
	Tuff Banten	413,49
Serpong Utara	Aluvial	468,72
	Formasi Serpong	25,83
	Kipas Aluvial	57,08
	Tuff Banten	1.665,92
Setu	Aluvial	229,98
	Batuan gunungapi muda	28,09
	Formasi Bojongmanik	862,83
	Formasi Serpong	229,11
	Kipas Aluvial	328,31
Jumlah		**16.485,52**

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.7. Peta Geologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

2.1.1.7. Kajian Risiko Bencana Kota

Kajian risiko bencana di Kota Tangerang Selatan mengacu pada Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 yang disusun oleh BPBD Kota Tangerang Selatan. Kajian risiko bencana menggunakan indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas yang akan menghasilkan gambaran tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Tingkat bahaya dan kerentanan bergantung pada jenis bahaya, sedangkan tingkat kapasitas ditentukan berdasarkan wilayah administrasi yang difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian.

A. Rekapitulasi Ancaman/Bahaya

Rekapitulasi ancaman/bahaya bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Skala tingkat bahaya dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0-0,33), sedang (>0,33-0,66) dan tinggi (>0,66-1,00). Hasil dari rekapitulasi ancaman/bahaya berupa luas potensi bahaya menurut tingkat ancamannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Tangerang Selatan

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Gempa Bumi	13.811,30	2.673,18	0,99	16.485,47	Tinggi
2	Banjir	415,35	440,82	741,33	1.597,50	Tinggi
3	Tanah Longsor	57,06	-	-	57,06	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	-	13.325,84	3.159,63	16.485,47	Tinggi
5	Kekeringan	16.053,38	432,09	-	16.485,47	Sedang
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	520,29	11.770,02	-	12.290,31	Sedang
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.927,72	8.902,98	-	10.829,70	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	13.292,36	2.775,33	417,78	16.485,47	Tinggi
9	Konflik Sosial	308,43	141,21	-	449,64	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, dan kegagalan teknologi. Kemudian terdapat 4 (empat) bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya sedang yaitu kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kebakaran gedung dan permukiman. Sedangkan bencana tanah longsor masuk ke dalam kategori bahaya rendah.

B. Rekapitulasi Kerentanan

Potensi kerentanan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dengan kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks kerentanan. Nilai indeks kerentanan Kota Tangerang Selatan selengkapnya berdasarkan jenis bencana dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

No.	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Gempa Bumi	1.747.906	208.126	22.196	345	Tinggi
2	Banjir	133.358	15.817	1.489	23	Tinggi
3	Tanah Longsor	576	68	10	13	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	1.747.906	207.487	22.155	344	Tinggi
5	Kekeringan	1.747.906	208.022	22.188	345	Tinggi
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	1.717.267	204.474	21.777	338	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.712.951	203.957	21.727	338	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.747.906	155.425	13.836	185	Tinggi
9	Konflik Sosial	38.182	4.421	517	7	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa terdapat 8 (delapan) bencana yang memiliki potensi penduduk terpapar kelas tinggi yaitu bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi serta konflik sosial. Kemudian

bencana tanah longsor ada pada kelas potensi penduduk terpapar rendah. Perlu diingat bahwa pengkelasan dibuat berdasarkan luasan kelas dominan tertinggi dari setiap kelurahan yang ada di tiap kecamatan.

Tabel 2.16. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

No	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas	Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		Luas (ha)	Kelas
1	Gempa Bumi	Rp 0	Rp 1.104	Rp 1.104	Sedang	-	-
2	Banjir	Rp 8.320	Rp 510	Rp 8.830	Sedang	29.182	Tinggi
3	Tanah Longsor	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rendah	-	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	Rp 6.934	Rp 11.263.051	Rp 11.269.985	Sedang	-	-
5	Kekeringan	-	Rp 0	Rp 0	Sedang	14.045,5	Rendah
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Rp 118.200	Rp 8.746	Rp 126.946	Sedang	-	-
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
8	Kegagalan Teknologi	Rp4.446.888	Rp2.137	Rp4.449.026	Sedang	692.065	Rendah
9	Konflik Sosial	Rp 7.759	Rp 1	Rp 7.760	Sedang	-	-

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.16 dapat dilihat bahwa terdapat 8 (delapan) bencana yang memiliki potensi kerugian fisik dan ekonomi sedang yaitu bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial. Sedangkan untuk bencana tanah longsor ada pada potensi kerugian fisik dan ekonomi kelas rendah. Untuk potensi kerusakan lingkungan pada bencana banjir masuk dalam kategori tinggi, sedangkan bencana tanah longsor, kekeringan dan kegagalan teknologi masuk ke dalam kategori rendah karena minimnya pula area lingkungan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

C. Rekapitulasi Kapasitas

1) Indeks Ketahanan Daerah

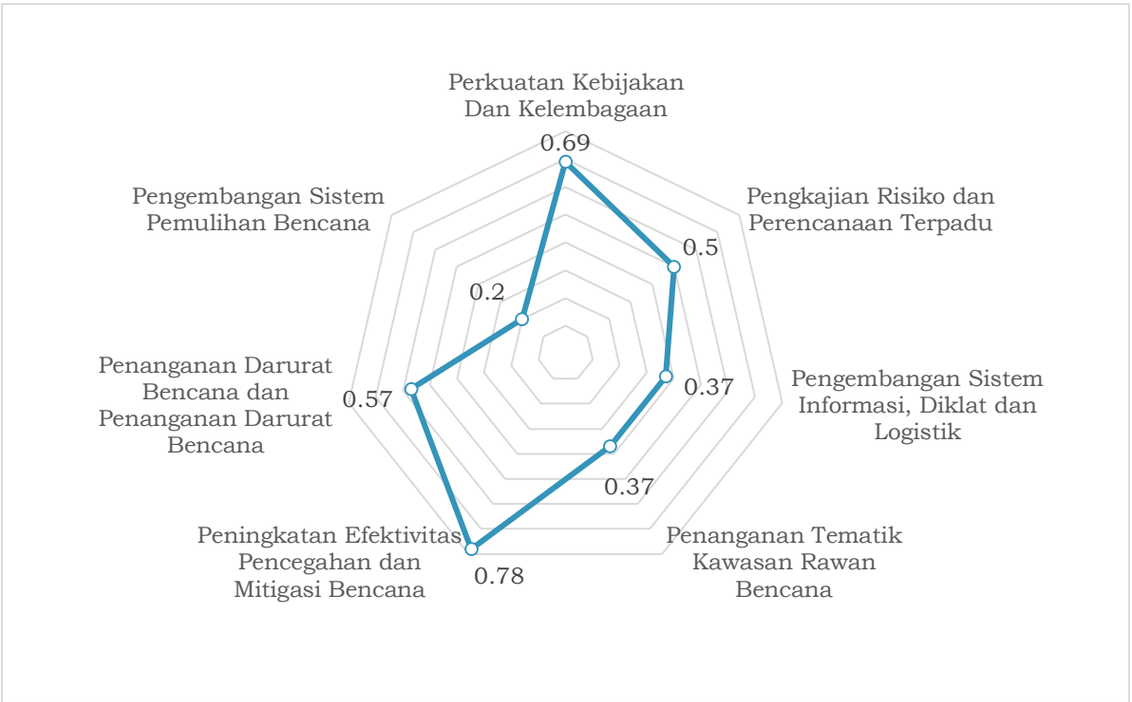
Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,53 yang berarti kapasitas daerah pada kelas sedang. Secara rinci nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada Tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2.17. Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah 2022	Indeks Kapasitas Daerah 2023	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,69	0,53	0.58	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20			

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023

Dalam penentuan tingkat kapasitas, indeks ketahanan daerah mengalami penyesuaian atau konversi. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kota Tangerang Selatan untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kota Tangerang Selatan.



Gambar 2.8. Diagram Capaian Prioritas Hasil Pengukuran IKD

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Dapat dilihat pada diagram di atas terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas pengkajian risiko bencana masih tergolong rendah yaitu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana;

dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian bencana.

2) Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

Indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua bahaya di Kota Tangerang Selatan per parameter berdasarkan kelurahan disajikan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

No	Kecamatan	PK	PTD	PKM	KTMDT	PM	Kelas
1	Ciputat	0,34	0,19	0,41	0,34	0,53	Rendah
2	Ciputat Timur	0,35	0,01	0,43	0,78	0,51	Sedang
3	Pamulang	0,16	0,47	0,72	0,27	0,58	Sedang
4	Pondok Aren	0,18	0,00	0,38	0,43	0,00	Rendah
5	Serpong	0,21	0,09	0,55	0,33	0,00	Rendah
6	Serpong Utara	0,16	0,06	0,44	0,63	0,00	Rendah
7	Setu	0,36	0,27	0,50	0,46	0,55	Sedang
Kota Tangerang Selatan		**0,25**	**0,16**	**0,49**	**0,46**	**0,31**	**Rendah**

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
PK = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana
PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat
PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat
KMDP = Ketidaktergantungan Masyarakat Daerah Terhadap Pemerintah
PM = Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Tabel 2.18 menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi seluruh potensi bencana berada pada kelas Rendah ditinjau dari nilai indeks kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu adanya peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil.

D. Risiko

Kajian risiko bencana digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Tangerang Selatan dan peta risiko bencana dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.19, Tabel 2.20 dan Gambar 2.9 sampai dengan Tabel 2.17.

Tabel 2.19. Tingkat Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Bahaya	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Gempa Bumi	13.811,30	2.673,18	0,99	16.485,47	Sedang
2	Banjir	415,17	440,73	740,88	1.596,78	Sedang
3	Tanah Longsor	57,06	-	-	57,06	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	-	13.343,03	3.142,44	16.485,47	Sedang
5	Kekeringan	16.053,38	432,09	167,3549	16.485,47	Rendah
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	520,29	13.334,76	-	13.855,05	Sedang
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.926,09	8.900,73	-	10.826,82	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	13.293,62	2.774,25	417,60	16.485,47	Sedang
9	Konflik Sosial	308,43	141,21	-	449,55	Sedang

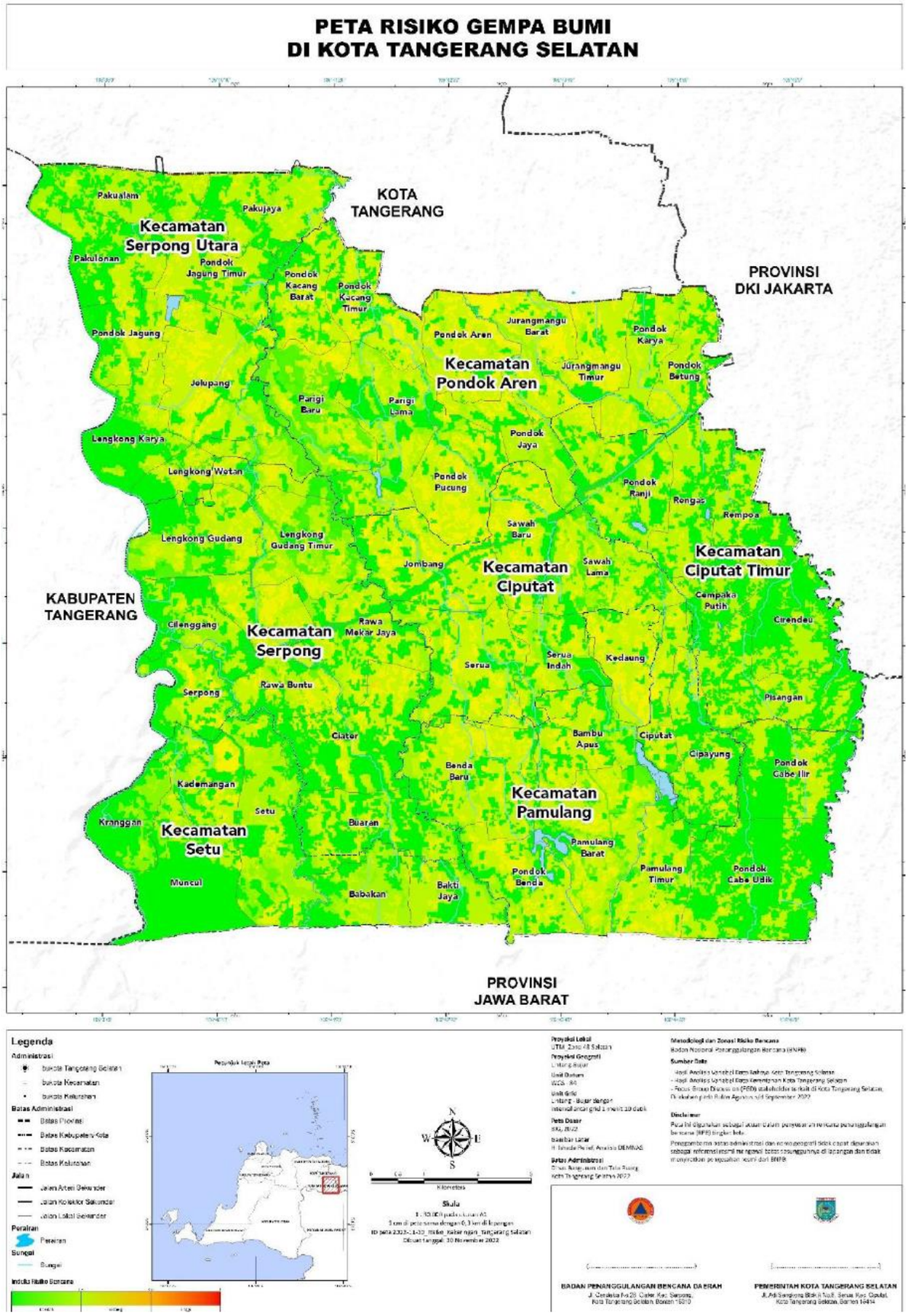
Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Tabel 2.20. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	96,61	87,44	79,86	73,06

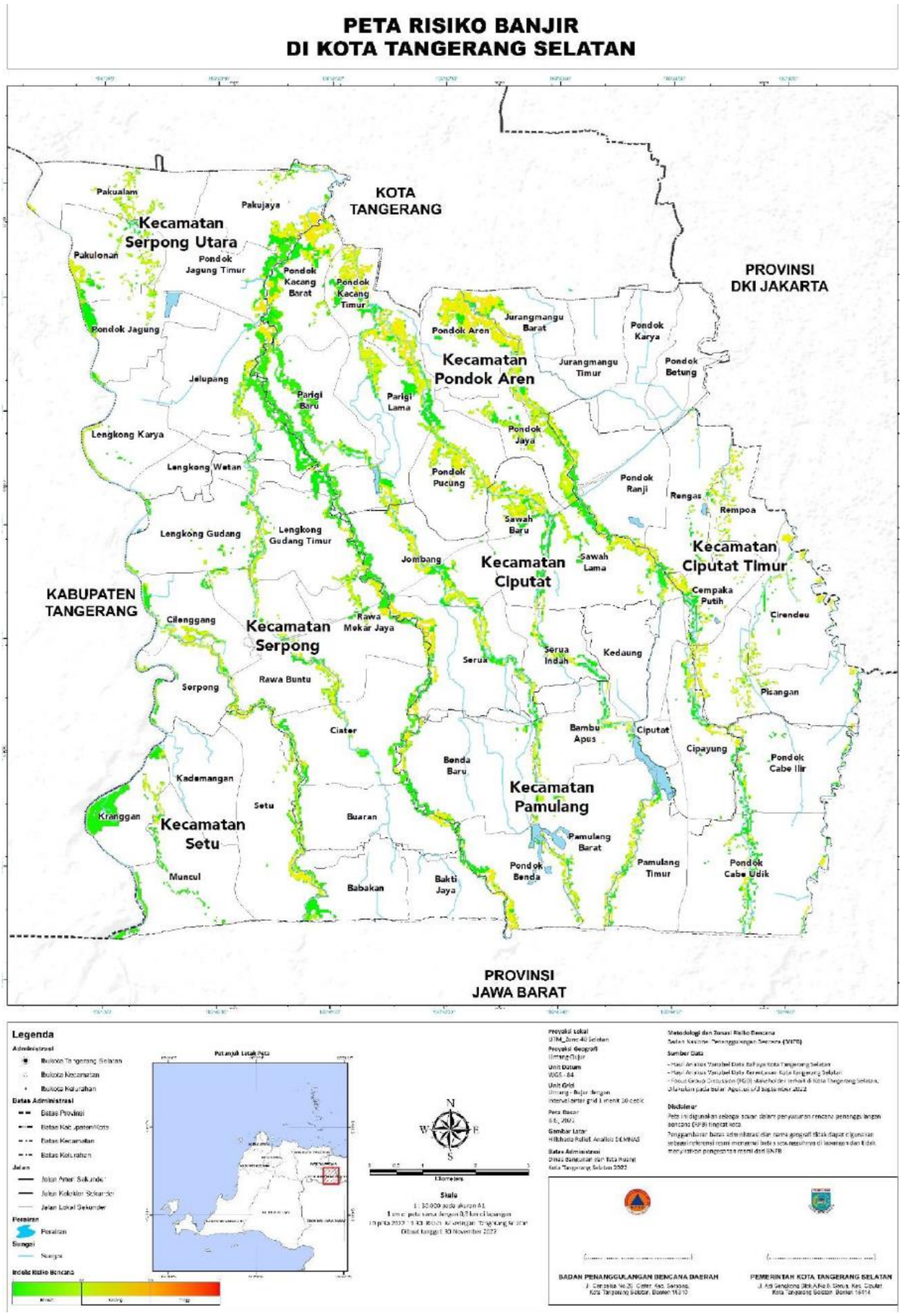
Sumber: Dokumen Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023

Selama periode 2015 hingga 2023 (Tabel 2.20), Kota Tangerang Selatan berhasil mencatat penurunan signifikan dalam indeks risiko bencana. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengurangi risiko bencana antara lain mencakup pembangunan tanggul pada kawasan rawan banjir, pembenahan drainase, serta edukasi dan pelatihan tanggap bencana bagi warga.



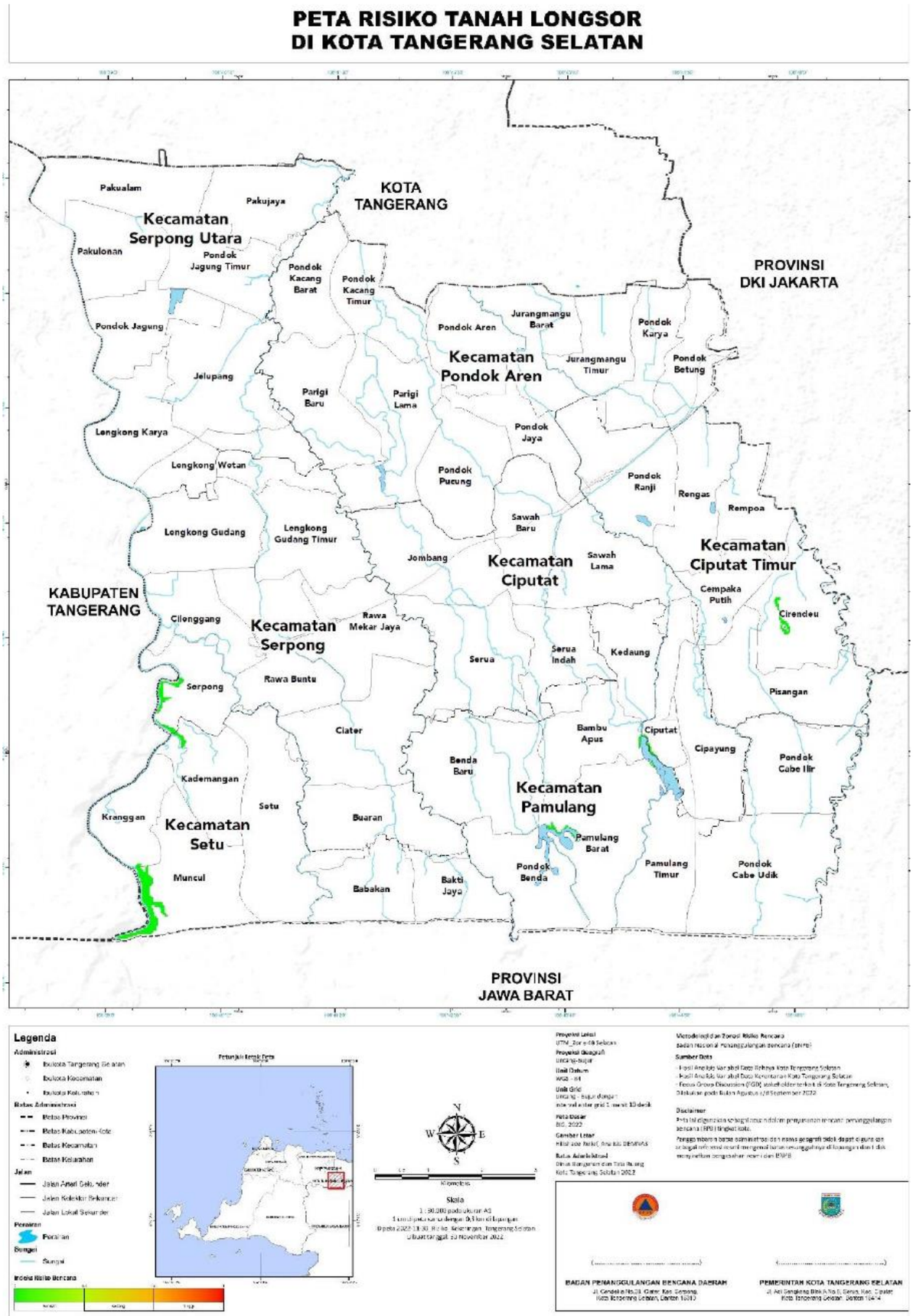
Gambar 2.9. Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



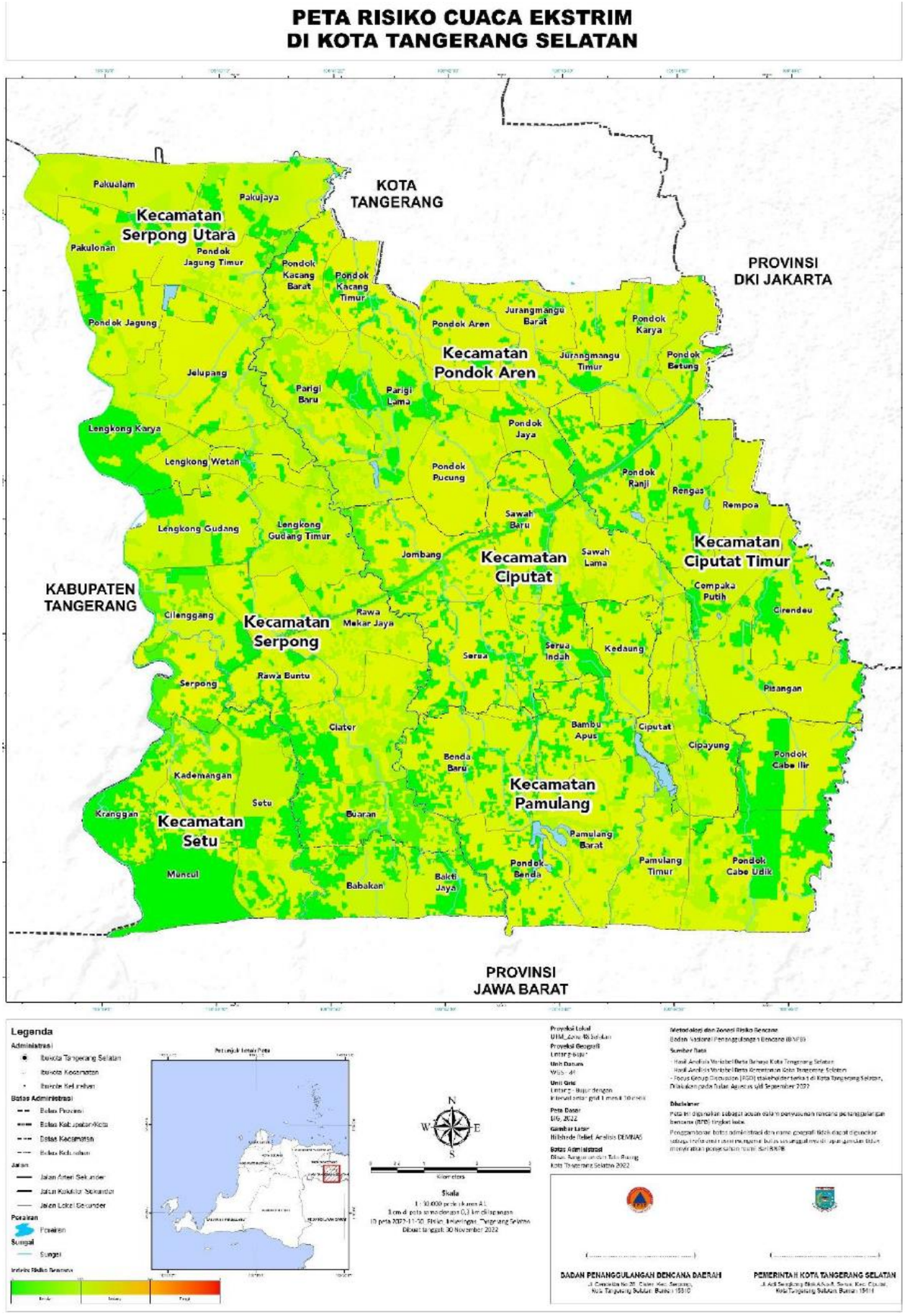
Gambar 2.10. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



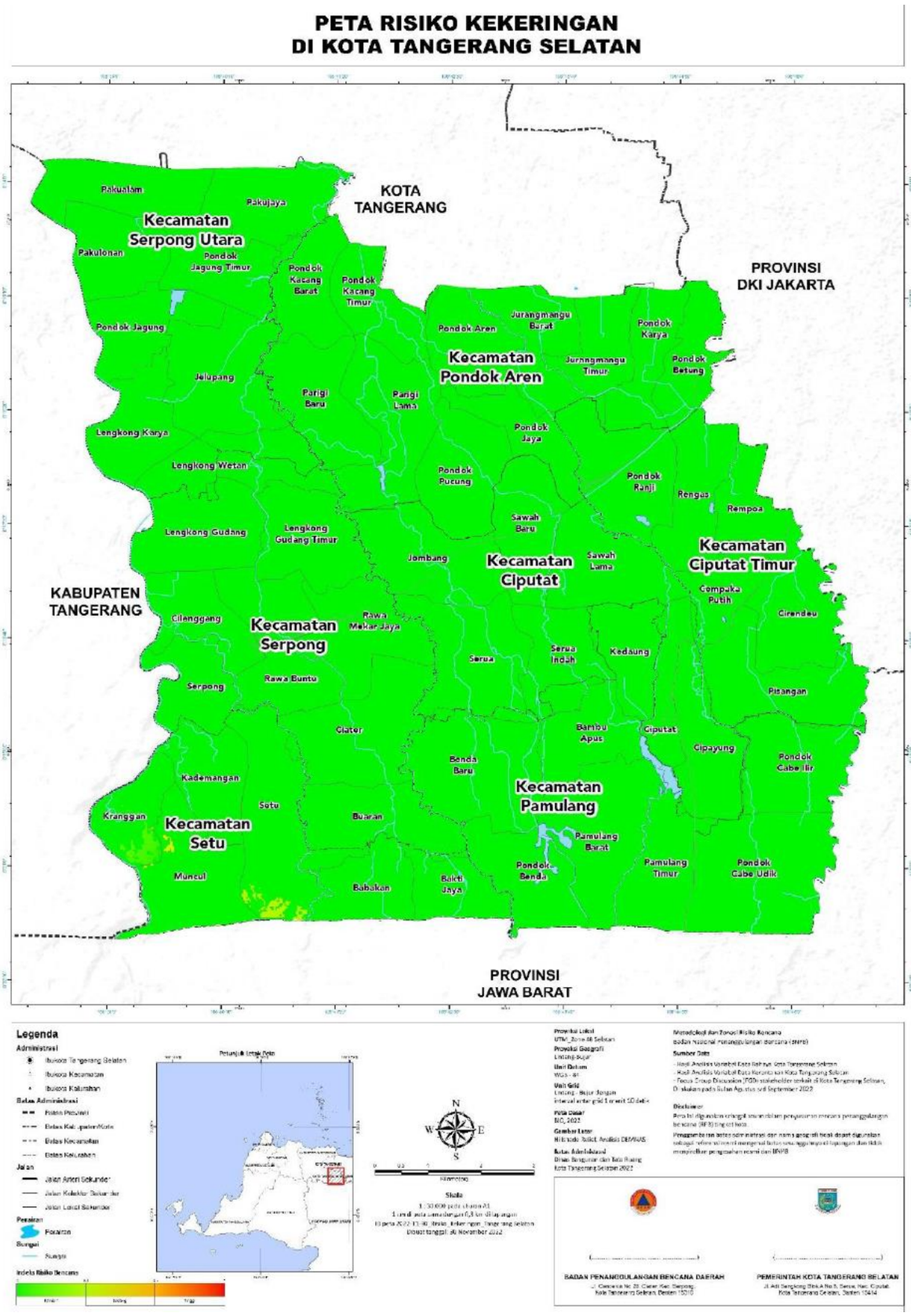
Gambar 2.11. Peta Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



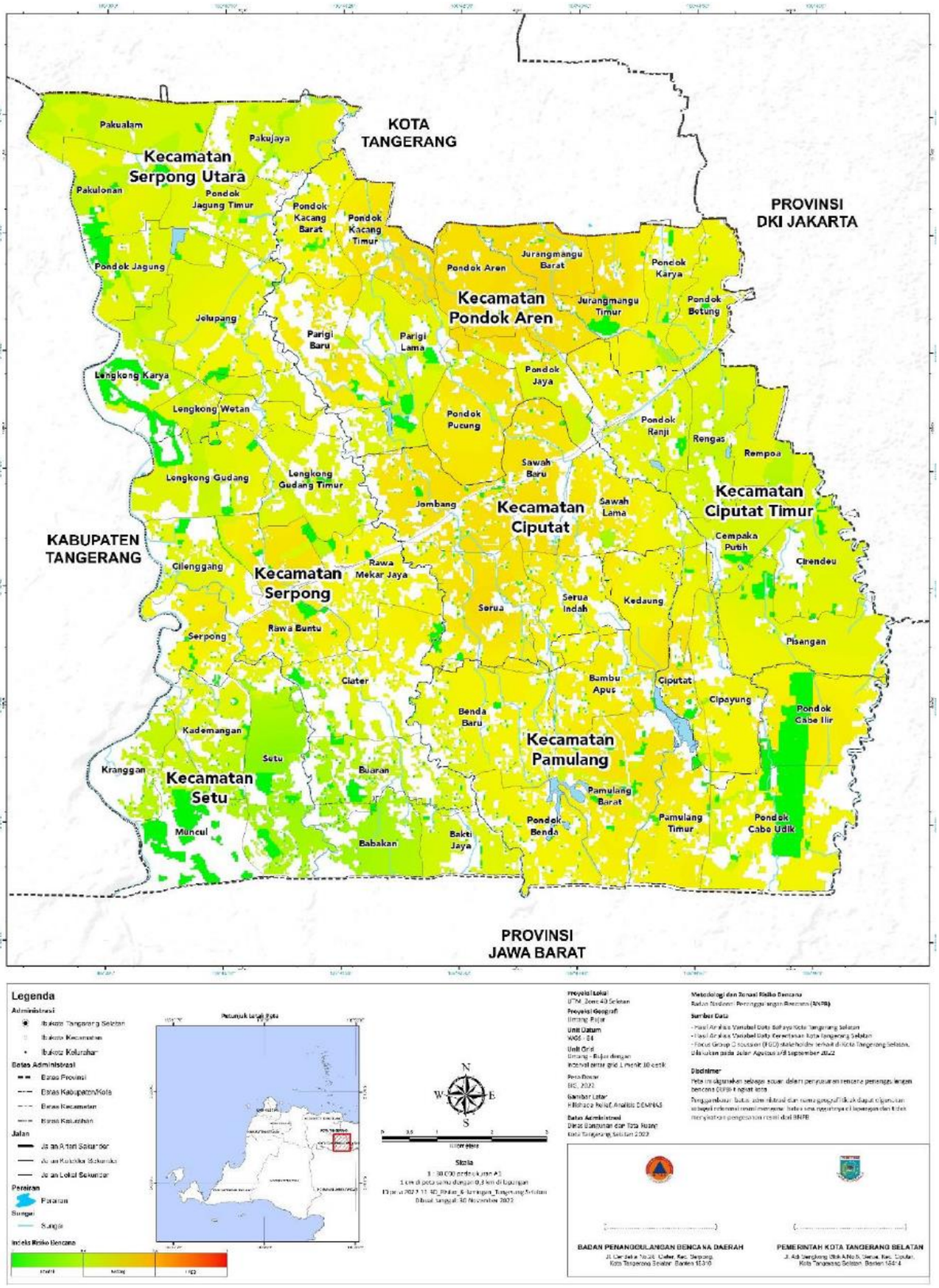
Gambar 2.12. Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



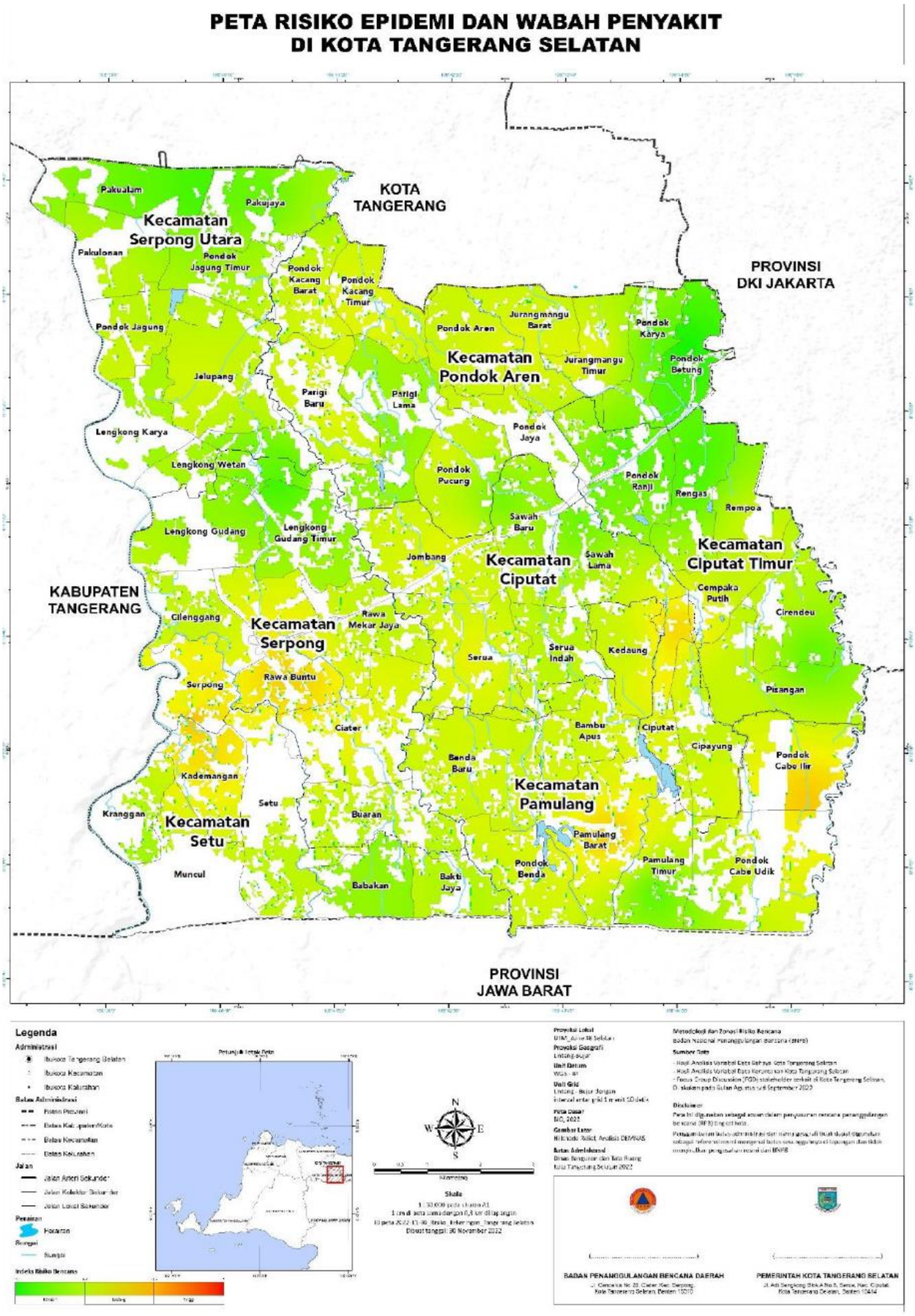
Gambar 2.13. Peta Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



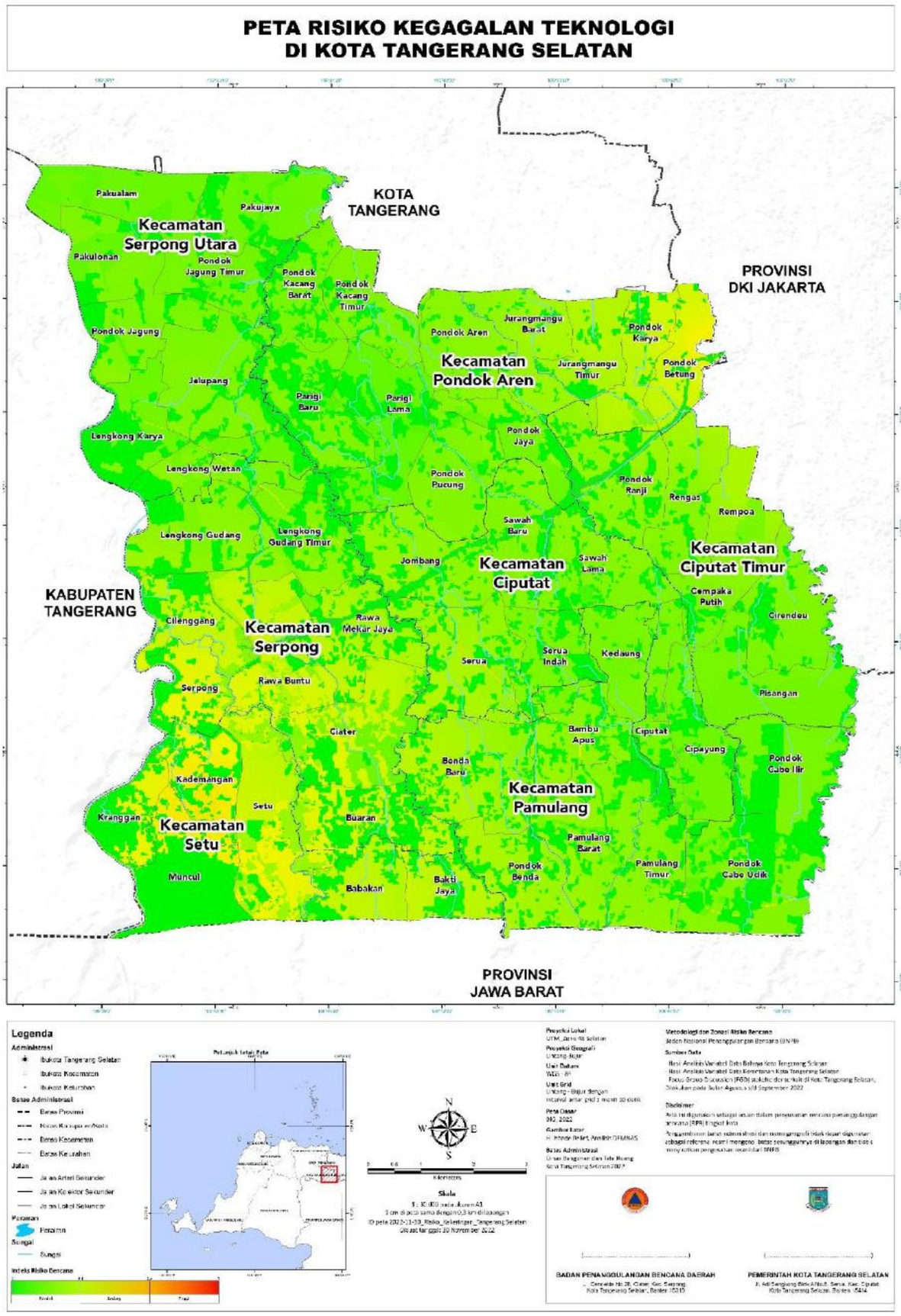
Gambar 2.14. Peta Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



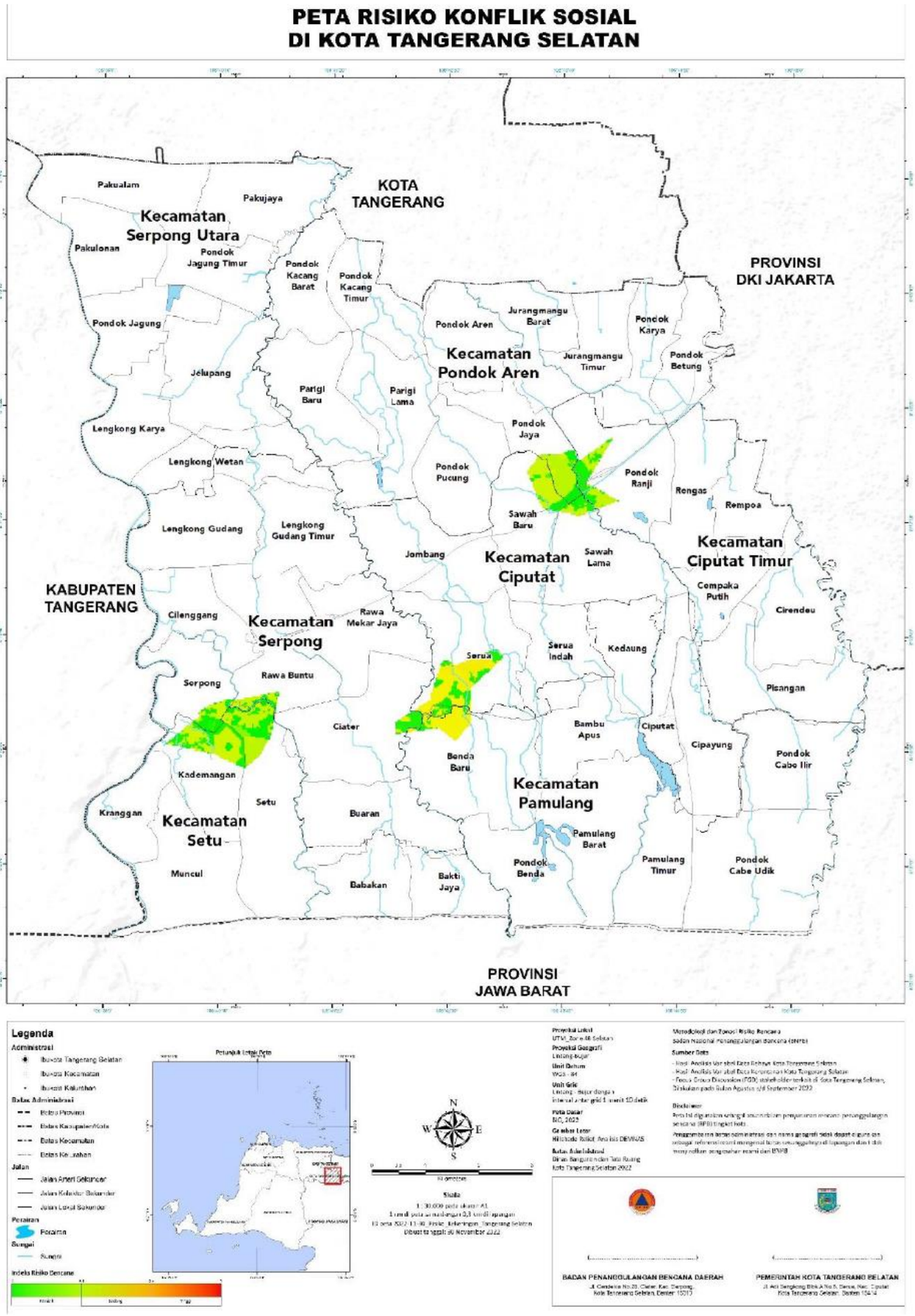
Gambar 2.15. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



Gambar 2.16. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022



Gambar 2.17. Peta Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

2.1.1.8. Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan perkotaan yang cepat telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas industri, yang semuanya memberikan tekanan tambahan pada lingkungan. Salah satu faktor dalam mengukur kualitas lingkungan yaitu indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah secara holistik. Indeks ini mencakup berbagai parameter seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, keragaman hayati, dan keberlanjutan penggunaan lahan. Dengan memperhatikan indeks kualitas lingkungan hidup, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Masalah polusi udara menjadi salah satu isu utama, terutama disebabkan oleh kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Selain itu, keberlanjutan sumber daya alam seperti air dan lahan hijau juga menjadi perhatian, karena urbanisasi yang tidak terkendali dapat mengancam ekosistem yang ada. Hal ini berdasarkan data IKLH Kota Tangerang Selatan tahun 2015-2023 masih tergolong sedang dengan nilai berkisar 50-70, namun ada beberapa titik tahun, Kota Tangerang Selatan tergolong buruk karena memiliki nilai di bawah 50. Nilai IKLH Kota Tangerang Selatan disajikan pada Tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

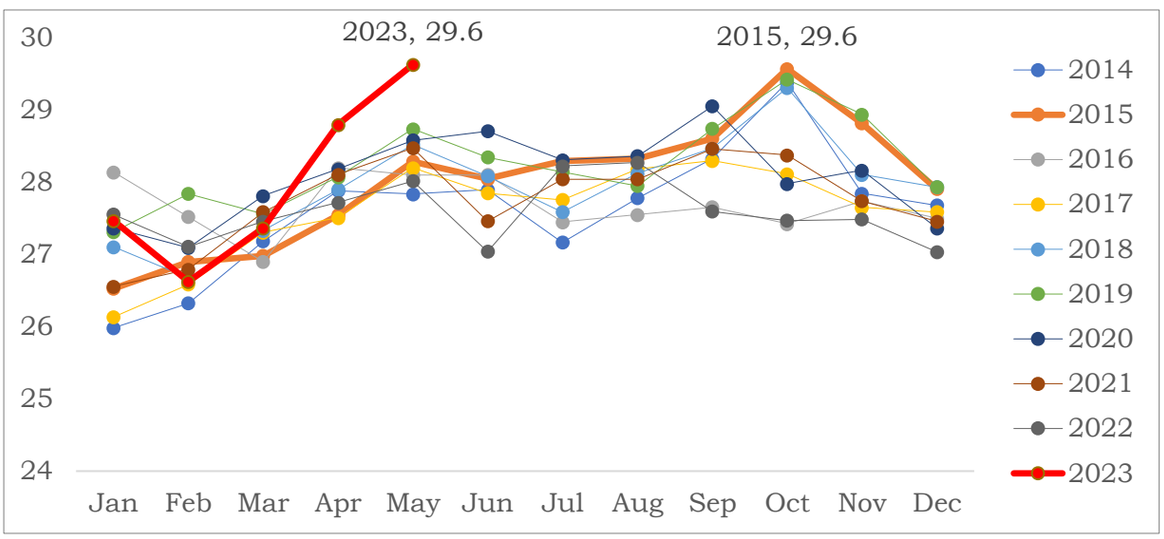
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tangerang Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	49	49	49.7	61	54	49,86	51,8	56,66	56,82
Provinsi Banten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,02	56,86	62,94	62,73	63,52	65,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 2023

Tantangan global yang menjadi perhatian dunia ke depan adalah dinamika perubahan iklim dengan variabilitas suhu permukaan yang terus meningkat akibat menurunnya fungsi serapan CO_2 dari vegetasi alami dari dampak tingginya perubahan tutupan/penggunaan lahan terbangun dan aktivitas dan atau kegiatan kolektif yang memproduksi emisi tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Alston dan Whittenbury (2013), memperkirakan akan adanya krisis bencana alam dari perubahan iklim yang tidak terkendali di mana pada tahun 2030, variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air karena pada saat itu populasi dunia sudah menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan mencapai 50% lebih besar dari kondisi saat ini, 45% lebih banyak energi yang dibutuhkan dan 30% lebih banyak air bersih yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tantangan terberat dalam implementasinya adalah mencari terobosan atau inovasi untuk bertransformasi atau ber-transisi dari energi fosil menjadi energi bersumber dari alam yang bersifat regeneratif.

Program emisi bersih sebagai komitmen negara-negara di dunia dan tujuan bersama untuk mengurangi emisi dari berbagai sektor pembangunan merupakan langkah serius dan sekaligus menjadi tantangan berat yang harus dilakukan. Saat ini kontribusi terbesar emisi CO_2 (global), 70% dari kegiatan sektor ekonomi (*International Energy Agency*, 2021). Target capaian emisi bersih di tahun 2050 merupakan komitmen global negara-negara di dunia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di mana di tahun tersebut perkiraan masih tersisa 22 gigaton (Gt) emisi CO_2 dari aktivitas industri. International *Institute for Applied Systems Analysis* (*IIASA*) dalam penelitiannya. Jika tercapai upaya meminimalkan gap emisi menuju target skenario emisi bersih (nol) 2050, maka membatasi kenaikan suhu global rata-rata jangka panjang hingga 1,5°C tanpa peningkatan suhu yang berlebihan, dan kenaikan suhu pada tahun 2100 sebesar sekitar 2,1°C (dengan probabilitas 50%), (IPCC, 2018).

Perkiraan dampak perubahan iklim ke depan juga mulai dirasakan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Hasil pengamatan data 10 tahun dari 1 Januari 2014 sampai 30 Mei 2023 terakhir suhu udara rata-rata Kota Tangerang Selatan menunjukkan suhu rata-rata minimum telah mencapai 29,60°C, sedangkan suhu rata-rata maksimum mencapai 35,20°C dengan amatan di tanggal 12 Mei 2023. Data ini berbeda jauh dengan rata-rata suhu pada bulan yang sama di sembilan tahun terakhir di mana terjadi peningkatan ekstrem suhu rata-rata permukaan laut sebagai fenomena *el-nino*. Bahkan di tanggal 17 April 2023 suhu tertinggi Kota Tangerang Selatan mencapai 36°C yang merupakan suhu harian tertinggi atau maksimum yang tercatat dibanding kota-kota lain di Indonesia. Indikasi kemarau panjang perlu diantisipasi dengan aktivitas atau kegiatan komunitas ditingkat RT/RW untuk membangun kesadaran pentingnya mempertahankan vegetasi dengan tutupan tanaman yang mampu menyimpan CO_2 di udara lebih lama. Gambar 2.18 berikut menunjukkan pola suhu udara rata-rata selama 10 tahun terakhir di Kota Tangerang Selatan.

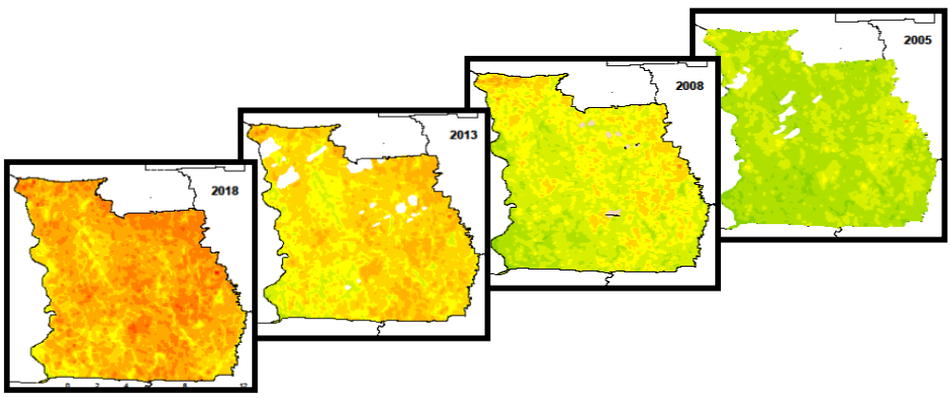


Gambar 2.18. Rata-rata Suhu Udara (°C) Kota Tangerang Selatan

Selama Periode 1 Januari 2014 - 30 Mei 2023

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

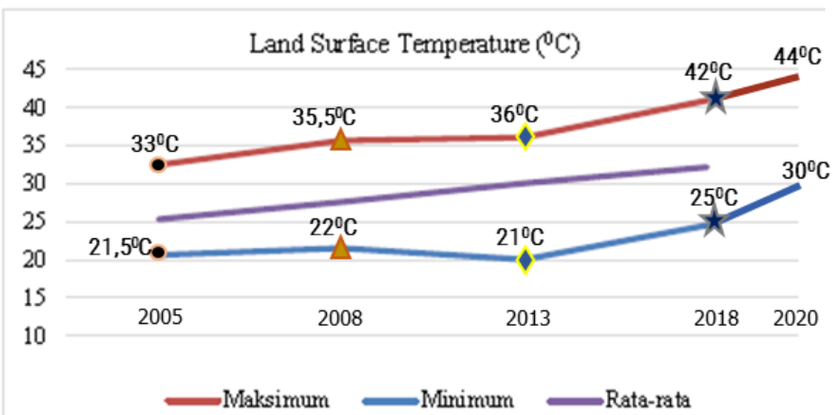
Penelitian mengenai *Urban Heat Island/UHI* di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Stella Oktavianingrum et al., 2020 menunjukkan bahwa selama periode 2005-2018 telah terjadi kenaikan suhu permukaan lahan di mana sebagai akibat dari perubahan tutupan vegetasi selama periode waktu penelitian. Tutupan lahan vegetasi dominan terkonversi semak belukar/lahan kering (area bervegetasi) menjadi lahan terbangun. Perubahan tutupan lahan yang terjadi mempengaruhi meningkatnya suhu permukaan tanah di Kota Tangerang Selatan, dengan peningkatan rata-rata suhu permukaan sekitar 0,4 - 0,70°C setiap tahunnya. Perubahan tutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi berkecenderungan meningkatkan suhu permukaan lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dan dinamika perubahan tutupan lahan kosong menjadi lahan dengan bangunan juga cenderung meningkatkan suhu permukaan lahan di wilayah pengamatan.



Gambar 2.19. Perubahan Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan 2005-2018

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa suhu permukaan lahan di tahun 2005 menunjukkan rata-rata suhu maksimum 330°C, terus meningkat selama periode pengamatan dan mengindikasikan peningkatan mencapai 440°C dalam periode tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa suhu permukaan Kota Tangerang meningkat dengan rata-rata kenaikan sekitar 20°C setiap tahun, yang berarti rata-rata suhu permukaan tanah Kota Tangerang Selatan akan meningkat sekitar 0,4 - 0,70°C setiap tahun.

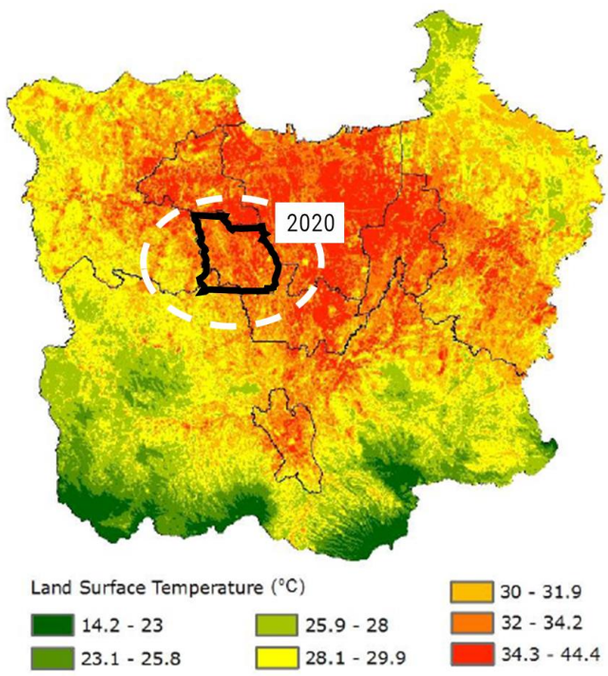


Gambar 2.20. Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan (°C) Selama Kurun Waktu 2005-2018

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Perilaku suhu permukaan lahan memiliki hubungan yang kuat dengan kerapatan vegetasi dan tingkat kepadatan bangunan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu pengamatan dilakukan sejak 2005, 2008, 2013, dan 2018. Mengindikasikan kuat bahwa suhu permukaan lahan berbanding terbalik dengan kepadatan vegetasi dan berbanding lurus dengan kepadatan bangunan di mana semakin tinggi nilai kepadatan bangunan di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula suhu permukaan lahan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Kota Tangerang Selatan di mana peningkatan suhu permukaan tanah sebanding dengan perkembangan permukiman dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang cukup besar (43%).

Penelitian suhu permukaan tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk Kota Tangerang Selatan juga dilakukan oleh A.B Raya dan H.S Hasibuan, 2020, di mana Jakarta dan daerah pinggiran di Metropolitan (Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok) didominasi oleh tutupan lahan terbangun, untuk wilayah Kota Tangerang Selatan mencapai 40,3% atau keseluruhan wilayah Jabodetabek mencapai 95% area terbangun dan memiliki suhu permukaan di atas 30°C. Konfigurasi ruang menunjukkan bahwa suhu permukaan lahan semakin menurun seiring dengan bertambahnya jarak dari Kota Jakarta. Gambar 2.21 di bawah menunjukkan sebaran suhu permukaan lahan di wilayah Jabodetabek tahun 2020, menunjukkan nilai LST yang semakin meningkat.



LST	Jakarta	Tangerang Ct.	Bekasi Ct.	Depok Ct.	Bogor Ct.	Tangsel Ct.
28-30	2.65%	3.51%	1.07%	4.64%	18.75%	2.70%
30-32	8.81%	16.35%	10.26%	26.07%	32.46%	17.48%
32-34	35.36%	38.40%	39.60%	41.93%	37.49%	49.15%
34-45	52.75%	41.59%	48.94%	27.32%	8.90%	30.65%

Gambar 2.21. Suhu Permukaan Tanah wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Sektor energi, pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah cair berkontribusi besar terhadap emisi GRK di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kajian inventarisasi gas rumah kaca (GRK). Sektor energi terbesar berasal dari konsumsi listrik oleh rumah tangga dan industri, sementara sektor industri merupakan pengguna terbesar sumber bahan bakar fosil. Untuk dapat mengurangi akibat dari emisi gas rumah kaca, diperlukan upaya penataan kebijakan dengan mengarusutamakan perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, mendorong aktivitas ramah lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan, pengelolaan limbah dengan teknologi ramah lingkungan.

2.1.2. Demografi

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 1.404.785 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 700.754 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 704.031 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan adalah 8.522 jiwa/km2. Kecamatan dengan jumlah kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pamulang sebesar 11.276 jiwa/km2, sementara itu kecamatan dengan kepadatan terkecil adalah Kecamatan Setu sebesar 5.460 jiwa/km2. Secara rinci distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22. Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Setu	16,73	91.513	6,51	5.460
2	Serpong	28,44	163.451	11,64	5.782
3	Pamulang	28,65	324.059	23,07	11.276
4	Ciputat	21,03	222.186	15,82	10.525
5	Ciputat Timur	17,97	169.555	12,07	9.520
6	Pondok Aren	29,78	295.812	21,06	9.927
7	Serpong Utara	22,26	138.209	9,84	6.181
Kota Tangerang Selatan		**164,86**	**1.404.785**	**100,00**	**8.522**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

2.1.2.1. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Jumlah penduduk dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok usia. Kelompok usia secara garis besar dibedakan menjadi usia anak-anak yaitu 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun, dan lansia yaitu 64 tahun ke atas. Kelompok usia juga dapat dibedakan per 5 tahun, dari 0 sampai 75 tahun ke atas. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan menurut kelompok usia pada tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan kelompok usia

Kelompok Usia (tahun)	Tahun								
	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	52.601	50.262	102.863	52.253	49.926	102.179	42.296	39.364	81.660
5-9	56.729	54.213	110.942	56.390	53.904	110.294	60.108	56.177	116.285
10-14	56.796	53.104	109.900	56.740	53.238	109.978	60.942	57.327	118.269
15-19	54.270	51.345	105.615	53.654	50.724	104.378	53.290	50.507	103.797
20-24	53.779	53.026	106.805	53.072	52.344	105.416	58.187	55.833	114.020
25-29	54.216	54.792	109.008	54.044	54.660	108.704	57.009	57.269	114.278
30-34	53.774	56.341	110.115	53.744	56.102	109.846	55.894	57.561	113.455
35-39	56.442	57.822	114.264	56.967	58.178	115.145	54.217	56.641	110.858
40-44	54.505	55.304	109.809	55.033	55.733	110.766	57.389	60.615	118.004
45-49	50.384	51.938	102.322	51.389	53.024	104.413	51.242	54.977	106.219
50-54	43.388	43.706	87.094	44.555	45.081	89.636	47.282	48.889	96.171
55-59	35.925	37.747	73.672	37.091	39.161	76.252	37.555	38.810	76.365
60-64	26.367	27.007	53.374	27.658	28.593	56.251	27.313	29.457	56.770
65-69	19.425	18.869	38.294	20.444	19.972	40.416	18.864	19.317	38.181
70-74	8.464	8.485	16.949	9.815	9.644	19.459	10.961	10.605	21.566
75+	6.409	8.253	14.662	6.648	8.685	15.333	8.205	10.682	18.887
Total	**683.474**	**682.214**	**1.365.688**	**689.497**	**688.969**	**1.378.466**	**700.754**	**704.031**	**1.404.785**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa penduduk usia anak-anak mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Sedangkan penduduk lansia mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan tiap tahun.

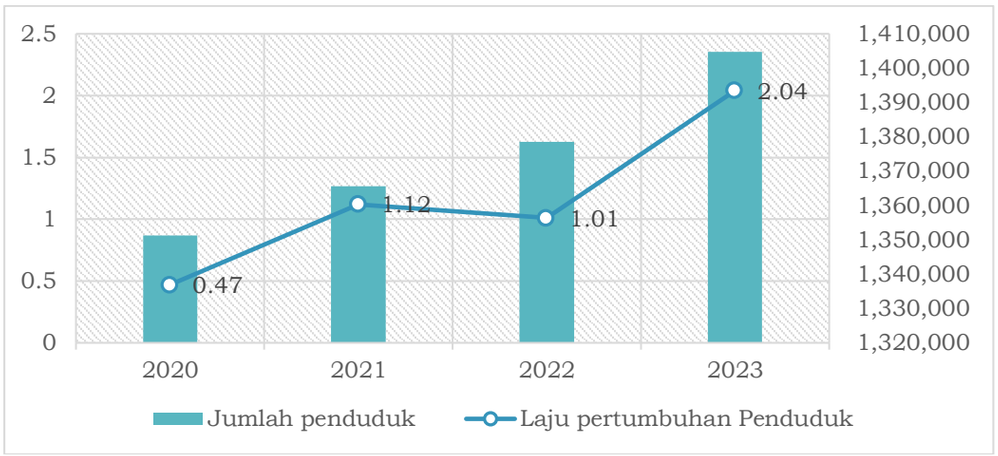
Hasil proyeksi penduduk yang dihitung menurut Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020), menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 mencapai 1.391.649 juta jiwa. Adapun statistik persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023 berdasarkan SP 2020 disajikan dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki +Perempuan
0-9	13,82	13,17	13,49
10-19	15,30	15,37	15,33
20-29	16,82	16,05	16,43
30-39	14,53	14,75	14,64
40-49	15,13	15,69	15,41
50-59	12,12	13,76	12,95
60+	12,28	11,21	11,74
Kota Tangerang Selatan	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Pertumbuhan kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai 0,47. Namun, pada tahun 2021, angka ini melonjak tajam menjadi 1,12, menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Meskipun begitu, tahun berikutnya, pada 2022, pertumbuhan kembali melandai menjadi 1,01. Namun, perubahan besar terjadi lagi pada tahun 2023, di mana laju pertumbuhannya melonjak tinggi menjadi 2,04. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan demografi yang kompleks di kota Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir.



Gambar 2.22. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.1.2.2. Jumlah penduduk berdasarkan generasi

Klasifikasi generasi merupakan pengelompokan atau pengkodean untuk generasi yang merujuk pada William H. Frey-*Analysis of Census Bureau Population Estimates t*ahun 2020. Terdapat enam klasifikasi generasi menurut William H. Frey. Klasifikasi generasi tersebut terdiri atas:

- *Post* Generasi Z: penduduk yang lahir tahun 2013 dst dengan perkiraan usia saat ini s.d 7 tahun;
- Generasi Z: penduduk yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usai saat ini 8-23 tahun;
- Generasi Y (Milenial) : penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia saat ini 24-39 tahun;
- Generasi X: penduduk yang lahir tahun 1965-1980 dengan perkiraan usia saat ini 40-55 tahun;
- *Baby Boomer*: penduduk yang lahir tahun 1946-1964 dengan perkiraan usia saat ini 56-74 tahun; dan
- *Pre-Boomer*: penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 dengan perkiraan usia saat ini lebih dari 75 tahun.

Klasifikasi generasi di Kota Tangerang Selatan dibedakan menurut indikator mobilitas. Indikator mobilitas terdiri atas migran seumur hidup antar kabupaten/kota dan migran risen antar kabupaten/kota. Migran seumur hidup antar kabupaten/kota adalah banyaknya penduduk di suatu kabupaten/kota yang lahir di kabupaten/kota lain per 100 penduduk. Migran risen antar

kabupaten/kota adalah banyaknya penduduk umur lima tahun ke atas di suatu kabupaten/kota yang lima tahun sebelumnya bertempat tinggal di kabupaten/kota lain per 100 penduduk. Berikut disajikan data mengenai angka migran seumur hidup dan migran risen menurut klasifikasi generasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020.

Tabel 2.25. Angka migran seumur hidup dan migran risen menurut klasifikasi generasi di Kota Tangerang Selatan 2020

Klasifikasi Generasi	Migran Seumur Hidup	Migran Risen
Post Generasi z	13,57	5,33
Generasi z	34,94	3,74
Milenial	57,00	8,76
Generasi X	66,51	2,98
Baby Boomer & Pre-Boomer	66,76	2,68
Penduduk Kota Tangerang Selatan	**48,09**	**4,96**

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Dari Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa di Kota Tangerang Selatan, 48 dari 100 penduduk lahir di luar Kota Tangerang Selatan. Proporsi penduduk berstatus migran seumur hidup pada Generasi X dan generasi yang lebih muda, lebih rendah daripada Generasi *Pre-Boomer* dan *Baby Boomer*. Sebanyak 67 dari 100 penduduk *Pre-Boomer* dan *Baby Boomer* di Kota Tangerang Selatan lahir di luar Kota Tangerang Selatan.

Pada tahun 2020, sebanyak 5 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kota Tangerang Selatan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota lain 5 tahun sebelumnya. Proporsi penduduk berstatus migran risen pada generasi yang lebih muda (*post* Generasi Z, Generasi Z, dan Milenial) memperlihatkan proporsi migran risen lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua (Generasi X, *pre-boomer*, dan *baby boomer*). Sebanyak 9 dari 100 penduduk generasi Y (Milenial) di Kota Tangerang Selatan merupakan migran risen.

Selain indikator mobilitas, data demografi klasifikasi generasi juga terdapat untuk indikator pendidikan. Indikator pendidikan yang ditampilkan adalah jenjang pendidikan yang di tamatkan menurut klasifikasi generasi. Jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat/ijazah pada suatu jenjang tertentu. Pembagian jenjang pendidikan mulai dari tidak/belum pernah bersekolah, tidak tamat SD, SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, DI/DII/DIII, DIV/S1, Profesi, dan S2/S3. Lebih rinci mengenai data jenjang pendidikan yang ditamatkan pada klasifikasi generasi ditampilkan pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26. Jenjang pendidikan yang ditamatkan pada klasifikasi generasi Kota Tangerang Selatan (persen)

Klasifikasi Generasi	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	DI/DII/ DIII	DIV/ S1	Profesi	S2/S3
Milenial	0,28	0,87	4,22	9,82	54,32	6,07	22,32	0,15	1,95
Generasi X	0,32	3,16	12,98	15,19	40,56	6,79	18,63	0,13	2,24
Baby Boomer	2,07	7,04	25,46	11,28	30,41	5,58	15,36	0,20	2,62

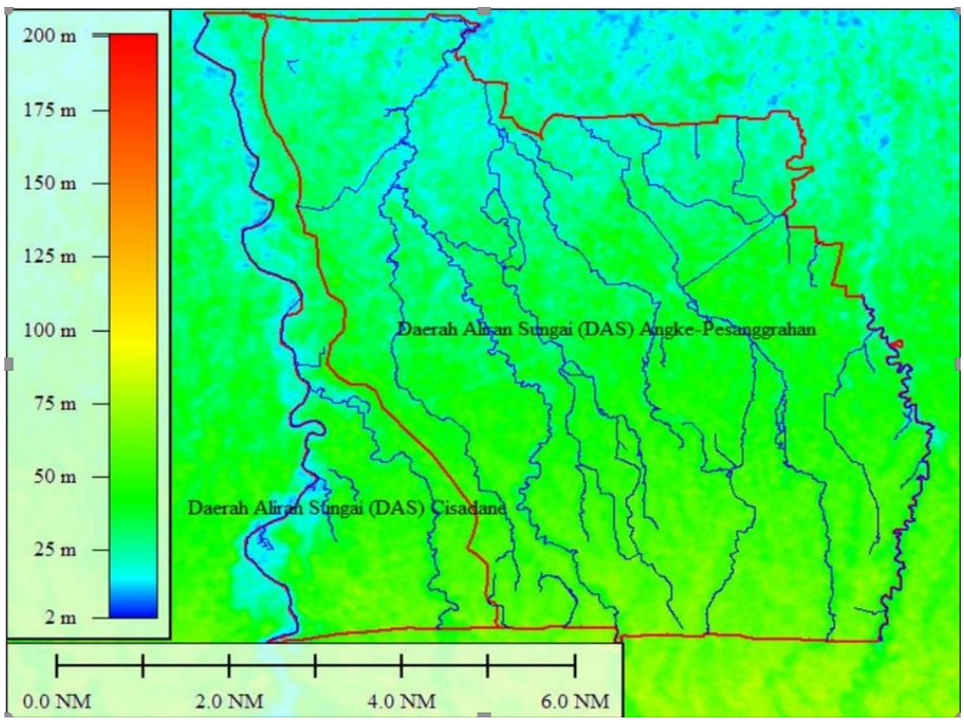
Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Pada Tabel 2.26 dapat dilihat bahwa mayoritas jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi *Baby Boomer*, generasi X, dan Milenial adalah SMA/sederajat, di mana angka tertinggi terdapat pada generasi Milenial yaitu 54,32%. Selanjutnya pada generasi X dan generasi *Baby Boomer* dengan angka masing-masing 40,56% dan 30,41%.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

2.1.3.1. Daya Dukung Air

Secara umum, Kota Tangerang Selatan dilalui 2 Daerah Aliran Sungai Besar yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane sebagaimana Gambar 2.23.



Gambar 2.23. Peta DAS di Kota Tangerang Selatan

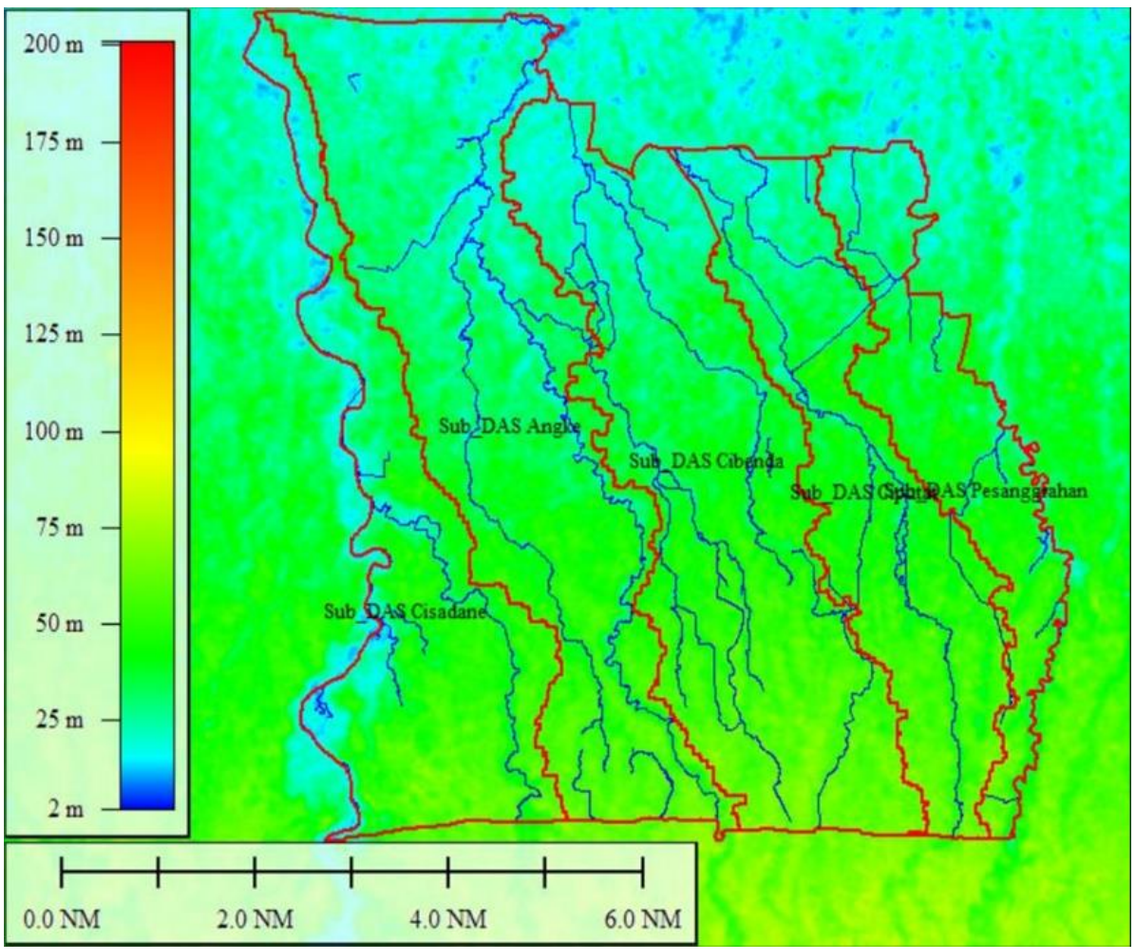
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Wilayah Kota Tangerang Selatan dibagi menjadi beberapa Sub-DAS untuk mendapatkan perhitungan debit yang lebih rinci termasuk anak-anak Sungainya. Sub-DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak Sungai ke Sungai utama. Pembagian Sub-DAS di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27. Pembagian Sub-DAS di Kota Tangerang Selatan

No	Sub DAS	Luas (km²)
1	Sub-DAS Pesanggrahan	17,639
2	Sub-DAS Ciputat	27,259
3	Sub-DAS Cibenda	44,374
4	Sub-DAS Angke	48,592
5	Sub-DAS Cisadane	26,99

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.24. Peta Sub DAS di Kota Tangerang Selatan

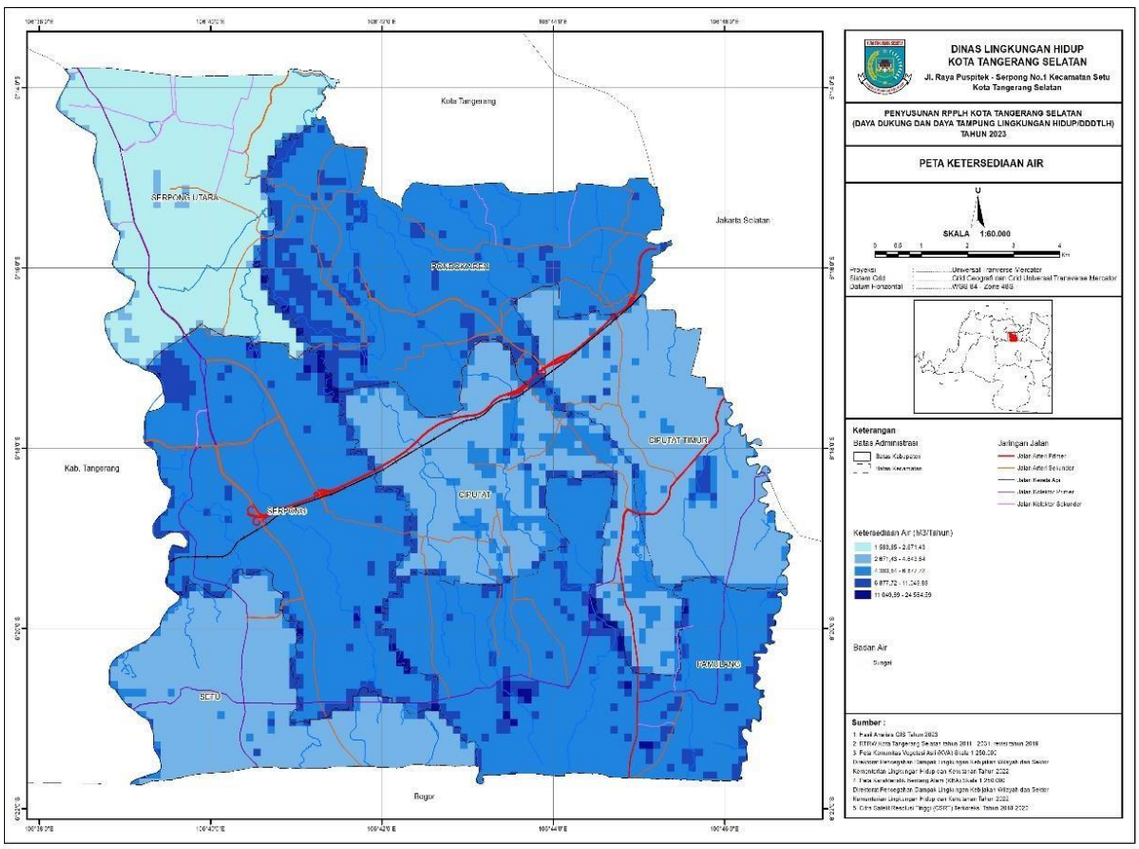
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Kota Tangerang Selatan memiliki total keseluruhan ketersediaan air sebesar 35.690.389,88 m³/tahun. Jumlah ini memberikan gambaran umum mengenai total volume air yang dapat dimanfaatkan di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan dalam satu tahun. Jika ditinjau per kecamatan, terlihat adanya variasi dalam hal ketersediaan air. Kecamatan Pondok Aren, Pamulang, dan Serpong memiliki jumlah ketersediaan air yang relatif tinggi, sementara Kecamatan Serpong Utara, Setu, Ciputat Timur, dan Ciputat memiliki jumlah yang lebih rendah. Ketersediaan air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, kondisi geologis, aktivitas manusia, dan perubahan iklim. Adapun lebih detail mengenai ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam Tabel 2.28 dan ditunjukkan oleh Gambar 2.25.

Tabel 2.28. Ketersediaan Air di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Total Ketersediaan Air (m³/tahun)
Ciputat	5.229.120,43
Ciputat Timur	3.208.884,14
Pamulang	7.464.630,43
Pondok Aren	8.089.833,77
Serpong	7.370.828,39
Serpong Utara	1.798.631,56
Setu	2.528.461,16
Jumlah	**35.690.389,88**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.25. Peta Ketersediaan Air Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Kebutuhan air terdiri dari kebutuhan domestik dan kebutuhan berbasis lahan dan peternakan. Perhitungan kebutuhan air berbasis lahan menggunakan data spasial penutupan lahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 di mana hanya kelas penutup lahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi). Adapun total kebutuhan air di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam 2.29.

Tabel 2.29. Total Kebutuhan Air Kota Tangerang Selatan (Liter/detik)

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Domestik (Liter/Detik)	Kebutuhan Air Berbasis Lahan (Liter/Detik)	Total Kebutuhan Air (Liter/Detik)
1	Setu	123,16	252,26	375,42
2	Serpong	221,22	175,15	396,37
3	Pamulang	432,21	139,99	572,20
4	Ciputat	296,22	143,33	439,55
5	Ciputat Timur	240,43	87,08	337,51
6	Pondok Aren	412,03	262,47	674,49
7	Serpong Utara	189,27	153,40	342,67
Total		**1.914,54**	**1.223,68**	**3.138,22**

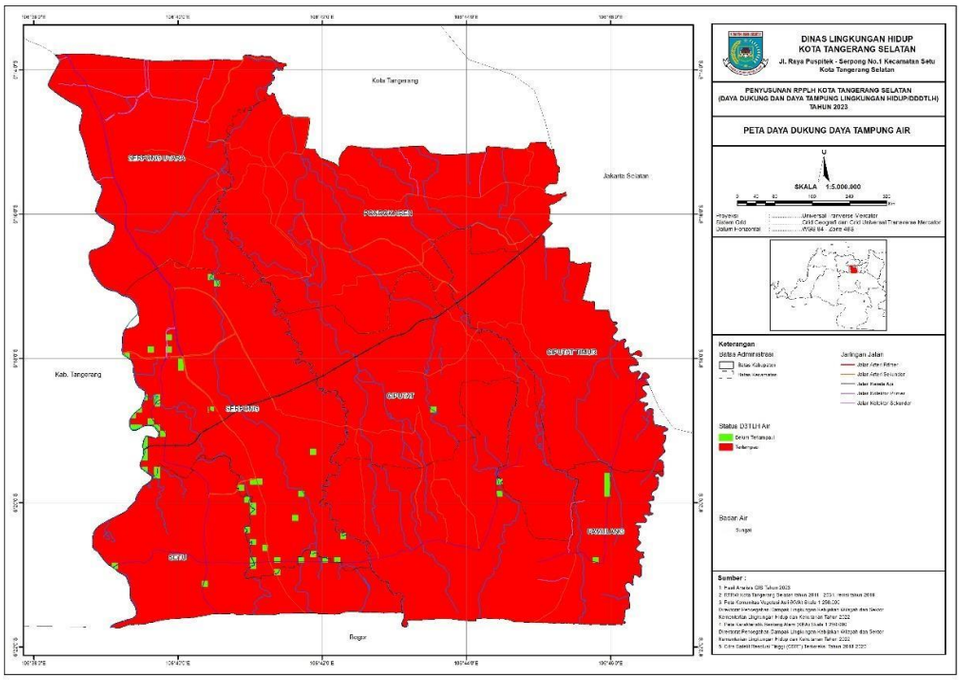
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Data di atas digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air sehingga dapat diketahui status daya dukung air pada suatu wilayah. Berdasarkan status daya dukung air per wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan, terlihat bahwa kecenderungan ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan semakin hari semakin menurun, daya dukung dan daya tampung air Kota Tangerang Selatan telah terlampaui sebanyak 99,22% dari keseluruhan luas wilayahnya. Status daya dukung dan daya tampung air per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.30 dan Gambar 2.26.

Tabel 2.30. Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan per Kecamatan

Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Air	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
BELUM TERLAMPAUI	Ciputat	4,72	0,03
	Pamulang	16,52	0,10
	Serpong	102,02	0,62
	Setu	4,57	0,03
Jumlah		**127,84**	**0,78**
TERLAMPAUI	Ciputat	2.440,94	14,81
	Ciputat Timur	1.795,11	10,89
	Pamulang	2.740,64	16,62
	Pondok Aren	2.951,39	17,90
	Serpong	2.759,57	16,74
	Serpong Utara	2.110,61	12,80
	Setu	1.559,42	9,46
Jumlah		**16.357,68**	**99,22**
Total		**16.485,52**	**100,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.26. Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan

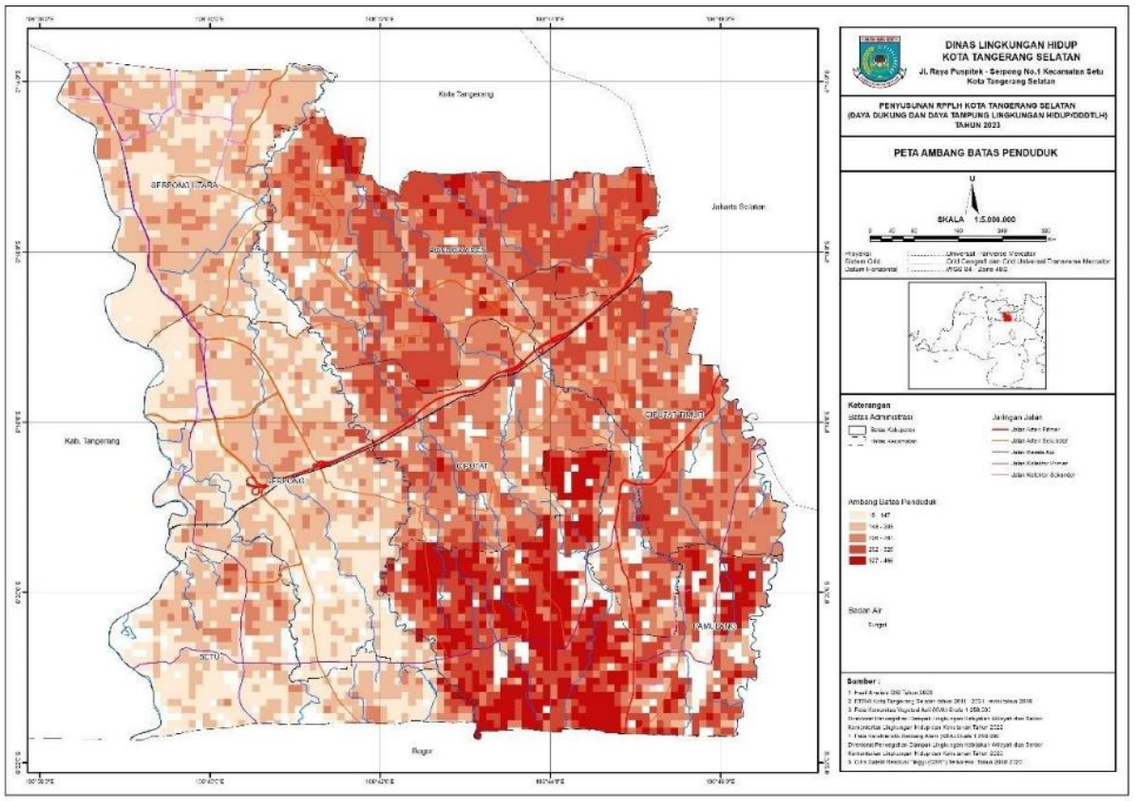
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan air akan meningkat, baik dari air permukaan maupun air tanah. Ambang batas penduduk Kota Tangerang Selatan yang dapat didukung kebutuhan airnya disajikan dalam Tabel 2.31 dan Gambar 2.27. Dengan kondisi eksisting jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sebesar 1.378.466 jiwa, maka selisih ambang batas penduduk Kota Tangerang Selatan yang masih dapat dipenuhi kebutuhan airnya adalah sebesar 39.001 jiwa. Hal ini perlu diwaspadai di masa mendatang di mana kondisi ketersediaan air yang ada tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari- hari.

Tabel 2.31. Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Selisih Ambang Batas (jiwa)
Ciputat	213.275	219.060	5.785
Ciputat Timur	173.110	176.551	3.441
Pamulang	311.189	319.094	7.905
Pondok Aren	296.659	305.799	9.140
Serpong	159.281	167.716	8.435
Serpong Utara	136.276	138.163	1.887
Setu	88.676	91.084	2.408
Jumlah	**1.378.466**	**1.417.467**	**39.001**

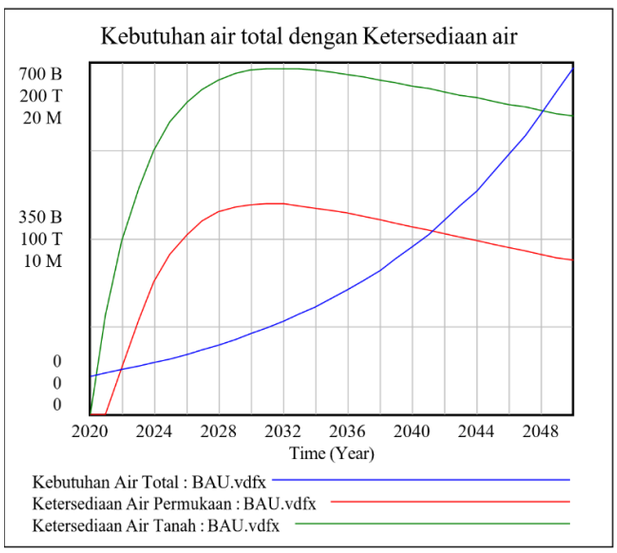
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.27. Peta Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan

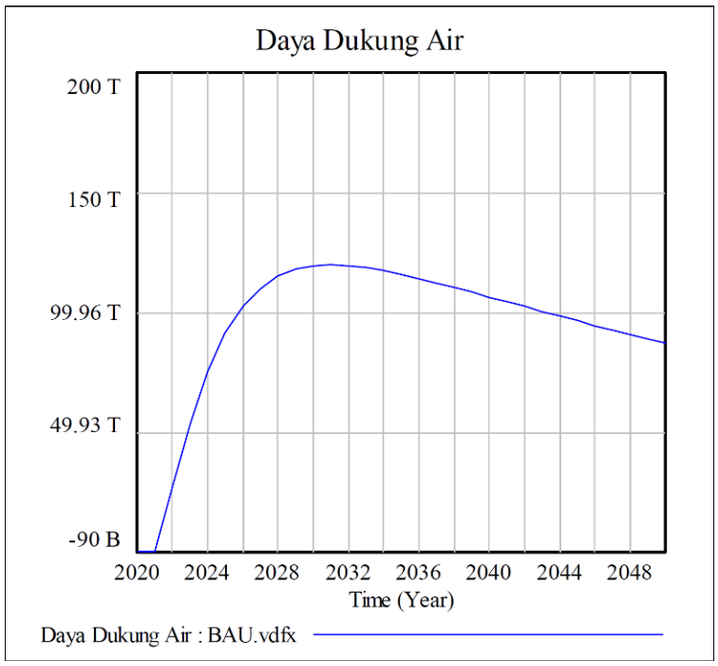
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Berdasarkan analisa sistem dinamik dalam KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.28, terlihat bahwa kebutuhan air total semakin meningkat di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya hingga tahun 2048. Sementara itu, ketersediaan air tanah dan air permukaan sangat rendah dan cenderung menurun dengan lambat hingga tahun 2048. Dari hasil analisis sistem dinamik di bawah, maka dapat disimpulkan bahwa isu pokok dalam Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang ke depan adalah isu air bersih.



Gambar 2.28. Proyeksi Perbandingan Kebutuhan Air Total dengan Ketersediaan Air

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-204



Gambar 2.29. Daya Dukung Air Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

2.1.3.2. Daya Dukung Pangan

Ketersediaan pangan Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dengan memanfaatkan nilai kalori seluruh bahan pangan yang dihasilkan di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Daya dukung pangan kemudian dihitung menggunakan pertimbangan kecukupan lahan pertanian yang dikonversikan sebagai potensi produksi beras dan komoditas lainnya. Sedangkan nilai kebutuhan pangan dihitung berdasarkan populasi penduduk yang tinggal di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil konversi bahan pangan, maka ketersediaan pangan berdasarkan kalori bahan pangan di Kota Tangerang Selatan yaitu sekitar 505.101.987 kkal. Secara lebih lengkap, ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.32 di bawah ini.

Tabel 2.32. Ketersediaan Pangan berdasarkan Nilai Kalori

No.	Jenis produksi komuditas	Kalori (kkal/100 gram)
1	Beras	2.878.074
2	Jagung	359.759
3	Kedelai	-
4	Kacang Tanah	215.856
5	Ubi Kayu	57.561.480
6	Ubi Jalar	-
7	Sayur	43.171.110
8	Buah Buahan	1.698.863
Total		**505.101.987**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Sedangkan, dalam perhitungan kebutuhan pangan didasarkan pada kalori yang dihitung dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019. Peraturan ini memberikan standar minimum gizi yang seyogyanya dipenuhi oleh masyarakat Indonesia untuk hidup layak dan sehat. Salah satunya, standar minimum gizi dari sisi kalori yang diklasifikasikan berdasarkan umur penduduk seperti terlihat pada Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33. Angka Kecukupan Energi

Umur Penduduk	AKE Laki (kkal)	AKE Perempuan (kkal)
0-9	1.650	0
10-14	2.400	2.050
15-19	2.650	2.100
20-24	2.650	2.250
25-29	2.650	2.250
30-34	2.550	2.150
35-39	2.550	2.150
40-44	2.550	2.150
45-49	2.550	2.150
50-54	2.150	1.800
55-59	2.150	1.800
60-64	2.150	1.800
65<	1.800	1.550

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

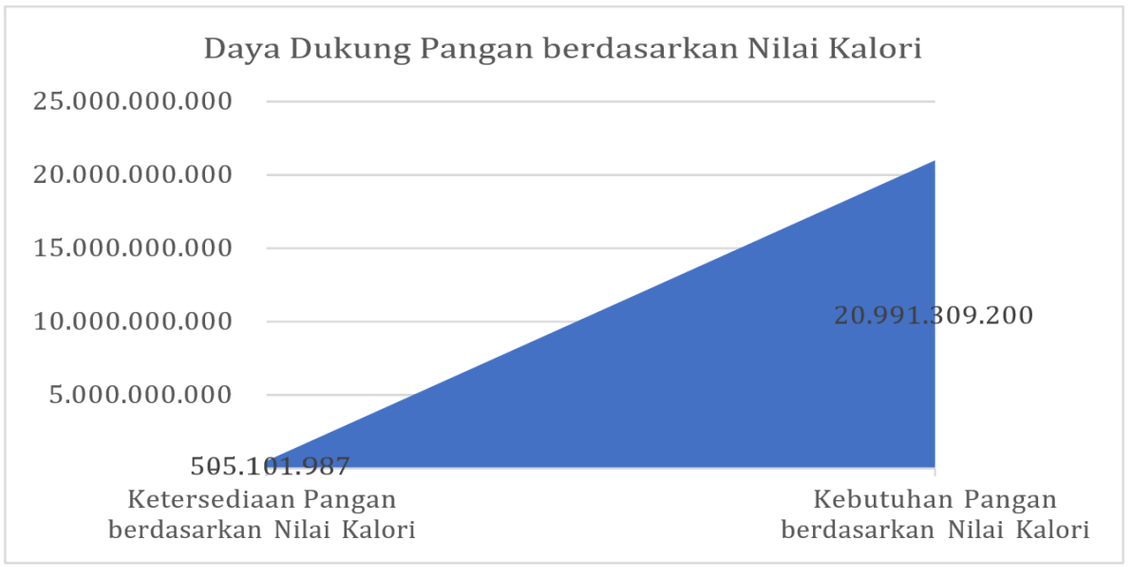
Berdasarkan pada Angka Kebutuhan Energi, kebutuhan pangan berdasarkan nilai kalori diperkirakan di Kota Tangerang Selatan mencapai 20.991.309.200 kkal, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34. Kebutuhan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2022

Kategori	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pangan (kkal)
kanak-kanak (5-11 tahun)	210.591	1284605100
remaja (12-25 tahun)	335.064	3233367600
dewasa (26-45 tahun)	454.475	8635025000
lansia (46-65 tahun)	393.885	7838311500
Total	**1.394.015**	**20.991.309.200**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Gambaran daya dukung pangan berdasarkan ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan disajikan dalam Gambar 2.30.



Gambar 2.30. Daya Dukung Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2022

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Dari Gambar 2.30, terlihat bahwa selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan dari sisi kalori menunjukkan defisit pangan atau ketersediaan kalori jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan daya dukung pangan Kota Tangerang Selatan dari sisi kecukupan nilai kalori secara indikatif Terlampaui. Dengan demikian, perlunya memaksimalkan ketersediaan logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan di Kota Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang Selatan hanya memiliki sedikit lahan pertanian, sehingga sebesar (99%) pasokan komoditinya seperti beras, daging sapi dan daging ayam masih dipasok dari luar daerah, sehingga ke depan sangat perlu untuk selalu memastikan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan terpenuhi di Kota Tangerang Selatan.

Jika mengacu pada indeks ketahanan pangan, Kota Tangerang Selatan menunjukkan dinamika kenaikan dan penurunan ketahanan pangan dalam kurun waktu tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.35. Tantangan muncul pada tahun 2022 dengan penurunan tajam menjadi 78,74 yang bisa jadi mengindikasikan adanya masalah struktural yang perlu diatasi. Namun, optimisme kembali muncul pada tahun 2023 dengan peningkatan yang menggembirakan menjadi 87,43. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan yang signifikan pada indikator pemanfaatan, di mana pada tahun 2022, nilai pemanfaatan sebesar 63,77 meningkat menjadi 78,35 pada tahun 2023. Sedangkan untuk indikator keterjangkauan hanya meningkat sedikit, yaitu semula sebesar 97,04 pada tahun 2022 menjadi 98,52 pada tahun 2023. Peningkatan indikator pemanfaatan pada tahun 2023 disebabkan karena peningkatan rasio rumah tangga dengan akses air bersih.

Tabel 2.35. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Indeks Ketahanan Pangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tangerang Selatan	83,33	86,39	83,14	83,74	78,74	87,43

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, 2023

2.1.3.3. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan hidup sebagai salah satu metode yang direkomendasikan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 tahun 2016 untuk mengukur dan menentukan D3TLH suatu wilayah. Pendekatan jasa lingkungan hidup ini diadopsi dari *Millenium Ecosystem Assessment* (*MEA*) yang diprakarsai oleh PBB / *United Nations* mulai tahun 2001. *MEA* bekerja dengan asumsi semakin tinggi jasa lingkungan hidup di suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Pendekatan jasa lingkungan hidup ini dinilai berdasarkan kondisi ekoregion dan tutupan lahan (*land cover*) sebagai penaksir atau *proxy* penilaiannya. Jenis kelas ekoregion dan/atau kelas tutupan lahan tertentu akan memiliki kaitan nilai/derajat kepentingan yang berbeda dengan setiap jenis jasa lingkungan hidup yang dinilai.

Informasi jasa lingkungan hidup yang disajikan merupakan data sekunder hasil analisis dari P3E Jawa, KLHK. Terdapat 6 (enam) jasa lingkungan hidup, yakni jasa lingkungan hidup penyedia air bersih, jasa lingkungan hidup penyedia pangan, jasa lingkungan hidup pengaturan air, jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara, jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir, dan jasa lingkungan hidup pengaturan iklim.

A. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan *recharge area* di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air merupakan gambaran kemampuan lingkungan dalam memberikan fungsi penyediaan air permukaan yang sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Indeks jasa lingkungan hidup penyedia air membahas hal-hal dalam kemampuan lingkungan untuk menyediakan air sebagaimana potensi manfaatnya agar dapat berperan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang dapat dikategorikan di tiap daerah.

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018 didominasi oleh kinerja rendah sebesar 89,69% atau 14.335,23 ha. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi dengan kinerja jasa lingkungan penyedia air rendah adalah Kecamatan Serpong, yaitu seluas 1.739,57 ha atau 10,55% dari luas Kota Tangerang Selatan. Klasifikasi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.36, Tabel 2.37, dan Gambar 2.31.

Tabel 2.36. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018

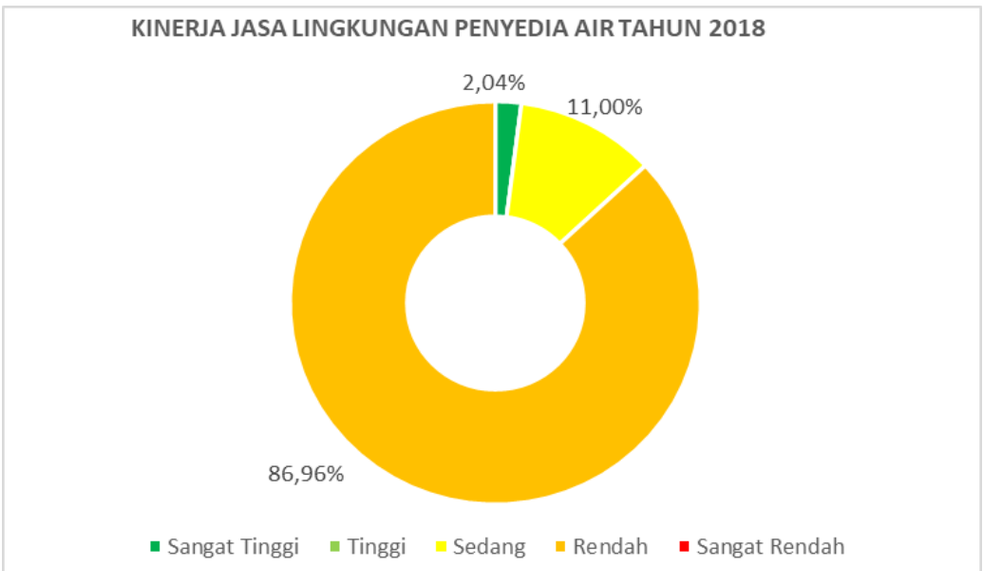
Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	-	-
Sedang	1.814,09	11,00%
Rendah	14.335,23	86,96%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

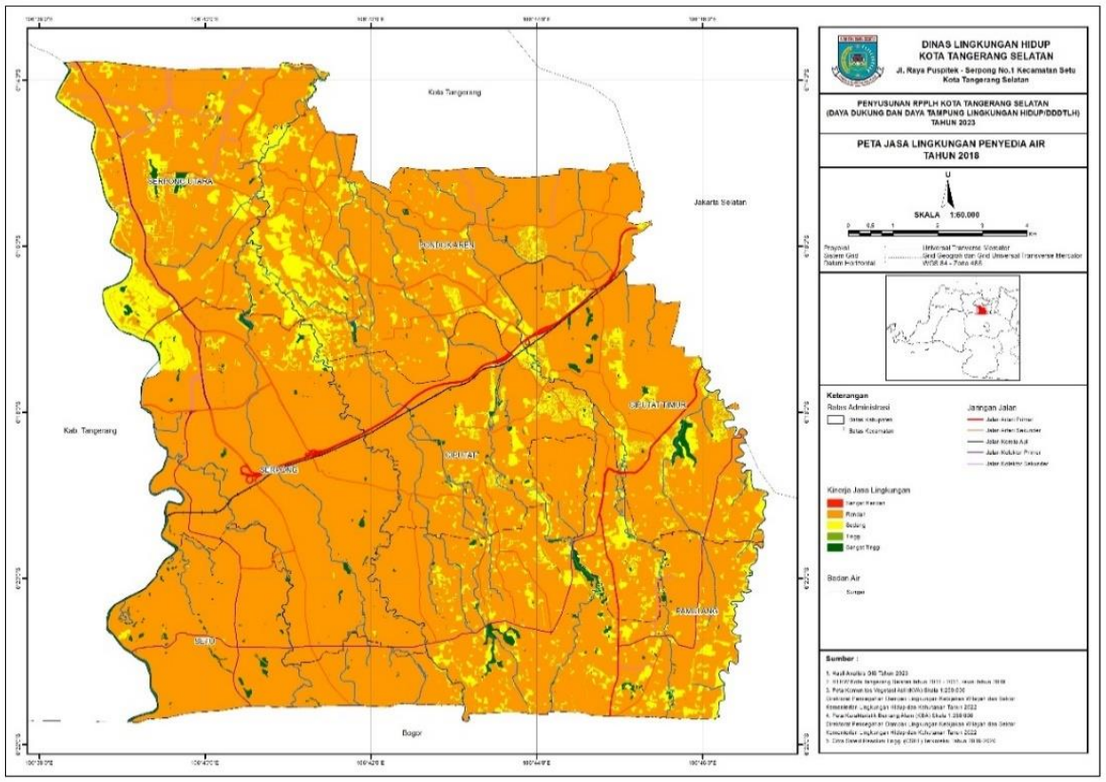
Tabel 2.37. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan		Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	27,0	-	264,3	1.824,6	-	**2.115,8**
	%	0,2	-	1,5	11,1	-	**12,8**
Ciputat Timur	ha	48,1	-	235,7	1.500,3	-	**1.784,0**
	%	0,3	-	1,4	9,1	-	**10,8**
Pamulang	ha	71,0	-	334,5	2.462,8	-	**2.868,4**
	%	0,4	-	2,0	15,0	-	**17,4**
Pondok Aren	ha	30,9	-	424,7	2.522,1	-	**2.977,6**
	%	0,2	-	2,6	15,3	-	**18,1**
Serpong	ha	57,6	-	122,0	2.664,3	-	**2.843,8**
	%	0,3	-	0,7	16,2	-	**17,3**
Serpong Utara	ha	53,8	-	424,2	1.739,6	-	**2.217,6**
	%	0,3	-	2,6	10,6	-	**13,5**
Setu	ha	47,9	-	8,8	1.621,7	-	**1.678,3**
	%	0,3	-	0,1	9,8	-	**10,2**
Jumlah Total	**ha**	**336,2**	**-**	**1.814,1**	**14.335,2**	**-**	**16.485,5**
	%	**2,0**	**-**	**11,0**	**87,0**	**-**	**100,0**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.31. Proporsi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.32. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Berdasarkan Gambar 2.32, area-area yang berwarna orange merupakan daerah yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air rendah. Dari perbedaan deviasi persentase peta di atas dapat diperkirakan terjadi pengurangan kemampuan dalam penyedia sumber daya air. Perlu diwaspadai jika kondisi tersebut terus berlangsung maka konsekuensinya terjadi penurunan ketersediaan air permukaan, sehingga masyarakat beralih melakukan ekstraksi air tanah yang berlebihan. Di lain sisi, air tanah diprioritaskan sebagai cadangan air yang diperuntukkan dalam kondisi kurang mendukung seperti kemarau panjang. Jika air tanah dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa melakukan *recharge*, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penurunan muka tanah/amblesan sehingga perlu melakukan upaya konservasi air pada area-area dengan permeabilitas tinggi dan adaptasi pada kondisi yang ada dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan.

B. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa lingkungan penyedia pangan merupakan jasa lingkungan yang menyediakan dukungan pangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Penyediaan pangan tersebut dapat berupa langsung diperoleh dari alam contohnya tangkapan ikan di laut, sungai, danau dan hutan. Selain itu dukungan pangan dapat berupa dari hasil budidaya sebagai contoh budidaya perikanan (tambak, empang), ladang dan sawah. Semakin luas keberadaan hutan, tambak, danau, sungai, ladang, kebun dan sawah maka semakin baik kinerja jasa lingkungan penyedia pangan.

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Tangerang Selatan tahun 2018 termasuk dalam klasifikasi kinerja rendah. Cakupan luasan wilayah Kota Tangerang Selatan yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan rendah sebesar 86,96% atau 14.335,23 ha. Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi kategori kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan rendah klasifikasi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan disajikan dalam Tabel 2.38 dan Tabel 2.39.

Tabel 2.38. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	293,90	1,78%
Tinggi	1844,39	11,19%
Sedang	11,99	0,07%
Rendah	14.335,23	86,96%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2.39. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan		Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	26,9	262,5	1,8	1.824,6	-	**2.115,8**
	%	0,2	1,6	0,0	11,1	-	**12,8**
Ciputat Timur	ha	30,2	248,8	4,8	1.500,3	-	**1.784,0**
	%	0,2	1,5	0,0	9,1	0,0	**10,8**
Pamulang	ha	45,9	354,3	5,4	2.462,8	-	**2.868,4**
	%	0,3	2,1	0,0	14,9	0,0	**17,4**
Pondok Aren	ha	30,9	424,7	-	2.522,1	-	**2.977,6**
	%	0,2	2,6	0,0	15,3	0,0	**18,1**
Serpong	ha	57,9	121,7	-	2.664,3	-	**2.843,8**
	%	0,4	0,7	0,0	16,2	0,0	**17,3**
Serpong Utara	ha	53,8	424,2	-	1.739,6	-	**2.217,6**
	%	0,3	2,6	0,0	10,6	0,0	**13,5**
Setu	ha	48,3	8,3	-	1.621,7	-	**1.678,3**
	%	0,3	0,1	0,0	9,8	0,0	**10,2**
Jumlah Total	**ha**	**293,9**	**1.844,4**	**12,0**	**14.335,2**	-	**16.485,5**
	%	**1,8**	**11,2**	**0,1**	**87,0**	**0,0**	**100,0**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

C. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air merepresentasikan peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Dengan metode perhitungan yang sama seperti pada jasa lingkungan hidup penyedia air, profil kinerja jasa

lingkungan hidup pengaturan air wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.40, Tabel 2.41 dan Gambar 2.33.

Tabel 2.40. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018

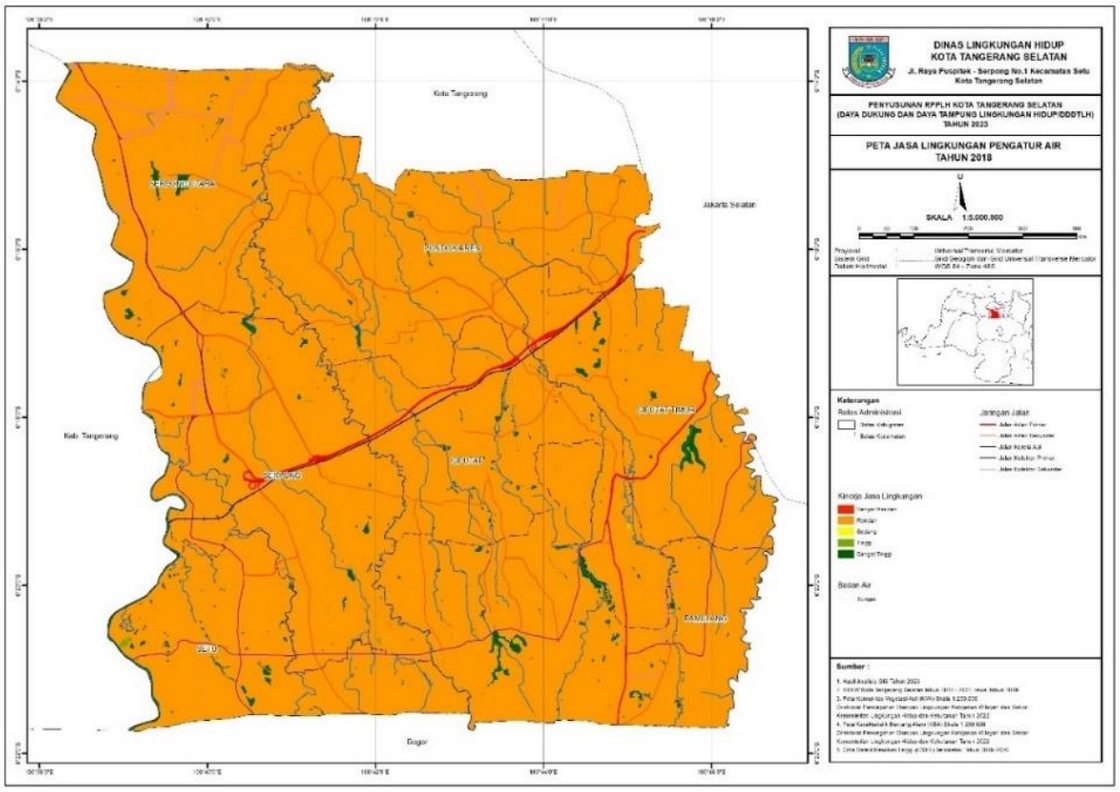
Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	4,82	0,03%
Sedang	2,47	0,015%
Rendah	16.142,03	97,92%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2.41. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan		Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	26,96	-	0,46	2.088,37	-	**2.115,80**
	%	0,16	0,00	0,00	12,67	-	**12,83**
Ciputat Timur	ha	48,06	-	0,63	1.735,34	-	**1.784,03**
	%	0,29	0,00	0,00	10,53	0,00	**10,82**
Pamulang	ha	71,04	0,06	1,38	2.795,88	-	**2.868,36**
	%	0,43	0,00	0,01	16,96	0,00	**17,40**
Pondok Aren	ha	30,88	-	-	2.946,75	-	**2.977,63**
	%	0,19	0,00	0,00	17,87	0,00	**18,06**
Serpong	ha	57,56	0,63	-	2.785,65	-	**2.843,84**
	%	0,35	0,00	0,00	16,90	0,00	**17,25**
Serpong Utara	ha	53,81	0,23	-	2.163,50	-	**2.217,55**
	%	0,33	0,00	0,00	13,12	0,00	**13,45**
Setu	ha	47,88	3,90	-	1.626,54	-	**1.678,32**
	%	0,29	0,02	0,00	9,87	0,00	**10,18**
Jumlah Total	**ha**	**336,20**	**4,82**	**2,47**	**16.142,03**	-	**16.485,52**
	%	**2,04**	**0,03**	**0,02**	**97,92**	**0,00**	**100,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.33. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel 2.41, kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kinerja rendah sebesar 97,92% atau 16.142,03 ha dari luasan total Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi kategori kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air rendah.

D. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan kualitas udara merupakan representasi kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer. Indikator kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara dilihat berdasarkan luas penggunaan lahan yang bervegetasi (ha). Perbedaan tipe vegetasi turut mempengaruhi fungsinya dalam melakukan serapan karbon untuk memperbaiki kualitas udara. Vegetasi mampu menangkap partikel dan menyerap gas penyebab polusi udara, seperti CO_2, SO_2, NO_2, dan sebagainya, terutama bila luas permukaan daunnya lebih besar (pohon lebat dan banyak). Penyerapan CO_2 oleh tumbuhan, tentunya juga mampu mengurangi efek perubahan iklim. Diperkirakan taman atau hutan kota mampu menyaring 85% partikel penyebab polusi. Sedangkan pohon besar di pinggir jalan bisa mengurangi 2/3 polusi yang ada (Duniadiny, 2015). Ragam vegetasi memiliki kemampuan serapan karbon yang berbeda-beda, hal tersebut mempengaruhi pemberian skor tipe vegetasi, pada akhirnya nilai perhitungan indeks bergantung pada skor-skor tersebut.

Kota Tangerang Selatan memiliki jasa lingkungan pengaturan kualitas udara dengan kategori rendah. Dikategorikan demikian dikarenakan jasa lingkungan dengan kinerja rendah mencapai luasan 16.126,40 ha atau 97,82% dari luas wilayah Kota. Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi kategori kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.42, Tabel 2.43, dan Gambar 2.34.

Tabel 2.42. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

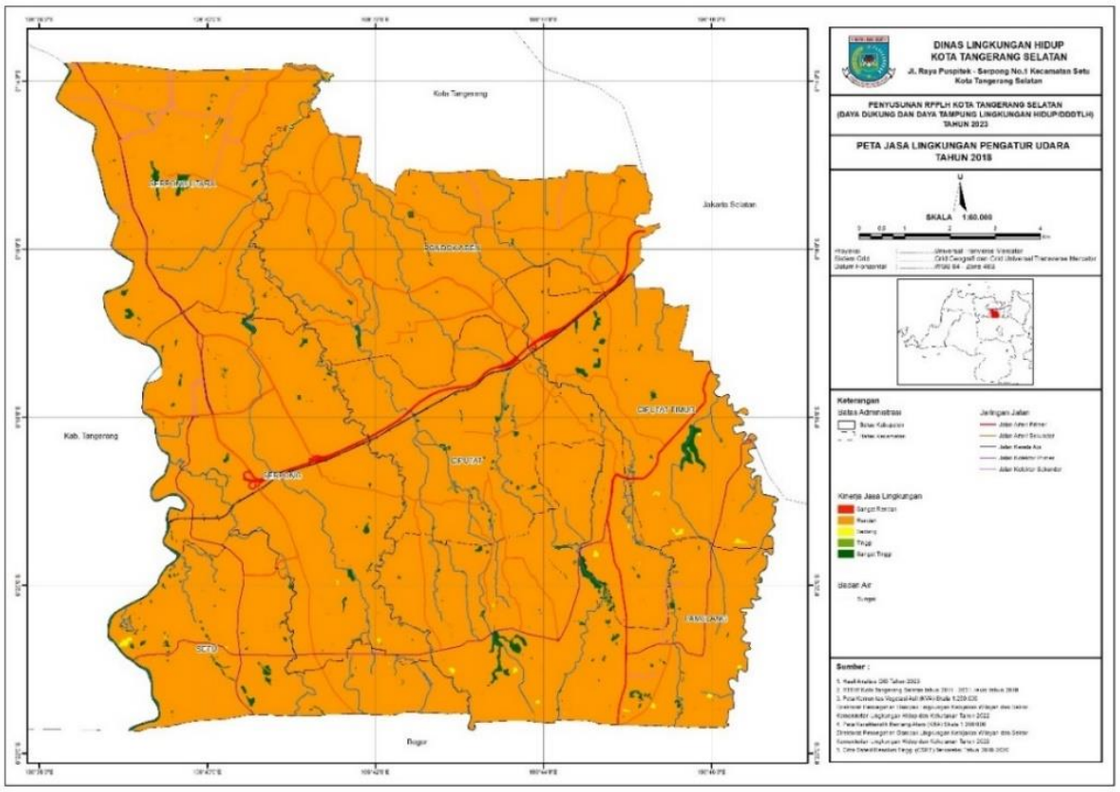
Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	-	-
Sedang	22,92	0,14%
Rendah	16.126,40	97,82%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2.43. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan		Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	26,96		1,84	2.086,99	-	**2.115,80**
	%	0,16	0,00	0,01	12,66		**12,83**
Ciputat Timur	ha	48,06		4,78	1.731,18		**1.784,02**
	%	0,29	0,00	0,03	10,50	0,00	**10,82**
Pamulang	ha	71,04		6,65	2.790,67		**2.868,36**
	%	0,43	0,00	0,04	16,93	0,00	**17,40**
Pondok Aren	ha	30,88		0,36	2.946,39		**2.977,63**
	%	0,19	0,00	0,00	17,87	0,00	**18,06**
Serpong	ha	57,56		0,98	2.785,30		**2.843,84**
	%	0,35	0,00	0,01	16,90	0,00	**17,25**
Serpong Utara	ha	53,81		3,98	2.159,76		**2.217,55**
	%	0,33	0,00	0,02	13,10	0,00	**13,45**
Setu	ha	47,88		4,33	1.626,11		**1.678,32**
	%	0,29	0,00	0,03	9,86	0,00	**10,18**
Jumlah Total	**ha**	**336,20**		**22,92**	**16.126,40**		**16.485,52**
	%	**2,04**	**0,00**	**0,14**	**97,82**	**0,00**	**100,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.34. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

E. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir

Perubahan terhadap bentang alam dari sisi geologi dan minimnya vegetasi, menyebabkan rendahnya tingkat kinerja jasa lingkungan hidup yang berfungsi sebagai pengatur mitigasi bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan bentang alam dan vegetasi alami telah berubah menjadi lahan hunian dan usaha, tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi mitigasi banjir.

Kinerja jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir di Kota Tangerang Selatan tahun 2018 didominasi kinerja jasa lingkungan rendah sebesar 86,97% atau seluas 14.337,24 ha. Kecamatan Serpong merupakan kecamatan dengan luas wilayah tertinggi yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup yang rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.44, Tabel 2.45 dan Gambar 2.35.

Tabel 2.44. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018

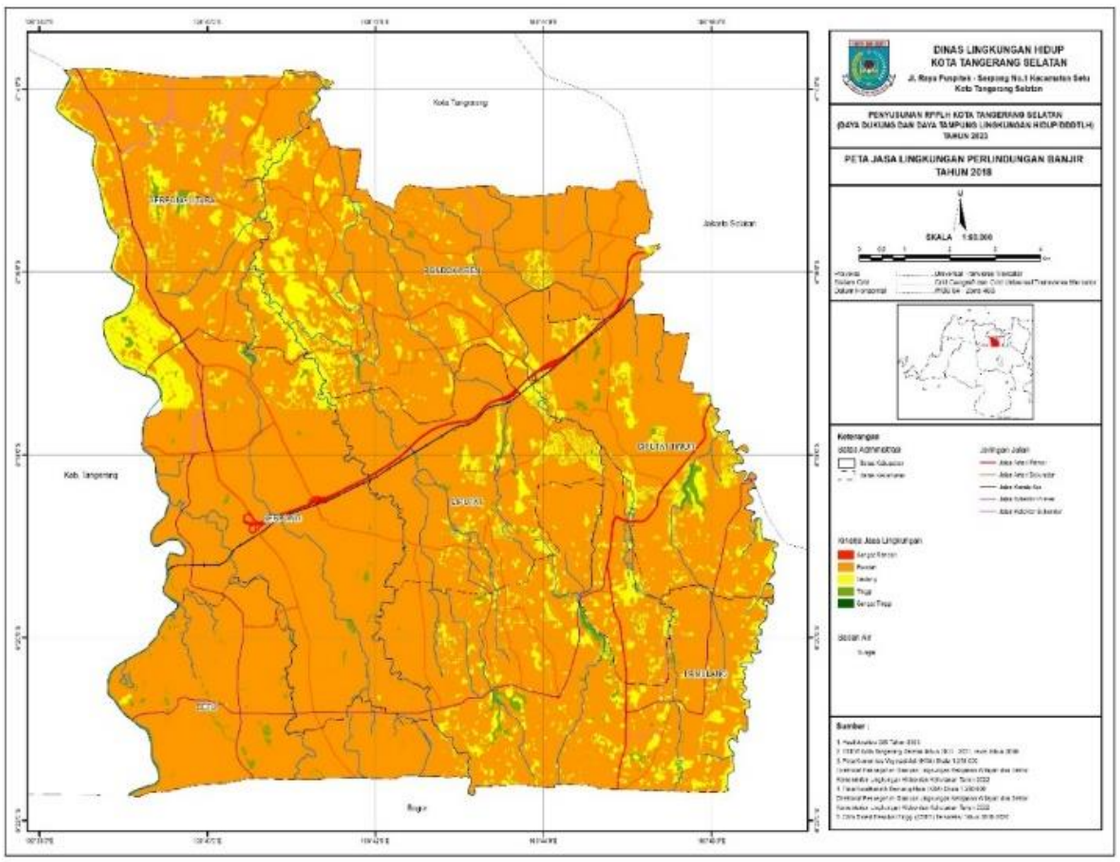
Kinerja Jasa Lingkungan Perlindungan Banjir Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	-	-
Tinggi	336,62	2,04%
Sedang	1.811,66	10,99%
Rendah	14.337,24	86,97%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2.45. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 berdasarkan Kecamatan

Kecamatan		Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha		27,39	263,84	1.824,57	-	**2.115,80**
	%	0,00	0,17	1,60	11,07		**12,83**
Ciputat Timur	ha		48,06	235,67	1.500,29		**1.784,02**
	%		0,29	1,43	9,10		**10,82**
Pamulang	ha		71,04	333,32	2.464,00		**2.868,36**
	%		0,43	2,02	14,95	0,00	**17,40**
Pondok Aren	ha		30,88	424,68	2.522,07		**2.977,63**
	%		0,19	2,58	15,30	0,00	**18,06**
Serpong	ha		57,56	121,65	2.664,63		**2.843,84**
	%	0,00	0,35	0,74	16,16	0,00	**17,25**
Serpong Utara	ha		53,81	424,17	1.739,57		**2.217,55**
	%	0,00	0,33	2,57	10,55	0,00	**13,45**
Setu	ha		47,88	8,33	1.622,11		**1.678,32**
	%	0,00	0,29	0,05	9,84	0,00	**10,18**
Jumlah Total	**ha**	**0,00**	**336,62**	**1.811,66**	**1.4337,24**	**0,00**	**1.6485,52**
	%	**0,00**	**2,04**	**10,99**	**86,97**	**0,00**	**100,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.35. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

F. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur iklim merupakan kinerja lingkungan yang berkontribusi pada iklim lokal maupun global. Kinerja jasa lingkungan ini dipengaruhi oleh tutupan lahan yang bervegetasi diantaranya yaitu hutan, perkebunan, lahan pertanian, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Semakin besar luas tutupan lahan yang bervegetasi dan semakin rapatnya vegetasi maka kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim semakin baik. Hal ini terjadi semakin luas dan semakin rapatnya vegetasi maka luas bidang dedaunan yang melakukan evapotranspirasi semakin besar yang mana akan menghasilkan oksigen dan uap air. Uap air dan oksigen yang dihasilkan inilah yang menyebabkan lingkungan sekitar menjadi lebih sejuk dan lebih baik kualitasnya.

Kota Tangerang Selatan termasuk ke dalam kriteria sangat rendah yang terlihat kinerja sangat rendah memiliki luasan yang dominan daripada kinerja lainnya yaitu seluas 14.333,41 ha atau sebesar 86,95%. Kecamatan Serpong merupakan kecamatan dengan luas wilayah tertinggi yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.46, Tabel 2.47 dan Gambar 2.36.

Tabel 2.46. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018

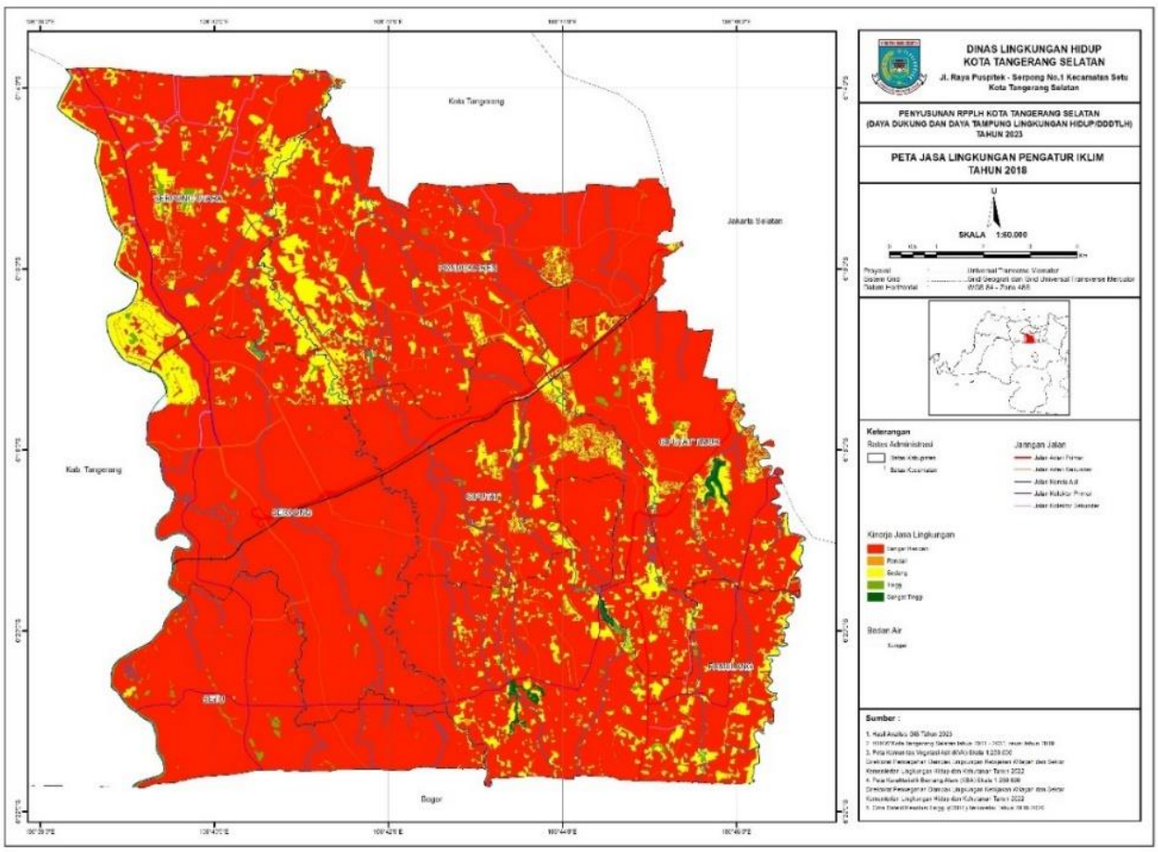
Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	44,30	0,27%
Tinggi	294,36	1,79%
Sedang	1.809,62	10,98%
Rendah	3,83	0,02%
Sangat Rendah	14.333,41	86,95%
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 2.47. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Klasifikasi		Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	0,03	27,40	263,80		1.824,57	2.115,80
	%	0,00	0,17	1,60	0,00	11,07	12,83
Ciputat Timur	ha	17,89	30,79	235,04	0,11	1.500,19	1.784,02
	%	0,11	0,19	1,43	0,00	9,10	10,82
Pamulang	ha	26,37	46,04	331,94	2,94	2.461,06	2.868,35
	%		0,28	2,01	0,02	14,93	17,24
Pondok Aren	ha		30,88	424,68		2.522,07	2.977,63
	%		0,19	2,58	0,00	15,30	18,06
Serpong	ha		57,56	121,65	0,35	2.664,28	2.843,84
	%	0,00	0,35	0,74	0,00	16,16	17,25
Serpong Utara	ha		53,81	424,17	0,00	1.739,57	2.217,55
	%	0,00	0,33	2,57	0,00	10,55	13,45
Setu	ha		47,88	8,33	0,43	1.621,67	1.678,31
	%	0,00	0,29	0,05	0,00	9,84	10,18
Jumlah Total	**ha**	**44,29**	**294,36**	**1.809,61**	**3,83**	**14.333,41**	**16.485,50**
	%	**0,27**	**1,79**	**10,98**	**0,02**	**86,95**	**100,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.36. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB secara tajam hingga -1,01. Hal ini diasumsikan karena pengaruh Covid-19. Namun pada tahun berikutnya, laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan meningkat kembali. Profil laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 2.48.

Tabel 2.48. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,4	0,94	-0,33	0,73	1,78	0,58
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	0,43	0,5	-8,72	1,67	8,35	3,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,75	5,39	-7,05	4,27	10,45	2,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,61	4,78	9,20	5,85	3,26	5,59
F. Konstruksi	9,1	9,64	-5,03	11,79	6,07	1,99

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	6,21	-5,76	2,573	7,25	3,84
H. Transportasi dan Pergudangan	9,21	9,71	-8,06	10,64	6,23	5,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	7,36	-5,75	4,87	8,78	9,55
J. Informasi dan Komunikasi	8,35	8,45	8,78	6,69	6,65	8,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,3	7,44	7,55	4,89	0,22	2,90
L. Real Estate	8,28	8,22	1,78	3,15	6,01	3,99
M,N. Jasa Perusahaan	7,24	8,57	-5,92	-1,06	7,03	8,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,44	8,47	-0,71	-5,09	7,35	5,46
P. Jasa Pendidikan	7,53	7,63	0,87	-0,97	-1,19	6,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,47	7,89	7,95	10,91	0,95	7,53
R,S,T,U. Jasa lainnya	7,68	9,49	-6,87	1,49	5,74	10,76
Pertumbuhan PDRB	**7,49**	**7,39**	**-1,01**	**4,81**	**5,82**	**5,36**

Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 terlihat bahwa total pertumbuhan PDRB pada tahun 2023 sebesar 5,36, di mana terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,82. Sektor basis yang mengalami penurunan siginifikan yaitu sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor *real estate*. Sektor konstruksi turun hingga >50 persen disebabkan karena terbatasnya lahan untuk pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Sektor *real estate* turun dimungkinkan karena fluktuasi suku bunga kredit perbankan yang berpengaruh pada pasar penjualan *real estate* di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan disebabkan karena pengaruh situasi geopolitik dan geoekonomi global terhadap rantai ekspor.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, nasional, kabupaten/kota di Provinsi Banten dan kabupaten/kota yang berdekatan dengan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berada di posisi kedua setelah Kota Tangerang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.50. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 rata-rata pertumbuhan ekonomi kembali meningkat termasuk Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.49. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi, Nasional, Kab/Kota di Provinsi Banten dan Kab/Kota Berdekatan dengan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kab Pandeglang	6	5,3	4,42	-0,67	3,1	3,47	2,53
Kab Lebak	5,76	5,63	5,44	-0,91	3,18	3,80	2,80
Kab Tangerang	5,82	5,8	5,56	-3,76	4,7	5,47	5,18
Kab Serang	5,22	5,29	5,01	-2,73	3,74	5,04	4,80
Kota Tangerang	5,88	4,95	4,02	-7,36	3,9	5,98	5,57
Kota Cilegon	5,5	6,11	5,29	-1,23	5,24	4,51	4,82
Kota Serang	6,43	6,59	6,2	-1,29	3,88	4,71	4,74

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kota Tangerang Selatan	7,30	7,49	7,39	-1,01	4,81	5,82	5,36
Kota Depok	6,75	6,97	6,74	-1,92	3,76	5,24	5,05
Kab. Bogor	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05
Provinsi Banten	**5,71**	**5,75**	**5,29**	**-3,38**	**4,44**	**5,03**	**4,81**

Sumber: BPS Provinsi Banten, dan BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tangerang Selatan dari tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.50 di bawah ini, terdapat 9 (sembilan) sektor basis yang menopang PDRB Kota Tangerang Selatan yaitu sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Sektor basis dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu tahun 2022-2023 yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa lainnya, sektor jasa perusahaan serta sektor Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.50. Potensi Sektoral Perekonomian Kota Tangerang Selatan berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2022 s.d Tahun 2023

Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	Pertum-buhan	LQ	Potensi Sektoral
	2022	2023			
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117,78	118,47	0,59	0,03	Non-Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-		-	0
C. Industri Pengolahan	5.037,65	5.221,97	3,66	0,23	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	64,88	66,81	2,97	0,10	Non-Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,01	34,86	5,60	0,48	Non Basis
F. Konstruksi	9.384,80	9.571,44	1,99	1,32	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.535,02	10.939	3,84	1,19	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	2.039,46	2.158,91	5,85	0,59	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.939,11	2.124,38	9,55	1,16	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	12.040,08	13.074	8,59	2,66	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	843,68	868,18	2,90	0,43	Non Basis
L. Real Estate	12.503,61	13.003	3,99	2,05	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	2.038,17	2.217,94	8,82	3,12	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622,55	656,57	5,46	0,55	Non Basis
P. Jasa Pendidikan	4.250,79	4.536,15	6,71	2,24	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.888,52	3.106,11	7,53	3,11	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.682,77	1.836,82	9,15	1,72	Basis
JUMLAH	**66.021,88**	**69.562,29**			

Berdasarkan analisa dengan menggunakan matriks tipologi Klassen, sektor basis dalam PDRB Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori sektor prima yaitu sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan. Kedua sektor ini menggantikan sektor konstruksi; sektor real estate dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang pada tahun 2022 merupakan sektor basis prima.

Sektor basis dengan kategori sektor berkembang di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, terdiri atas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Sementara untuk kategori sektor potensial yaitu sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor real estate. Gambaran tipologi per sektor lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.51. Matriks Tipologi Klassen

Rerata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB / **Rerata Laju Pertumbuhan Sektoral**	**$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$**	**$Y_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$**
$r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$	Sektor Prima	Sektor Berkembang
$r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Keterangan:
Y_{SEKTOR} = nilai sektor ke i
Y_{PDRB} = rata-rata PDRB
r_{SEKTOR} = laju pertumbuhan sektor ke-i
r_{PDRB} = laju pertumbuhan PDRB

Tabel 2.52. Tipologi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2022-2023)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	Pertumbuhan (rSEKTOR) (%)	Kontribusi	Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB	Rerata laju pertumbuhan sektoral	Tipologi Klassen	Potensi Sektor
		2022	2023						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117,78	118,47	0,59%	0,17%	<	<	Sektor Terbelakang	Non-Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	5.037,65	5.221,97	3,66%	7,51%	>	<	Sektor Potensial	Non-Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	64,88	66,81	2,97%	0,10%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,01	34,86	5,60%	0,05%	<	>	Sektor Berkembang	Non Basis
F	Konstruksi	9.384,80	9.571,44	1,99%	13,76%	>	<	Sektor Potensial	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.535,02	10.939	3,84%	15,73%	>	<	Sektor Potensial	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	2.039,46	2.158,91	5,85%	3,10%	<	>	Sektor Berkembang	Non-Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.939,11	2.124,38	9,55%	3,05%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	12.040,08	13.074	8,59%	18,80%	>	>	Sektor Prima	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	843,68	868,18	2,90%	1,25%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
L	Real Estate	12.503,61	13.003	3,99%	18,69%	>	<	Sektor Potensial	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	2.038,17	2.217,94	8,82%	3,19%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622,55	656,57	5,46%	0,94%	<	>	Sektor Berkembang	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	4.250,79	4.536,15	6,71%	6,52%	>	>	Sektor Prima	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.888,52	3.106,11	7,53%	4,47%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.682,77	1.836,82	9,15%	2,64%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
Jumlah		66.021,88	69.562,29	5,36%	5,88%				
Rerata PDRB		**3.883,64**	**4.091,90**						

Dengan adanya penurunan potensi sektor basis konstruksi dan real estate yang disebabkan karena keterbatasan pengembangan lahan di Kota Tangerang Selatan maka perlu dilakukan pengembangan sektor lapangan usaha lainnya sesuai dengan potensinya. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dapat dikembangkan seiring dengan pengembangan potensi destinasi wisata Kota Tangerang Selatan. Sektor jasa kesehatan memiliki potensi dikembangkan menjadi sektor unggulan karena sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tangerang Selatan cukup lengkap. Pengembangan sektor kesehatan sebagai sektor ekonomi unggulan dengan tetap menjaga pemenuhan akses pelayanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sektor jasa lainnya juga dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan potensi ekonomi karena sektor ini mencatatkan nilai tertinggi dalam kontribusi investasi tahun 2023 di Kota Tangerang Selatan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.53 di bawah ini.

Tabel 2.53. Jumlah PMDN dan PMA menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Miliar Rp.)	Persen
PMDN		
Jasa Lainnya	232,2	29,09%
Perdagangan dan Reparasi	219,3	27,47%
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	163,5	20,48%
Hotel dan Restoran	118,9	14,90%
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	64,3	8,06%
Total PMDN	**798,2**	**100,00%**
PMA		
Jasa Lainnya	1.900	42,21%
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.400	31,11%
Perdagangan dan Reparasi	706,9	15,71%
Kontruksi	248,2	5,51%
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	245,7	5,46%
Total PMA	**4.500,8**	**100,00%**
Total PMA+ PMDN	**5.299,0**	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

2.2.1.2. Pengeluaran Penduduk

Pola konsumsi atau pengeluaran penduduk, secara garis besar dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Pola pengeluaran ini akan berubah, seiring dengan perubahan yang terjadi pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, proporsi pengeluaran untuk makanan akan menurun, sedangkan pengeluaran bukan makanan akan meningkat. Pergeseran pola pengeluaran tersebut, dapat terjadi karena elastisitas pendapatan terhadap makanan cukup rendah, sebaliknya terhadap bukan makanan sangat tinggi. Oleh karena itu, kelebihan pendapatan akibat naiknya pendapatan ini, biasanya akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi bukan makanan, daripada untuk makanan.

Perubahan pola pengeluaran akibat naiknya pendapatan ini, sebenarnya sudah sejak lama diformulasikan dalam bentuk “Hukum Engel” oleh Ernst Engel (1821-1896). Menurut Engel, bila tidak ada perubahan selera maka dengan meningkatnya pendapatan, proporsi pengeluaran makanan akan menurun, sebaliknya proporsi pengeluaran bukan makanan akan meningkat. Dengan demikian, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dan proporsi pengeluaran disajikan dalam Gambar 2.37 dan Tabel 2.54.



Gambar 2.37. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan per Kapita, Kota Tangerang Selatan Maret 2016-2023

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Tabel 2.54. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan Maret 2021-2023

Kelompok Pengeluaran	Nominal (Rupiah)			Proporsi (Persen)		
	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023
1. Makanan	920.434	927.603	936.011	39,33	41,16	39,73
a. Bahan Makanan	506.286	477.976	503.768	21,64	21,21	21,38
b. Makanan/ Minuman Jadi	336.220	345.311	344.267	14,37	15,32	14,61
c. Rokok	77.927	85.742	87.976	3,33	3,8	3,73
2. Bukan Makanan	1.419.645	1.326.104	1.420.005	60,67	58,84	60,27
a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	810.486	786.665	802.944	34,63	34,91	34,08
b. Aneka Barang dan Jasa	357.344	317.395	370.728	15,27	14,08	15,73
c. Pakaian	48.678	52.719	48.669	2,08	2,34	2,06
d. Barang Tahan Lama	67.370	38.466	46.368	2,88	1,71	1,97
e. Lainnya	135.768	130.859	151.297	5,8	5,81	6,42
3. Makanan+Bukan Makanan	2.340.079	2.253.707	2.356.016	100	100	100

Sumber: BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2021-2023

Berdasarkan Gambar 2.37 dan Tabel 2.54, terlihat bahwa proporsi pengeluaran makanan rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan selama setahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari 41,16 persen pada Maret 2022 menjadi 39,73 persen pada Maret 2023. Proporsi tertinggi pengeluaran untuk makanan selama kurun waktu 6 tahun yaitu pada tahun 2022. Menurunnya proporsi pengeluaran makanan belum dapat menjadi petunjuk bagi menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena pada saat bersamaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dari 2,25 juta rupiah pada Maret 2022 menjadi 2,35 juta rupiah pada Maret 2023 dan besarannya masih di atas rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Banten yang hanya 1,74 juta rupiah.

Bila dilihat menurut kelompok pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan pada sebagian besar sub kelompok pengeluaran. Penurunan hanya terjadi pada komoditas dalam sub kelompok makanan/minuman jadi dan pakaian. Adapun yang mengalami peningkatan adalah komoditas bahan makanan, rokok, perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, barang tahan lama dan lainnya. Komoditas aneka barang dan jasa mengalami kenaikan terbesar, yaitu naik sebesar 53 ribu rupiah hingga menjadi 370 ribu rupiah pada Maret 2023. Diamati menurut proporsi pengeluarannya, terlihat ada sedikit pergeseran pada pola pengeluaran penduduk Kota Tangerang Selatan. Pada Maret 2022, tiga komoditas dengan urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, bahan makanan, serta makanan/minuman jadi. Pada Maret 2023, tiga komoditas dengan urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, bahan makanan, serta aneka barang dan jasa.

2.2.1.3. Indeks Gini

Ketimpangan suatu wilayah dapat diketahui melalui perhitungan Indeks Gini. Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3, maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan rendah, jika nilai Indeks Gini diantara 0,3 hingga 0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan sedang, dan jika nilai Indeks Gini di atas 0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan tinggi.

Sejak tahun 2018 hingga 2023, tingkat ketimpangan di Kota Tangerang Selatan dalam kategori sedang, di mana Indeks Gini berada pada kisaran nilai antara 0,3-0,5, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.55. Berdasarkan gambaran data perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama tahun 2018-2023, terlihat bahwa daerah yang mengalami peningkatan ketimpangan pada tahun 2023 yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Provinsi Banten. Sementara itu, tingkat ketimpangan Kota

Tangerang Selatan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.55. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Gini					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	0,319	0,31	0,305	0,266	0,302	0,243
Kab. Lebak	0,303	0,297	0,314	0,332	0,312	0,271
Kab. Tangerang	0,342	0,325	0,285	0,294	0,282	0,286
Kab. Serang	0,284	0,305	0,303	0,264	0,284	0,274
Kota Tangerang	0,33	0,328	0,339	0,343	0,383	0,379
Kota Cilegon	0,352	0,315	0,373	0,363	0,318	0,362
Kota Serang	0,351	0,342	0,352	0,34	0,354	0,306
Kota Tangerang Selatan	0,379	0,331	0,368	0,37	0,359	0,359
Provinsi Banten	**0,385**	**0,365**	**0,363**	**0,365**	**0,363**	**0,368**

Sumber: BPS Provinsi Banten, tahun 2023

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan indikator kemiskinan. Indikator tersebut antara lain mencakup garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan indikator target pencapaian, serta bahan untuk evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas, yang dilaksanakan pada tiap bulan Maret dan September.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Adapun penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2010-2023 terus mengalami peningkatan. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 2,57 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,50 persen. Sejalan dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebanyak 46,31 ribu jiwa. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 44,29 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan merupakan terendah kelima secara nasional setelah Kota Sawah Lunto, Kota Balik Papan, Kota Depok dan Kabupaten Banjar yaitu sebesar 2,27 persen, 2,31 persen, 2,38 persen dan 2,44 persen. Untuk wilayah Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah sebelum kota Depok yang tingkat kemiskinannya sebesar 2,38 persen. Rendahnya tingkat kemiskinan ini, bukan berarti masalah kemiskinan tidak lagi menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang.

Persoalan kemiskinan, bukan hanya sekadar mengukur berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, selain menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan digunakan indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan digunakan indeks keparahan kemiskinan (P2), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin besar nilai P1, semakin jauh jaraknya terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. P1 dan P2 dapat menunjukkan kualitas dari kemiskinan di suatu daerah.

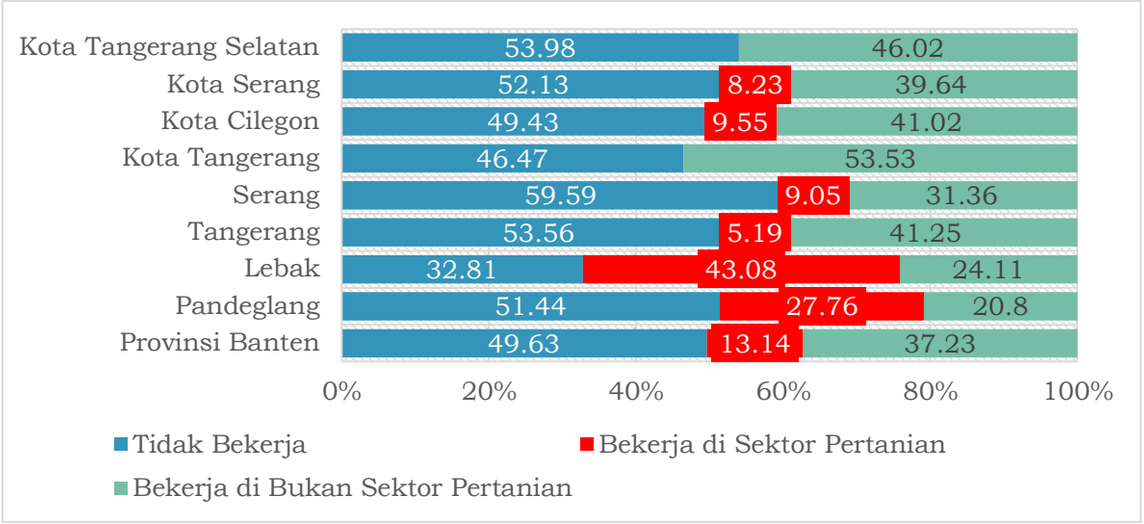
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 0,45, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang nilai indeks kedalaman kemiskinannya sebesar 0,32. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,07. Peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesenjangan pengeluaran per kapita masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan peningkatan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Profil kondisi kemiskinan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2023 disajikan dalam Tabel 2.56.

Tabel 2.56. Kondisi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2023

Wilayah	Kriteria Kemiskinan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tangerang Selatan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	275.643	317.887	344.681	378.303	401.696	433.967	472.968	494.784	549.150	593.781	643.083	665.610	712.717	782.543
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21.906	20.144	18.700	25.400	25.290	25.890	26.380	28.730	28.210	29.160	40.990	44.570	44.290	46.310
	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	98,31	98,50	98,67	98,25	98,32	98,31	98,34	98,24	98,32	98,32	97,71	97,43	97,50	97,43
	Persentase Penduduk Miskin (%)	1,69	1,5	1,33	1,75	1,68	1,69	1,66	1,76	1,68	1,68	2,29	2,57	2,5	2,57
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,35	0,09	0.14	0.14	0.20	0.19	0.28	0.30	0.22	0.27	0,31	0,34	0,32	0,45
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.11	0,03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.08	0.07	0,05	0,07	0,08	0,07	0,07	0,12
Provinsi Banten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	751.000	690.900	642.900	677.500	622.840	702.400	658.110	675.040	661.360	654.460	775.990	867.230	814.020	826.130
	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,02	6,26	5,71	5,89	5,51	5,90	5,42	5,45	5,24	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17
Kabupaten Tangerang	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	258.155	290.423	311.141	335.291	351.789	372.431	405.902	423.486	451.325	476.636	520.742	545.065	576.122	604.362
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	205.100	188.600	176.000	183.900	173.100	191.120	182.520	191.620	190.050	193.970	242.160	272.350	270.520	276.330
	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	92,82	93,58	94,29	94,22	94,74	94,29	94,71	94,61	94,82	94,86	93,77	92,88	93,08	93,07
	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,18	6,42	5,71	5,78	5,26	5,71	5,29	5,39	5,18	5,14	6,23	7,12	6,92	6,93
Kota Tangerang	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	303.551	337.543	365.205	398.513	421.554	455.228	496.349	508.551	556.782	584.318	632.835	655.061	695.225	746.468
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	124.300	114.300	106.500	103.100	98.760	102.560	102.880	105.340	103.490	98.370	118.220	134.240	132.880	137.700
	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	93,12	93,86	94,44	94,96	95,09	94,96	95,06	95,05	95,24	95,57	94,78	94,07	94,23	94,11
	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,88	6,14	5,56	5,04	4,91	5,04	4,94	4,95	4,76	4,43	5,22	5,93	5,77	5,89

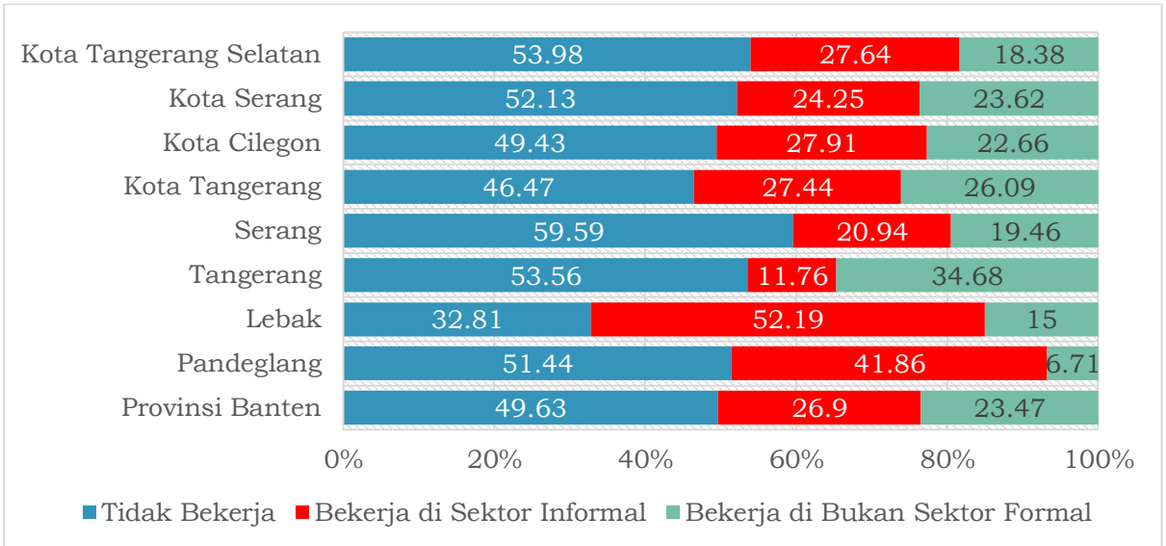
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, BPS Provinsi Banten

Karakteristik penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang tidak bekerja, termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sementara itu, berdasarkan status/ kedudukannya dalam pekerjaan utama, penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan didominasi penduduk yang bekerja di sektor informal, yaitu penduduk yang pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Gambaran karakteristik penduduk miskin tersebut di atas disajikan dalam Gambar 2.38 dan Gambar 2.39.



Gambar 2.38. Karakteristik Penduduk Miskin Menurut Sektor Pekerjaan dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

Sumber: RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045



Gambar 2.39. Karakteristik Penduduk Miskin Menurut Status Bekerja Kabupaten/Kota Tahun 2022

Sumber: RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan, karakteristik indikator mikro sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan wilayah disajikan dalam Tabel 2.57. sampai dengan Tabel 2.65.

Tabel 2.57. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok Usia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Usia < 6 Tahun			Usia 6 - 14 Tahun			Usia 15 - 44 Tahun			Usia 45 - 59 Tahun			Usia ≥ 60 Tahun		
		Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
1	Serpong	2.897	1.380	1.517	8.707	4.165	4.542	24.502	12.420	12.082	8.415	3.909	4.506	2.508	1.206	1.302
2	Serpong Utara	1.196	557	639	4.006	1.940	2.066	10.877	5.515	5.362	3.784	1.706	2.078	836	397	439
3	Pondok Aren	5.585	2.736	2.849	17.504	8.482	9.022	47.571	24.015	23.556	17.087	8.020	9.067	4.410	2.019	2.391
4	Ciputat	3.970	1.896	2.074	13.334	6.471	6.863	37.926	18.949	18.977	14.050	6.780	7.270	4.255	2.019	2.236
5	Ciputat Timur	3.082	1.490	1.592	10.427	5.135	5.292	28.546	14.466	14.080	10.818	5.064	5.754	2.941	1.390	1.551
6	Pamulang	5.185	2.495	2.690	16.907	8.173	8.734	47.844	24.088	23.756	18.287	8.787	9.500	5.610	2.630	2.980
7	Setu	2.497	1.204	1.293	6.527	3.100	3.427	17.721	8.925	8.796	5.810	2.635	3.175	1.721	860	861
Total (7 Kecamatan)		**24.412**	**11.758**	**12.654**	**77.412**	**37.466**	**39.946**	**214.987**	**108.378**	**106.609**	**78.251**	**36.901**	**41.350**	**22.281**	**10.521**	**11.760**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.58. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		Jumlah	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	Jumlah	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Serpong	9.603	3.756	2.972	2.875	2.248	2.077	103	68
2	Serpong Utara	4.659	1.892	1.459	1.308	808	760	34	14
3	Pondok Aren	19.740	8.034	6.097	5.609	3.784	3.565	133	86
4	Ciputat	15.043	5.979	4.619	4.445	3.082	2.853	156	73
5	Ciputat Timur	11.638	4.740	3.588	3.310	2.319	2.178	90	51
6	Pamulang	18.997	7.586	5.939	5.472	3.835	3.580	171	84
7	Setu	7.027	2.946	2.110	1.971	1.595	1.491	72	32
Total (7 Kecamatan)		**86.707**	**34.933**	**26.784**	**24.990**	**17.671**	**16.504**	**759**	**408**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.59. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kabupaten / Kota	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat			Perguruan Tinggi		
		Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
1.	Serpong	6.464	3.082	3.382	3.046	1.492	1.554	2.719	1.338	1.381	109	54	55
2.	Serpong Utara	3.039	1.459	1.580	1.467	712	755	1.391	681	710	39	18	21
3.	Pondok Aren	12.638	6.035	6.603	6.203	3.069	3.134	6.066	2.899	3.167	225	121	104
4.	Ciputat	10.019	4.908	5.111	4.625	2.235	2.390	4.615	2.264	2.351	198	107	91
5.	Ciputat Timur	7.486	3.672	3.814	3.619	1.760	1.859	3.710	1.832	1.878	182	109	73
6.	Pamulang	12.247	5.856	6.391	6.001	2.894	3.107	5.998	2.960	3.038	368	218	150
7.	Setu	4.828	2.303	2.525	2.075	970	1.105	2.033	989	1.044	63	38	25
Total (7 Kecamatan)		**56.721**	**27.315**	**29.406**	**27.036**	**13.132**	**13.904**	**26.532**	**12.963**	**13.569**	**1.184**	**665**	**519**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.60. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Fasilitas BAB Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kabupaten/Kota	Dengan Septik Tank	Tanpa Septik Tank	Jamban Umum/Bersama	Lainnya
1.	Serpong	11.626	240	73	13
2.	Serpong Utara	4.817	136	30	4
3.	Pondok Aren	22.252	200	30	13
4.	Ciputat	17.900	154	50	8
5.	Ciputat Timur	13.498	58	139	3
6.	Pamulang	22.851	221	47	4
7.	Setu	8.162	226	33	11
Total (7 Kecamatan)		**101.106**	**1.235**	**402**	**56**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.61. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Status Bekerja Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	5- 14 Tahun			15-59 Tahun			≥ 60 Tahun		
		Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
1.	Serpong	9.483	41	9.442	32.917	15.384	17.533	2.508	1.209	1.299
2.	Serpong Utara	4.333	30	4.303	14.661	6.955	7.706	836	425	411
3.	Pondok Aren	19.139	93	19.046	64.658	31.358	33.300	4.410	2.258	2.152
4.	Ciputat	14.510	82	14.428	51.976	25.533	26.443	4.255	2.134	2.121
5.	Ciputat Timur	11.322	58	11.264	39.364	19.497	19.867	2.941	1.474	1.467
6.	Pamulang	18.414	82	18.332	66.131	31.270	34.861	5.610	2.843	2.767
7.	Setu	7.223	35	7.188	23.531	11.016	12.515	1.721	788	933
Total (7 Kecamatan)		**84.424**	**421**	**84.003**	**293.238**	**141.013**	**152.225**	**22.281**	**11.131**	**11.150**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.62. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
1.	Serpong	1.015	60	2	745	4.283	3.301	55	2.357	134
2.	Serpong Utara	341	32	0	195	2.360	1.061	24	799	175
3.	Pondok Aren	1.882	139	0	994	8.515	6.273	172	4.255	265
4.	Ciputat	1.864	67	2	912	6.407	5.534	165	2.936	225
5.	Ciputat Timur	1.206	73	2	576	5.693	3.546	121	2.265	216
6.	Pamulang	2.141	113	3	925	9.015	6.949	209	3.311	457
7.	Setu	723	74	3	356	2.960	2.316	42	1.795	163
Total (7 Kecamatan)		**9.172**	**558**	**12**	**4.703**	**39.233**	**28.980**	**788**	**17.718**	**1.635**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.63. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Sumber Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Air Kemasan/ Isi Ulang	Leding/ PAM	Sumber Terlindungi	Sumber Tidak Terlindungi	Lainnya
1.	Serpong	712	1.397	9.786	44	13
2.	Serpong Utara	474	203	428	28	2
3.	Pondok Aren	4.928	627	16.836	40	64
4.	Ciputat	1.837	949	15.282	23	21
5.	Ciputat Timur	2.641	488	10.464	45	60
6.	Pamulang	3.241	464	19.356	29	33
7.	Setu	781	358	7.233	30	30
Total (7 Kecamatan)		**14.614**	**4.486**	**83.237**	**239**	**223**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Tabel 2.64. Indikator Status Kesejahteraan Penduduk Miskin Berdasarkan Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Jumlah	Usia < 45	Usia 45 - 59	Usia ≥ 60
1.	Serpong	1.125	347	515	263
2.	Serpong Utara	342	96	181	65
3.	Pondok Aren	2.030	501	1.018	511
4.	Ciputat	2.097	539	974	584
5.	Ciputat Timur	1.380	303	701	376
6.	Pamulang	2.283	491	1.135	657
7.	Setu	789	257	362	170
Total (7 Kecamatan)		**10.046**	**2.534**	**4.886**	**2.626**

Sumber: https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran

Pada tahun dasar tahun 2021, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang hidup di bawah USD 1,9 *PPP* per kapita per hari (*World Bank*), setara dengan 11.941 Rupiah per kapita per hari atau 358.233 Rupiah per kapita per bulan. Perkembangan kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.65. Garis Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Ekstrem Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Garis Kemiskinan Ekstrem (Rp)
2020	643.083	537.972
2021	665.610	552.150
2022	712.717	596.224
2023	782.543	654.988

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2023

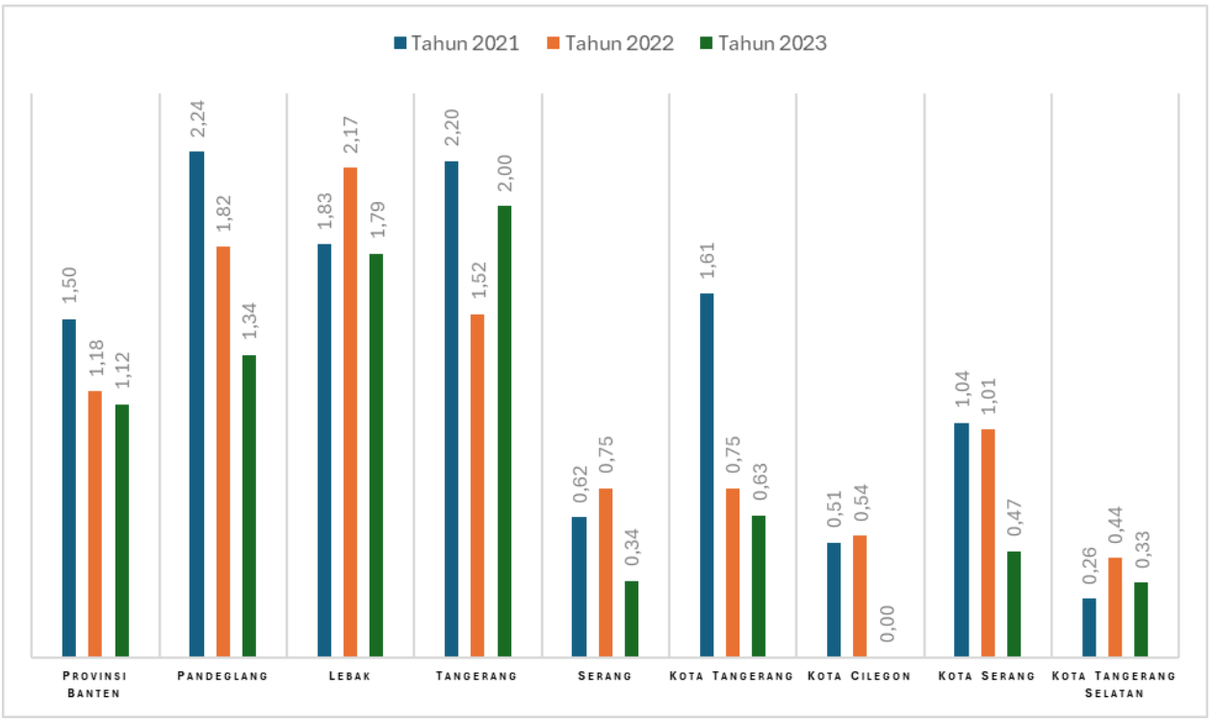
Tabel 2.66. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		Persentase (%)	
	Miskin	Miskin Ekstrem	Miskin	Miskin Ekstrem
2021	44,57	4,57	2,57	0,26
2022	44,29	7,76	2,50	0,44
2023	46,31	6,00	2,57	0,33

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.65 dan Tabel 2.66 di atas, terlihat bahwa dari tahun 2020-2023 Garis Kemiskinan Ekstrem mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan Garis Kemiskinan. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem dibandingkan tahun 2021. Hal ini dimungkinkan disebabkan karena pasca pandemi bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah mengalami pengurangan sementara penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang Selatan merupakan kemiskinan kronis yang sangat tergantung pada pemberian bantuan sosial tersebut.

Grafik di bawah ini memperlihatkan perbandingan kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, di mana angka kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang Selatan termasuk rendah di bawah rata-rata Provinsi Banten.



Gambar 2.40. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

Sumber: RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

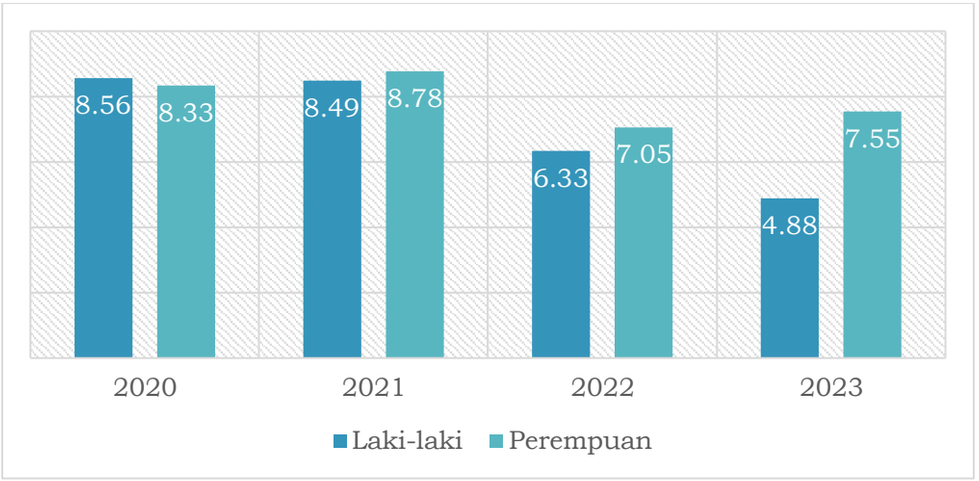
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT memberikan gambaran tentang seberapa efisien pasar tenaga kerja suatu negara dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Perkembangan TPT di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2010-2023 disajikan dalam Tabel 2.67 di bawah ini.

Tabel 2.67. TPT Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2010	8,22
2011	11,98
2012	8,07
2013	4,56
2014	6,92
2015	6,13
2016	-
2017	6,83
2018	4,67
2019	4,78
2020	8,48
2021	8,6
2022	6,59
2023	5,81

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.67, angka TPT Kota Tangerang Selatan selama setahun terakhir ini mengalami penurunan. Pada tahun 2023, TPT Kota Tangerang Selatan sebesar 5,81 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6,59 persen. Hal ini dimungkinkan karena kondisi ekonomi mulai membaik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diamati menurut jenis kelamin, dalam kurun waktu tahun 2020-2023 terlihat bahwa angka TPT perempuan masih lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Pada tahun 2023, angka TPT laki-laki sebesar 4,88 persen sementara angka TPT perempuan sebesar 7,55 persen, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.41 di bawah ini.

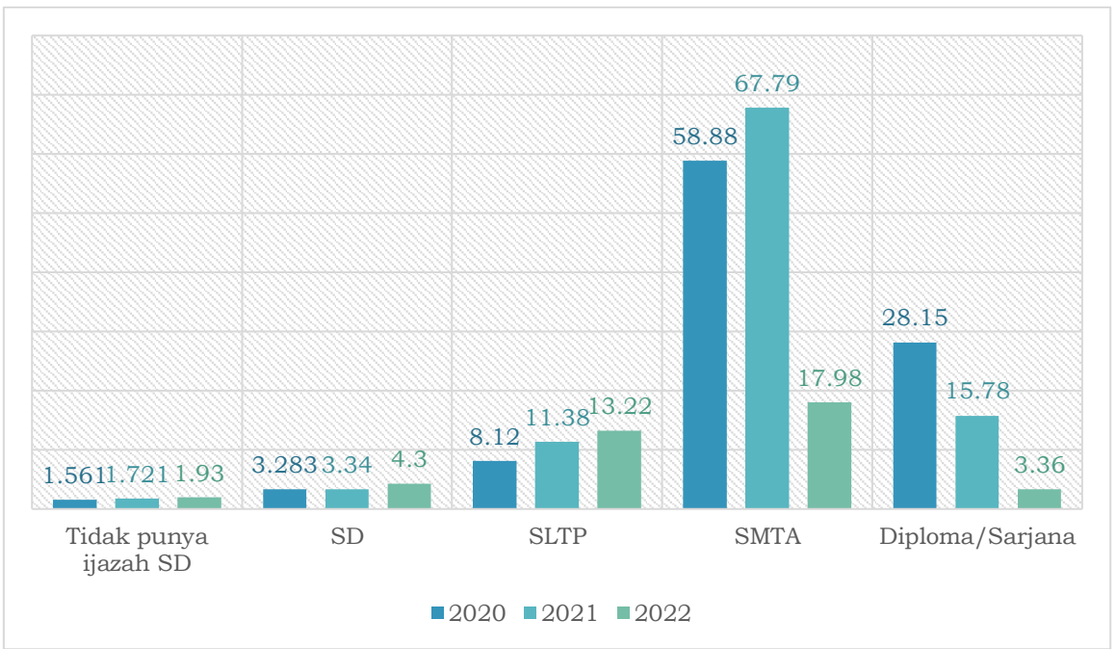


Gambar 2.41. TPT menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

A. Tingkat Pengangguran dan Pendidikan

Pendidikan yang tinggi menjadi jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan berdampak kepada tingginya harapan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha, yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Gambar 2.42 menyajikan angka TPT menurut tingkat pendidikan angkatan kerja, yang dapat memberikan gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja pada masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 2.42. TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Diamati menurut besaran TPT, tingkat pengangguran terbuka penduduk berpendidikan SMP ke Bawah terlihat masih relatif rendah. Hal ini dapat terjadi karena angkatan kerja berpendidikan rendah memang bersedia

untuk melakukan pekerjaan apa saja, termasuk bila dibayar dengan upah yang rendah sekalipun. Sementara lulusan SMA Umum dan SMK, tingkat penganggurannya sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan karena dengan keahlian yang terbatas, mereka akan kalah bersaing dengan angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III dan Universitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan pencari kerja berpendidikan rendah, yang bersedia untuk melakukan pekerjaan apa saja. Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka untuk tingkat pendidikan SMA dan diploma/sarjana mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2020 dan 2021 masih terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja. Sementara pada tahun 2022, kondisi perekonomian mulai membaik sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat yang menyebabkan berkurangnya angka pengangguran.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (*UNDP*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (*HDR*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Nilai IPM ini dihasilkan dari komponen perhitungan IPM metode baru yang terdiri dari komponen angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Data IPM dan komponen pembentuk IPM Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2010-2023 disajikan dalam Tabel 2.68 hingga Tabel 2.72.

Tabel 2.68. IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	59,08	59,92	60,48	61,35	62,06	62,72	63,4	63,82	64,34	64,91	68,86	69,02	69,7	70,28
Kab Lebak	58,83	59,82	60,22	61,13	61,64	62,03	62,78	62,95	63,37	63,88	66,39	66,5	67,19	67,68
Kab Tangerang	68,01	68,45	68,83	69,28	69,57	70,05	70,44	70,97	71,59	71,93	74,09	74,47	75,15	75,56
Kab Serang	60,96	61,97	62,97	63,57	63,97	64,61	65,12	65,6	65,93	66,38	70,93	71,05	71,99	72,63
Kota Tangerang	73,69	74,15	74,57	75,04	75,87	76,08	76,81	77,01	77,92	78,43	79,83	80,08	80,44	80,98
Kota Cilegon	68,8	69,26	70,07	70,99	71,57	71,81	72,04	72,29	72,65	73,01	76,8	77,11	77,68	78,24
Kota Serang	68,25	68,69	69,43	69,69	70,26	70,51	71,09	71,31	71,68	72,1	75,25	75,53	76,01	76,43
Kota Tangerang Selatan	-	76,99	77,68	78,65	79,17	79,38	80,11	80,84	81,17	81,48	82,73	82,98	83,28	83,57
Provinsi Banten	**67,54**	**68,22**	**68,92**	**69,47**	**69,89**	**70,27**	**70,96**	**71,42**	**71,95**	**72,44**	**74.41**	**74.68**	**75.25**	**75.77**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.68 terlihat bahwa IPM di Kota Tangerang Selatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah, begitu pun sebaliknya. Dengan melihat indikator-indikator pembentuk IPM, terlihat bahwa semua indikator pembentuk IPM di Kota Tangerang Selatan juga paling tinggi di Provinsi Banten.

Tabel 2.69. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023

Kabupaten/ Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	11,23	11,23	12,17	12,86	13,38	13,39	13,4	13,41	13,42	13,42	13,47	13,49	13,72	13,73
Kab Lebak	10,35	10,35	10,96	11,55	11,88	11,9	11,91	11,92	11,93	11,93	11,97	11,98	12,09	12,1
Kab Tangerang	10,77	10,77	11,18	11,44	11,65	11,89	12,11	12,51	12,8	12,8	12,82	12,84	12,85	12,87
Kab Serang	10,74	10,74	11,72	12,09	12,35	12,36	12,37	12,38	12,39	12,39	12,57	12,58	12,78	12,86
Kota Tangerang	11,56	11,56	12,23	12,6	12,86	12,9	13,41	13,44	13,83	13,83	13,85	13,87	13,88	13,89
Kota Cilegon	11,78	11,78	12,18	12,67	13,07	13,1	13,11	13,12	13,13	13,13	13,16	13,18	13,2	13,21
Kota Serang	10,98	10,98	11,82	11,92	12,34	12,36	12,63	12,64	12,65	12,65	12,78	12,79	12,81	12,82
Kota Tangerang Selatan	12,08	12,08	12,79	13,24	13,58	13,61	14,08	14,39	14,42	14,42	14,47	14,66	14,67	14,68
Provinsi Banten	**11,02**	**11,02**	**11,79**	**12,05**	**12,31**	**12,35**	**12,7**	**12,78**	**12,85**	**12,85**	**12,89**	**13,02**	**13,05**	**13,09**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel 2.70. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023

Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	6,33	6,38	6,43	6,44	6,45	6,6	6,62	6,63	6,72	6,96	7,1	7,11	7,13	7,15
Kab Lebak	5,34	5,58	5,7	5,81	5,84	5,86	6,19	6,2	6,21	6,31	6,4	6,41	6,59	6,6
Kab Tangerang	7,85	7,96	8,07	8,18	8,2	8,22	8,23	8,24	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92	8,93
Kab Serang	6,07	6,31	6,57	6,65	6,69	6,9	6,98	7,17	7,18	7,33	7,5	7,51	7,78	7,79
Kota Tangerang	9,64	9,75	9,76	9,82	10,2	10,2	10,28	10,29	10,51	10,65	10,69	10,83	10,84	10,91
Kota Cilegon	8,71	8,93	9,29	9,6	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73	9,74	9,87	10,08	10,34	10,38
Kota Serang	8,32	8,39	8,48	8,56	8,58	8,59	8,6	8,61	8,62	8,67	8,76	8,89	8,9	8,91
Kota Tangerang Selatan	-	10,87	11,09	11,48	11,56	11,57	11,58	11,77	11,78	11,8	11,81	11,82	11,84	11,85
Provinsi Banten	**7,92**	**7,95**	**8,06**	**8,17**	**8,19**	**8,27**	**8,37**	**8,53**	**8,62**	**8,74**	**8,89**	**8,93**	**9,13**	**9,15**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Dari indikator pendidikan, berdasarkan Tabel 2.70 harapan lama sekolah di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2023 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 14,66 tahun sampai dengan 14,68 tahun. Hal tersebut berarti bahwa harapan masyarakat untuk bersekolah hanya mampu mencapai sekolah di akademi/perguruan tinggi di tingkat tiga (D-III). Begitupun dengan indikator rata-rata lama sekolah yang disajikan dalam Tabel 2.71., menunjukkan bahwa penduduk Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun

2020-2023) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 11,82 tahun sampai dengan 11,85 tahun. Dengan kata lain pendidikan masyarakat Kota Tangerang Selatan setara SMA kelas dua.

Dari indikator Kesehatan, berdasarkan Tabel 2.72. angka harapan hidup di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mencapai 73,11 tahun, yang menggambarkan bahwa kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup bisa mencapai usia 73 tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran untuk sehat dari masyarakat Kota Tangerang Selatan cukup tinggi, selain itu juga sarana dan prasarana kesehatan yang ada semakin memadai. Sementara itu, dari indikator pengeluaran per kapita (Tabel 2.73), semenjak dua tahun pasca pandemi, pengeluaran per kapita Masyarakat Kota Tangerang Selatan terus meningkat. Hal ini menggambarkan pemulihan ekonomi di Kota Tangerang Selatan turut berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan daya beli Masyarakat.

Tabel 2.71. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)													
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kab Pandeglang	62,26	62,46	62,66	62,83	62,91	63,51	63,77	64,04	64,24	64,49	73,1	73.22	73.63	74.01
Kab Lebak	65,49	65,63	65,74	65,83	65,88	66,28	66,43	66,59	66,79	67,04	72,93	73.04	73.43	73.80
Kab Tangerang	68,79	68,86	68,92	68,96	68,98	69,28	69,37	69,47	69,61	69,79	74,56	74.59	74.91	75.18
Kab Serang	62,56	62,75	62,9	63,03	63,09	63,59	63,81	64,02	64,22	64,47	73,7	73.81	74.22	74.62
Kota Tangerang	71,07	71,08	71,09	71,09	71,09	71,29	71,34	71,38	71,45	71,57	74,78	74.78	75.02	75.30
Kota Cilegon	65,72	65,78	65,84	65,84	65,85	66,15	66,24	66,32	66,43	66,6	74,23	74.25	74.51	74.81
Kota Serang	67,2	67,22	67,23	67,23	67,23	67,33	67,36	67,38	67,58	67,83	74,43	74.54	74.84	75.13
Kota Tangerang Selatan	72,04	72,07	72,09	72,1	72,11	72,12	72,14	72,16	72,26	72,41	75,16	75.16	75.40	75.64
Provinsi Banten	**68,5**	**68,68**	**68,86**	**69,04**	**69,13**	**69,43**	**69,46**	**69,49**	**69,64**	**69,84**	**74,12**	**74.17**	**74.46**	**74.77**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel 2.72. Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	7.335,00	7.395,00	7.426,00	7.486,00	7.589,00	7.730,00	8.138,00	8.358,00	8.613,00	8.719,00	8.572,00	8.635,00	8.827,00	9.151,00
Kab Lebak	7.779,00	7.819,00	7.859,00	7.918,00	7.977,00	8.111,00	8.308,00	8.372,00	8.634,00	8.850,00	8.690,00	8.724,00	8.854,00	9.130,00
Kab Tangerang	11.622,00	11.631,00	11.640,00	11.648,00	11.666,00	11.727,00	11.863,00	11.914,00	12.179,00	12.476,00	12.203,00	12.273,00	12.427,00	12.749,00
Kab Serang	9.668,00	9.722,00	9.777,00	9.831,00	9.886,00	10.004,00	10.317,00	10.466,00	10.693,00	10.802,00	10.665,00	10.713,00	10.916,00	11.320,00
Kota Tangerang	13.485,00	13.500,00	13.515,00	13.531,00	13.671,00	13.766,00	13.911,00	14.104,00	14.443,00	14.860,00	14.484,00	14.575,00	14.909,00	15.377,00
Kota Cilegon	11.716,00	11.784,00	11.852,00	11.920,00	12.057,00	12.127,00	12.326,00	12.562,00	12.900,00	13.230,00	13.010,00	13.041,00	13.185,00	13.663,00
Kota Serang	11.788,00	11.834,00	11.880,00	11.950,00	12.091,00	12.289,00	12.660,00	12.914,00	13.261,00	13.418,00	13.212,00	13.281,00	13.709,00	14.088,00
Kota Tangerang Selatan	-	14.037,00	14.131,00	14.207,00	14.361,00	14.588,00	14.972,00	15.291,00	15.672,00	15.988,00	15.667,00	15.751,00	15.997,00	16.225,00
Provinsi Banten	**10.777,00**	**10.933,00**	**11.008,00**	**11.061,00**	**11.150,00**	**11.261,00**	**11.469,00**	**11.659,00**	**11.994,00**	**12.267,00**	**11.964,00**	**12.033,00**	**12.216,00**	**12.601,00**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

2.2.1. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.1.1. Pembangunan Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari upaya pembangunan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki watak disiplin serta sportivitas yang tinggi. Pembangunan seni, budaya dan olahraga di Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui pembangunan prasarana, penyediaan sarana dan fasilitasi pembinaan cabang olahraga melalui KONI Daerah dan komunitas budaya serta revitalisasi objek-objek budaya. Prasarana olahraga di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.73.

Tabel 2.73. Jumlah Prasarana Olahraga di Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan		Lapangan Bola Voli	Lapangan Basket	Lapangan Tenis	Lapangan Futsal	Lapangan Bulutangkis	Kolam Renang	Lapangan Sepak Bola	SoftBall/ Baseball	Lapangan Golf	Bilyar	Fitness	Lapangan Tembak	Bowling	Panjat Tebing	Tenis Meja
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Serpong	6	8	3	7	5	11	12	0	0	7	8	1	0	1	1
2	Serpong Utara	4	6	1	14	18	7	6	1	1	1	2	2	1	1	1
3	Pondok Aren	6	8	4	15	25	7	17	0	1	1	9	0	0	0	7
4	Ciputat	7	7	1	17	10	12	14	0	0	1	7	2	0	2	1
5	Ciputat Timur	3	5	2	12	5	3	9	1	1	2	6	0	0	1	2
6	Pamulang	10	8	4	19	17	8	14	0	0	2	8	1	0	1	1
7	Setu	11	8	5	7	25	2	13	0	0	0	2	0	0	0	1
2022		**47**	**50**	**20**	**91**	**105**	**50**	**85**	**2**	**3**	**14**	**42**	**6**	**1**	**6**	**14**
2021		**44**	**46**	**18**	**85**	**105**	**47**	**82**	**2**	**2**	**11**	**36**	**6**	**1**	**3**	**14**
2020		**44**	**35**	**20**	**85**	**117**	**25**	**91**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**4**	**1**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kota Tangerang Selatan memiliki 45 jenis cabang olah raga dan organisasi yang menaunginya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74. Jenis Cabang Olah Raga Dan Organisasi Cabang Olah Raga di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No	Cabang Olah Raga	Organisasi
1	Bola Tangan	Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI)
2	Aero Sport	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)
3	Arum Jeram	Federasi Arum Jeram Indonesia (FAJI)
4	Hockey	Federasi Hockey Indonesia (FHI)
5	Karate	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI)
6	Petanque	Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI)
7	Panjat Tebing	Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)
8	Bridge	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
9	Anggar	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI)
10	Balap Motor / Mobil	Ikatan Motor Indonesia (IMI)
11	Pencak Silat	Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
12	Sepeda	Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)
13	Woodball	Indonesia Woodball Association (IWbA)
14	Tarung Derajat	Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT)
15	Muaythai	Muaythai Indonesia (MI)
16	Angkat Besi	Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI)
17	Atletik	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
18	Bola Basket	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)
19	Bola Volley	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)
20	Bowling	Persatuan Boling Indonesia (PBI)
21	Bulutangkis	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
22	Catur	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
23	Cricket	Persatuan Cricket Indonesia (PCI)
24	Drum Band	Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)
25	Gateball	Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI)
26	Golf	Persatuan Golf Indonesia (PGI)
27	Gulat	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
28	Judo	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)
29	Menembak	Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)
30	Billiard	Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)
31	Dayung	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)
32	Sepatu Roda	Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)
33	Panahan	Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)
34	Renang	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)
35	Senam	Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI)
36	Sepak Bola	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
37	Sepak Takraw	Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)
38	Squash	Persatuan Squash Indonesia (PSI)
39	Tenis Meja	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
40	Tenis Lapangan	Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI)
41	Tinju	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)
42	Kempo	Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI)
43	Baseball	Perserikatan Bisbol dan Sofbol Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI)
44	Taekwondo	Taekwondo Indonesia (TI)
45	Wushu	Wushu Indonesia (WI)

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Jumlah sarana dan prasarana seni dan budaya di Kota Tangerang Selatan disajikan pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75. Jumlah Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kota Tangerang Selatan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Jumlah
Sanggar Kesenian	21
Gedung Kesenian	0
Museum	0
Pusat Kebudayaan/Taman Budaya	1
Tahun 2022	**22**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

2.2.1.2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kesehatan suatu keluarga. IKS mencakup 12 indikator, di mana indikator tersebut dirancang untuk memberikan gambaran holistik tentang kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dua belas indikator tersebut, yaitu: (1) Keluarga mengikuti program keluarga berencana, (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, (4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkolosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN), (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Data menunjukkan bahwa IKS Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebesar 0,19. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2022 dan tahun 2023 yang mencapai 0,35 dan 0,58. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas keluarga sehat di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.76. Indeks Keluarga Sehat di Kota Tangerang Selatan

Indeks	2020	2021	2022	2023
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,19	0,26	0,35	0,58

Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 awal Oktober 2020-awal Oktober 2021; Jumlah KK sumber dari e-monev STBM

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah sebuah metode evaluasi yang mengukur mutu sebuah keluarga melalui tingkat ketenangan, kemandirian, dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Konsep ini mencerminkan peran serta fungsi keluarga di berbagai daerah di Indonesia. iBangga berfungsi sebagai petunjuk penting untuk menilai keberhasilan dalam upaya meningkatkan mutu keluarga. Penilaian iBangga membantu dalam mengelompokkan wilayah-wilayah sebagai daerah yang memiliki

keluarga tangguh, berkembang, atau rentan secara pembangunan. Menurut BKKBN 2020, nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori yaitu: (1) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, (2) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, dan (3) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Data pada Tabel 2.77 berikut menunjukkan bahwa nilai iBangga Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 yaitu 57,72, di mana masuk ke dalam kategori cukup baik (berkembang). Nilai tersebut menjadi nilai tertinggi ketiga di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Adapun pada tahun 2023, nilai iBangga Kota Tangerang Selatan meningkat hingga mencapai 64,22 dan masih termasuk ke dalam kategori cukup baik. Dalam kurun waktu dua titik tahun tersebut, nilai iBangga Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai iBanga Provinsi Banten.

Tabel 2.77. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	2022	2023
		Capaian	Capaian
1.	Kab. Pandeglang	52,20	56.39
2.	Kab. Lebak	52,88	59.22
3.	Kab. Tangerang	55,69	64.71
4.	Kab. Serang	54,12	58.31
5.	Kota Tangerang	58,04	64.25
6.	Kota Cilegon	57,91	64.19
7.	Kota Serang	56,50	64.69
8.	Kota Tangerang Selatan	57,72	64.22
Provinsi Banten		**56.98**	**62,20**

Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) Provinsi Banten 2023

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Tabel 2.78 di bawah ini menunjukkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2017

hingga 2023. Menurut data tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, nilai IPG di daerah-daerah Provinsi Banten mengalami peningkatan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2023, Kota Tangerang Selatan mencapai nilai IPG sebesar 94,23, menempatkannya sebagai peringkat kedua tertinggi setelah Kota Tangerang. Peningkatan signifikan dalam nilai IPG ini mencerminkan kemajuan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.78. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	86,13	86,47	86,68	86,71	86,83	86,93	87,09
Kab Lebak	78,56	79,26	79,63	79,81	79,87	80,20	80,75
Kab Tangerang	91,20	90,90	90,97	90,98	91,08	91,24	91,67
Kab Serang	92,28	92,18	92,40	92,14	91,98	92,32	92,49
Kota Tangerang	94,07	94,51	94,89	95,06	94,72	94,73	94,89
Kota Cilegon	86,35	86,75	87,16	87,22	87,25	87,57	88,05
Kota Serang	91,15	91,16	91,96	92,28	92,47	92,63	92,49
Kota Tangerang Selatan	92,83	93,16	93,56	93,58	93,80	93,96	94,23
Provinsi Banten	**91,14**	**91,30**	**91,67**	**91,74**	**91,83**	**92,18**	**92,48**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

2.2.1.5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan gender dalam suatu populasi. IDG juga dapat diartikan sebagai indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Data menunjukkan bahwa IDG Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 yaitu dari sebesar 68,46 kemudian menjadi 72,36 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik semakin meningkat. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	60.45	61.27	61.58	63.52	63.16	64.07	65.22
Kab Lebak	64.38	60.85	60.36	58.68	58.24	57.16	60.08
Kab Tangerang	62.43	62.25	61.54	61.53	62.17	63.35	63.84
Kab Serang	59.00	64.55	58.87	59.48	59.93	58.79	61.91
Kota Tangerang	71.67	71.76	65.19	65.03	64.86	64.09	63.02
Kota Cilegon	56.05	59.22	52.86	52.32	52.81	51.30	52.16
Kota Serang	63.81	62.65	62.10	61.26	61.66	62.39	62.98
Kota Tangerang Selatan	68.46	70.72	74.00	73.85	73.08	72.67	72.36
Provinsi Banten	**70.00**	**72.75**	**68.83**	**68.76**	**69.09**	**68.55**	**69.87**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

2.2.1.6. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan disparitas atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat atau negara. IKG menjelaskan gambaran tentang sejauh mana terdapat ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Nilai IKG berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai 0 mengindikasikan ketidaksetaraan yang minimal atau tidak ada ketimpangan antara jenis kelamin, sementara nilai 1 menunjukkan ketidaksetaraan yang maksimal. IKG penting digunakan untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender, memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mengidentifikasi area-area di mana ketidaksetaraan masih tinggi.

Kota Tangerang Selatan memiliki nilai IKG pada tahun 2018 sebesar 0,303. Secara keseluruhan hingga tahun 2023, nilai IKG Kota Tangerang Selatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan nilai positif yaitu menurunnya ketimpangan gender di Kota Tangerang Selatan. Apabila dibandingkan dengan nilai IKG di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten pada tahun 2023, Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan nilai IKG terendah.

Tabel 2.80. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	0.624	0.605	0.580	0.583	0.573	0,561
Kab Lebak	0.617	0.635	0.605	0.626	0.616	0,600
Kab Tangerang	0.477	0.499	0.486	0.457	0.433	0,402
Kab Serang	0.553	0.572	0.563	0.554	0.560	0,544
Kota Tangerang	0.266	0.342	0.279	0.311	0.324	0,284
Kota Cilegon	0.456	0.447	0.338	0.354	0.443	0,260
Kota Serang	0.546	0.549	0.508	0.521	0.544	0,530
Kota Tangerang Selatan	0.303	0.223	0.171	0.155	0.170	0,200
Provinsi Banten	**0.491**	**0.503**	**0.484**	**0.475**	**0.478**	**0,464**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 menunjukkan nilai 52,31. Berdasarkan data dari DISPORA Kota Tangerang Selatan, nilai IPP menunjukkan peningkatan secara kontinu, yaitu pada tahun 2022 yaitu mencapai 53,43 dan pada tahun 2023 mencapai 54,52. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembangunan kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.81. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
IPP Kota Tangerang Selatan	52,31	53,43	54,53

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tahun 2023

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menggambarkan kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan IPK melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Pada tahun 2022, Kota Tangerang Selatan memiliki nilai IPK mencapai 52,70. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai IPK milik Provinsi Banten, di mana mencapai 51,41 (Kemdikbud, 2024). Meskipun tidak signifikan, nilai IPK Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 52,11. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Dampak ekstrem dari penurunan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan bisa sangat beragam, mulai dari hilangnya identitas budaya, menurunnya kualitas kehidupan budaya masyarakat, hingga potensi terjadinya konflik sosial.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2018-2023, struktur ekonomi masyarakat Tangerang Selatan telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier. Pada tahun 2023, kelompok lapangan usaha primer memberikan sumbangan sebesar 0,20 persen. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 0,24 persen. Sementara kelompok lapangan usaha sekunder pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 25,38 persen, di mana nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar 25,16 persen. Kelompok lapangan usaha tersier Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 74,44 persen, jauh meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 62,91 persen.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, yaitu lapangan usaha Konstruksi, Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Kontribusi tiga lapangan usaha utama tersebut di atas terhadap PDRB masing-masing pada tahun 2023 sebesar 17,39 persen, 17,42 persen dan 16,73 persen. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2018 s.d 2023 disajikan dalam Tabel 2.82.

Tabel 2.82. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,98	8,39	7,83	7,58	7,96	7,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	15,99	16,37	15,70	17,29	17,82	17,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,22	17,16	16,50	16,21	16,73	16,73
H	Transportasi dan Pergudangan	3,35	3,39	3,18	3,41	3,50	3,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	3,02	2,87	2,84	2,87	2,93
J	Informasi dan Komunikasi	10,63	10,30	11,14	11,13	10.93	11,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	1,35	1,48	1,47	1,42	1,40
L	Real Estat	17,57	17,82	18,54	18,12	17,68	17,42
M, N	Jasa Perusahaan	3,84	3,90	3,77	3,54	3,57	3,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	1,36	1,42	1,30	1,33	1,34
P	Jasa Pendidikan	8,89	9,04	9,34	8,71	7,95	8,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	4,24	4,69	4,98	4,79	4,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,16	3,25	3,13	3,02	3,07	3,30
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 serta distribusi persentase PDRB ADHB terhadap Provinsi Banten disajikan dalam Tabel 2.83 dan Tabel 2.84.

Tabel 2.83. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten						
Pandeglang	26.183,54	27.931,12	28.371,05	29.869,92	32.076,54	34.018,06
Lebak	26.602,74	28.725,28	29.055,01	30.830,20	33.474,52	35.571,00
Tangerang	129.825,98	140.089,98	135.731,68	145.283,68	160.167,18	173.302,66
Serang	71.521,74	76.906,40	75.880,72	80.231,26	87.983,13	95.080,44
Kota						
Tangerang	161.359,63	171.732,45	143.022,76	150.156,86	182.409,19	206.597,34
Cilegon	96.909,88	103.931,06	102.731,77	110.495,00	120.746,80	129.532,42
Serang	28.980,87	31.602,58	31.666,10	33.503,98	36.723,84	39.838,19
Tangerang Selatan	75.043,78	82.769,49	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
Provinsi Banten	**613.804,41**	**661.321,34**	**625.895,38**	**665.870,30**	**747.223,58**	**814.124,34**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024
Catatan: *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Tabel 2.84. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten						
Pandeglang	4,25	4,21	4,51	4,47	4,28	4,16
Lebak	4,32	4,33	4,62	4,61	4,46	4,35
Tangerang	21,06	21,11	21,58	21,73	21,36	21,18
Serang	11,60	11,59	12,06	12,00	11,74	11,62
Kota						
Tangerang	26,18	25,88	22,74	22,46	24,33	25,25
Cilegon	15,72	15,66	16,33	16,53	16,11	15,83
Serang	4,70	4,76	5,03	5,01	4,90	4,87
Tangerang Selatan	12,17	12,47	13,12	13,17	12,82	12,76
Provinsi Banten	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024
Catatan: *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Berdasarkan data dalam Tabel 2.84 terlihat bahwa rata-rata kontribusi PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2018-2023 antara 12-13 persen. Kontribusi tertinggi tercatatkan terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,17 persen. Pada tahun 2023 kontribusi PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dibandingkan tahun 2021.

2.3.1.2. PDRB per Kapita

Besaran PDRB per kapita suatu di daerah didapat dari rasio PDRB daerah tersebut dengan jumlah penduduk yang ada. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDRB per kapita merupakan *proxy* ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

PDRB per-kapita Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.85 di bawah ini. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Tangerang Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 2.85. PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	75.043,78	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
- ADHK 2010	55.999,11	60.137,01	59.531,08	62.393,12	66.021,91	69.562,29
PDRB per kapita (Juta Rp)						
- ADHB	44,24	49,35	61,02	64,48	69,74	75,01
- ADHK 2010	33,01	35,85	44,01	45,69	47,89	49,99
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHB	4,23	8,60	22,76	3,8	4,84	4,38
Jumlah penduduk (orang)	1.696,31	1677,36	1354,35	1365,39	1378,71	1404,79
Pertumbuhan	3,13	-1,12	-19,36	0,97	0,94	1,91

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Secara absolut, baik PDRB ADHB dan ADHK pada periode 2018-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, nilai PDRB mencapai Rp 104.387,69 miliar dam PDRB ADHK 2010 mencapai Rp 69.562,29 miliar. Peningkatan juga terjadi pada PDRB per kapita pada tahun 2021–2023, baik secara nominal (ADHB) dan riil (ADHK). Hal ini menandakan perekonomian Kota Tangerang Selatan semakin membaik pasca dilanda pandemi Covid-19.

PDRB per kapita masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam rentang waktu tahun 2018-2023 menjadi urutan PDRB per kapita terbesar ketiga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Banten,

PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan masih lebih tinggi nilainya. Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota di sekitar Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa Kota Jakarta Selatan memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu mencapai Rp 354,42 juta rupiah pada tahun 2023. Adapun PDRB per kapita Kota Depok dan Kabupaten Bogor memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan PDRB Kota Tangerang Selatan. Profil PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2023 dan beserta Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, disajikan dalam Tabel 2.86 di bawah ini.

Tabel 2.86. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah Berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (juta rupiah)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	18,44	20,07	21,66	22,92	22,35	23,25	24,70	25,91
Kab. Lebak	17,57	19,01	20,53	22,10	21,03	22,01	23,62	24,81
Kab. Tangerang	31,46	33,19	35,16	37,97	41,96	44,30	48,22	51,54
Kab. Serang	41,00	44,13	47,63	51,09	46,94	48,92	52,95	56,52
Kota Tangerang	65,04	69,63	73,84	78,05	75,56	78,53	94,43	105,92
Kota Cilegon	195,73	209,06	224,69	238,20	237,12	251,42	271,35	287,53
Kota Serang	36,72	39,68	42,76	45,98	45,96	47,80	51,55	55,04
Kota Tangerang Selatan	**38,46**	**41,33**	**44,24**	**49,35**	**61,02**	**64,48**	**69,74**	**75,01**
Provinsi Banten	**42,48**	**45,28**	**48,37**	**52,01**	**52,73**	**55,38**	**61,41**	**66,15**
Kota Jakarta Selatan	219,00	239,13	260,95	283,97	289,57	299,33	327,04	354,54
Kota Depok	24,47	25,91	27,62	30,08	34,36	35,74	38,40	40,82
Kabupaten Bogor	32,98	35,15	37,54	40,39	43,59	45,39	48,19	51,38

Sumber: BPS Provinsi Banten, BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

2.3.1.3. PDRB Pengeluaran

Untuk mengetahui kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, selain menggunakan gambaran PDRB pendekatan produksi, juga dapat menggunakan gambaran PDRB pendekatan pengeluaran. Perkembangan perekonomian Kota Tangerang Selatan terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktivitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Kota Tangerang Selatan selama periode tahun 2018-2023. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), serta tingkat pertumbuhan

pada total PDRB. Pada tahun 2022, dunia global termasuk Indonesia dan Kota Tangerang Selatan khususnya sudah melewati fase dua tahun musibah pandemi Covid-19, dampaknya terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2022.

Nilai PDRB Kota Tangerang Selatan (ADHB) menurut pengeluaran selama periode tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari 75.043,78 miliar rupiah menjadi 104.387,69 miliar rupiah. Pada tahun 2020, peningkatan PDRB ADHB menurut pengeluaran sempat tertahan dikarenakan pandemi Covid 19. Gambaran PDRB ADBH menurut pengeluaran selama kurun waktu tahun 2018-2023 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.87.

Tabel 2.87. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Konsumsi Rumah Tangga	54.795,08	59.941,44	59.802,01	62.689,01	67.847,06	72.285,43
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	159,26	175,83	168,66	178,79	187,12	197,81
3. Konsumsi Pemerintah	1.274,38	1.437,29	1.293,09	1.359,04	1.417,20	1.579,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.582,77	37.549,60	38.169,27	41.357,81	45.937,28	48.343,16
5. Perubahan Inventori	50,67	44,78	7,27	1,37	11,41	-94,52
6. Ekspor	34.817,11	35.350,59	34.407,33	51.819,73	61.728,38	57.932,50
7. Impor	49.635,50	51.730,05	56.316,16	69.259,96	80.911,54	75.856,54
PDRB	**75.043,78**	**82.769,48**	**82.531,47**	**88.065,80**	**96.136,88**	**104.387,69**

Catatan: *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku (ADHB), PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga) atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Gambaran PDRB ADHK menurut pengeluaran di Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 2.88.

Tabel 2.88. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Konsumsi Rumah Tangga	42.268,28	44.538,34	43.604,23	44.920,41	46.550,78	48.243,89
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	120,15	129,02	118,86	118,57	120,52	122,42
3. Konsumsi Pemerintah	895,91	957,46	843,77	845,22	858,46	872,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.659,91	23.872,44	23.778,74	25.062,98	26.087,50	16.488,28
5. Perubahan Inventori	32,91	28,17	4,72	0,74	6,17	-54,02
6. Ekspor	28.622,53	29.307,16	29.160,87	31.331,02	33.942,14	30.781,15
7. Impor	38.600,34	38.695,57	37.980,11	39.885,82	41.543,65	36.892,25
PDRB	**55.999,11**	**60.137,01**	**59.531,08**	**62.393,12**	**66.021,91**	**69.562,29**

Catatan:*) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.88, selama kurun waktu 2018-2023 seluruh komponen pengeluaran menunjukkan peningkatan dari 55 999,11 miliar rupiah tahun 2018 menjadi 60.137,01 miliar rupiah tahun 2019, kemudian turun menjadi 59 531,08 miliar rupiah di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi sehingga meningkat kembali menjadi 62.393,12 miliar rupiah dan semakin meningkat di tahun 2023 menjadi 69.562,29 miliar rupiah.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Kontribusi setiap komponen tersebut terhadap PDRB ADHB disajikan dalam Tabel 2.89.

Tabel 2.89. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	73,02	72,42	72,46	71,09	70,48	69,53
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18
3. Konsumsi Pemerintah	1,70	1,74	1,57	1,54	1,47	1,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	44,75	45,37	46,25	46,96	47,79	38,08
5. Perubahan Inventori	0,07	0,05	0,01	0	0,01	-0,08
6. Ekspor	46,40	42,71	47,75	58,84	64,21	44,25
7. Impor	66,14	62,50	68,24	78,65	84,16	53,03
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.89 terlihat bahwa selama periode 2018-2023, PDRB Kota Tangerang Selatan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 44 s.d. 47 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 42 s.d. 64 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 62 s.d. 84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 1,47-1,74 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB masih relatif kecil. Di sisi lain, pada tahun 2018-2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “minus”. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi “defisit” atau merugi). Seperti kita ketahui bahwa Kota Tangerang Selatan adalah kota yang bergerak di sektor tersier (Perdagangan dan Jasa-jasa), sehingga barang-barang yang dikonsumsi sebagian besar berasal dari wilayah di luar kota Tangerang Selatan.

Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran juga dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen pembentuknya. Tabel 2.90 di bawah ini menunjukkan sumber pertumbuhan PDRD ADHK menurut pengeluaran. Setelah sempat berkontraksi pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-9, konsumsi rumah tangga dan komponen ekspor mencatatkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022, bahkan komponen ekspor mencatatkan peningkatan pertumbuhan tertinggi. Namun pada tahun 2023, kembali menurun hingga -4,80. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menggambarkan investasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, yaitu 1,64 (2022) dan 0,61 (2023).

Tabel 2.90. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2018-2023

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,3	4,05	-1,55	2,21	2,61	2,56
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	0,01	0,02	-0,02	0	0	0
3. Konsumsi Pemerintah	0,14	0,11	-0,19	0	0,02	0,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,84	2,17	-0,16	2,16	1,64	0,61
5. Perubahan Inventori	0,01	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	-0,09
6. Ekspor	1,4	1,22	-0,24	3,65	4,18	-4,80
7. Impor	2,22	0,17	-1,19	3,2	2,66	-7,05
PDRB	**7,49**	**7,39**	**-1,01**	**4,81**	**5,82**	**5,36**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh Rumah Tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Tangerang Selatan untuk periode 2018-2023 digambarkan dalam uraian berikut.

A. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Tabel 2.91 di bawah ini menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Tangerang Selatan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Tangerang Selatan maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 2.91. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Konsumsi Rumah Tangga	73,02	72,42	72,46	71,18	70,57	69,25
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	0,21	0,21	0,2	0,2	0,19	0,19
3. Konsumsi Pemerintah	1,7	1,74	1,57	1,54	1,47	1,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	44,75	45,37	46,25	46,96	47,78	46,31
5. Perubahan Inventori	0,07	0,05	0,01	0	0,01	-0,09
6. Ekspor	46,4	42,71	47,75	58,84	64,13	55,50
7. Impor	66,14	62,5	68,24	78,65	84,16	72,67
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Catatan: *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Pada tahun 2018–2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.92. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi Rumah Tangga. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19 di sepanjang tahun tersebut. Kemudian di tahun 2021 dan 2022 terjadi pemulihan ekonomi yang mendorong terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga. Selama periode 2018–2023 proporsi pengeluaran konsumsi

Rumah Tangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 73,02 persen (2018); 72,42 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 73,02 persen dan terendah pada tahun 2023 sebesar 69,53 persen.

Tabel 2.92. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a. ADHB (Milyar Rp)	54.795,08	59.941,44	59.802,01	62.689,01	67.847,06	72.285,42
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	42.268,28	44.538,34	43.604,23	44.920,41	46.550,77	48.243,89
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	73,02	72,42	72,46	71,09	70,48	69,53
Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp)						
a. ADHB (Milyar Rp)	32.302,55	35.735,52	44.212,69	45.902,30	49.153,96	51.456,39
b. ADHK 2013 (Milyar Rp)	24.917,81	26.552,59	32.237,51	32.892,14	33.769,98	34.342,42
Jumlah penduduk (orang)	1.696.308	1.677.363	1.352.593	1.365.688	1.378.466	1.404.785
Pertumbuhan						
Total Konsumsi Rumah Tangga	**11,39**	**5,37**	**-2,10**	**3,02**	**3,63**	**3,64**

Catatan: *) angka sementara, **) angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong masyarakat untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi per kapita. Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, secara umum setiap individu di Kota Tangerang Selatan menghabiskan dana sekitar 32,30 juta rupiah setahun (ADHB). Nilai tersebut meningkat hingga mencapai 51,46 juta rupiah setahun pada tahun 2023.

Secara umum, pertumbuhan total konsumsi rumah tangga (atas dasar harga konstan) Kota Tangerang Selatan tumbuh sebesar 11,39 persen tahun 2018. Namun sejak tahun 2019 laju konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,37 persen. Kemudian di tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda Indonesia khususnya Kota Tangerang Selatan, sehingga konsumsi rumah tangga terkontraksi -2,10 persen. Namun di tahun 2021 hingga 2023 terjadi pemulihan perekonomian sehingga mendorong konsumsi rumah tangga

masing-masing tumbuh sebesar 3,02 persen, 3,63 persen, dan 3,64 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022 (%)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,04	23,78	23,48	23,55	24,46	24,31
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,54	3,49	3,64	3,58	3,48	3,45
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,23	17,1	18,25	18,18	17,51	17,84
d. Kesehatan & Pendidikan	8,12	7,92	8,14	8,05	7,8	7,66
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	29,41	30,09	28,67	28,9	29,43	29,44
f. Hotel & Restoran	12,08	11,95	11,7	11,72	11,48	11,49
g. Lainnya	5,58	5,68	6,13	6,03	5,83	5,81
Total Konsumsi	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Secara rata-rata dari tahun 2018 s.d 2023 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kota Tangerang Selatan, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 24,04 persen (2018); 23,78 persen (2019); 23,48 persen (2020); 23,55 persen (2021); 24,46 persen (2022); dan 24,31 (2023).

B. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. Konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (LNPRT) peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, di mana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan yang tidak pernah lebih dari 1 persen selama periode tahun 2018-2023.

Tabel 2.94. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Konsumsi LNPRT						
a. ADHB (Milyar Rp)	159,26	175,83	168,66	178,79	187,12	197,81
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	120,15	129,02	118,86	118,57	120,52	122,42
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,21	0,21	0,2	0,2	0,19	0,19
Pertumbuhan (ADHK 2010)	6,37	7,38	-7,87	-1,08	2,50	1,58

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sebesar 159,26 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 175,83 miliar rupiah (2019), 168,66 miliar rupiah (2020), 178,79 miliar rupiah (2021), 187,12 miliar rupiah (2022), dan 197,81 miliar rupiah (2023). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT selama lima tahun terakhir juga berfluktuatif yaitu berturut-turut adalah 6,37 persen (2018), 7,38 persen (2019), - 7,87 persen (2020), -1,08 persen (2021), 2,50 persen (2022), dan 1,58 persen (2023). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya pemilihan Presiden Republik Indonesia.

C. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri, sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.95 di bawah ini.

Tabel 2.95. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (Milyar Rp)	1.274,38	1437,29	1.293,09	1.359,04	1.417,21	1.579,86
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	895,91	957,46	843,77	845,22	858,46	872,82
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,7	1,74	1,57	1,54	1,47	1,51
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)						

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a. ADHB (Milyar Rp)	751,27	856,87	956,01	995,13	1.028,1	1.124,62
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	528,15	570,81	623,82	618,9	622,76	621,32
Pertumbuhan						
a. Total Konsumsi Pemerintah	9,69	6,87	-11,87	0,17	1,57	1,67

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.95, terlihat bahwa Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 1,47-1,74 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB masih relatif kecil. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.274,38 miliar rupiah (2018), kemudian meningkat menjadi 1.437,29 (2019) dan turun menjadi 1.293,09 miliar rupiah pada tahun 2020. Kemudian tahun 2021 hingga 2023 kembali meningkat masing-masing menjadi 1.359,04 miliar rupiah, 1.417,21 miliar rupiah, dan 1.579,86 miliar rupiah. Untuk konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebesar 895,91 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 957,46 miliar rupiah. Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda Indonesia khususnya Kota Tangerang Selatan sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi pemerintah menjadi sebesar 843,77 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2021 hingga 2023 mulai terjadi pemulihan ekonomi di mana konsumsi pemerintah berangsur naik menjadi 872,82 miliar rupiah. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi, dari 1,70 persen (tahun 2018) dan meningkat kembali tahun 2019 yaitu menjadi 1,74 persen. Kemudian tahun 2020, 2021 dan 2022 proporsinya semakin menurun yaitu masing-masing sebesar 1,57 persen, 1,54 persen dan 1,47 persen. Namun pada tahun 2023 mulai meningkat menjadi sebesar 1,51 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktik, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 751,27 ribu rupiah, setiap tahun selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 1.124,62 ribu rupiah.

D. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang

berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik. Perkembangan dan struktur PMTB selama kurun waktu tahun 2018-2022 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.96 dan Tabel 2.97.

Tabel 2.96. Perkembangan PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total PMTB						
a. ADHB (Milyar Rp)	33.582,77	37.549,60	38.169,27	41.357,81	45.947,29	48.343,16
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	22.659,67	23.872,44	23.778,74	25.062,99	26.087,50	26.488,28
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**44,75**	**45,37**	**46,25**	**46,96**	**47,79**	**46,31**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Tabel 2.97. Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Struktur PMTB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a. Bangunan (Milyar Rp)	31.283,25	34.971,66	35.482,79	38.510,51	42.759,37	44.717,79
(%)	93,15	93,13	92,96	93,12	93,06	92,50
b. Non Bangunan (Milyar Rp)	2.299,53	2.577,94	2.686,48	2.847,30	3.187,91	3.625,38
(%)	6,85	6,87	7,04	6,88	6,94	7,50
Total PMTB	33.582,77	37.549,60	38.169,27	41.357,81	45.947,29	48.343,16
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan						
a. Bangunan	9,79	5,22	-0,48	5,43	4,03	1,04
b. Non bangunan	8,23	7,37	0,96	4,91	4,93	9,27
Total PMTB	**9,69**	**5,35**	**-0,39**	**5,40**	**4,09**	**1,56**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.97, selama periode 2018-2023 nilai PMTB mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Berdasarkan gambaran pertumbuhan, dalam kurun waktu 2018-2019 menunjukkan adanya perlambatan, yaitu dari 9,69 persen (2018) melambat menjadi 5,35 persen (2019). Kemudian di tahun 2020 nilai PMTB Kota Tangerang Selatan mengalami kontraksi sebesar -0,39 persen sebagai imbas pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 PMTB Kota Tangerang Selatan kembali tumbuh positif yaitu masing-masing sebesar 5,40 persen dan 4,09 persen. PMTB Kota Tangerang Selatan tahun 2022 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021. Sama halnya dengan PMTB Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang menurun menjadi 1,56. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap pada tahun 2018 s.d. 2022. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung melambat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan. Namun berbeda dengan tahun 2023 di mana sektor non bangunan meningkat menjadi 9,27 sedangkan sektor bangunan menurun menjadi 1,04.

E. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Apabila Perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok). Perkembangan Perubahan Inventori dalam kurun waktu tahun 2018-2023 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.98 di bawah ini.

Tabel 2.98. Perkembangan Perubahan Inventori Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Nilai Inventori						
a. ADHB (Milyar Rp)	50,67	44,78	7,27	1,37	11,41	-94,52
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	32,91	28,17	4,72	0,74	6,17	-54,02
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**0,07**	**0,05**	**0,01**	**0**	**0,01**	**-0,09**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

F. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Tangerang Selatan, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain. Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Tangerang Selatan dari luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Tangerang Selatan terhadap ekonomi atau produk wilayah lain. Perkembangan ekspor dan impor dalam kurun waktu tahun 2018-2023 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.99 dan Tabel 2.100.

Tabel 2.99. Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Nilai Ekspor						
a. ADHB (Milyar Rp)	34.817,11	35.350,59	39.407,33	51.819,73	61.728,38	57.932,50
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	28.622,53	29.307,16	29.160,87	31.331,02	33.947,14	30.781,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	46,40	42,71	47,75	58,84	64,13	55,50
Pertumbuhan	2,61	2,39	-0,50	7,44	8,33	-9,33

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Tabel 2.100. Perkembangan Impor Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Nilai Impor						
a. ADHB (Milyar Rp)	49.635,50	51.370,05	56.316,16	69.259,96	80.911,58	75.856,54
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	38.600,34	38.695,57	37.980,11	39.895,82	41.543,65	36.892,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	66,14	62,50	68,24	78,65	84,16	72,67
Pertumbuhan	3,09	0,25	-1,85	5,04	4,13	-11,20

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.99 dan Tabel 2.100 di atas, terlihat bahwa perkembangan ekspor dan impor di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara umum baik ekspor maupun impor mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2021-2022, kemudian menurun kembali pada tahun 2023.

2.3.1.4. Perbandingan PDRB terhadap Total Impor

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika rasionya kecil berarti menunjukkan ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya. Gambaran rasio PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap impor disajikan dalam Tabel 2.101.

Tabel 2.101. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHB) (Milyar Rp)	75.043,78	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
Total Impor (ADHB) (Milyar Rp)	49.635,50	51.730,05	56.316,16	69.259,96	80.911,58	75.856,54
Rasio PDRB terhadap Impor	1,51	1,60	1,47	1,27	1,19	1,38

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.101, rasio PDRB terhadap impor pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 1,51 dan 1,60. Sementara sejak periode tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan tren menurun dari 1,47 (2020), 1,27 (2021) dan 1,19 (2022). Namun pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 1,38. Rasio PDRB terhadap impor Kota Tangerang Selatan terlihat masih relatif kecil yang menunjukkan ketergantungan perekonomian Kota Tangerang Selatan kepada impor masih cukup tinggi. Hal

ini merupakan tantangan untuk menurunkan ketergantungan impor melalui peningkatan sektor perdagangan pada wilayah domestik untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga penduduk Kota Tangerang Selatan. Kebutuhan peningkatan sektor perdagangan pada wilayah domestik dapat menjadi peluang pasar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

2.3.1.5. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2018 - 2023, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Tangerang Selatan dengan provinsi lain dan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Tangerang Selatan selalu dalam posisi defisit. Nilai total impor yang lebih besar dari total ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Kondisi ini tentu saja sangat mempengaruhi kekuatan ekonomi Kota Tangerang Selatan jika tidak segera diantisipasi. Gambaran neraca perdagangan barang dan jasa Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 2.102 di bawah ini.

Tabel 2.102. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Ekspor (ADHB) (Milyar Rp)	34.817,11	35.350,59	39.407,33	51.819,73	61.728,38	57.932,50
Total Impor (ADHB) (Milyar Rp)	49.635,50	51.730,05	56.316,16	69.259,96	80.911,58	75.856,54
Net ekspor (X-M) (Milyar Rp)	-14.818,38	-16.379,46	-16.908,82	-17.440,23	-19.183,21	-17.924,04
Rasio ekspor terhadap Impor	0,70	0,68	0,70	0,75	0,76	0,76

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.3.1.6. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu wilayah, sektor, atau populasi tertentu. Rasio ini membantu dalam memahami tingkat kegiatan kewirausahaan dan dampaknya terhadap perekonomian. Perhitungan mengenai rasio kewirausahaan diperoleh dari jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama pekerja yang berusaha dibantu

buruh tetap/buruh dibayar dibandingkan dengan angkatan kerja. Hasil menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 menunjukkan nilai 2,42. Nilai rasio kewirausahaan di Kota Tangerang Selatan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan mencapai 3,09. Kemudian nilai tersebut menurun lagi pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh jumlah pekerja yang berusaha dan dibantu karyawan tetap menunjukkan angka pada tahun 2021 yang menurun dibanding tahun 2020. Namun pada tahun 2022, rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan kembali meningkat hingga mencapai 3,69 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan penduduk Kota Tangerang Selatan yang berwirausaha. Selain itu, tingginya rasio kewirausahaan mencerminkan hal positif dalam pembangunan ekonomi karena menunjukkan pertumbuhan sektor bisnis dan potensi untuk menciptakan lapangan kerja serta inovasi. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103. Rasio Kewirausahaan Kota Tangerang Selatan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pekerja yang Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	18.828	24.345	22.639	24.402	17.585	24.268	24.094
Jumlah Angkatan Kerja	776.658	788.305	832.423	852.435	817.237	817.237	652.575
Rasio Kewirausahaan	**2,42**	**3,09**	**2,72**	**2,86**	**2,15**	**2,97**	**3,69**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan; BPS Provinsi Banten Tahun 2024

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, cukup banyak permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian, diantisipasi dan diselesaikan oleh Pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain adalah tingginya tingkat pengangguran, sedikitnya penciptaan lapangan kerja, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya. Bidang ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.

Konsep ketenagakerjaan yang mengacu pada data dan informasi dari BPS merujuk kepada *The Labor Force Concept*, yang menjadi rekomendasi dari *International Labour Organization* (*ILO*). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu

bekerja dan mencari pekerjaan (pengangguran). Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja, yang tergolong sebagai angkatan kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur keterlibatan aktif penduduk dalam kegiatan ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2010-2023 disajikan dalam Tabel 2.104 di bawah ini.

Tabel 2.104. TPAK Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
2010	60
2011	69,64
2012	64,9
2013	60,73
2014	63,04
2015	59,12
2016	-
2017	57,02
2018	61,92
2019	60,57
2020	62,49
2021	62,56
2022	58,67
2023	60,50

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.104, terlihat bahwa TPAK periode Agustus 2023 sebesar 60,50 persen, berarti ada sekitar 60 orang dari 100 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atau berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Adapun sisanya, bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, dapat dilihat melalui tingkat pengangguran terbuka (TPT). Bagian yang tidak terserap oleh pasar ini selanjutnya disebut sebagai penganggur, yang timbul karena suplai tenaga kerja jauh melebihi permintaannya. pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

2.3.2.2. Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan pendekatan jumlah jam kerja. Penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan asumsi

bahwa semakin lama jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja, akan semakin banyak jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, pekerjanya akan semakin produktif. Berdasarkan lama jam kerja, penduduk yang bekerja dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu sementara tidak bekerja, pekerja penuh, setengah penganggur, dan pekerja paruh waktu. Adapun yang dimaksud sementara tidak bekerja adalah pekerja yang memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja. Sementara pekerja penuh ialah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, dengan jumlah jam kerja minimal 35 jam. Setengah menganggur dan pekerja paruh waktu, pada prinsipnya adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, namun memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam. Hanya saja, setengah menganggur masih berusaha mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Sebaliknya pekerja paruh waktu, tidak lagi mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2022 disajikan dalam Tabel 2.105.

Tabel 2.105. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja Agustus Tahun 2021-2022

Kategori Pekerja	2021			2022		
	L	P	Total	L	P	Total
Pekerja Penuh	68,45	57,24	64,23	75,9	61,53	70,75
Setengah Penganggur	4,59	6,35	5,26	4,44	3,79	4,2
Pekerja Paruh Waktu	17,67	26,79	21,11	12,28	25,33	16,96
Pengangguran Terbuka	9,28	9,62	9,41	7,39	9,35	8,09

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Banten, BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.105, Terlihat bahwa persentase pekerja berkategori pekerja penuh meningkat dari 64,23 persen menjadi 70,75 persen pada Agustus 2022. Selanjutnya, dengan mengasumsikan tingkat produktivitas bergantung kepada lamanya jam kerja, dapat dikatakan bahwa produktivitas pekerja di Kota Tangerang Selatan secara umum telah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya persentase pekerja penuh. Diamati menurut jenis kelamin, pekerja berkategori paruh waktu banyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini dapat dipahami, mengingat sebagian besar perempuan yang bekerja mempunyai peran ganda yaitu juga mengasuh anak, sehingga mereka akan memilih pekerjaan yang tidak terlalu mengikat secara waktu.

Selain berdasarkan jam kerja, untuk mengukur kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja berdasarkan status pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat diasumsikan semakin tinggi kualitasnya. Tabel 2.106 memperlihatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja tahun 2019-2023 di Kota Tangerang Selatan. Terlihat bahwa angkatan kerja dengan pendidikan sarjana mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa angkatan kerja yang memiliki keahlian mengalami peningkatan. Patut dicermati hal menarik terkait data penduduk

bukan angkatan kerja berpendidikan sarjana pada tahun 2022 yang mencapai hampir 50% dari angkatan kerja yang bekerja. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penduduk tersebut masih meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak buru-buru bekerja. Kondisi ini dapat menggambarkan adanya kesadaran penduduk usia kerja untuk menempuh pendidikan hingga jenjang keahlian tertinggi sebelum memutuskan untuk bekerja.

Tabel 2.106. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan 2019-2023

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2022			2023		
		Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran	
1	Sampai dengan SD	118.119	2.760	114.082	114.462	3.418	108.015	92.593	445	85.535	93.036	1.548	75.989
2	Sekolah Menengah Pertama	96.991	966	114.587	108.308	5.729	117.036	85.359	4.559	127.447	75.522	3.698	105.133
3	Sekolah Menengah Atas	356.838	22.571	220.960	338.615	41.556	203.807	292.521	35.582	234.170	266.556	22.416	176.786
4	Perguruan Tinggi	203.809	12.692	63.158	200.266	19.869	70.710	292.932	13.246	128.546	179.516	10.283	68.131

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Banten, BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

2.3.2.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pekerjaan utama merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi suatu lapangan usaha dalam penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran lapangan usaha mana saja yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Dengan demikian, untuk menerapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, dapat fokus kepada lapangan-lapangan usaha tertentu, sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pekerjaan utama di Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2022 disajikan dalam Tabel 2.107 di bawah ini.

Tabel 2.107. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Agustus Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
Industri Pengolahan	6,54	7,19	23,04
Konstruksi	6,89	7,21	5,95
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi/ Perawatan Mobil-Sepeda Motor	26,44	25,06	20,88
Transportasi dan Perdagangan	10,37	9,22	6,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,33	9,91	7,77
Informasi dan Komunikasi	3,99	3,40	1,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,52	7,32	1,96
Real estate	2,74	2,07	1,19
Jasa Perusahaan	5,90	7,52	3,55
Administrasi pemerintahan	1,96	2,61	2,38
Jasa Pendidikan	6,51	5,58	4,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,10	2,72	1,57
Jasa Lainnya	11,75	8,83	5,57
Lapangan usaha lainnya	1,96	1,38	13,27
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.107, lima lapangan usaha yang sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022, yaitu sektor lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar-eceran dan reparasi/perawatan mobil-sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan, serta lapangan usaha lainnya. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan pada tahun 2023 yang signifikan menggambarkan bahwa adanya tenaga kerja lokal yang terserap pada sektor sekunder di luar wilayah Kota Tangerang Selatan.

Selain berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja juga bisa diamati menurut status pekerjaan utamanya. Status pekerjaan utama ini,

selanjutnya digunakan sebagai pendekatan untuk menyusun dua kelompok kegiatan ekonomi, yakni formal dan informal. Kegiatan ekonomi formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Adapun sisanya, digolongkan ke dalam kegiatan informal. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin dalam kurun waktu tahun 2022-2023 disajikan dalam Tabel 2.108.

Tabel 2.108. Persentase Penduduk Kota Tangerang Selatan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Agustus Tahun 2022-2023

Status Pekerjaan Utama	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Formal						
Buruh/Karyawan/ Pegawai	52,72	44,61	49,85	66,43	66,75	66,54
Berusaha dibantu buruh tetap	2,79	1,10	2,19	4,57	2,69	3,92
Informal						
Berusaha sendiri	21,04	23,56	21,93	20,40	21,49	20,78
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	7,98	7,12	7,68	2,86	2,18	2,63
Pekerja Bebas Pertanian/ Non Pertanian	12,54	6,42	10,38	4,33	1,31	3,29
Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	2,93	17,18	7,97	1,41	5,58	2,85

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.108, terlihat bahwa mayoritas pekerja di Kota Tangerang Selatan bekerja pada sektor ekonomi formal. Terutama yang berstatus Buruh/Karyawan/Pegawai. Pada tahun 2023 persentase pekerja yang bekerja di sektor formal mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2022. Kondisi yang demikian menjadi penanda bagi meningkatnya sektor ekonomi formal. Meningkatnya sektor ekonomi formal, terlebih pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai, hal ini disebabkan oleh mulai naiknya kegiatan atau kinerja usaha industri pengolahan, yang ditandai oleh meningkatnya persentase pekerja pada lapangan usaha tersebut. Sebaliknya, sektor ekonomi informal justru mengalami sedikit penurunan. Namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Di sektor informal, pekerja bebas mengalami penurunan jumlah. Hal ini dimungkinkan karena semakin membaiknya perekonomian, sehingga pekerja yang sebelumnya sebagai pekerja bebas, sekarang bisa bekerja di tempat yang lebih layak dan tidak menjadi pekerja bebas lagi.

2.3.2.4. Angka Beban Ketergantungan dan Bonus Demografi

Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator kependudukan yang penting, karena dapat menggambarkan dampak dari keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Semakin besar angkanya, menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun), dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Sebaliknya bila semakin kecil, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan terlihat didominasi oleh penduduk usia produktif. Bahkan, persentasenya juga terus meningkat hingga menjadi 71,40 persen pada tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.109. Dengan demikian, Kota Tangerang Selatan memiliki penduduk usia produktif yang cukup banyak dan sangat potensial untuk digunakan sebagai modal dasar dalam membangun daerahnya.

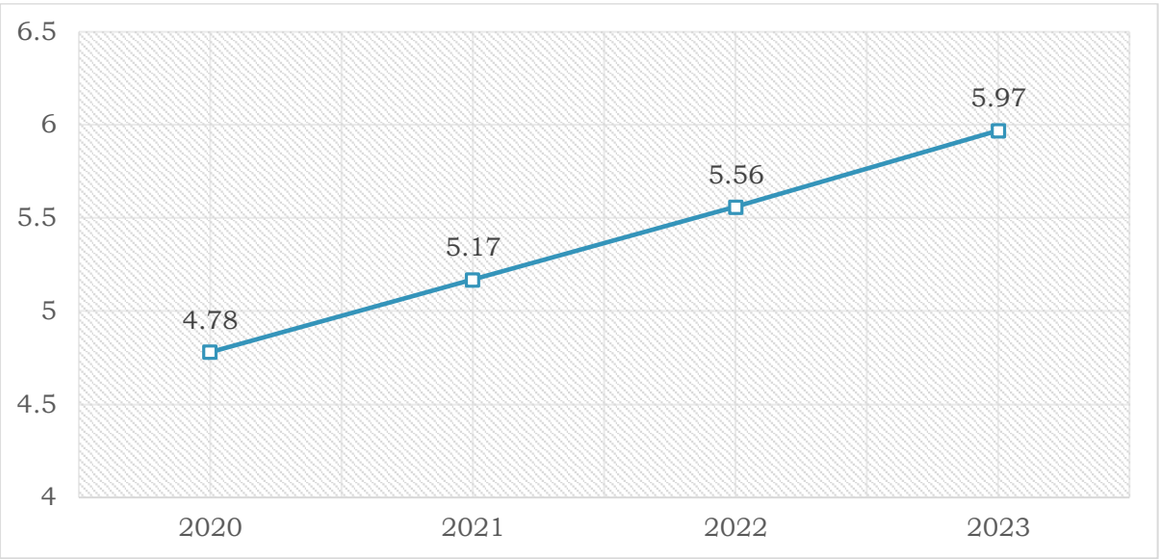
Tabel 2.109. Komposisi Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2020-2023

Tahun	Komposisi Penduduk (Persen)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14 Tahun	15-64 tahun	65 Tahun ke Atas	
2020	24,04	71,18	4,78	40,49
2021	23,56	71,27	5,17	40,32
2022	23,10	71,34	5,56	40,17
2023	22,51	71,90	5,60	39,10

Sementara itu persentase penduduk usia 0-14 tahun dapat dikatakan cukup tinggi, walaupun besarannya terus menurun. Penurunannya juga dapat menjadi penanda bagi keberhasilan dari upaya pengendalian kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun meningkatnya persentase penduduk usia 65 tahun ke atas, menjadi salah satu bukti adanya perbaikan dalam bidang kesehatan, sehingga penduduk dapat hidup lebih lama. Adanya perubahan komposisi penduduk di atas, jelas sangat mempengaruhi besarnya angka beban ketergantungan. Pada tahun 2020, angka beban ketergantungan Kota Tangerang Selatan sebesar 40,49. Berarti, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 40 sampai 41 orang penduduk usia tidak produktif. Sementara pada tahun 2023, beban yang ditanggung sedikit mengalami penurunan, sehingga yang ditanggung sekitar 39 sampai 40 orang penduduk usia tidak produktif. Melihat besaran angka beban ketergantungan yang kurang dari 50 ini, dapat dikatakan bahwa Kota Tangerang Selatan sudah mengalami bonus demografi (*demographic dividend*). Bahkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk, bonus demografi sudah diraih sejak tahun 2016. Menurut BPS, bonus demografi tersebut juga masih akan dinikmati, setidaknya hingga tahun 2035. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Hal ini karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut masih belum

banyak. Bonus demografi mulai dinikmati bila angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan hingga menjadi di bawah 50. Walaupun sudah lama meraihnya, namun bonus demografi belum tentu bermanfaat bagi Kota Tangerang Selatan. Untuk benar-benar bisa menikmatinya, kualitas sumber daya manusia Kota Tangerang Selatan harus terus-menerus ditingkatkan. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja juga mesti ditambah, agar dapat menampung banyaknya penduduk usia produktif.

Setelah bonus demografi, penuaan penduduk (*aging population*) sepertinya akan menjadi isu penting pada masa-masa mendatang. Penuaan penduduk adalah suatu fenomena demografi, yang akan terjadi ketika umur median penduduk meningkat akibat naiknya angka harapan hidup dan atau menurunnya tingkat fertilitas. Penuaan penduduk salah satunya dapat diukur melalui proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas. Disebut mengalami penuaan, apabila persentasenya sudah di atas 7 persen. Bila bonus demografi benar-benar berhasil dinikmati, Kota Tangerang Selatan akan mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua ini adalah suatu kondisi, di mana proporsi penduduk yang berusia tua semakin banyak namun masih produktif, sehingga tetap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. Perkembangan Penduduk Kota Tangerang Selatan Usia 65 Tahun ke Atas pada Tahun 2020-2023 disajikan dalam Gambar 2.43.



Gambar 2.43. Perkembangan Penduduk Kota Tangerang Selatan Usia 65 Tahun ke Atas Tahun 2020-2023

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

2.3.2.5. Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi

Kemampuan literasi dicerminkan oleh angka persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Berdasarkan jenjang pendidikannya, kemampuan literasi para peserta didik di Kota Tangerang Selatan menunjukkan nilai di atas 70% pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Angka terendah dimiliki oleh kemampuan literasi peserta

SD pada tahun 2022 yaitu sebesar 73,36%. Namun nilai tersebut meningkat menjadi 84,04% pada tahun 2024.

Selain kemampuan literasi, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu indikator penilaian para peserta didik di Kota Tangerang Selatan. Kemampuan numerasi dapat diartikan sebagai angka persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Angka kemampuan numerasi peserta didik di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA menunjukkan nilai pada rentang 46,41% hingga 88,14%.

Tabel 2.110. Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Peserta Didik di Kota Tangerang Selatan

Kemampuan Literasi	2022	2023	2024
SMA	85,95%	85,44%	92,98%
SMP	78,27%	83,84%	87,13%
SD	73,36%	78,29%	84,04%
Kemampuan Numerasi	**2022**	**2023**	**2024**
SMA	61,76%	74,99%	88,14%
SMP	54,52%	63,23%	81,97%
SD	46,41%	62,99%	75,70%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 2024

2.3.2.6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat (Perpusnas, 2023). Dengan menggunakan IPLM, pemerintah dan organisasi dapat memantau perkembangan literasi masyarakat dari waktu ke waktu, mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan, dan merancang kebijakan pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan tingkat literasi secara keseluruhan.

Perhitungan IPLM dipengaruhi oleh jumlah Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) di kabupaten/kota, seperti jumlah perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan, jumlah tenaga perpustakaan, jumlah kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, jumlah keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. Berdasarkan hasil perhitungan IPLM, diapatkan nilai IPLM Kota Tangerang Selatan tahun 2021 sebesar 67,01 %. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 79,31 atau skor 16,43. Rincian nilai IPLM dan UPLM disajikan pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111. IPLM Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)		
2021	**2022**	**2023**
67,01	73,07	79,31

Sumber: : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2022; Kajian IPLM Kota Tangerang Selatan tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat perubahan rumus IPLM kabupaten/kota sehingga nilai IPLM Kota Tangerang Selatan terkoreksi menjadi 54,69.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Infrastruktur Transportasi

Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari kawasan Jabodetabekjur dan daerah penghubung antara Provinsi Jakarta dengan Provinsi Banten memiliki prasarana transportasi yang cukup lengkap. Kota Tangerang Selatan dilalui oleh jaringan tol JORR 2 (segmen Kunciran-Serpong dan segmen Serpong-Cinere) dan tol Serpong-Balaraja. Kota Tangerang Selatan memiliki 5 (lima) stasiun Kereta Api yang melayani angkutan komuter ke/dari Jakarta, 1 (satu) terminal bus tipe A Pondok Cabe, 2 (dua) terminal bus tipe C di BSD, dan Bandar Udara Pondok Cabe.

Stasiun Kereta Api yang ada di Kota Tangerang Selatan melayani jalur Tanah Abang-Serpong-Maja, terdiri atas:

1. Stasiun Rawa Buntu di Kecamatan Serpong;
2. Stasiun Serpong di Kecamatan Serpong;
3. Stasiun Sudimara di Kecamatan Ciputat;
4. Stasiun Jurangmangu di Kecamatan Ciputat;
5. Stasiun Pondok Ranji di Kecamatan Ciputat Timur.

Sistem Jaringan Jalan Nasional yang ada di Kota Tangerang Selatan, yaitu:

1. Jalan Dewi Sartika;
2. Jalan Ir.H. Djuanda;
3. Jalan Moh. Toha;
4. Jalan Otto Iskandar Dinata;
5. Jalan Rambutan;
6. Jalan RE Martadinata

Adapun sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kota Tangerang Selatan, yaitu:

1. Jalan Aria Putra;
2. Jalan BSD Grand Boulevard;
3. Jalan Ceger Raya;
4. Jalan Cirendeu Raya;
5. Jalan Cisauk;
6. Jalan Dr. Setiabudi;
7. Jalan H. Amir Machmud;
8. Jalan Haji Usman;

9. Jalan Jombang Raya;
10. Jalan Lingkar Selatan;
11. Jalan Otto Iskandar Dinata;
12. Jalan Pahlawan Seribu;
13. Jalan Pajajaran;
14. Jalan Pondok Betung Raya;
15. Jalan Pondok Cabe Raya;
16. Jalan Raden Fatah
17. Jalan Raya Pondok Aren
18. Jalan Raya Puspiptek
19. Jalan Raya Serpong
20. Jalan Siliwangi
21. Jalan Surya Kencana, dan
22. Jalan Sarimulya.

Panjang jalan yang ada di Kota Tangerang Selatan seluruhnya adalah 446,11 km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut dapat dibedakan sesuai dengan tingkat kewenangan pemerintah, dan kondisi permukaan jalan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.112 dan Tabel 2.113 di bawah ini. Berdasarkan tingkat kewenangan, sebagian besar jalan yang ada di Kota Tangerang Selatan merupakan jalan kewenangan kota. Sementara itu, berdasarkan kondisi jalan terlihat bahwa sebagian besar jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan dalam kondisi baik.

Tabel 2.112. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
Negara	9,81	9,81	9,81	10,68	10,68
Provinsi	51,613	51,613	51,613	51,613	46,540
Kabupaten/Kota	384,688	384,688	384,688	384,688	384,688
Jumlah	**446,111**	**446,111**	**446,111**	**446,980**	**441,910**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Tabel 2.113. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Tangerang Selatan (km)

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	376,85	374,36	347,55	300,29	117,13
Sedang	5,45	5,86	32,99	60,82	258,11
Rusak	1,25	3,77	2,29	15,67	9,04
Rusak Berat	1,14	0,7	1,86	7,92	0,41
Jumlah	**384,69**	**384,69**	**384,69**	**384,69**	**384,69**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.3.3.2. Infrastruktur Utilitas Kelistrikan

Jaringan infrastruktur kelistrikan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari jaringan transmisi SUTET dan transmisi SUTT yang melewati seluruh wilayah di Kota Tangerang Selatan, sehingga sumber penerangan utama di Kota Tangerang Selatan berasal listrik. Data persentase rumah tangga menurut sumber penerangan yang digunakan di Kota Tangerang Selatan

disajikan dalam Tabel 2.114. Pada tabel tersebut terlihat bahwa semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah menikmati fasilitas penerangan listrik. Sebanyak 99,87 persen rumah tangga di Kota Tangerang Selatan menggunakan listrik PLN, 0,13 persen menggunakan listrik non PLN.

Tabel 2.114. Persentase rumah tangga menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Tangerang Selatan

Sumber Penerangan	2021	2022	2023
Listrik PLN	99,59	100	99,87
Listrik Non PLN	0,41	0	0,13
Bukan Listrik	0	0	0
Jumlah	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2021-2023

2.3.3.3. Infrastruktur Utilitas Air Minum

Sistem penyediaan air minum di Kota Tangerang Selatan dilayani melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan. Adapun untuk unit pelayanan air minum di Kota Tangerang Selatan dibagi atas 4 (empat) zona yaitu:

1. Zona I meliputi Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara
2. Zona II meliputi Kecamatan Pondok Aren
3. Zona III meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Pamulang; dan
4. Zona IV meliputi Kecamatan Setu.

Sumber air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan air ledeng. Termasuk juga air minum bersih adalah air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, yang jarak ke tempat penampungan kotoran tinja minimal 10 meter. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan sumber air minum bersih. Jika dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini, pada tahun 2021-2023 sumber air minum yang berasal dari air kemasan bermerek atau air isi ulang merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum air kemasan, air isi ulang mencapai 53,08 persen. Sisanya sebanyak 43,50 persen menggunakan sumur bor/pompa, 1,79 persen menggunakan air leding, dan 1,63 persen dari air sumur terlindung, sumur tak terlindung sebagai sumber air minum. Sumber air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Tangerang Selatan berasal dari Sungai Cisadane dan Sungai Angke.

Tabel 2.115. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Untuk minum di Kota Tangerang Selatan

Fasilitas Air Minum Utama	2021	2022	2023
Air kemasan bermerk, air isi ulang	49,11	51,05	53,08
Ledeng	1,75	0,57	1,79
Sumur Bor/pompa	48,17	48	43,5
Sumur Terlindung, sumurtak terlindung	0,89	0,27	1,63
Mata Air terlindung, mata air tak terlindung	0,09	0,1	0
Air Permukaan, Air hujan, lainnya	0	0	0
Jumlah	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2021-2023

2.3.3.4. Restoran

Restoran merupakan salah satu fasilitas penunjang dalam meningkatkan daya saing daerah. Jumlah restoran di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah restoran sebesar 202 restoran. Tahun 2018, 2019, dan 2020 jumlah restoran mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 314, 383, dan 580 restoran. Pada tahun 2021, jumlah restoran di Kota Tangerang Selatan berjumlah 580 restoran. Jumlah restoran terbanyak pada tahun 2021 berada di Kecamatan Pamulang dengan jumlah 198 restoran. Restoran yang jumlahnya paling sedikit berada di Kecamatan Serpong Utara dengan jumlah 9 restoran.

Tabel 2.116. Jumlah Restoran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Setu	3	4	93	131	131
2	Serpong	60	78	85	141	141
3	Pamulang	35	51	132	198	198
4	Ciputat	16	7	7	19	19
5	Ciputat Timur	3	24	25	36	36
6	Pondok Aren	35	102	36	46	46
7	Serpong Utara	50	48	5	9	9
Kota Tangerang Selatan		**202**	**314**	**383**	**580**	**580**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2021

2.3.3.5. Hotel

Salah satu potensi basis ekonomi Kota Tangerang Selatan berdasarkan lapangan usaha adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sub sektor ini berkaitan dengan kontribusi Perhotelan dan pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Jumlah hotel di Kota Tangerang Selatan ini dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117. Jenis dan Jumlah Hotel di Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Hotel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel berbintang	16	18	19	22	25
2	Hotel non bintang	11	14	16	12	10
Total		**27**	**32**	**35**	**34**	**35**

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Provinsi Banten 2019-2022

Rata-rata selama kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah hotel di Kota Tangerang Selatan meningkat. Peningkatan jumlah tersebut terutama disebabkan karena peningkatan jumlah hotel berbintang. Perhotelan di Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat mendukung rencana pengembangan sektor MICE.

2.3.3.6. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. IKLI berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan pandangan masyarakat yang objektif, komprehensif, dan dapat dipercaya, baik dari segi pembangunan fisik maupun manfaat yang dihasilkan. Data menunjukkan bahwa IKLI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 sebesar 6, kemudian meningkat hingga tahun 2020 mencapai 9,08. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan IKLI menjadi 5. Nilai tersebut meningkat kembali hingga 5,75 pada tahun 2022 dan 7,03 pada tahun 2023. Tren fluktuatif tersebut mencerminkan adanya pengaruh pandemi pada tahun 2021 yang menyebabkan turunnya nilai IKLI. Namun secara berangsur mulai meningkat kembali pada tahun berikutnya.

Tabel 2.118. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	6	6	6,25	9	9,08	5	5,75	7,03

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

2.3.3.7. Indeks Kota Layak Huni

Indeks Kota Layak Huni merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan huni suatu kota atau wilayah. Indeks ini mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan ketersediaan layanan dasar di dalam kota. Nilai IKLH terbagi atas 5 kelompok yaitu:

a) Nilai indeks 81-100 = sangat baik
b) Nilai indeks 61-80 = baik
c) Nilai indeks 41-60 = cukup
d) Nilai indeks 21-40 = buruk
e) Nilai indeks 0-20 = sangat buruk

Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 68,38 di mana masuk ke dalam kategori baik. Pada tahun 2022, nilai Indeks Kota Layak Huni meningkat menjadi 68,84 (baik). Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023, yaitu mencapai 69,50 (baik).

Tabel 2.119. Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

IKLH	2021	2022	2023
Kota Tangerang Selatan	68,38	68,84	69,50

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Iklim Investasi

Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah, dapat digunakan parameter *Incremental Capital Output Ratio* (*ICOR*). *ICOR* menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. *ICOR* juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”. Dengan menggunakan rasio ini, maka *ICOR* mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit.

Nilai *ICOR* yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik adalah antara 3–4. Semakin tinggi *ICOR* mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya inefesiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, *ICOR* yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal (Imelda, 2015)

Tabel 2.120 di bawah ini menggambarkan nilai *ICOR* Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2023. setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 di mana sektor investasi tertahan, pada tahun 2021 dan 2022 Kota Tangerang Selatan mengalami pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 ICOR Kota Tangerang Selatan sebesar 7,19, artinya setiap peningkatan *output* sebesar 1 miliar rupiah diperlukan penambahan kapital sebesar 7,19 miliar rupiah. Walaupun nilai *ICOR* Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2021, namun nilai *ICOR* Kota Tangerang Selatan yang lebih besar dari 4 sejak tahun 2018 menggambarkan bahwa penciptaan investasi di Kota Tangerang Selatan belum efisien. Tingginya nilai *ICOR* pada tahun 2021-2022 dibandingkan tahun 2018-2019 menggambarkan bahwa penciptaan investasi di Kota Tangerang Selatan pasca pandemi Covid-19 masih belum kembali ke kondisi

semula sebelum adanya pandemi. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai *ICOR* menjadi sebesar 4,66. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120. *Incremental Capital Output Ratio* (*ICOR*), Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHK) (Milyar Rp)	55.999,11	60.137,01	59.531,08	62.393,12	66.021,91	69.562,29
Perubahan (Milyar Rp)	3.900,55	4.137,91	-605,94	2.862,04	3.628,79	3.540,38
PMTB (ADHK 2010) (Milyar Rp)	22.659,67	23.872,44	23.778,74	25.062,99	26.087,50	16.488,28
ICOR 2018-2023	5,81	5,77	-39,24	8,76	7,19	4,66

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Realisasi investasi dalam kurun waktu tahun 2018-2023 di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuatif, yaitu:

1. Tahun 2018, total investasi sebesar Rp. 2.906.424.200.000,00, dengan komposisi investasi modal asing (PMA) sebesar Rp. 682.924.720.000,00 dan investasi modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 2.223.499.480.000,00;
2. Tahun 2019, total investasi sebesar Rp. 2.210.024.910.741,00, dengan komposisi investasi modal asing (PMA) sebesar Rp. 690.332.410.741,00 dan investasi modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 1.519.692.500.000,00;
3. Tahun 2020, total investasi sebesar Rp. 3.933.532.793.777,00, dengan komposisi investasi modal asing (PMA) sebesar Rp. 685.355.687.529,00 dan investasi modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 3.248.177.106.248,00;
4. Tahun 2021, total investasi sebesar Rp. 5.677.731.619.419,00, dengan komposisi investasi modal asing (PMA) sebesar Rp. 1.462.211.319.419,00 dan investasi modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 4.215.520.300.000,00;
5. Tahun 2022, total investasi sebesar Rp. 4.658.090.895.958,00, dengan komposisi investasi modal asing (PMA) sebesar Rp. 999.360.629.294,00 dan investasi modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 3.658.730.266.664,00; dan
6. Tahun 2023, total investasi sebesar Rp. 7.449.142.644.164,00, dengan komposisi investasi modal asing (PMA) sebesar Rp. 1.223.818.044.164,00 dan investasi modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 6.225.324.600.000,00.

Memperbaiki iklim investasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak *input* ke dalam proses produksi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Upaya kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memperbaiki iklim investasi, antara lain:

1. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik terintegrasi;
2. Penerapan sistem *Online Single Submission* (*OSS*) sebagai upaya perbaikan perijinan berusaha untuk memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi;
3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan mengintegrasikannya dengan sistem *OSS* sebagai instrumen kepastian pemanfaatan ruang untuk investasi;
4. Pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan regulasi perpajakan sesuai kewenangan;
5. Penyelenggaraan SPBE untuk pelayanan publik;
6. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur

2.3.4.2. Situasi Politik, Ketentraman dan Ketertiban Daerah

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom ke-8 di Provinsi Banten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2008. Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang**.** Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan Pilkada serentak sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2020. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.121 dan

Tabel 2.122.

Tabel 2.121. Data Daftar Pemilih Tetap Kota Tangerang Selatan

No.	Tahun	Total DPT
1.	2014	959.106
2.	2015	914.312
3.	2019	948.571
4.	2020	976.019

Sumber: KPUD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2020

Tabel 2.122. Ringkasan hasil pemilihan umum Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Calon	Pasangan	Koalisi	Suara	%
Muhammad	Rahayu Saraswati	Koalisi Tangsel Untuk Semua	205.309	35,66
Siti Nur Azizah	Ruhamben	Koalisi Rakyat	134.682	23,39
Benyamin Davnie	Pilar Saga Ichsan		235.734	40,94
Total			**575.725**	**100,0**
Suara sah			575.725	96,8
Suara tidak sah			18.986	3,19
Pemilih pengguna hak pilih			594.711	60,29
Pemilih golput			400.311	41,01
Pemilih terdaftar			976.019	

Sumber: KPUD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2020

Daftar Pemilih Tetap atau DPT merupakan data yang menggambarkan jumlah masyarakat yang memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan DPT sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.121, terlihat bahwa jumlah DPT pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun 2014, 2015, dan 2019. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2020 sebesar 60,29 persen dan tingkat pemilih golput sebesar 41,01 persen. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan menggunakan hak pilihnya lebih besar dari 50 persen dan lebih besar dari tahun 2015 yang mencatatkan kehadiran pemilih sebesar 57,98 persen, namun tingkat pemilih golput yang masih cukup tinggi perlu mendapatkan perhatian untuk Pilkada serentak berikutnya karena tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat menjadi tolok ukur seberapa jauh iklim demokrasi sudah diterapkan.

Dalam hal keterlibatan perempuan dalam politik, jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Tangerang Selatan sebesar 32 persen sudah melebihi standar minimal 30 persen, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.123.

Tabel 2.123. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, 2022

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan Karya	8	2	10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	3	8
Partai Gerakan Indonesia Raya	5	3	8
Partai Keadilan Sejahtera	4	4	8
Partai Demokrat	3	2	5
Partai Kebangkitan Bangsa	3	1	4
Partai Solidaritas Indonesia	3	1	4
Partai Amanat Nasional	2	-	2
Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
Kota Tangerang Selatan	**34**	**16**	**50**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Aman atau tidaknya suatu wilayah tak lepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Kota Tangerang Selatan telah memiliki institusi Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangerang Selatan yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kotamadya Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan yang berada di bawah jajaran Polda Metro Jakarta Raya memiliki tugas utama dalam hal keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan peraturan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memiliki luas total 321,11 km2 dan terdiri dari 12 kecamatan. Beberapa jenis satker yang berada di bawah naungan Polres Tangerang Selatan antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Bagian Humas, dan Propam. Sementara beberapa jenis layanan kepolisian yang tersedia seperti layanan SPKT, SIM, SKCK, SP2HP, izin keramaian, dan pengawalan jalan. Polres Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Promotor Raya No.1 Lengkong Gudang Timur BSD Serpong Tangerang Selatan, membawahi 9 (sembilan) Polsek (Tabel 2.124).

Tabel 2.124. Data Polsek di bawah Wilayah Kerja Polres Tangerang Selatan

No.	Nama Polsek	Alamat
1.	Polsek Ciputat	Jalan Ir. Haji Juanda No.70, Pisangan, Ciputat Timur, Pisangan, Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
2.	Polsek Pamulang	Jalan Surya Kencana No.1, Pamulang Barat, Pamulang, Pamulang Bar., Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
3.	Polsek Pondok Aren	Jl. Graha Raya Bintaro No.3, Parigi Baru, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
4.	Polsek Serpong	Jl. Letnan Sutopo No.1, Lengkong Gudang Tim., Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
5.	Polsek Cisauk	Jl. Raya Serpong Rumpin, Cibogo, Cisauk, Tangerang, Banten 15343

No.	Nama Polsek	Alamat
6.	Polsek Pagedangan	Jl. Raya Pagedangan, Tangerang, Banten 15339
7.	Polsek Kelapa Dua	Jl. Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Serpong, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15000
8.	Polsek Legok	Jl. Raya Parung Panjang No.5, Babakan, Legok, Tangerang, Banten 15820
9.	Polsek Curug	Jl. Raya STPI Curug KM.5, Curug Wetan, Tangerang, Banten 15810

Sumber: Polres Tangerang Selatan

Menurut PBB rasio polisi yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Secara logika, semakin kecil rasio polisi semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut larut, intensitas patroli rendah, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara (*quick response*) tidak tepat waktu. Data rasio penduduk per polisi di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.125.

Tabel 2.125. Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Banten, 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi			Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-laki	Perempuan	Total	
Pandeglang	778	31	809	1.615
Lebak	761	38	799	1.794
Tangerang	903	48	951	3.525
Serang	662	31	693	2.377
Kota Tangerang	1.409	70	1.479	1.305
Kota Cilegon	635	50	685	657
Kota Serang	672	40	712	1.011
Kota Tangerang Selatan	**1.126**	**62**	**1.188**	**1.160**
Polda Banten	**6.938**	**432**	**7.370**	**1.662**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Pada tahun 2022, rasio penduduk per polisi di Kota Tangerang Selatan sebesar 1.160, artinya setiap 1 polisi harus melayani 1.160 penduduk. Jika dibandingkan dengan standar PBB, terlihat bahwa rasio tersebut masih belum sesuai standar ideal. Hal ini menggambarkan bahwa beban pelayanan polisi di Kota Tangerang Selatan masih cukup berat. Untuk mencapai kondisi ideal, dibutuhkan banyak personil polisi di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan data jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.126 dan Tabel 2.127, terlihat bahwa pada tahun 2022 tindak kejahatan paling banyak terjadi di Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 2.648 kasus dengan tingkat penyelesaian tindak pidana sebesar 77,53 persen.

Tabel 2.126. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) di Provinsi Banten, 2022

Kabupaten/Kota	Tindakan Pidana yang Dilaporkan	Tindakan Pidana yang Diselesaikan
Pandeglang	370	268
Lebak	374	241
Tangerang	608	481
Serang	660	319
Kota Tangerang	2.504	2.036
Kota Cilegon	489	231
Kota Serang	611	336
Kota Tangerang Selatan	**2.648**	**2.053**
Polda Banten	**5.118**	**2.894**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Tabel 2.127. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) di Provinsi Banten, 2022

Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Tindak Pidana
Pandeglang	72,43
Lebak	64,44
Tangerang	79,11
Serang	48,33
Kota Tangerang	81,31
Kota Cilegon	47,24
Kota Serang	54,99
Kota Tangerang Selatan	**77,53**
Polda Banten	**56,54**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Adapun jenis tindak pidana yang terjadi di Kota Tangerang Selatan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.128 hingga Tabel 2.130.

Tabel 2.128. Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia di Provinsi Banten, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	Pembunuhan	Pemerkosaan	Penganiayaan	Penganiayaan Berat	Penculikan
Pandeglang	-	1	-	27	-
Lebak	1	-	1	15	1
Tangerang	1	5	31	61	-

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	Pembunuhan	Pemerkosaan	Penganiayaan	Penganiayaan Berat	Penculikan
Serang	1	1	97	2	-
Kota Tangerang	2	1	2	56	-
Kota Cilegon	-	-	1	-	-
Kota Serang	1	2	44	114	-
Kota Tangerang Selatan	**5**	**5**	**5**	**-**	**2**
Polda Banten	**7**	**20**	**290**	**-**	**2**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Tabel 2.129. Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi Banten, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pandeglang	-	3	55	15	8	-	46	-	82	12
Lebak	-	5	77	8	9	-	40	3	86	2
Tangerang	-	6	148	39	34	-	258	2	135	67
Serang	-	1	119	37	14	-	89	-	95	34
Kota Tangerang	-	1	106	38	14	-	39	20	147	25
Kota Cilegon	1	2	59	23	7	-	-	-	185	37
Kota Serang	-	1	114	24	9	-	44	-	4	22
Kota Tangerang Selatan	**-**	**25**	**162**	**301**	**18**	**-**	**142**	**-**	**114**	**142**
Polda Banten	**13**	**20**	**944**	**173**	**74**	**-**	**627**	**4**	**106**	**199**

Keterangan:

1 Pembakaran dengan sengaja
2 Pengrusakan/Penghancuran barang
3 Pencurian dengan pemberatan
4 Pencurian ringan
5 Pencurian dengan kekerasan
6 Pencurian dalam keluarga
7 Penipuan/Perbuatan curang
8 Penadahan
9 Pencurian kendaraan bermotor
10 Penggelapan

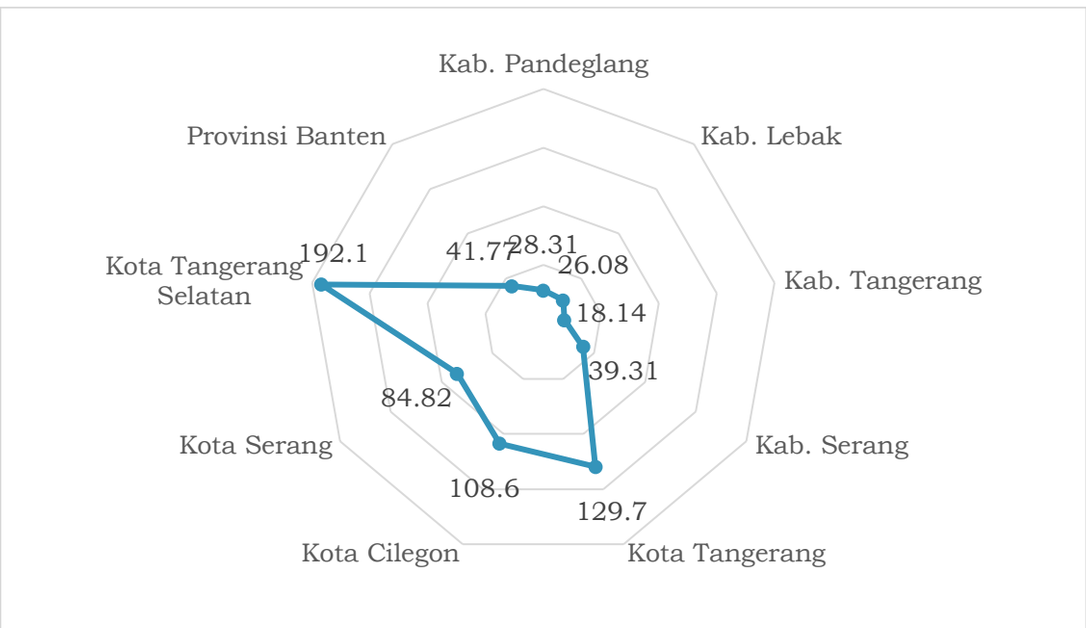
Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Tabel 2.130. Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Banten Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Narkotika	Obat Keras
Pandeglang	-	-
Lebak	67	-
Tangerang	-	-
Serang	96	-
Kota Tangerang	240	-
Kota Cilegon	52	-
Kota Serang	73	-
Kota Tangerang Selatan	**208**	**-**
Polda Banten	**521**	**-**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2023

Untuk melihat berapa risiko penduduk menjadi korban tindak kejahatan dapat diukur dengan indikator *crime rate*. Pada tahun 2022, paling berisiko menjadi korban kejahatan, yaitu sebanyak 192 orang dari setiap 100.000 penduduk, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.44 di bawah ini. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena pengaruh negatif dari kemajuan teknologi informasi yang masuk di Kota Tangerang Selatan dan memerlukan upaya penanganan segera untuk dapat tetap menjaga keamanan wilayah Kota Tangerang Selatan.



Gambar 2.44. Risiko Penduduk Menjadi Korban Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) di Provinsi Banten, 2022

(Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2023)

2.3.4.3. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan sebagai suatu alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. IDI diperoleh dengan menggabungkan berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi dalam suatu wilayah. Nilai IDI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 menunjukkan nilai sedang. Namun pada tahun 2022 dan 2023, nilai IDI Kota Tangerang Selatan meningkat menjadi kategori baik.

Tabel 2.131. Indeks Demokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi	Sedang	Baik	Baik (81)

Sumber: Kesbangpol Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.3.4.4. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi dalam suatu negara atau wilayah. Dikembangkan oleh *Transparency International*, IPK memberikan penilaian tentang sejauh mana korupsi dipandang merajalela atau terkendali dalam suatu masyarakat. IPK didasarkan pada survei dan penilaian yang dilakukan terhadap pendapat dan persepsi masyarakat, bisnis, serta pakar terkait korupsi dalam suatu negara. Hasil dari IPK menjadi penting karena memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor swasta dalam menangani korupsi.

Tabel 2.132. Indeks Persepsi Korupsi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

Layanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Persepsi Korupsi	82	73,32	74,29

Sumber: Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (*CPI*) adalah ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat korupsi di suatu kota. Pada tahun 2021, Kota Tangerang Selatan memperoleh skor *CPI* sebesar 81, mencerminkan persepsi yang relatif rendah terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Namun, pada tahun 2022, skornya menurun menjadi 73,32, menunjukkan potensi adanya peningkatan korupsi atau perubahan persepsi terhadap korupsi dalam satu tahun terakhir. Penurunan skor tersebut mungkin mengindikasikan adanya kebutuhan untuk lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan pencegahan korupsi di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2023 nilai Indeks Persepsi Korupsi mengalami peningkatan menjadi 74,29 yang menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dalam persepsi korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menekankan pentingnya upaya bersama dari pemerintah, lembaga

anti-korupsi, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat integritas dan memastikan pengelolaan sumber daya publik yang efisien dan adil.

2.3.4.5. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Persepsi dan realitas keamanan yang dirasakan oleh penduduk atau pemangku kepentingan dalam suatu area tertentu digambarkan dalam indeks rasa aman. Kota Tangerang Selatan memiliki nilai indeks rasa aman pada tahun 2021 hingga 2023 yang termasuk dalam kategori aman.

Tabel 2.133. Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Indeks Rasa Aman	Aman	Aman (66,97)	Aman (73,50)

Sumber: Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.3.4.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Tiga indikator kerukunan umat beragama melibatkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi merujuk pada sikap saling menerima dan menghargai antar kelompok agama terhadap yang lain. Kesetaraan mencakup kemauan untuk melindungi serta memberikan hak dan kesempatan yang sama satu sama lain. Sementara itu, kerja sama melibatkan interaksi sosial, empati, dan simpati dalam berbagai konteks, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun penilaian kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

- 0-20 : sangat rendah
- 21-40 : rendah
- 41-60 : sedang
- 61-80 : tinggi
- 81-100 : sangat tinggi

Nilai IKUB Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 67,46 di mana termasuk kategori tinggi. Pada tahun berikutnya (2022), nilai IKUB Kota Tangerang Selatan meningkat menjadi 72,39 dan masih termasuk ke dalam kategori tinggi.

Tabel 2.134. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
IKUB	67,46 (tinggi)	72,39 (tinggi)

Sumber: Kesbangpol Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.3.4.7. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

IDSD Tahun 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2022. Empat komponen pembentuk daya saing tersebut yaitu: Komponen Lingkungan Pendukung, Komponen Sumber Daya Manusia, Komponen Pasar dan Komponen Ekosistem Inovasi. Adapun pilar-pilar dalam masing-masing keempat komponen tersebut adalah:

b. Komponen Lingkungan Pendukung, meliputi empat pilar, yaitu:
    1. Pilar 1 institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah;
    2. Pilar 2 infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah;
    3. Pilar 3 adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan
    4. Pilar 4 stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup
c. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu:
    1. Pilar 5 kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan
    2. Pilar 6 keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
d. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu:
    1. Pilar 7 pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi;
    2. Pilar 8 pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja;
    3. Pilar 9 sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan

4. Pilar 10 ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

e. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu:

1. Pilar 11 dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja: dan
2. Pilar 12 kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Berdasarkan BRIN (2024), Nilai IDSD berkisar dari 0-5 di mana (0-1,25) termasuk kategori rendah, (1,26-2,50) termasuk kategori sedang, (2,51-3,75) termasuk kategori tinggi, dan (3,76-5) termasuk kategori sangat tinggi. Nilai IDSD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 tidak dapat dinilai untuk skor IDSD karena terdapat skor pilar yang tidak teridentifikasi. Namun berdasarkan skor pilar yang lainnya, kategori IDSD Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori sangat tinggi. Sama halnya dengan tahun 2023, capaian IDSD Kota Tangerang Selatan mencapai skor 3,81 yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Nilai IDSD Kota Tangerang Selatan disajikan dalam tabel 2.136 di bawah ini.

Tabel 2.135. Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2023

Kota Tangerang Selatan		**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
Lingkungan Pendukung	Pilar 1	4,28	4,14
	Pilar 2	N/A	3,75
	Pilar 3	3,88	4,93
	Pilar 4	3,78	3,54
SDM	Pilar 5	4	4,06
	Pilar 6	3,79	4,11
Pasar	Pilar 7	5	5
	Pilar 8	3,21	3,81
	Pilar 9	1,14	1,29
	Pilar 10	4,09	4,94
Ekosistem Inovasi	Pilar 11	5	2,65
	Pilar 12	3,92	3,48
Skor IDSD		**N/A**	**3,81**

Sumber: BRIN, Tahun 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berlandaskan peraturan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045. Dalam aspek pelayanan umum, dijelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator dari seluruh aspek pelayanan umum akan dijelaskan pada sub-bab berikut ini.

2.4.1. Indeks Reformasi Hukum

Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi ulang dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu:

1. memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi;
2. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan; dan
4. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Pelaksanaan Reformasi Hukum Kota Tangerang Selatan mendapatkan skor 76.09 dengan predikat BB (Baik). Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan sistem hukum di Kota Tangerang Selatan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, Tangerang Selatan telah berhasil mengimplementasikan berbagai reformasi yang signifikan. Penegakan hukum yang lebih transparan, efisien, dan adil telah menjadi fokus utama, memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua warga. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam penguatan lembaga hukum, tetapi juga menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari dua komponen yaitu pengungkit dan komponen hasil. Hasil evaluasi RB selama 5 tahun menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, hasil antara dan reform, namun belum diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Tabel 2.136. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Layanan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	58,79/CC	60,31/B	61,11/B	63,48/B	65,61/B	76,79/BB

Sumber: SETDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Dari tahun 2018 hingga 2023, Kota Tangerang Selatan berhasil mencatat peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam nilai indeks reformasi birokrasi, mulai dari 58,97 pada tahun 2018 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan predikat BB, yaitu 76,79. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang teguh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk melakukan transformasi mendalam dalam struktur dan operasi birokrasi Kota Tangerang Selatan.

2.4.3. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Permen PANRB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. indikator evaluasi pelayanan publik ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Hasil indeks pelayanan publik merupakan salah

satu komponen pengukuran reformasi birokrasi, Data indeks pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan disajikan pada Tabel 2.137 berikut.

Tabel 2.137. Capaian indeks pelayanan publik Kota Tangerang Selatan

Layanan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	3,73	3,87	4.22	4.47	3.90

Sumber: SETDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya tren positif. Pada tahun 2019, nilai indeks pelayanan publik berada pada angka 3,73, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 3,87 pada tahun 2020, dan seterusnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 4,47. Namun demikian, pada tahun 2023, terdapat sedikit penurunan menjadi 3,90. Hal ini dikarenakan terdapat pembaruan metode perhitungan oleh kementerian.

2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Tabel 2.138. Capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Tangerang Selatan

Layanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,48 (cukup)	2,54 (cukup)	3,18 (baik)

Sumber: Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam nilai indeks Standar Pelayanan Birokrasi Elektronik (SPBE) setiap tahunnya. Pada tahun 2021, kota ini mencatat nilai indeks SPBE sebesar 2,48, yang kemudian meningkat menjadi 2,54 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat, di mana nilai indeks SPBE mencapai 3,18. Penyediaan layanan yang lebih efisien dan terintegrasi secara elektronik telah membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan birokrasi.

2.4.5. Indeks Kapabilitas dan Inovasi Daerah

Indeks kapabilitas inovasi daerah dilihat dari pilar 12 dalam dokumen Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kapabilitas inovasi daerah memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah untuk mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide barang dan jasa baru. Menurut hasil indeks kapabilitas inovasi daerah (Tabel 2.139), Kota Tangerang Selatan menunjukkan tingkat kapabilitas tinggi setiap tahunnya, dengan nilai indeks 3,92 pada tahun 2022 dan 3,48 pada tahun 2023 berada di atas nilai indeks nasional maupun Provinsi Banten. Berdasarkan penilaian penerapan inovasi melalui indeks inovasi daerah, pada tahun 2023 penerapan inovasi di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2022.

Tabel 2.139. Capaian Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan

Layanan	2022	2023
Indeks kapabilitas inovasi daerah	3,92	3,48
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (59,88)	Sangat Inovatif (60,15)

Sumber: BRIN dan Kemendagri RI, Tahun 2024

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Pencapaian Indikator Makro selama Periode RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Pelaksanaan pembangunan mulai dari daerah hingga pusat merupakan bagian yang integral dan saling terkait sehingga dibutuhkan keselarasan, konsistensi dan sinergitas antara daerah dan pusat. Dengan demikian majunya pembangunan daerah menjadi sinyal baik bagi pembangunan nasional, begitu pula sebaliknya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Indonesia dapat menempati posisi PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045, dan Indonesia dapat keluar dari *middle income trap*. Adapun sasaran makro pembangunan Indonesia Tahun 2020-2024, meliputi pertumbuhan ekonomi (5,4-6,0%), tingkat kemiskinan (6,5-7,0%), indeks gini (0,36-0,374%), tingkat pengangguran terbuka (4,0-4,6%) dan indeks pembangunan manusia (75,54%). Untuk mencapai target tersebut tentu dibutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata antar daerah. Transformasi ekonomi menjadi kunci utama di tengah kondisi global yang tidak kondusif akibat ancaman terjadinya perang dunia, efek pandemi Covid-19, resesi ekonomi dan dampak perubahan iklim.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan SE Menteri Dalam Negeri RI Nomor 600.2.1/1570/SJ mengamanatkan daerah

agar menyajikan data realisasi indikator makro dalam evaluasi RPJPD, yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran per kapita, ketimpangan pendapatan dan PDRB per kapita. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan perwujudan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai dimensi. Ukuran kesejahteraan tersebut selanjutnya dinilai dan dibandingkan.

Hasil evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa terdapat enam indikator makro (85,7 persen) Kota Tangerang Selatan berstatus progresif, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.140 di bawah ini. IPM Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan sebesar 6,44% selama tahun 2011-2022. IPM Kota Tangerang Selatan merupakan IPM tertinggi di Provinsi Banten dan termasuk kategori Sangat Tinggi (IPM > 80).

Indikator angka kemiskinan menunjukkan realisasi penurunan yang fluktuatif. Pada Tahun 2022, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah dengan angka kemiskinan terendah di tingkat provinsi dan peringkat ke-empat di tingkat nasional. Peningkatan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan terjadi karena pandemi Covid-19 yang berlangsung di tahun 2020.

Dalam rentang tahun 2011-2019, tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan menurun secara progresif, semula 8,07% pada tahun 2011 menjadi 4,78% pada tahun 2019. Pada Tahun 2020-2021, tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan Covid-19 sangat memukul sektor ketenagakerjaan yang didominasi pada usaha sektor tersier di Kota Tangerang Selatan. Banyak usaha yang harus tutup berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tenaga kerja yang dirumahkan. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan kembali mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi yang berangsur menggeliat sejak pelonggaran PPKM. Selain angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan juga pernah mengalami kontraksi pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan berangsur mengalami kenaikan kembali seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Pengeluaran per kapita dan PDRB per kapita di Kota Tangerang Selatan mencatatkan kinerja peningkatan tiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2011-2021. Hal tersebut menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Selain peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah diharapkan juga dapat mendorong pemerataan kesejahteraan. Dalam mengukur kondisi pemerataan kesejahteraan masyarakat, digunakan indikator kinerja berupa Indeks Gini. Indeks Gini di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2011-2022, dengan status kondisi ketimpangan sedang.

Tabel 2.140. Hasil pencapaian indikator Makro RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Form 4)

No.	Indikator	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2011)	Capaian Tahun										Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,99	77,68	78,65	79,17	79,38	80,11	80,84	81,17	81,48	81,36	81,6	81,95	6,44% (↑)	• Pada tahun 2020, terdapat perubahan data jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020; • Komponen pembentuk IPM mengalami perubahan dari Angka Melek Huruf menjadi Harapan Lama Sekolah
2	Persentase Penduduk Miskin	1,5	1,33	1,75	1,68	1,69	1,67	1,76	1,68	1,68	2,29	2,57	2,5	66,67% (↑)	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,98	8,07	4,56	6,92	6,13	6,13	6,83	4,67	4,78	8,48	8,6	6,59	44,99% (↓)	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8,81	8,66	8,75	8,05	7,25	6,74	7,3	7,49	7,4	-1,01	4,81	5,82	Arahan kemendagri tidak perlu diisi	
5	Pengeluaran per Kapita	25,92	25,88	27,19	28,41	29,47	30,46	31,67	33,01	35,85	44,01	45,69	47,89	84,76% (↑)	
6	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	0,41	n/a	n/a	n/a	n/a	0,41	0,38	0,379	0,331	0,368	0,370	0,359	Arahan kemendagri tidak perlu diisi	
7	PDRB per Kapita	25,92	28,02	30,72	33,64	36,44	38,46	41,33	44,24	49,34	60,99	64,33	69,74	169,06% (↑)	

2.5.2. Pencapaian Arah Kebijakan (Sasaran Pokok) RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang Selatan yang hendak diwujudkan untuk jangka waktu 2005-2025 adalah sebagai berikut:

"Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera dan Nyaman (BERKESAN)"

Visi tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ingin dicapai pada Tahun 2025 di Kota Tangerang Selatan, dengan dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. **Membangun Sumber Daya Manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.**

   Maksud misi tersebut adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi dengan penguasaan teknologi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. **Meningkatkan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa yang berdaya saing, berkeadilan serta berwawasan lingkungan.**

   Maksud misi tersebut adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada kegiatan perdagangan dan jasa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan dengan tetap diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

3. **Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota.**

   Maksud misi tersebut adalah mewujudkan penyediaan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk pengembangan sektor transportasi, perdagangan, sumber daya air, permukiman, persampahan, drainase, telekomunikasi, energi dan kelistrikan.

4. **Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.**

   Maksud misi tersebut adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Evaluasi visi dilakukan melalui pengukuran sasaran pokok/arah kebijakan. Visi dapat dikatakan tercapai jika seluruh sasaran pokok tercapai atau arah kebijakan dilaksanakan secara akuntabel. Evaluasi terhadap RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 dilakukan melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain. Penilaian capaian visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 diupayakan dilakukan melalui metode kuantitatif walaupun sasaran pokok RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 tidak memiliki ukuran kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menyepakati ukuran kuantitatif yang bersumber dari capaian RPJMD dan data capaian pembangunan lainnya, yang relevan dengan arah kebijakan/sasaran pokok RPJPD. Uraian pencapaian arah kebijakan/sasaran pokok RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.141 dan Tabel 2.142.

Tabel 2.141. Penjabaran dan Capaian Sasaran Pokok Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 Berdasarkan Indikator RPJMD yang Relevan

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Membangun Sumber Daya Manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya	1. Tercapainya pengendalian pertumbuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan penduduk	3.67	3.59	3.51	3.44	3.36	3.30	3.28	3.13	3.04	0.47	1.12	1.01
		Total Fertility Rate	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.08	2.08	2.08	2.08
	2. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas formal, non formal dan informal	Harapan Lama Sekolah	12.43	12.79	13.24	13.58	13.61	14.08	14.39	14.42	14.43	14.47	14.66	14.67
		Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,07	80.22
		Rata-rata lama sekolah	10.87	11.09	11.48	11.56	11.57	11.58	11.77	11.78	11.8	11.81	11.82	11.84
	3. Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat	Persentase rumah tangga ber PHBS	68.00%	71.00%	75.40%	78.60%	79.00%	82.20%	84.00%	86.80%	88.00%	91.00%	93.00%	93.80%
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu, merata, dan terjangkau	Angka harapan hidup	72.07	72.09	72.1	72.11	72.12	72.13	72.17	72.26	72.41	72.49	72.50	72.78
		AKI (angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup)	44	39	48	35	49	48	48	42	35	32	31.6	27.83
		AKB (Angka kematian bayi per	1.6	1.5	0.7	0.4	1.2	1.4	1.5	1.9	1.5	0.6	0.52	0.27

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1000 kelahiran hidup)												
		Prevalensi Stunting Balita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.39%	N/A	19.90%	9%
	5. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	Predikat Indeks inovasi daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	inovatif (peringkat 2)	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	inovatif	inovatif (peringkat 13)
		Indeks daya saing daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sedang	Tinggi (3,71)
	6. Meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks kerukunan umat beragama (KUB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67,46	72,39
	7. Mengembangkan ketenagakerjaan guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11.98	8.07	4.56	6.92	6.13	6,13	6.83	4.67	4.78	8.48	8.60	6.59
		Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78.148.225	82.292.178	81.692.099.99
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N/A	64.90	60.73	63.04	N/A	N/A	57.02	61.12	60.57	62.49	62.56	58.67

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	8. Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	8	13	16	17	19	N/A
		Indeks Pembangunan Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62.82	63.7	63.7	64.32	64.32	92.59	92.83	93.16	93.56	93.58	93.8	93.96
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60.46	59.94	59.94	60.3	60.3	63.17	68.46	70.72	74	73.85	73.08	72.67
	9. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	N/A	256 jiwa	256 jiwa	256 jiwa	256 jiwa	305 Jiwa	763 Jiwa	793 Jiwa	824 Jiwa	854 Jiwa	129 Jiwa	675 Jiwa
		Persentase Penduduk Miskin	1,5	1,33	1,75	1,68	1,69	1,67	1,76	1,68	1,68	2,29	2,57	2,5
	10. Meningkatnya peran kepemudaan dan pengembangan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	52.31	53.43
		Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38 Medali	11 Medali
		Persentase Pemuda Pelopor yang aktif	0.0013%	0.0013%	0.0013%	0.0012%	0.0012%	0.0012%	0.0012%	0.0012%	0.0010%	0.0015%	0.0016%	0.0015%

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		menggerakkan kegiatan kepemudaan												
2. Meningkatkan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa yang berdaya saing, berkeadilan serta berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.81	8.66	8.75	8.05	7.25	6.74	7.3	7.49	7.4	-1.01	4.81	5.82
		Tingkat Pengangguran Terbuka	11.98	8.07	4.56	6.92	6.13	6,13	6.83	4.67	4.78	8.48	8.60	6.59
		Peningkatan Jumlah Investasi PMA	12	17	33	63	55	194	249	379	491	548	618	546
		Peningkatan Jumlah Investasi PMDN	2	1	1	5	10	10	31	51	421	937	1887	2149
	2. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif efisien dan bernilai tambah	Jumlah kawasan strategis ekonomi yang berkembang	6	6	6	6	6	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.7	61	54	49.86	51,8	56,66

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3. Tersedianya penunjang kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, serta sistem informasi yang handal	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	13.38	9.5	6.35	4.42	5.94	5.6	6.11	8.37	6.21	-5.76	2.73	7.25
	4. Berkurangnya kesenjangan perekonomian antarwilayah dan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.41	0.38	0.38	0.33	0.37	0.37	0.36
		Persentase Penduduk Miskin	1.5	1.33	1.75	1.68	1.69	1.67	1.76	1.68	1.68	2.29	2.57	2.5
	5. Terciptanya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K)	Tingkat pertumbuhan UMKM	0	0	-0,07	0,02	0	7,58	0,14	-0,47	1,48	1,92	0,21	0,37
		Jumlah UMKM	N/A	2537	2358	2425	N/A	20797	23776	12438	30889	90128	108966	149644
		persentase UKM aktif non BPR/LKM UKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	52	65.17	69.8	68.18	N/A	N/A	N/A
		Persentase Koperasi Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51.11%	52.76%	56.06%	58.04%	55.07%	56.32%	N/A

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Nilai sektor ekonomi kreatif (triliun)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,16	7,8
	6. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Skor PPH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95.23	90.45	90.5	90.2	94	95.4	93.3
		Persentase permukiman layak Huni	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,19	99,25
3. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan sarana dan prasarana kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	6.25	9	9.08	5	5.75
		Jumlah kawasan strategis ekonomi yang berkembang	6	6	6	6	6	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi	Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,56	0.54	0.54
		Rasio Konektivitas Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59	0.59	0.63
	3. Meningkatnya pelayanan prasarana sumber daya air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah	30%	35%	40%	50%	55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42.11%	44,05%

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		sungai kewenangan Kota												
	4. Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum jaringan perpipaan dan bukan perpipaan	82.20%	82.22%	82.25%	82.50%	N/A	83.00%	83.50%	84%	84.50%	85%	85.20	86.21
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85.63%	86%	86.60%	87.73%	88.80%	89.00%	77%
	5. Meningkatnya pelayanan drainase kota untuk mendukung kegiatan ekonomi kota	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.36	16.81
	6. Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah	Persentase pengangkutan sampah/ Cakupan	7.2	9.4	13.7	23.3	N/A	36.34%	37.49%	43.00%	71.2%	88.53%	88.89	90.73

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	untuk mendukung kegiatan ekonomi dan untuk menciptakan lingkungan asri	pengelolaan sampah												
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85.63%	86%	86.60%	87.73%	88.80%	89.00%	77%
	7. Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika	Persentase Penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	N/A	N/A	N/A	N/A	49.07%	54.42%	66.84%	72.03%	78.35%	79.17%	83.08%	85.16%
	8. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	9. Menurunnya lokasi rawan banjir kota	luas genangan yang tereduksi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32%	34%	36%	38%	67%	N/A	N/A
		Rasio luas kawasan	30%	35%	40%	50%	55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42.11	44,05

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kota												
	10. Terwujudnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau	Persentase permukiman layak huni	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,19	99,25
		luasan permukiman kumuh perkotaan (ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	846	327.15	388.75	336.44	36.58	111	101.66
	11. Tercapainya ketersediaan luas minimal Ruang Terbuka Hijau Kota	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00%	4.26%	4.30%
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggungjawab	1. Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	B (66,92)
		Profesionalisme SDM Aparatur (ASN)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	11	24	25	33.76	63.77
		Indeks reformasi birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58.79/CC	60.31/B	61.11/B	63.48/B	65.61/B

Misi	Sasaran Pokok	Usulan Indikator	Capaian Tahun ke											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Indeks Persepsi Korupsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2.9	N/A	80,46	82	73.32
	2. Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	83.5	78.95	81.04	82.66	85.75	83.5
	3. Meningkatnya kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan	Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Komposisi PAD terhadap APBD	32.62	33.06	39.67	16.70	46.86	46.60	54.66	49.57	50.00	48.95	53.66	54.66
	4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan	Indeks demokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sedang	Baik
	5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	60	65	70	80	90	100	100	100	100	100	100	N/A
		Indeks rasa aman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aman	Aman
	6. Meningkatnya ketaatan hukum masyarakat	Angka kriminalitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120.72	106.75	71.04	117.35	78.04	73.00	N/A
		Tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundangan	56.4	57	67.45	79.81	88.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.142. Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 Berdasarkan Penjabaran Arah Kebijakan (Form 5)

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
1	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Tercapainya pengendalian pertumbuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Uraian Pencapaian	Pencapaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan pencapaian indikator laju pertumbuhan penduduk, dan *total fertility rate*. Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk dan *total fertility rate*, Pemerintah Kota Tangsel dapat melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk selama periode tahun 2011-2022 di mana laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1.01 sementara pada tahun awal 2011 masih sebesar 3.67, selain itu pencapaian *total fertility rate* (*TFR*) yang pada tahun 2019 hingga 2022 bertahan pada angka 2.08. Pencapaian *TFR* dilaksanakan melalui penguatan program Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Berencana
2	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas formal, non formal dan informal
	Uraian Pencapaian	Pencapaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan pencapaian indikator harapan lama sekolah, indeks pendidikan, dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan pencapaian indikator-indikator tersebut, terlihat bahwa kinerja sektor pendidikan di Kota Tangerang Selatan selama periode tahun 2022-2022 meningkat. Hal ini dibuktikan dengan capaian harapan lama sekolah yang awalnya pada tahun 2011 sebesar 12.43 menjadi 14.67 pada tahun 2022. Sementara itu data rata-rata lama sekolah juga capaiannya pada awal tahun 2011 sebesar 10.87 menjadi 11.84 pada tahun 2022. Sementara itu, data indeks pendidikan baru terdapat data capaiannya pada tahun 2022 sehingga belum dapat membuktikan meningkatnya pelayanan pendidikan. Walaupun indeks pendidikan di Kota Tangerang Selatan belum dapat dinilai perkembangannya namun indeks pendidikan di Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan kinerja sektor pendidikan di Kota Tangerang Selatan turut berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Kota Tangerang Selatan sehingga menjadi IPM paling tinggi di Provinsi Banten
3	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat
	Uraian Pencapaian	Kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat di Kota Tangerang Selatan selama periode tahun 2011-2022 meningkat di mana capaian Persentase rumah tangga ber PHBS pada tahun awal 2011 sebesar 68%

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		meningkat menjadi 93.8% pada tahun 2022. Peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat turut berkontribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup penduduk di Kota Tangerang Selatan.
4	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu, merata, dan terjangkau
	Uraian Pencapaian	Kinerja sektor kesehatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dengan indikator usia harapan hidup, angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 100,000 kelahiran hidup serta prevalensi stunting balita. Berdasarkan data usia harapan hidup, capaian usia harapan hidup yang meningkat dari awalnya pada tahun 2011 sebesar 72.07 menjadi 72.78 pada tahun 2022. Sementara itu, angka kematian ibu dan bayi per 100,000 kelahiran hidup, menurun semua sebesar 44 dan 1.6 pada awal tahun 2011 menjadi 27.83 dan 0.27 pada tahun 2022. Monitoring dan Evaluasi program Kesehatan Ibu dan anak melalui bina wilayah yang melibatkan kader-kader kesehatan sebagai mitra pemberdayaan masyarakat dan dilakukan secara berkala dari Fasyankes Tingkat pertama ke Fasyankes Tingkat Rujukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Berdasarkan data prevalensi stunting, Pemkot Tangerang Selatan berhasil menurunkan stunting semula pada tahun 2019 sebesar 15.39% menurun menjadi 9% pada tahun 2022. Hasil tersebut dicapai karena pelaksanaan tematik program Percepatan Penurunan Stunting yang didukung oleh lintas sektoral dan didukung oleh komitmen pembiayaan.
5	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Uraian Pencapaian	Kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator predikat indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah. Pada awal tahun 2017, Kota Tangerang Selatan dapat meraih predikat sebagai Kota Inovatif yang meningkat menjadi Kota Sangat Inovatif pada kurun waktu tahun 2018-2020. Pada tahun 2021-2022, terdapat perubahan indikator penilaian dari Kemendagri sehingga Kota Tangerang Selatan meraih predikat Kota Inovatif dalam penilaian indeks inovasi daerah. Sementara itu, berdasarkan data indeks daya saing daerah, Kota Tangerang Selatan dikategorikan sebagai Kota Berdaya Saing Sedang pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 menjadi Kota Berdaya Saing Tinggi. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja inovasi dan daya saing daerah.
6	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
	Uraian Pencapaian	Peningkatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan nilai dari awal tahun 2021 sebesar 67.46 menjadi 72.39 pada tahun 2022. Kebebasan beragama di Kota Tangerang Selatan dapat dijaga kondusif atas kerja sama semua pihak. Sementara itu terkait aspek nilai luhur budaya daerah, belum ada pendekatan indikator penilaian kinerja yang menjawab hal tersebut. Walaupun begitu, pembangunan kebudayaan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dan kepariwisataan di Kota Tangerang Selatan tetap dilaksanakan melalui perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Tangerang Selatan, fasilitasi pelestarian budaya melalui penyelenggaraan festival-festival budaya bekerja sama dengan komunitas kesenian dan budaya pada event-event daerah sebagai daya tarik pariwisata daerah
7	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Mengembangkan ketenagakerjaan guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan pekerja
	Uraian Pencapaian	Sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka, produktivitas tenaga kerja per total *output* dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan selama periode tahun 2011-2022 mengalami fluktuatif namun secara rata-rata dapat mencatatkan penurunan. TPT pada tahun 2011 sebesar 11.98% menurun menjadi 6.59% pada tahun 2022. Pada tahun 2020, TPT di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan karena pandemi Covid 19 yang berdampak pada banyaknya PHK, namun pada tahun 2022 TPT dapat turun seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Produktivitas tenaga kerja per total *output* di Kota Tangerang Selatan dapat mencatatkan peningkatan, semula sebesar 78 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 81 juta rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan pada tahun yang pada awal tahun 2012 sebesar 58.67 dari sebesar 62.56 pada tahun 2021. Penurunan ini karena jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 juga mengalami penurunan yang dapat disebabkan karena masyarakat memilih untuk meneruskan pendidikan atau tetap mengurus Rumah Tangga
8	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Uraian Pencapaian	Kinerja sasaran ini dicapai dengan penilaian kinerja indikator jumlah kelurahan ramah anak, indeks pembangunan keluarga, indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Jumlah kelurahan ramah anak meningkat selama periode tahun 2011-2022 yaitu semula sejumlah 5 pada tahun awal 2016 menjadi 19 pada tahun 2021.Pembangunan keluarga di Kota Tangerang Selatan dikategorikan baik selama kurun waktu tahun 2020-2022. Sementara itu, kinerja indeks pembangunan gender juga mengalami peningkatan selama

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		tahun 2011-2022 yaitu semula senilai 62.82 pada tahun 2011 menjadi 93.96 pada tahun 2022. Kinerja tersebut diraih karena upaya peningkatan keberdayaan perempuan dalam keluarga dan peran serta perempuan dalam pembangunan, Sementara itu, indeks pemberdayaan gender mengalami penurunan mulai tahun 2020-2022 dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena penurunan kontribusi pendapatan perempuan dan penurunan pekerja perempuan profesional akibat pandemi Covid-19 yang berdampak banyaknya PHK termasuk pekerja perempuan. Namun jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2011, IDG di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2022 mencatatkan kinerja peningkatan.
9	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Uraian Pencapaian	Kinerja sasaran ini dinilai berdasarkan jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar dan Persentase Penduduk Miskin. Capaian jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar, secara riil belum menunjukkan korelasi positif dengan sasaran pokok penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan indikator jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai standar dasar terus meningkat dari tahun 2012 sebesar 256 jiwa menjadi 675 jiwa pada tahun 2022. Meningkatnya jumlah PMKS yang dilayani belum tentu menurunkan masalah kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum valid dan belum satu sumber data; Sulitnya proses Reunifikasi dan Penelusuran Keluarga dalam penanganan PPKS dan Pemberian bantuan (Permakanan, Sandang dan Alat Bantu) bagi PPKS Belum optimal karena overlap data. Sementara itu, terkait capaian indikator persentase penduduk miskin, terlihat bahwa capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020-2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 di mana banyak penduduk Tangsel yang kehilangan pekerjaan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, persentase penduduk miskin pada tahun 2022 mengalami kinerja penurunan
10	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya peran kepemudaan dan pengembangan olahraga
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator indeks pembangunan pemuda, jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional dan persentase pemuda pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan. Pembangunan pemuda sebagai bagian dari pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan mencatatkan peningkatan kinerja yaitu pada tahun awal 2021 sebesar 52.31 menjadi 53.43 pada tahun 2022. Peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan juga meningkat dari tahun 2011 sebesar 0,0013% pemuda pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan, menjadi 0.0015% pada tahun 2022. Masih terdapat aspek-aspek yang perlu

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		diperbaiki dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda seperti sosialisasi kegiatan kepeloporan pemuda yang menjadi salah aspek yang dinilai dalam menghitung Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, peran pengembangan olahraga belum dapat optimal, ditunjukkan dengan menurunnya perolehan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, semula memperoleh 38 medali pada tahun 2011 menjadi 11 medali pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pembinaan keolahragaan, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kompetisi dan belum terkelolanya pemetaan potensi atlet yang berprestasi.
11	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran ini dinilai berdasarkan capaian laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka serta peningkatan jumlah investasi PMA dan PMDN. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan tercatat dimulai pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi karena pandemi covid 19 yang berdampak pada perekonomian Kota Tangerang Selatan yang didominasi sektor tersier perdagangan dan jasa. Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi mulai meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi daerah. Upaya Pemkot Tangsel untuk menumbuhkan perekonomian dilakukan melalui percepatan vaksinasi Covid-19 hingga *booster* kedua untuk kekebalan komunitas, pelonggaran PPKM secara bertahap seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Tangsel yang tervaksinasi, relaksasi pajak daerah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi sektor konstruksi sebagai salah satu lapangan usaha utama pembentuk PDRB Tangsel. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan selama periode tahun 2011-2022 mengalami fluktuatif namun secara rata-rata dapat mencatatkan penurunan. TPT pada tahun 2011 sebesar 11.98% menurun menjadi 6.59% pada tahun 2022. Pada tahun 2020, TPT di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyaknya PHK, namun pada tahun 2022 TPT dapat turun seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sementara itu, kinerja investasi di daerah cenderung mengalami peningkatan di mana jumlah investasi PMA dan PMDN pada tahun 2011 masing-masing sejumlah 12 dan 2 meningkat menjadi sejumlah 546 dan 2149 pada tahun 2022.
12	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif efisien dan bernilai tambah

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
	Uraian Pencapaian	Kinerja sasaran ini dinilai berdasarkan capaian indikator Jumlah kawasan strategis ekonomi yang berkembang dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Jumlah kawasan strategis ekonomi yang berkembang di Kota Tangerang Selatan terealisasi sebanyak 6 kawasan sementara itu indeks kualitas lingkungan hidup mencatatkan kinerja peningkatan yaitu semula sebesar 49,7 pada tahun 2017 menjadi 51.8 pada tahun 2022. Dukungan terhadap pengembangan kawasan strategis di Kota Tangerang Selatan adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkotaan baik yang dikerjakan oleh Pemkot Tangsel dan yang dikerjakan oleh swasta/pihak pengembang kawasan. Penyelarasan pembangunan kawasan dengan RTR juga merupakan upaya pemkot untuk mengoptimalkan ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi, mengingat ruang kota yang tersedia sangat terbatas. Upaya pengendalian terhadap pencamaran air, tanah dan udara juga dilakukan oleh Pemkot Kota Tangsel melalui kewajiban amdal/UKL-UPL yang terintegrasi dengan perijinan bagi jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Peningkatan cakupan pengelolaan sampah, akses jaringan air minum perpipaan dan akses terhadap sanitasi yang layak, pembangunan taman, pembuatan sumur resapan serta pengendalian limbah B3 merupakan salah satu upaya Pemkot untuk mengurangi pencemaran udara, air dan tanah
13	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Tersedianya penunjang kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, serta sistem informasi yang handal
	Uraian Pencapaian	Kinerja capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan kinerja pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, yang mulai mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2019-2020, PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021-2022, PDRB sektor perdagangan mulai mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi, yaitu semula -5.76% pada tahun 2020 menjadi 7,25% pada tahun 2022. Upaya Pemkot Tangsel untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan sama dengan upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena struktur perekonomian Kota Tangsel didominasi sektor perdagangan dan jasa. Upaya-upaya tersebut adalah percepatan vaksinasi Covid-19 hingga booster kedua untuk kekebalan komunitas, pelonggaran PPKM secara bertahap seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Tangsel yang tervaksinasi, dan relaksasi pajak daerah.
14	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Berkurangnya kesenjangan perekonomian antarwilayah dan antar kelompok masyarakat
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini ditunjukkan berdasarkan indikator indeks gini dan persentase penduduk miskin. Indeks gini yang menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan, dapat diturunkan semula pada tahun 2016

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		sebesar 0,41 menjadi 0,36 pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu semula sebesar 1,5% menjadi 2,5%. Secara umum, peningkatan ini disebabkan karena naiknya garis kemiskinan Tangerang Selatan, yang merupakan alat ukur tingkat kemiskinan suatu daerah. Dengan naiknya nilai garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan maka standar pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kota Tangsel juga meningkat. Secara khusus, peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Tangsel yang signifikan terjadi pada kurun waktu tahun 2020-2021 disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaannya. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2020-2021, tingkat kemiskinan pada tahun 2022 mampu mencatatkan kinerja penurunan. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kota Tangsel paling kecil di Provinsi Banten.
15	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Terciptanya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K)
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator tingkat pertumbuhan UMKM, jumlah UMKM, persentase UKM aktif non BPR/LKM UKM, persentase koperasi aktif, dan Nilai sektor ekonomi kreatif. Jumlah UMKM di Kota Tangerang Selatan yang semula berjumlah 2.537 UMKM pada tahun 2012 meningkat jumlahnya menjadi 149.644 UMKM pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang Selatan berfluktuatif dari tahun 2011- 2022. Pada tahun 2022, UMKM mulai tumbuh sebesar 0,37% dari tahun 2021 sebesar 0,21%. Pertumbuhan ini seiring dengan pemulihan ekonomi. Adanya UKM aktif non BPR/LKM UKM yang terdata pada tahun 2019 sebesar 68,18% dan koperasi aktif yang terdata sebesar 56,32% pada tahun 2022 merupakan gambaran terciptanya pemberdayaan UMKM-K. Selain itu, tercatatnya nilai sektor ekonomi kreatif pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 81,6T dan 7,8 T juga menggambarkan adanya pemberdayaan pada sektor ekonomi kreatif. Pertumbuhan UMKM yang kecil dan nilai sektor ekonomi kreatif yang belum tinggi disebabkan karena belum tergalinya potensi UMKM dan ekonomi kreatif yang dapat bersaing dan berorientasi ekspor. Selain itu, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan menjadi tantangan.
16	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator skor PPH dan persentase permukiman yang layak huni. Skor PPH berfluktuasi selama kurun waktu tahun 2016-2022, di mana pada tahun 2002 skor PPH di Tangerang Selatan sebesar 93,3 dari skor ideal 100, yang berarti pola konsumsi pangan masyarakat Tangsel cukup beragam dan seimbang. Terkait pemenuhan kebutuhan perumahan, pada tahun 2021-2022 tercatatkan persentase permukiman yang layak huni sebesar 99,19% dan 99,25%, yang menggambarkan bahwa rata-rata masyarakat Tangsel tinggal pada

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		perumahan yang layak huni. Keterjangkauan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang serta keterjangkauan memiliki rumah yang layak huni, terutama bagi masyarakat miskin dan MBR merupakan tantangan bagi Pemkot Tangsel. Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel dalam penyediaan kebutuhan dasar dan rumah yang layak bagi masyarakat miskin adalah pemberian bansos dan bedah rumah tidak layak huni. Selain itu, upaya pengendalian inflasi juga merupakan upaya Pemkot untuk keterjangkauan harga pangan dan perumahan di Kota Tangerang Selatan
17	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan sarana dan prasarana kota
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai dengan pendekatan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) di mana capaiannya pada tahun 2022 sebesar 5,75 dari skor ideal 10. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 di mana nilai IKLI sebesar 5, maka nilai IKLI pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peran swasta sangat berkontribusi dalam pengembangan sarana dan prasarana kota di Kota Tangsel, mengingat sebagian besar kawasan permukiman dikembangkan oleh pihak swasta. Peran swasta tersebut antara lain berkontribusi terhadap pengembangan kawasan stratregis di Kota Tangerang Selatan yang selama kurun waktu tahun 2011-2018 telah berkembang sebanyak 6 kawasan. Sementara itu peran serta masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana kota antara lain keikutsertaan masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan dan berkontribusi dalam pemeliharaan sarpras lingkungan dengan pola padat karya. Pengembangan sarpras kota yang masih menjadi tantangan untuk dikerjasamakan pembiayaannya dengan swasta yaitu sarpras pengelolaan sampah, penyediaan SPAM perpipaan, dan SPALD-Terpadu Tingkat Kota (termasuk IPLT)
18	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (*V/C Ratio*) dan Rasio Konektivitas Kota. *V/C ratio* merupakan kinerja jaringan jalan dalam menampung volume lalin di atasnya. *V/C ratio* jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan mencatatkan nilai 0,54 atau level C (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan) sementara itu rasio konektivitas kota yang merupakan alat ukur pelayanan transportasi publik mencatatkan nilai sebesar 0,63. Capaian kedua indikator tersebut jika dibandingkan dengan target capaian pada tahun 2026 mencatatkan capaian sangat rendah untuk *V/C Ratio* dan capaian rendah untuk rasio konektivitas kota. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dan simpang guna peningkatan kinerja jaringan jalan dalam mengatasi kemacetan akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, selalu terkendala karena tinggi harga lahan. Selain itu, terbatasnya kapasitas jalan dan simpang juga menyulitkan operasional transportasi umum massal berbasis jalan yang membutuhkan lebar jalan dan

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		simpang yang cukup. Sementara itu, kinerja rasio konektivitas kota yang sangat rendah disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan belum adanya layanan transportasi publik yang terintegrasi antar simpul. Jika dibandingkan dengan tren capaian kinerja dari tahun 2011-2022, indeks kinerja jaringan jalan secara umum mengalami peningkatan
19	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan prasarana sumber daya air
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai dengan capaian kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kota, di mana pada tahun 2022 capaiannya sebesar 44,05%. Jika disandingkan dengan target capaian kinerja pada tahun 2026, maka capaian tersebut termasuk dalam kategori capaian kinerja tinggi. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan SDA terutama untuk pengendalian banjir adalah adanya sungai kewenangan pusat yang belum terintegrasi penanganannya dari hulu ke hilir. Selain itu kebutuhan lahan untuk perluasan badan air sungai juga terkendala akan harga lahan yang tinggi.
20	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani air minum jaringan perpipaan dan bukan perpipaan serta Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T). Capaian Persentase rumah tangga yang terlayani air minum jaringan perpipaan dan bukan perpipaan meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 86,21% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 82,20%. Sementara itu, capaian Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T) sebesar 77% pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 85,63%. Penurunan capaian pelayanan air limbah tersebut dapat disebabkan karena perbedaan perhitungan data sasaran. Pada tahun 2016, rumah tangga yang dihitung hanya rumah tangga yang memiliki SPALD-S saja, sementara mulai tahun 2021, perhitungan capaian akses sanitasi juga menghitung rumah tangga yang mendapatkan akses SPALD-T, di mana Kota Tangsel belum memiliki SPALD-T.
21	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan drainase kota untuk mendukung kegiatan ekonomi kota

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian kinerja indikator Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, di mana pada tahun 2022 capaiannya sebesar 16,81% meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 13,36%.
22	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan untuk menciptakan lingkungan asri
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian kinerja indikator Cakupan pengelolaan sampah dan Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T). Cakupan pengelolaan sampah pada tahun 2022 sebesar 90,73% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 88,89%. Sementara itu, capaian Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T) sebesar 77% pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 85,63%. Penurunan capaian pelayanan air limbah tersebut dapat disebabkan karena perbedaan perhitungan data sasaran. Pada tahun 2016, rumah tangga yang dihitung hanya rumah tangga yang memiliki SPALD-S saja, sementara mulai tahun 2021, perhitungan capaian akses sanitasi juga menghitung rumah tangga yang mendapatkan akses SPALD-T, di mana Kota Tangerang Selatan belum memiliki SPALD-T.
23	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian kinerja indikator Persentase Penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, di mana pada tahun 2015 sebesar 49,07% meningkat menjadi 85,18% pada tahun 2022.
24	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan indikator ketersediaan informasi rencana tata ruang (RTR) wilayah. Pada tahun 2011, Kota Tangerang Selatan telah menetapkan RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, selanjutnya diubah pada tahun 2019. Sementara itu RDTR Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2042 ditetapkan pada tahun 2022. Indikator ini memang belum membuktikan ketercapaian sasaran pokok secara agregat, namun dengan adanya RTRW dan RDTR di Kota Tangsel yang digunakan untuk pengaturan dan pengendalian penataan ruang maka dapat diharapkan adanya perwujudan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
25	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Menurunnya lokasi rawan banjir kota
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan indikator luas genangan yang tereduksi yang pada tahun awal 2016 sebesar 32% meningkat menjadi 67% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, digunakan indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kota yang memiliki capaian pada tahun awal 2011 sebesar 30% meningkat menjadi 44,05% di tahun 2022, yang diharapkan dapat mengurangi lokasi rawan banjir.
26	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Terwujudnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator Persentase permukiman layak huni dan luasan permukiman kumuh perkotaan. Capaian persentase permukiman yang layak huni pada tahun 2022 tercatat sebesar 99,25% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,19%. Sementara itu luasan permukiman kumuh perkotaan menurun dari tahun 2016 yang mencapai 846 ha menjadi 101,66 ha pada tahun 2022. Untuk membantu cakupan rumah yang layak huni yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan MBR, Pemkot Tangsel melakukan upaya bedah rumah tidak layak huni dan pengelolaan rusun sewa.
27	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Tercapainya ketersediaan luas minimal Ruang Terbuka Hijau Kota
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan indikator Persentase RTH publik terhadap luas wilayah yang memiliki capaian pada tahun awal 2020 sebesar 4 % meningkat menjadi 4,3% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan standar RTH Publik untuk kawasan perkotaan sebesar minimal 20% dari luas wilayah, maka sasaran pokok ini belum tercapai disebabkan keterbatasan lahan yang tersedia untuk penyediaan RTH Publik sejak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan, yaitu <10% sehingga dibutuhkan pembebasan lahan yang selalu terkendala dengan tingginya harga lahan di Tangsel.
28	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Profesionalisme SDM Aparatur (ASN), Indeks reformasi birokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 mendapatkan nilai B (66,92),

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
		menurun dibandingkan pada tahun 2021 yang mendapatkan nilai BB. Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yang mendapatkan predikat CC maka capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2022 dapat dikatakan meningkat. Sementara itu, capaian Profesionalisme SDM Aparatur (ASN) dan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, yaitu masing-masing mendapatkan nilai 63,77 dan 65,61/B dari nilai 33,76 dan 63,48/B. Indeks persepsi korupsi pada tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 73,32, menurun dari capaian tahun 2021 yang mendapatkan nilai 82. Penurunan indeks persepsi korupsi dapat disebabkan karena belum optimalnya upaya pencegahan korupsi di internal Pemkot.
29	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya pelayanan publik
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indeks kepuasan masyarakat, di mana pada tahun 2022 mendapatkan nilai 83.5, lebih kecil dibandingkan capaian tahun 2021 yang mendapatkan nilai 85.75. Hal ini dapat disebabkan karena belum optimalnya integrasi akses pelayanan publik di Tangsel dan respons cepat tanggap terhadap aduan permasalahan pelayanan publik . Selain itu, masih belum optimalnya penyederhanaan birokrasi pelayanan publik dan transparansi proses pelayanan publik menjadi catatan dalam capaian kepuasan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan
30	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan
	Uraian Pencapaian	Capaian sasaran pokok ini dinilai berdasarkan indikator Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah dan Komposisi PAD terhadap APBD. Pemkot Kota Tangsel dapat mempertahankan WTP atas pemeriksaan keuangan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Kinerja ini meningkat dibandingkan tahun 2013-2014 yang mendapatkan predikat WDP. Sementara itu, dalam kurun waktu tahun 2011-2022. kemampuan kapasitas fiskal daerah yang digambarkan oleh persentase komposisi PAD terhadap APBD mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, komposisi PAD terhadap APBD Kota Tangsel mencapai 54,66%.
31	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan capaian indikator indeks demokrasi yang memiliki capaian pada tahun awal 2021 berupa sedang dan meningkat menjadi baik pada tahun 2022.
32	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Periode Perencanaan	Tahun 2005-2025
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai indikator Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban dan indeks rasa aman. Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, pada tahun 2022 sebesar 100% meningkat dari capaian tahun 2011 yang tercatat sebesar 60% meningkat. Sementara itu, pada tahun 2021 dan 2022, Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat aman untuk penilaian indeks rasa aman.
33	Arah Kebijakan (Sasaran Pokok)	Meningkatnya ketaatan hukum masyarakat
	Uraian Pencapaian	Capaian kinerja sasaran pokok ini dinilai berdasarkan indikator penurunan angka kriminalitas dan Tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ditindak. Angka kriminalitas di Tangsel mengalami penurunan yaitu pada tahun awal 2016 sebesar 120,72 dan terus menurun hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 73. Sementara itu, tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ditindak mengalami peningkatan semula tahun 2011 sebesar 56,4% menjadi 88,99% pada tahun 2015, merupakan upaya untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan.

2.5.3. Pencapaian RPJMD selama Periode RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

2.5.3.1. RPJMD Tahun 2011-2016

Pada kegiatan evaluasi ini, pencapaian RPJMD untuk periode 2011-2016 tidak diikutsertakan karena sebagian besar tidak memiliki indikator yang dapat diukur di tingkat kota.

2.5.3.2. RPJMD Tahun 2016-2021

Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang andal dan berdaya saing

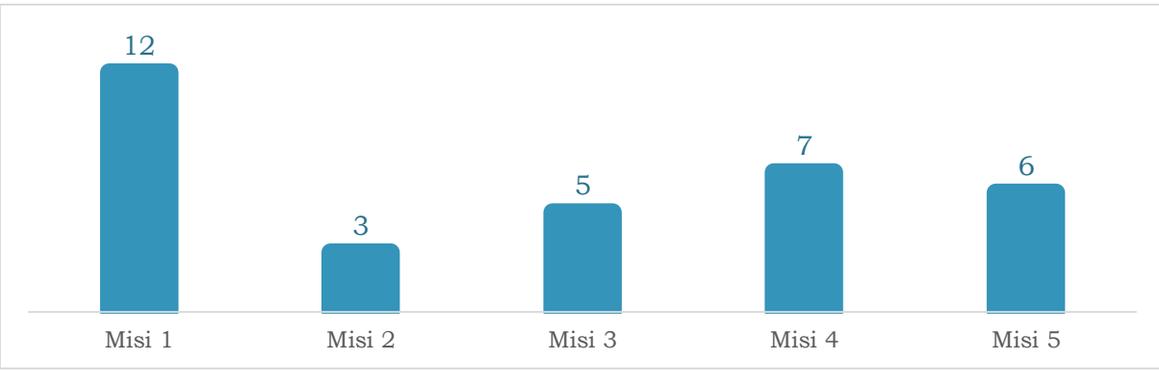
Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional

Misi 3 : Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi

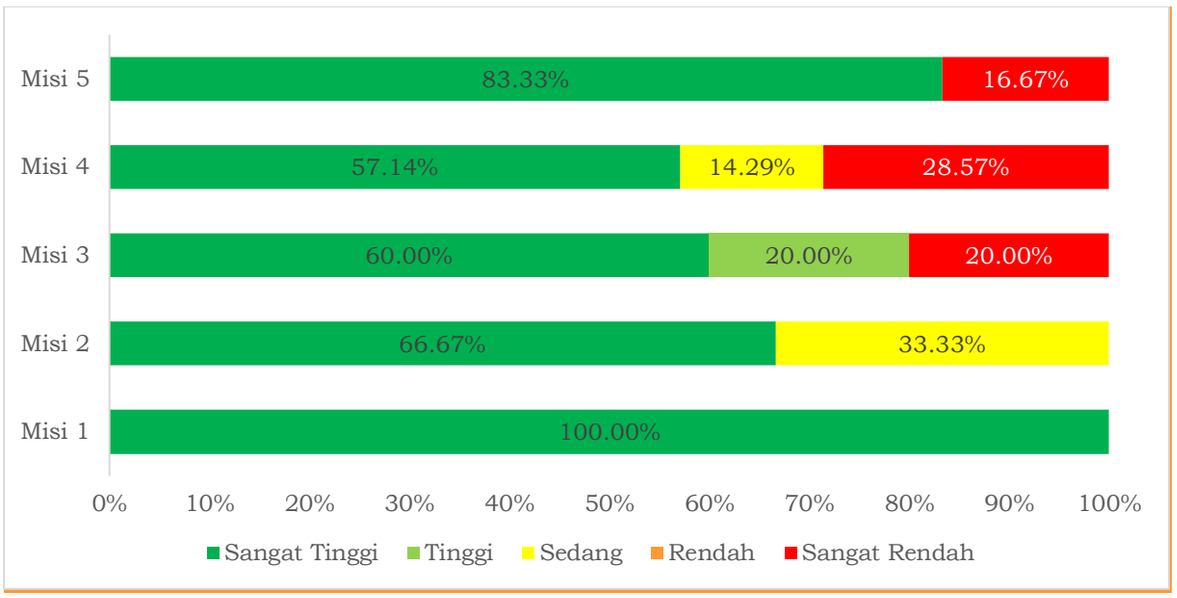
Untuk pengukuran keberhasilan pencapaian misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, ditetapkan 33 indikator sasaran yang tersebar pada masing-masing misi sesuai relevansinya. Sebaran indikator sasaran pada masing-masing misi digambarkan dalam Gambar 2.45 berikut ini.



Gambar 2.45. Sebaran Indikator pada Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

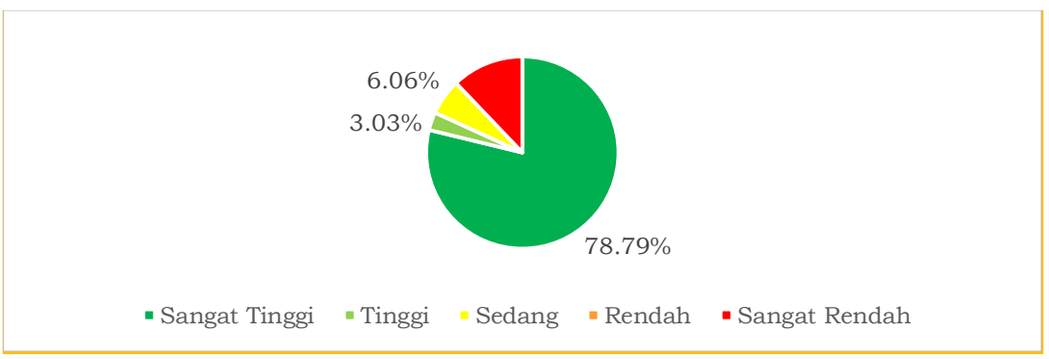
Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, misi yang memiliki tingkat capaian hingga 100% adalah misi ke-1 yang terkait pengembangan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing. Pencapaian misi ke-1 tersebut menempatkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota dengan IPM paling tinggi di Provinsi Banten. Misi yang paling rendah pencapaiannya dalam kurun waktu tahun 2016-

2021 adalah misi ke-4 yang terkait pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Tangerang Selatan adalah pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif agar dapat berdaya saing dan memiliki nilai tambah tinggi terhadap perekonomian Kota. Faktor eksternal yang menyebabkan kinerja perekonomian Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan adalah dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020. Gambaran rata-rata pencapaian misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam Gambar 2.46 di bawah ini



Gambar 2.46. Predikat Capaian Per Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Secara rata-rata, kinerja indikator pembangunan untuk pencapaian visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 mencatatkan kinerja sangat tinggi, dengan sebaran capaian target indikator predikat kinerja sangat tinggi sebesar 78,79%, kinerja tinggi sebesar 3,03%, kinerja sedang sebesar 6,06% dan kinerja sangat rendah sebesar 12,12% sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.47 di bawah ini. Kinerja indikator yang capaiannya sangat rendah adalah capaian rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota, jumlah investasi PMA, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kepuasan pelayanan publik.



Gambar 2.47. Predikat Capaian Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

2.5.3.3. RPJMD Tahun 2021-2026

Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

Misi 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul

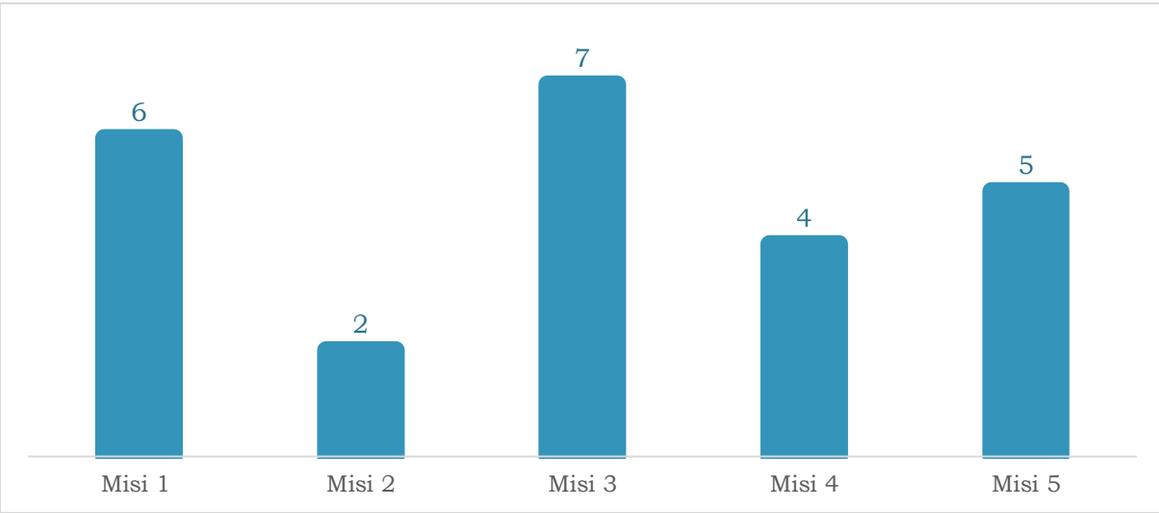
Misi 2 : Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi

Misi 3 : Membangun kota yang lestari

Misi 4 : Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif

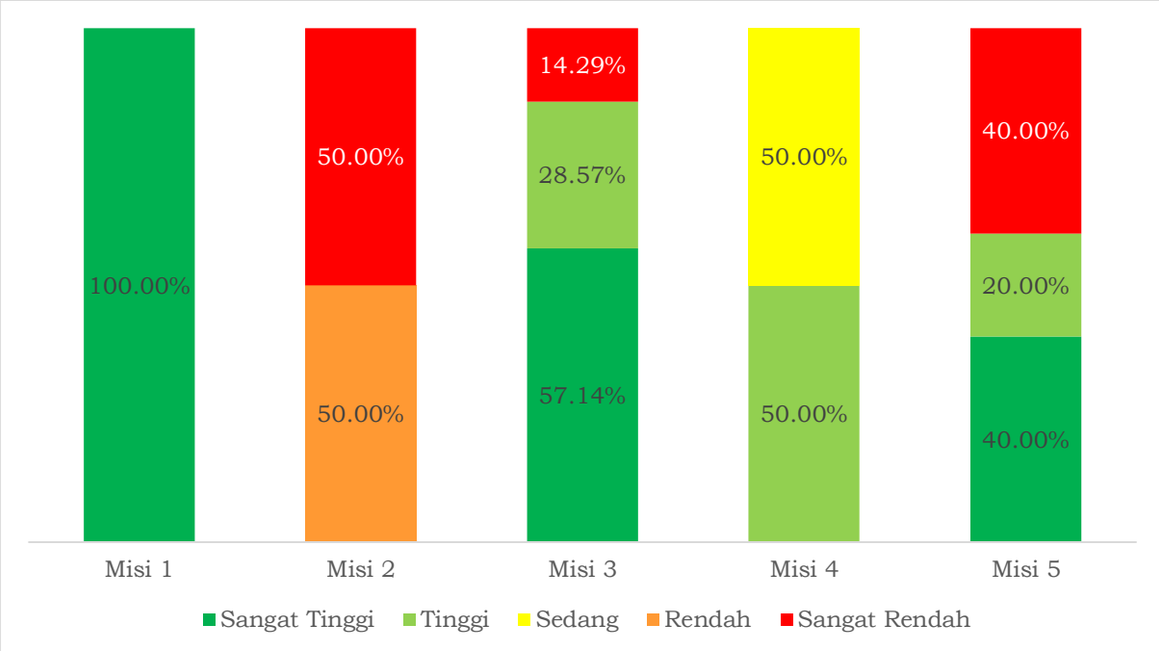
Misi 5 : Membangun birokrasi yang efektif dan efisien

Untuk pengukuran keberhasilan pencapaian misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, ditetapkan 5 (lima) indikator tujuan dan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran yang tersebar pada masing-masing misi sesuai relevansinya. Sebaran indikator sasaran pada masing-masing misi digambarkan dalam Gambar 2.48 di bawah ini.



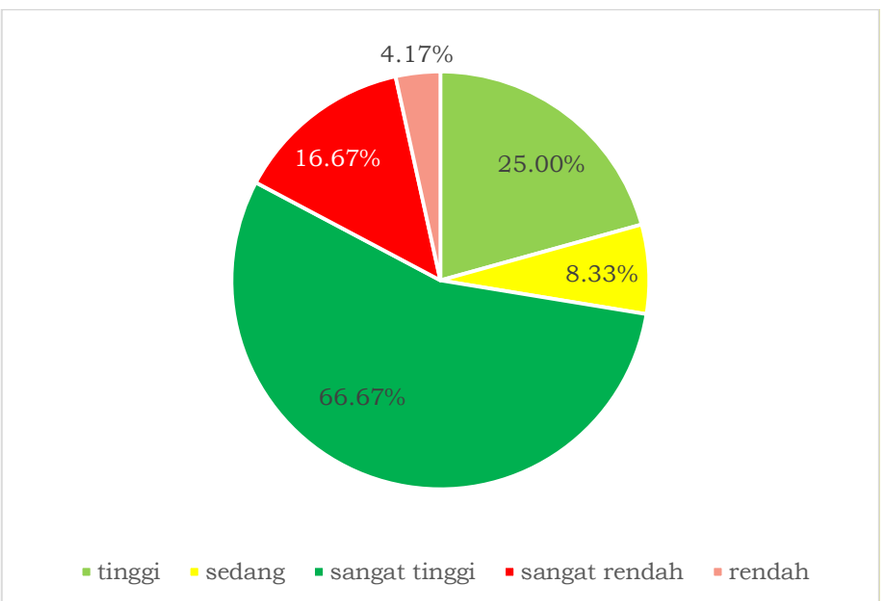
Gambar 2.48. Sebaran Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi RJPMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan sampai dengan capaian tahun 2022. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.49 di bawah ini, misi yang tingkat capaiannya hingga 100% adalah misi ke-1 yang terkait pengembangan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing. Pencapaian misi ke-1 tersebut menempatkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota dengan IPM paling tinggi di Provinsi Banten. Misi yang paling rendah pencapaiannya dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah misi ke-2 yang terkait layanan infrastruktur transportasi. Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan infrastruktur transportasi di Kota Tangerang Selatan adalah kebutuhan pembebasan lahan yang sangat besar karena tingginya harga lahan.



Gambar 2.49. Predikat Capaian Per Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Secara rata-rata, kinerja indikator pembangunan untuk pencapaian visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sampai dengan pelaksanaan tahun 2022 mencatatkan kinerja sangat tinggi, dengan sebaran capaian target indikator predikat kinerja sangat tinggi sebesar 66,67%, kinerja tinggi sebesar 25%, kinerja sedang sebesar 8,33%, kinerja capaian rendah sebesar 4,17% dan kinerja sangat rendah sebesar 16,67% sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.50 di bawah ini Kinerja indikator yang capaiannya rendah adalah capaian Rasio Konektivitas Kota , sedangkan kinerja yang capaiannya sangat rendah adalah capaian Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (*V/C Ratio*), Indeks Resiko Bencana, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Indeks Persepsi Korupsi.



Gambar 2.50. Predikat Capaian Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

2.5.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Berdasarkan Evaluasi RPJMD

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026, faktor pendorong dalam pencapaian setiap indikator kinerja sasaran antara lain

a. Komitmen pembiayaan pembangunan terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai belanja mandatory dan urusan penyelenggaraan pemerintah yang terkait dengan SPM dan pelayanan dasar;
b. Pelibatan masyarakat sebagai mitra pemberdaya dan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program-program pembangunan;
c. Pelibatan sektor swasta dalam pengembangan kawasan dan sarana prasarana perkotaan;
d. Penggunaan teknologi sistem informasi dalam pelayanan publik dan pendukung urusan penyelenggaraan pemerintah;
e. Penguatan peran kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) dalam pelaksanaan sebagai tugas penyelenggaraan pembangunan, terutama yang dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat;
f. Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan akademisi, lembaga penelitian/riset, asosiasi profesi, lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
g. Upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi ASN dengan pemberian diklat teknis dan struktural, penerapan evaluasi kinerja berbasis pencapaian *output/outcome* instansi, perekrutan ASN dengan sistem *Computer Assisted Test* (*CAT*) dan *online*, *open bidding* untuk penempatan jabatan pimpinan tinggi, perubahan struktur jabatan pada level eselon 4 menjadi jabatan fungsional.

Sementara itu, faktor penghambat terhadap kinerja sasaran yang belum tercapai secara progresif adalah:

a. Dampak pandemi Covid 19 yang masih dalam tahap pemulihan;
b. Tingginya harga lahan yang menyebabkan terkendalanya kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan;
c. Terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan sesuai standar;
d. Belum efektifnya pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif penyediaan sarana prasarana perkotaan yang membutuhkan biaya sangat besar dan teknologi tinggi;
e. Belum optimalnya akuntabilitas dan profesionalisme ASN dalam pelaksanaan program-program pemerintah;
f. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan daerah;
g. Belum optimalnya daya saing SDM di level nasional dan internasional;
h. Akses pelayanan publik masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, walaupun sudah memanfaatkan teknologi informasi;

i. Ketersediaan dan validitas data sektoral belum akuntabel dan terintegrasi, terutama untuk perencanaan pembangunan dan penentuan sasaran pembangunan;
j. Belum optimalnya pemanfaatan data dan konsistensi hasil evaluasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan;
k. Belum optimalnya Penerapan manajemen kinerja melalui perencanaan kinerja berbasis *outcome*, evaluasi dan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil kinerja;
l. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
m. Belum optimalnya pelayanan prima yang cepat tanggap dan efektif dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.

2.5.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Menurut Persepsi Masyarakat

Selain mengindentifikasi faktor pendorong dan penghambat berdasarkan capaian kinerja, analisis faktor pendorong dan penghambat juga dilakukan melalui survei kepada masyarakat kota Tangerang Selatan untuk menggali persepsi masyarakat. Data kualitatif yang diperoleh dari survei selanjutnya dianalisis dengan pendekatan *text analysis* dengan melalui beberapa tahapan pra-proses. Berikut ini adalah hasil dari analisis untuk memperoleh faktor pendorong dan penghambat bagi kinerja pembangunan pemerintah kota Tangerang Selatan.

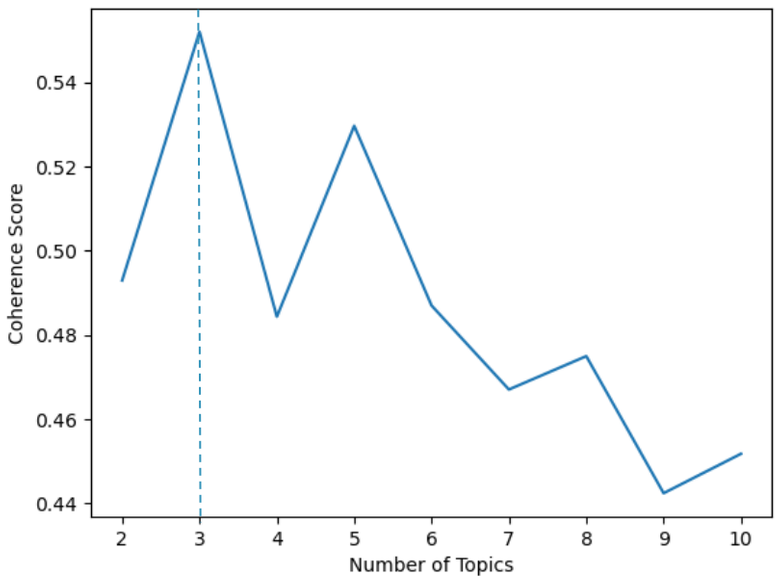
2.5.5.1. Faktor Pendorong

Pada Gambar 2.51 di bawah ini terlihat bahwa beberapa kata kunci yang mendominasi persepsi masyarakat tentang faktor pendorong bagi kinerja pembangunan di kota Tangerang Selatan adalah pembangunan, masyarakat, jalan, dan SDM. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk bisa memahami secara utuh makna dari kata-kata kunci tersebut dalam konteks sebagai faktor pendorong.



Gambar 2.51. *Word cloud* faktor pendorong

Selanjutnya metode *Latent Dirichlet Allocation (LDA)* digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik utama pada faktor pendukung yang disampaikan oleh responden. Banyaknya topik yang optimal ditentukan berdasarkan *coherence score* seperti yang terlihat pada Gambar 2.52 berikut ini. Berdasarkan ukuran tersebut, dipilih tiga topik utama yang memiliki *coherence score* tertinggi.



Gambar 2.52. *Coherence score* untuk penentuan topik pada faktor pendorong

Hasil survei menunjukkan terdapat tiga topik utama pada persepsi masyarakat terkait dengan faktor pendorong, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.143 berikut ini

Tabel 2.143. Ulasan dengan faktor pendukung paling berkontribusi di masing-masing topik

No.	Topik	Contoh Ulasan
1	banyaknya SDM dan jalan (infrastruktur)	SDM yang mumpuni dan kredibilitas pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat
2	kualitas pembangunan, transportasi, dan masyarakat umum	Pembangunan fasilitas umum sangat bagus sekolahan SD dan SMP bahkan TK negeri
3	ekonomi dan infrastruktur	Perekonomian yang stabil, keterlibatan penduduk, kepercayaan investor

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendorong kinerja pembangunan di kota Tangerang Selatan di antaranya adalah:

- Kapasitas dan peranan pemerintah kota
- Program yang disusun oleh pemerintah kota
- Upaya peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah kota

- Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kota

Jika lakukan penelurusan lebih spesifik, identifikasi faktor pendorong jika dikaji berdasarkan kelompok umur atau asal generasi responden. Dapat diuraikan hasil seperti berikut ini:

a) sebagian Gen Z (25-35), sebagian Generasi *Boomer* (45-55 & >65) lebih fokus pada Peningkatan SDM
b) Gen Z 2000an (18-25) lebih mementingkan kualitas pembangunan dan masyarakat umum
c) Generasi Milenial (35-45) dan *Boomer* akhir produktif (55-65) lebih mementingkan pemerataan ekonomi dan infrastruktur

Sedangkan menurut asal kecamatan, faktor pendorong dapat diuraikan seperti berikut ini:

a) Kecamatan Pamulang, Ciputat, Serpong lebih fokus pada peningkatan SDM
b) Kecamatan Pondok Aren dan Serpong Utara lebih mementingkan kualitas pembangunan dan masyarakat umum
c) Kecamatan Setu dan Ciputat Timur lebih mementingkan pemerataan ekonomi dan infrastruktur

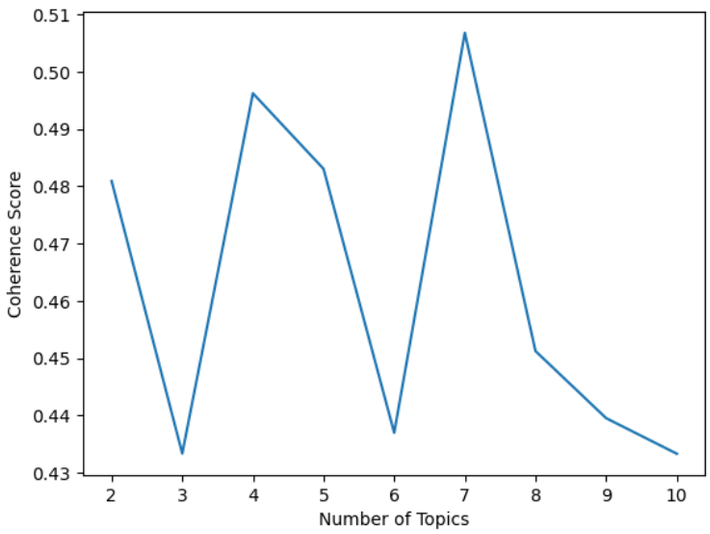
2.5.5.2. Faktor Penghambat

Pada Tabel 2.53 di bawah ini terlihat bahwa beberapa kata kunci yang mendominasi persepsi masyarakat tentang faktor penghambat bagi kinerja pembangunan di kota Tangerang Selatan adalah kurang, pembangunan, masyarakat, kerja, ormas, dan jalan. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk bisa memahami secara utuh makna dari kata-kata kunci tersebut dalam konteks sebagai faktor penghambat.



Gambar 2.53. *Word cloud* faktor penghambat

Metode *LDA* digunakan untuk mengidentifikasi banyaknya topik pada ulasan faktor penghambat kinerja pembangunan yang dituliskan oleh responden. Berdasarkan ukuran *coherence score*, banyaknya topik adalah 7 topik, seperti yang terlihat pada Gambar 2.54.



Gambar 2.54. *Coherence score* penentuan topik pada faktor penghambat

Hasil survei menunjukkan terdapat enam topik utama pada persepsi masyarakat terkait dengan faktor pendorong sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.144 berikut ini.

Tabel 2.144. Ulasan dengan faktor penghambat paling berkontribusi di masing-masing topik

No.	Topik	Contoh Ulasan
1	birokrasi yang menghambat, kurangnya sdm, kondisi jalan	Birokrasi yang terlalu rumit, penanganan keluhan masyarakat yang sangat lambat, masih banyak tingkat kriminalitas, pungutan liar oleh ormas. Kurangnya pemimpin turun ke bawah (masyarakat)
2	banyaknya pembangunan yang tidak dikerjakan secara baik	Kurangnya pemantauan kerja secara rutin sehingga kinerja pembangunan tidak teratur dan terhambat
3	tidak adanya kontrol pembangunan di Tangsel sehingga kondisi pekerjaan menjadi kurang	Pemerintah. Jujur pemerintah berjalan sangat lambat, bahkan seolah olah tidak ada pemerintahan yang mengurus disini, jalanan rusak sudah tahunan, bekas proyek drainase tidak dibetulkan kembali, jalanan banyak yang berlubang dan membahayakan, stasiun sudimara sumber macet sudah tahunan tidak ada solusi plus jalan di akses rel kereta lubang besar sekali dan membahayakan, janji akan pelebaran jalan sumatera tidak ditepati, masyarakat banyak bersabar, akses buruk kecuali jalanan milik Bintaro Jaya dan BSD. Tidak ada kontrol pembangunan *cluster* dan memperdayaan air tanah, harusnya pam sudah masuk di mana-mana. Sangat disayangkan.
4	tidak adanya atau kurangnya tempat yang tepat untuk pertanyaan kepada pejabat, pegawai politik	▪ kerumitan politik dan regulasi yg tidak implementable ▪ mungkin laporan-laporan masyarakat yang tidak sampai kepada Pemda Tangsel?

No.	Topik	Contoh Ulasan
5	ormas, penduduk, remaja, di jalanan	Maraknya ormas aliran kiri yang mengatur/mempersulit proses jalannya program pemerintah, pungli, selalu ada oknum aparat dan ormas.
6	pemerintahan yang korup, sdm yang rendah	Korupsi dan ketidaksigapan aparatur pemerintahan dalam pembangunan ataupun perbaikan yang perlu ditangani
7	ormas, masyarakat, sampah kota yang tidak baik	Masih banyak masyarakat yang kurang *aware* akan hal-hal kecil, sbg contoh masih banyak yang suka buang sampah rumah tangga sembarangan hingga menggunung, masih banyak orang yg membangun rumah/tempat usaha di jalanan umum. Kurang tegasnya sanksi dari peraturan-peraturan yang diberikan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penghambat kinerja pembangunan di kota Tangerang Selatan di antaranya adalah:

- Akuntabilitas aparat pemerintah yang kurang optimal
- Birokrasi yang rumit
- Penundaan perbaikan jalan/pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai
- Perizinan yang menyalahi tata ruang
- Pengelolaan sampah kota
- Ormas yang kurang terorganisir

Secara lebih spesifik, faktor-faktor penghambat yang diutarakan oleh responden menurut asal generasi (kelompok umur) dapat diuraikan seperti di bawah ini.

a) Generasi *Boomer* Akhir (>65) lebih fokus pada Birokrasi dan kurangnya SDM
b) Generasi Milenial (35-45) lebih memiliki isu pada banyaknya pekerjaan (infrastruktur/ketersediaan pekerjaan) yang tidak berkualitas
c) Gen Z (18-25 & 25-35) dan *early boomer* (45-55) lebih memiliki masalah pada kurangnya pembangunan infrastruktur
d) Generasi Boomer Akhir Produktif (55-64) lebih mengutamakan faktor korupnya pemerintahan dan SDM yang rendah

Sedangkan menurut faktor penghambat yang dianalisis menurut kecamatan dapat diuraikan seperti berikut ini.

a) Kecamatan Setu lebih fokus pada Banyaknya pekerjaan (infrastruktur/ketersediaan pekerjaan) yang tidak berkualitas
b) Kecamatan Ciputat dan Serpong lebih memiliki masalah pada kurangnya pembangunan infrastruktur
c) Kecamatan Pondok Aren dan Serpong Utara lebih menginginkan pembenahan dari korupnya pemerintahan dan sdm yang rendah

Kecamatan Pamulang dan Ciputat Timur memiliki masalah pada pengelolaan sampah, ormas, masyarakat, dan tata kota yang tidak baik.

2.5.6. Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025

Berdasarkan dokumen Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

A. Bidang Sosial dan Kehidupan beragama

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Kondisi tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya komitmen pembiayaan pembangunan terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai belanja mandatory dan urusan penyelenggaraan pemerintah yang terkait dengan SPM dan pelayanan dasar, pelibatan masyarakat sebagai mitra pemberdayaan dan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program-program pembangunan, dan penguatan peran kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) dalam pelaksanaan sebagai tugas penyelenggaraan pembangunan, terutama yang dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat.

Tantangan dan arah kebijakan yang perlu didorong ke depan dalam pembangunan bidang sosial dan kehidupan beragama di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan. Pembangunan pendidikan Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada tantangan untuk pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mampu mengatasi beberapa tantangan diantaranya partisipasi pendidikan usia dini yang masih rendah, kuantitas dan kualitas guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik baik jenjang PAUD, SD maupun SMP. Pencapaian pembangunan pendidikan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu didorong, yaitu:
   a) Meningkatkan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempercepat wajib belajar 13 tahun;
   b) Meningkatkan pengelolaan pendidikan termasuk tenaga pendidik pada jenjang PAUD, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan dan non formal;
   c) Adopsi pembelajaran *STEAM* (*Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics*); dan
   d) Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital.

2. Kesehatan. Tantangan pembangunan kesehatan Kota Tangerang Selatan yang perlu diatasi adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu, Kota Tangerang Selatan menghadapi kekurangan

gizi mikro dan makro yang tercermin dari masih tingginya angka *stunting* yang mencapai 9%. Pencapaian pembangunan kesehatan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

a) Upaya peningkatan pelayanan kesehatan;
b) Penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
c) Jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting.

3. Sosial Budaya. Kesenjangan perekonomian antar wilayah dan antar kelompok masyarakat masih menjadi tantangan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi dan upaya penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan struktur permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga tingkat kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. Tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya pembangunan pemuda dan keluarga serta perlu terus dijaga kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang berkebudayaan sebagai modal utama pembangunan. Hal-hal yang perlu menjadi prioritas dalam arah kebijakan RPJPD berikutnya, adalah:

a) Penuntasan kemiskinan;
b) Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;
c) Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja;
d) Mendorong kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang religius dan berkebudayaan maju; dan
e) Perkuatan pembinaan keluarga berkualitas.

B. Bidang Ekonomi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mampu melakukan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang sempat mempengaruhi sejumlah capaian indikator pembangunan ekonomi. Namun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Tangerang Selatan adalah pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif

agar dapat berdaya saing dan memiliki nilai tambah tinggi terhadap perekonomian kota terlebih terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021 berkontribusi terhadap turunnya geliat perekonomian di Kota Tangerang Selatan, termasuk sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Dalam menghadapi kondisi tersebut, meski pencapaian bidang ekonomi Kota Tangerang Selatan, telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih perlu didorong terutama dalam upaya:

a) Industrialisasi meliputi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi
b) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan utama kota dan ekonomi kreatif berkelanjutan.
c) Meningkatkan produktivitas UMKM dan Koperasi.
d) Peningkatan tenaga kerja produktif dan berkelas dunia.

C. Bidang Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota di Tangerang Selatan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Pada pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi, dan telekomunikasi dan informasi telah cukup optimal. Namun pada pelayanan sumber daya air, transportasi dan penanganan drainase kota masih belum optimal. Tantangan dan kendala terhadap hal tersebut diantaranya adalah kebutuhan pembebasan lahan yang sangat besar karena tingginya harga lahan dan belum terintegrasinya pelayanan transportasi publik antar simpul. Selain itu, belum efektifnya pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif penyediaan sarana prasarana perkotaan yang membutuhkan biaya sangat besar dan teknologi tinggi. Kebijakan yang perlu didorong untuk RPJPD berikutnya adalah upaya:

a) Meningkatkan kinerja layanan dan konektivitas infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi untuk mendukung pemanfaatan ruang kota yang lebih efisien dan peningkatan kesejahteraan penduduk;
b) Mengembangkan sistem transportasi angkutan umum terintegrasi dan Pengembangan transportasi ramah lingkungan;
c) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema kerja sama lainnya sebagai alternatif penyediaan sarana prasarana perkotaan yang membutuhkan biaya sangat besar dan teknologi tinggi.

D. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Pencapaian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih dihadapkan beberapa tantangan antara lain: kualitas lingkungan hidup masih berada pada 51,08 (kategori sedang), pengelolaan sampah perkotaan yang belum optimal, ketahanan bencana dan perubahan ikilim terutama pengendalian banjir dan penurunan Gas Rumah

Kaca (GRK), serta proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30 persen belum terpenuhi. Kebijakan RPJPD berikutnya diarahkan pada:

a) Perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (*sustainable lifestyle*).
b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga.
c) Pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.

E. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggungjawab di Kota Tangerang Selatan masih ditemui beberapa tantangan, diantaranya: belum optimalnya akuntabilitas dan profesionalisme ASN dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah, belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dari internal dan belum optimalnya pengembangan inovasi daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan daerah. Pencapaian tata kelola pemerintahan telah menunjukan perkembangan yang semakin meningkat, ke depan masih perlu didorong terutama dalam upaya:

a) Meningkatkan kinerja birokrasi dan menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara
b) Memperkuat pencegahan korupsi
c) Meningkatkan layanan publik dan digitalisasi layanan Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pengembangan inovasi daerah.

F. Lain-lain

Hal-hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan ke depan, adalah sebagai berikut:

a. Perlunya memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing strategi dan arah kebijakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.
b. Perlunya perhatian khusus terhadap ketersediaan dan akuntabilitas data-data sektoral yang akan digunakan dalam analisis proyeksi kinerja. Data-data sektoral yang mutakhir dan relevan akan sangat mempengaruhi kualitas perencanaan jangka panjang daerah;
c. Perlunya penguatan pola kolaborasi dan kerja sama dengan akademisi dan praktisi pembangunan untuk mendapatkan masukan inovatif dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.

2.5.7. Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

2.5.7.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis pembangunan KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Selain itu juga mempertimbangkan skenario kondisi lingkungan terutama daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2030 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain terutama aspek lingkungan. Dalam dokumen KLHS RPJPD, indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang. Perumusan isu strategis dan permasalahan dalam KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 2.145 di bawah ini. Perumusan isu strategis didasarkan pada isu strategis terkait TPB dan isu strategis hasil penjaringan masukan. Sedangkan perumusan permasalahan didasarkan pada kondisi sumber daya dan lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan, indikator TPB yang belum tercapai dan yang akan terdata sampai dengan akhir 2045.

Tabel 2.145. Permasalahan dan Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Isu Strategis	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB
1) Kota Layak Huni:	
Ketercukupan pangan	• Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan, realisasi pencapaian 90% dari target 92,5. • Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (N/A) • Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (N/A)
Air minum perpipaan	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, realisasi pencapaian 86,21% dari target 100%.
Sistem sanitasi perkotaan	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, realisasi pencapaian 97,53% dari target 100%.
Kualitas lingkungan	• Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (N/A) • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (N/A) • Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, realisasi pencapaian 66,00 menurun dari target meningkat.
Persampahan	• Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang, realisasi pencapaian 2,3 ton dari target 20 ton.

Isu Strategis	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB
	• Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister (N/A)
Jaringan energi melalui sambungan gas rumah dan konversi BBM menjadi listrik	• Bauran energi terbarukan. (N/A) • Intensitas energi primer (N/A)
Penyediaan perumahan yang layak	• Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, realisasi pencapaian 68,03%.
Transportasi publik terintegrasi	• Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, realisasi pencapaian 40%
Keamanan melalui penegakan Perda/aturan	• Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (N/A)
Mitigasi bencana	• Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), realisasi pencapaian 79,86% dari target menurun hingga 30%. • Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk (N/A) • Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan (N/A)
RTH dan ruang publik	• Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang, realisasi pencapaian 4,30% dari keseluruhan wilayah kota atau setara dengan 708,86 ha dari target 30% RTH publik.
Partisipasi masyarakat	• Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan (N/A).
Pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis satu data regsosek, termasuk perlindungan sosial bagi lansia dan difabel	• Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, realisasi pencapaian 2,50% dari target menurun. • Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, realisasi pencapaian 7960 dari target menurun.
2) Penanganan Efek Gas Rumah Kaca	• Persentase Perubahan Emisi CO_2/Emisi Gas Rumah Kaca (N/A)
3) Kualitas Pendidikan	• Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat, realisasi pencapaian 106,83% dari target 114,09%. • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, realisasi pencapaian 100,39% dari target 106,94%. • Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika (N/A)
Kebutuhan *soft skil*l, dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia Emas	• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, realisasi pencapaian 6% dari target meningkat. • Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat

Isu Strategis	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB
	pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, realisasi pencapaian 0,80% dari target meningkat. • Persentase tenaga kerja formal, realisasi pencapaian 21,65% dari target 51% • Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, realisasi pencapaian 6,59% meningkat dari target menurun. • Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur, realisasi pencapaian 8% meningkat dari target meningkat.
4) Kesehatan	
Penyakit menular atau tidak menular akibat lingkungan, pandemi ada potensi berulang, *aging population*	• Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, realisasi pencapaian 97,31% dari target 95% • Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, realisasi pencapaian 59,35% dari target 65%. • Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, realisasi pencapaian 0,83% dari target menurun. • Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, realisasi pencapaian 0,027 dari target menurun. • Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, realisasi pencapaian 0,027 dari target menurun. • Prevalensi HIV pada populasi dewasa, realisasi pencapaian 0,10% dari target <0,5%. • Kejadian Malaria per 1000 orang, realisasi pencapaian 0,1 dari target menurun. • Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir, realisasi pencapaian 0,0048 dari target menurun. • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), realisasi pencapaian 97,31% dari target meningkat. • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern, realisasi pencapaian 96,89% dari target meningkat.
5) Tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*) berbasis riset/kelitbangan dan pemanfaatan TIK	• Persentase penggunaan *E- procurement* terhadap belanja pengadaan (N/A). • Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB, realisasi pencapaian 0,06% dari target meningkat.
6) Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya MBR	• Laju pertumbuhan PDB per kapita, realisasi pencapaian 5,82% dari target meningkat. • Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit (N/A). • Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai

Isu Strategis	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB
	tambah industri (N/A).
7) Pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah	• Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, realisasi pencapaian 1,87% dari target di atas 12%.
8) Alternatif pembiayaan pembangunan/sumber pembiayaan non APBD	• Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, realisasi pencapaian 91,56% dari target meningkat. • Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), realisasi pencapaian Ada dari target Ada • Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), realisasi pencapaian Ada dari target Ada.

2.5.7.2. Visi

Rekomendasi visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan KLHS RPJPD adalah perlu memasukkan kata “kota yang aman, nyaman dan layak huni dan pelayanan dasar”.

2.5.7.3. Misi

Rekomendasi misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan KLHS RPJPD adalah perlu adanya misi terkait mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pelayanan infrastruktur dasar.

2.5.7.4. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Rekomendasi sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan KLHS RPJPD disajikan pada Tabel 2.146 di bawah ini.

Tabel 2.146. Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
1	Kota Layak Huni:												
	ketercukupan pangan,	• Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, realisasi pencapaian 90% dari target 92,5. • Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (N/A) • Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (N/A)	(1) Kota Layak Huni	• Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourish ment*) (N/A) • Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (N/A)	Visi perlu memasukkan kata "kota yang aman, nyaman dan layak huni dan pelayanan dasar"	• Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup • Mewujudkan pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya ketahanan dan ketangguhan pangan	• Meningkatkan ketahanan dan ketangguhan pangan dan gizi yang baik					• Pertanian • Pangan • Perikanan • Perdagangan
	air minum perpipaan,	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, realisasi pencapaian 86,21% dari target 100%.					Meningkatnya akses air minum yang aman dan terjangku melalui air permukaan	• Meningkatkan akses air minum yang aman dan terjangkau melalui air permukaan • Meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air					Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	sistem sanitasi perkotaan,	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, realisasi					Meningkatnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai	Meningkatkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai					• Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat Dan

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
		pencapaian 97,53% dari target 100%											Kawasan Permukiman
	kualitas lingkungan,	• Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (N/A) • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (N/A) • Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, realisasi pencapaian 66,00 menurun dari target meningkat.		• Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (N/A) • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (N/A)			Meningkatnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai	Meningkatkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai					• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman • Kesehatan
	persampahan	• Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang, realisasi pencapaian 2,3 ton dari target 20 ton. • Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister (N/A)		• Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister (N/A)			Meningkatnya kota layak huni yang berkelanjutan	Pengurangan produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	jaringan energi melalui sambungan gas rumah dan konversi BBM menjadi listrik,	• Bauran energi terbarukan. (N/A) Intensitas energi primer (N/A)		• Bauran energi terbarukan. (N/A) • Intensitas energi primer (N/A)									Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	penyediaan perumahan yang layak,	• Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, realisasi pencapaian 68,03%.		Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			Meningkatnya permukiman layak huni dan terjangkau serta berkelanjutan	Meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau terutama bagi MBR					• Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
													• Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	transportasi publik terintegrasi,	• Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, realisasi pencapaian 40%		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan			Meningkatnya akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua	Meningkatkan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua.					Perhubungan
	keamanan melalui penegakan Perda/aturan,	• Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (N/A)		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (N/A)			Menurunnya segala bentuk kekerasan	Mengurangi segala bentuk kekerasan					Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
	mitigasi bencana,	• Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), realisasi pencapaian 79,86% dari target menurun hingga 30%. • Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk (N/A) • Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan (N/A)		• Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk (N/A) • Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan (N/A)			Meningkatnya kota layak huni yang berkelanjutan	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya akibat bencana alam dan non alam					Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
	RTH dan ruang publik,	• Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang, realisasi pencapaian 4,30% dari keseluruhan wilayah kota atau setara dengan 708,86 Ha dari target 30% RTH publik.		Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang			Meningkatnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang aman	• Meningkatkan ruang terbuka hijau publik dan ruang publik yang aman dan merata • Gerakan penanaman 1 rumah 1 pohon					• Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
	partisipasi masyarakat,	• Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan (N/A).		Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan					• Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak • Pemberdayaan Masyarakat • Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis satu data regsosek, termasuk perlindungan sosial bagi lansia dan difabel	• Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, realisasi pencapaian 2,50% dari target menurun. • Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, realisasi pencapaian 7960 dari target menurun.		• Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. • Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur			Meningkatnya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40%	• Pemerataan hak atas sumber daya ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan • Mengurangi kesenjangan ekonomi • Mengurangi kesenjangan hukum dan praktik diskriminatif lainnya. • Meningkatkan ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim, termasuk bencana					• Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak • Pemberdayaan Masyarakat • Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana • Sosial • Kesehatan • Tenaga Kerja

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
				• Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur • Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerj aan • Persentase tenaga kerja formal. • Laju pertumbuhan PDB per kapita. • Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.									
2	Penangan Efek Gas Rumah Kaca	• Persentase Perubahan Emisi CO_2/Emisi Gas Rumah Kaca (N/A)	(2) Penangan Efek Gas Rumah Kaca				Meningkatnya kota layak huni yang berkelanjutan	Meningkatkan penggunaan energi terbarukan (ETB)					Lingkungan Hidup
							Meningkatnya pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	Meningkatkan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua					
							Meningkatnya penggunaan energi terbarukan						
3	Kualitas Pendidikan	• Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat, realisasi pencapaian 106,83% dari target 114,09%.	(3) kualitas pendidikan	• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.			Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar,	• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar,					Pendidikan

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
		• Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, realisasi pencapaian 100,39% dari target 106,94%. • Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika (N/A)		• Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/se derajat.									
	kebutuhan soft skill, dan memanfaatkan bonus demografi indonesia emas	• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, realisasi pencapaian 6% dari target meningkat. • Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, realisasi pencapaian 0,80% dari target meningkat. • Persentase tenaga kerja formal, realisasi pencapaian 21,65% dari target 51% • Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, realisasi pencapaian 6,59% meningkat dari target menurun.											• Tenaga Kerja • Pendidikan
		• Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur, realisasi pencapaian 8%											

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
		meningkat dari target meningkat.											
		• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, realisasi pencapaian 6% dari target meningkat.											
4	Kesehatan :												
	penyakit menular atau tidak menular akibat lingkungan, pandemi ada potensi berulang, *aging population*	• Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, realisasi pencapaian 97,31% dari target 95% • Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, realisasi pencapaian 59,35% dari target 65%. • Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, realisasi pencapaian 0,83% dari target menurun. • Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, realisasi pencapaian 0,027 dari target menurun. • Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, realisasi pencapaian 0,027 dari target menurun.	(4) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	• Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. • Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. • Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. • Prevalensi HIV pada populasi dewasa. • Kejadian Malaria per 1000 orang. • Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15			Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua	• Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua • Mengurangi dan mencegah epidemi dan penyakit menular. • Menurunkan angka kematian bayi dan balita					Kesehatan

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
		• Prevalensi HIV pada populasi dewasa, realisasi pencapaian 0,10% dari target <0,5%. • Kejadian Malaria per 1000 orang, realisasi pencapaian 0,1 dari target menurun. • Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir, realisasi pencapaian 0,0048 dari target menurun. • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), realisasi pencapaian 97,31% dari target meningkat. • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern, realisasi pencapaian 96,89% dari target meningkat.		tahun dalam satu tahun terakhir. • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).									
5	Tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*) berbasis riset/kelitban gan dan pemanfaatan TIK	• Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan (N/A). • Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB, realisasi pencapaian 0,06% dari target meningkat.	(5) Tata kelola pemerintaha n yang baik berbasis riset/kelitba ngan dan pemanfaatan TIK				Meningkatnya kerja sama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi	• Meningkatkan kerja sama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi					Perencanaan
6	Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya MBR	• Laju pertumbuhan PDB per kapita, realisasi pencapaian 5,82% dari target meningkat. • Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit (N/A).	(6) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha				Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat miskin dan rentan	• Pemerataan hak atas sumber daya ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk					Perencanaan

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
		• Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri (N/A). • Tingkat setengah pengangguran (N/A).	khususnya MBR					masyarakat miskin dan rentan					
7	Pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah	• Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, realisasi pencapaian 1,87% dari target di atas 12%.	(7) Pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah	• Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. • Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.			Meningkatknya sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas loka	• Meningkatkan sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas lokal • Meningkatkan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat					• Keuangan • Perencanaan
8	Alternatif pembiayaan pembangunan /sumber pembiayaan non APBD	• Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, realisasi pencapaian 91,56% dari target meningkat. • Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), realisasi pencapaian Ada dari target Ada	(8) Peningkatan alternatif pembiayaan pembangunan/sumber pembiayaan non APBD				Meningkatnya kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat	• Meningkatkan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat					• Keuangan • Perencanaan

No.	Isu Strategis Hasil Penjaringan	Permasalahan Terkait Capaian Indikator TPB	Isu Strategis PB	Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenangan
					Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan RPJPD	5 tahun ke I	5 tahun ke II	5 tahun ke III	5 tahun ke IV	
		• Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), realisasi pencapaian Ada dari target Ada.											

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan, serta para pakar kependudukan bekerja sama menyusun asumsi dalam perhitungan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dibuat dengan metode komponen kohort berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta migrasi (migrasi internasional dan migrasi internal antarprovinsi) yang paling mungkin terjadi selama periode 30 (tiga puluh) tahun yang akan datang. Proyeksi penduduk Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional. Selanjutnya, dihitung proyeksi penduduk per provinsi. Adapun hasil proyeksi penduduk nasional digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level provinsi. Dengan demikian, total penduduk seluruh provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk nasional yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Setelah itu, dihitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota. Hasil proyeksi penduduk provinsi digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level kabupaten/kota. Sehingga, total penduduk seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk provinsi yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi.

Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020–2035 adalah penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Mengingat pentingnya akurasi data penduduk dasar, dilakukan assessment terhadap komposisi penduduk dasar menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dengan mempertimbangkan struktur piramida penduduk hasil

SP2020 yang mengindikasikan terjadinya *age heaping*, maka dilakukan perapihan umur dengan teknik Arriaga agar kesalahan pelaporan umur tidak berlanjut sepanjang periode proyeksi. Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang. Masukan dari pertemuan tersebut menjadi pedoman tim teknis BPS dalam menentukan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi. Selanjutnya, tim teknis BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan program *Rural Urban Projection* (*RUP*). Angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan beberapa kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada setiap asumsi.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam bab ini bukanlah merupakan suatu prediksi atau perkiraan. Proyeksi di dalam bab ini adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Tangerang Selatan jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama dua puluh tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045. Data penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sampai dengan 2045 berdasarkan hasil SP 2020 disajikan pada Tabel 2.147

Tabel 2.147. Data penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2045

Tahun	Laki-laki	Proporsi laki-laki	Perempuan	Proporsi perempuan	Total
2020	676.632	50,07%	674.682	49,93%	1.351.314
2021	683.100	50,03%	682.300	49,97%	1.365.400
2022	689.140	49,98%	689.570	50,02%	1.378.710
2023	694.960	49,94%	696.690	50,06%	1.391.650
2024	698.140	49,89%	701.350	50,11%	1.399.490
2025	698.659	49,83%	703.504	50,17%	1.402.163
2026	699.250	49,77%	705.790	50,23%	1.405.040
2027	699.950	49,71%	708.210	50,29%	1.408.160
2028	700.760	49,65%	710.770	50,35%	1.411.530
2029	701.680	49,58%	713.480	50,42%	1.415.160
2030	702.769	49,52%	716.378	50,48%	1.419.147
2031	704.070	49,46%	719.530	50,54%	1.423.600
2032	705.620	49,39%	722.920	50,61%	1.428.540
2033	707.440	49,33%	726.590	50,67%	1.434.030
2034	709.530	49,27%	730.530	50,73%	1.440.060

Tahun	Laki-laki	Proporsi laki-laki	Perempuan	Proporsi perempuan	Total
2035	711.654	49,21%	734.514	50,79%	1.446.168
2040	718.677	48,91%	750.829	51,09%	1.469.506
2045	719.707	48,63%	760.380	51,37%	1.480.087

Sumber Data: BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Parameter fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian) hasil proyeksi penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 2.148, di mana tergambar bahwa angka kelahiran di Kota Tangerang Selatan dinilai akan mengalami tren penurunan. Hal ini menggambarkan perlunya upaya penyesuaian dan inovasi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana agar keberlangsungan generasi dapat tetap terjaga. Sementara itu, jika melihat tren angka kematian dalam kurun waktu 2025-2045, terlihat bahwa angka kematian akan menurun. Hal ini selaras dengan gambaran peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya hingga tahun 2023.

Tabel 2.148. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR)	1,71	1,70	1,70	1,69	1,69	1,69
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (*IMR*)	10,44	9,11	7,70	6,66	6,32	6,12

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Gambaran terkait kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 sampai dengan 2045 disajikan pada Sumber Data: BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Tabel 2.150 dan Tabel 2.150. Kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan menunjukan tren meningkat selama 20 tahun. Hal ini menggambarkan perlunya upaya-upaya mitigasi dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang agar kepadatan penduduk tersebut tidak menambah beban negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Berdasarkan data rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, menunjukan bahwa proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Tangerang Selatan relatif berimbang. Hal ini menggambarkan perlu adanya penguatan pembangunan dan pemberdayaan gender agar penduduk perempuan di Kota Tangerang

Selatan dapat memiliki daya saing dan menjadi unggul, setara dengan penduduk laki-laki

Tabel 2.149. Proyeksi penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (orang)	1.391.650	1.402.163	1.419.147	1.446.168	1.469.506	1.480.087
Luas Wilayah (km2)	164.855	164.855	164.855	164.855	164.855	164.855
Kepadatan Penduduk (orang/ha)	8.442	8.505	8.608	8.772	8.913	8.978

Sumber Data: BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Tabel 2.150. Proyeksi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	694.960	698.659	702.769	711.654	718.677	719.707
Perempuan	696.690	703.504	716.378	734.514	750.829	760.380
Rasio	99,75	99,31	98,10	96,89	95,72	94,65

Sumber Data: BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur berperan penting dalam mengelola sumber daya manusia sesuai kebutuhan berdasarkan usianya. Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2025 sampai dengan 2045 disajikan pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151. Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun (orang)	314.930	305.130	277.543	259.356	252.070	248.598
15-64 Tahun (orang)	993.650	1.000.141	1.003.296	1.005.364	991.133	966.070
>65 Tahun (orang)	83.060	96.892	138.308	181.448	226.303	265.419
Angka Ketergantungan	40,05	40,20	41,45	43,85	48,27	53,21

Sumber Data: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.6.2. Rasio Ketergantungan / *Depedency Ratio* (DR)

Rasio Ketergantungan dihitung dengan membandingkan Jumlah Penduduk Belum Produktif (Usia 0-14 tahun) dan Jumlah Penduduk Tidak

Produktif (Usia > 65 tahun) dengan Jumlah Penduduk Usia Produktif (Usia 15-64 tahun). Misal Rasio Ketergantungan 40, hal ini dapat dimaknai bahwa, setiap 100 Penduduk Usia Produktif, menanggung 40 Penduduk Usia Belum Produktif/Tidak Produktif. Bonus Demografi terjadi saat nilai rasio ketergantungan kecil. Semakin kecil rasio ketergantungan maka semakin besar bonus demografi. Bonus demografi didapat jika lebih dari 60% penduduk ada pada usia produktif atau jika rasio ketergantungan <66. Hal ini dapat dihitung dengan Rumus Berikut ini:

$$DR = \frac{P_{(0-14)} - P_{(65+)}}{P_{(15-64)}} x100$$

Keterangan:

DR = *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan)

$P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk usia muda atau belum produktif (0-14 tahun)

$P_{(65+)}$ = Jumlah penduduk usia tidak produktif atau tua (65 tahun ke atas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Berdasarkan proyeksi rasio ketergantungan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.151 sebelumnya, terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Tangerang Selatan terus meningkat. Hal ini berarti bahwa semakin banyak beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif, peningkatan ini disebabkan karena peningkatan usia lansia yang sudah tidak produktif yang tidak diimbangi dengan penambahan usia produktif dari usia belum produktif. Dari gambaran proyeksi rasio ketergantungan, dapat terlihat bahwa pada tahun 2025-2045 Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi, mengingat nilai rasio ketergantungan di bawah 66. Walaupun masih mengalami bonus demografi sampai dengan tahun 2045, namun tingkat produktivitas penduduknya berkurang disebabkan karena bertambahnya usia produktif yang sudah menua.

2.6.3. Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Jumlah penduduk di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan yang semakin bertambah mengindikasikan besarnya kebutuhan akan pelayanan publik. Untuk itu perlu upaya untuk memenuhi dan memfasilitasi penduduk melalui kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang menunjang peningkatan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya melalui pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga Kota Tangerang Selatan perlu mengidentifikasi jumlah kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik untuk 20 tahun mendatang dalam periode RPJPD Tahun

2025-2045 yang dirinci per lima tahun. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dilakukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang salah satunya mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

2.6.3.1. Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara itu, perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah juga kebutuhan akan rumah tinggal. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 2.152, yang menggambarkan bahwa pertambahan penduduk di Kota Tangerang Selatan berimplikasi pada pertambahan kebutuhan rumah. Berdasarkan data ketersediaan rumah tahun 2023 (LPPD, Tahun 2023) terlihat bahwa kebutuhan rumah sampai dengan tahun 2045 masih dapat terpenuhi dengan jumlah rumah eksisting. Permasalahan kebutuhan terkait perumahan pada umumnya di kawasan perkotaan, seperti halnya Kota Tangerang Selatan adalah akses dan keterjangkauan terhadap rumah yang layak huni terutama bagi masyarakat miskin. Semakin terbatasnya lahan di Kota Tangerang Selatan yang menyebabkan harga lahan semakin mahal menyebabkan harga rumah yang layak huni menjadi mahal juga. Mahalnya harga rumah tersebut tentu saja menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka akan cenderung mendirikan rumah pada lokasi yang tidak layak atau mereka akan mendirikan rumah-rumah yang tidak layak asalkan terjangkau, sehingga dapat berimplikasi pada tumbuhnya kawasan permukiman.

Tabel 2.152. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (orang)	1.391.650	1.402.163	1.419.147	1.446.168	1.469.506	1.480.087
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	347.913	350.541	354.787	361.542	367.377	370.022
Jumlah total unit rumah s/d tahun 2023	378.834					

Keterangan: Ketersediaan unit rumah tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023

2.6.3.2. Air Bersih

Air bersih adalah sumber daya utama bagi kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Sebagai salah satu penyokong pilar pembangunan lingkungan, Air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi salah satu hal penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang layak dan memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Proyeksi kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan neraca sumber daya-Bagian 1: Sumber daya air spasial yang diterbitkan oleh BSN, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.153.

Tabel 2.153. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (orang)	1.391.650	1.402.163	1.419.147	1.446.168	1.469.506	1.480.087
Proyeksi Kebutuhan Air untuk Domestik (m3/tahun)	60.954.270	61.414.739	62.158.639	63.342.158	64.364.363	64.827.811
Ketersediaan Air Kota Tangerang Selatan (m3/tahun)	35.690.390					

Keterangan: Ketersediaan air kondisi tahun 2023 berdasarkan KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Hasil proyeksi kebutuhan air untuk domestik menunjukkan bahwa setiap tahunnya kebutuhan akan air untuk domestik terus mengalami peningkatan. Berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 bahwa ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 35.690.390 m3/tahun, terlihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan air sampai dengan tahun 2045, ketersediaan air masih kurang. Perlu adanya upaya pemenuhan ketersediaan air baik berupa upaya konservasi air tanah dan air permukaan dan pemenuhan dari sumber-sumber air di luar Kota Tangerang Selatan, seperti PSN Waduk Karian.

2.6.3.3. Energi/Listrik

Listrik merupakan infrastruktur yang penting untuk mendukung Pembangunan wilayah. Penyediaan listrik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas untuk menyediakan pasokan listrik secara nasional, termasuk di Kota Tangerang Selatan. Listrik menjadi sumber energi utama bagi kebutuhan manusia, baik untuk kegiatan komersial, kegiatan industri, maupun kegiatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan industri, listrik berperan penting

dalam proses produksi yang sebagian besar menggunakan peralatan elektronik dan mesin-mesin industri. Pasokan listrik perlu dilakukan secara aman dan efisien ke berbagai kawasan permukiman, termasuk perumahan, gedung-gedung komersial dan pemerintahan, dan area publik lainnya. Proyeksi kebutuhan daya listrik dihitung berdasarkan SNI 04-6267.601-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 601: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik-Umum) yang diterbitkan oleh BSN, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.154.

Tabel 2.154. Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	347.913	350.541	354.787	361.542	367.377	370.022
Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik (VA)	633.200.750	637.984.165	645.711.885	658.006.440	668.625.230	673.439.585
Daya Listrik Tersedia Tahun 2023 (VA)	2.420.477.000					

Keterangan: Daya Listrik kondisi tahun 2023 berdasarkan dokumen/publikasi BPS yaitu Kota Tangerang Selatan dalam Angka Tahun 2024

Hasil proyeksi kebutuhan daya listrik menunjukkan bahwa setiap tahunnya kebutuhan akan daya listrik terus mengalami peningkatan. Proyeksi kebutuhan daya listrik ini hanya dihitung berdasarkan kebutuhan rumah, belum berdasarkan kebutuhan lainnya selain rumah misal industri dll. Sehingga proyeksi kebutuhan daya listrik pada tahun yang akan datang ini meski masih jauh lebih kecil daripada daya eksisting di tahun 2023, tetap perlu adanya upaya terkait ketahanan energi pada masa yang akan datang untuk rumah dan berbagai fasilitas lainnya di Kota Tangerang Selatan.

2.6.3.4. Persampahan

Persoalan sampah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya bersama dalam penanganan sampah terutama untuk mengurangi jumlah produksi sampah tidak sebanding dengan penyediaan sarana prasarananya. Proyeksi timbulan sampah dan kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS3R disajikan dalam Tabel 2.155 di bawah ini.

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2045 diproyeksikan bertambah ± 1000 ton dari tahun 2023. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian mengingat keterbatasan lahan TPST Cipeucang dan keterbatasan lahan untuk menambah TPS3R sesuai dengan proyeksi jumlah yang dibutuhkan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengupayakan langkah-langkah progresif untuk pengurangan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga perlu mengupayakan penanganan TPST Cipeucang yang sudah over kapasitas dengan membangun fasilitas pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi yang dapat secara signifikan mengelola sampah dalam jumlah besar dan lebih ramah lingkungan.

Tabel 2.155. Proyeksi timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (orang)	1.391.650	1.402.163	1.419.147	1.446.168	1.469.506	1.480.087
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari) asumsi : 1 orang= 0,73 kg sampah (SIPSN 2023)	1.016	1.024	1.036	1.056	1.073	1.080
Timbulan sampah yang diolah pada TPST Cipeucang (ton/hari) *data eksisting tahun 2023 berdasarkan SIPSN 2023	400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Timbulan sampah yang diolah pada TPA Pengelola Kawasan Pemukiman Swasta (ton/hari) **data eksisting tahun 2023 berdasarkan SIPSN 2023	300	700	0	0	0	0
Timbulan sampah yang belum terkelola (ton/hari)	316	324	36	56	73	80
Proyeksi kebutuhan TPS3R (unit) asumsi: 1 TPS3R mengolah 5 ton/hari	63	65	7	11	15	16
Jumlah TPS3R/TPST yang aktif tercatat dalam SIPSN Tahun 2023 (unit)	39					

Keterangan: jumlah TPST kondisi tahun 2023 berdasarkan data fasilitas pengolahan sampah dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

2.6.3.5. Kesehatan

Prasarana kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah sebagai wujud untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan prasarana kesehatan direncanakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani. Perhitungan kebutuhan sarana kesehatan ini mengacu pada dokumen SNI No. 03-1733

tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh BSN. Untuk perhitungan proyeksi rumah sakit dilakukan dengan asumsi bahwa kapasitas pelayanan untuk satu rumah sakit adalah sekitar 50.000 jiwa. Adapun jenis sarana kesehatan yang dibutuhkan diantaranya adalah:

1. Rumah sakit, merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
2. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyembuhan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit;
3. Poliklinik/Balai Pengobatan, yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi; dan
4. Apotek, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 2.157, yang menggambarkan kebutuhan fasilitas kesehatan tersebut sudah terpenuhi dengan ketersediaanya pada tahun 2023. Dengan dukungan prasarana kesehatan yang cukup lengkap, maka kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Tangerang Selatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, integrasi sistem, operasional dan prosedur antar fasilitas dan peningkatan akses layanan berkualitas yang lebih merata untuk semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.156. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun						asumsi kapasitas per fasilitas
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah Penduduk (orang)	1.391.650	1.402.163	1.419.147	1.446.168	1.469.506	1.480.087	
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit (unit)	28	28	28	29	29	30	50.000
Proyeksi Kebutuhan Poliklinik (unit)	278	280	284	289	294	296	5.000
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas (unit)	12	12	12	12	12	12	120.000
Proyeksi Kebutuhan Apotek (unit)	46	47	47	48	49	49	30.000
Ketersediaan Rumah Sakit (2023)	31						

Uraian	Tahun						asumsi kapasitas per fasilitas
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
Ketersediaan Klinik Pratama (2023)	404						
Ketersediaan Puskesmas (2023)	35						
Ketersediaan Apotek (2021)	50						

Keterangan: jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia berdasarkan data yang dipublikasi Dinas Kesehatan dalam Portal Data Kota Tangerang Selatan dan dokumen/publikasi BPS yaitu Kota Tangerang Selatan dalam Angka Tahun 2024

2.6.3.6. Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perhitungan kebutuhan sarana pendidikan ini mengacu pada dokumen SNI No. 03-1733 tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh BSN. Adapun jenis sarana pendidikan yang dibutuhkan diantaranya adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
2. Sekolah Dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD); dan
4. Sekolah Menengah Umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Hasil proyeksi kebutuhan berbagai fasilitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.158 menunjukkan bahwa seiring penurunan jumlah penduduk usia 5-19 tahun maka kebutuhan akan sekolah juga mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan ketersediaan sekolah tahun 2023, terlihat bahwa kebutuhan sekolah jenjang menengah pertama masih perlu penambahan prasarana sekolah sampai dengan tahun

2030, sedangkan untuk kebutuhan sekolah jenjang menengah atas masih perlu penambahan prasarana sekolah sampai dengan tahun 2045. Sementara itu kebutuhan sekolah usia dini dan sekolah dasar sudah tercukupi dengan ketersediaan prasarana sekolah pada tahun 2023.

Tabel 2.157. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Tahun						asumsi kapasitas per fasilitas
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 5-9 Tahun	107.780	102.496	91.217	86.107	82.978	83.426	
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 10-14 Tahun	111.260	110.057	99.799	89.973	85.372	82.226	
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 15-19 Tahun	108.590	109.068	108.018	99.073	89.604	84.997	
Proyeksi Kebutuhan TK/RA*	449	427	380	359	346	348	240
Proyeksi Kebutuhan SD/MI	449	427	380	359	346	348	240
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs	309	306	277	250	237	228	360
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA/SMK	302	303	300	275	249	236	360
Ketersediaan TK/RA (2024, Dapodik)	601						
Ketersediaan SD/MI (2024, Dapodik)	435						
Ketersediaan SMP/MTs (2024, Dapodik)	265						
Ketersediaan SMA/MA/SMK (2024, Dapodik)	200						

Keterangan: jumlah ketersediaan fasilitas berdasarkan Dapodik 2024/2025 Ganjil

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

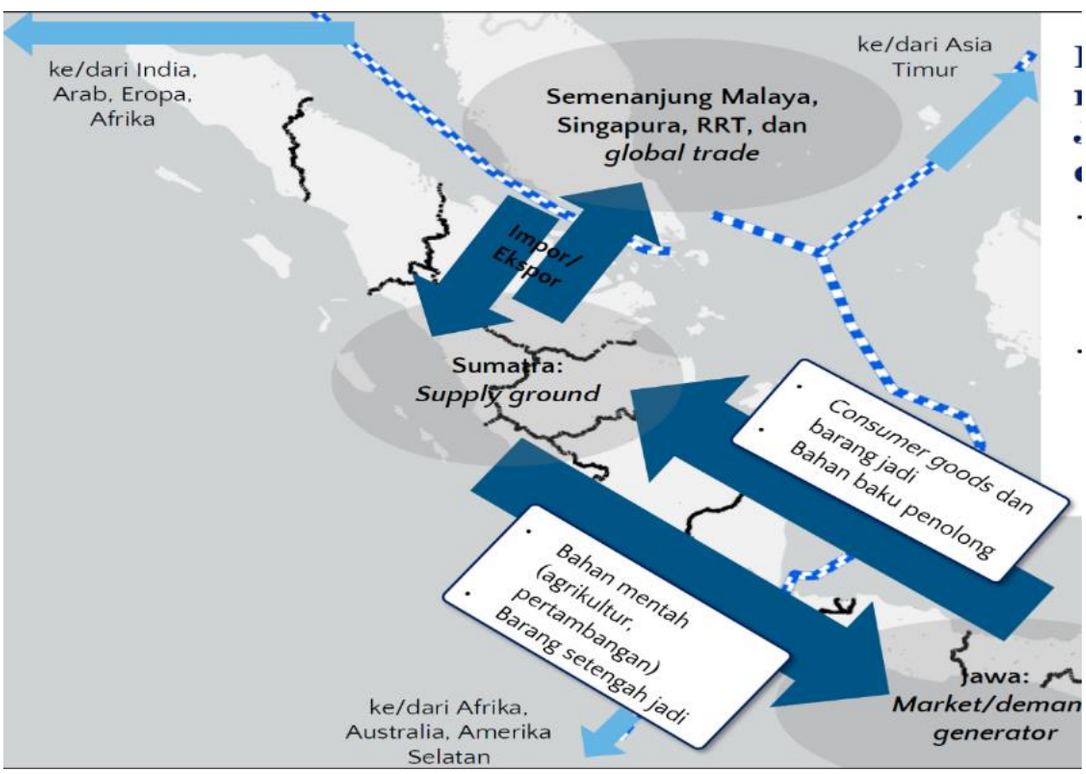
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman dan selaras dengan rencana pembangunan nasional. Selain itu, sebagai daerah memiliki identitas dan otonomi, daerah juga didorong untuk merencanakan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Dalam penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 diamanatkan secara jelas untuk mengidentifikasi dan menganalisis rencana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan arah kebijakan kewilayahan yang dituangkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, RTRW Kawasan

Jabodetabekpunjur, RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 dan RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 yang berpotensi dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara signifikan.

2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045

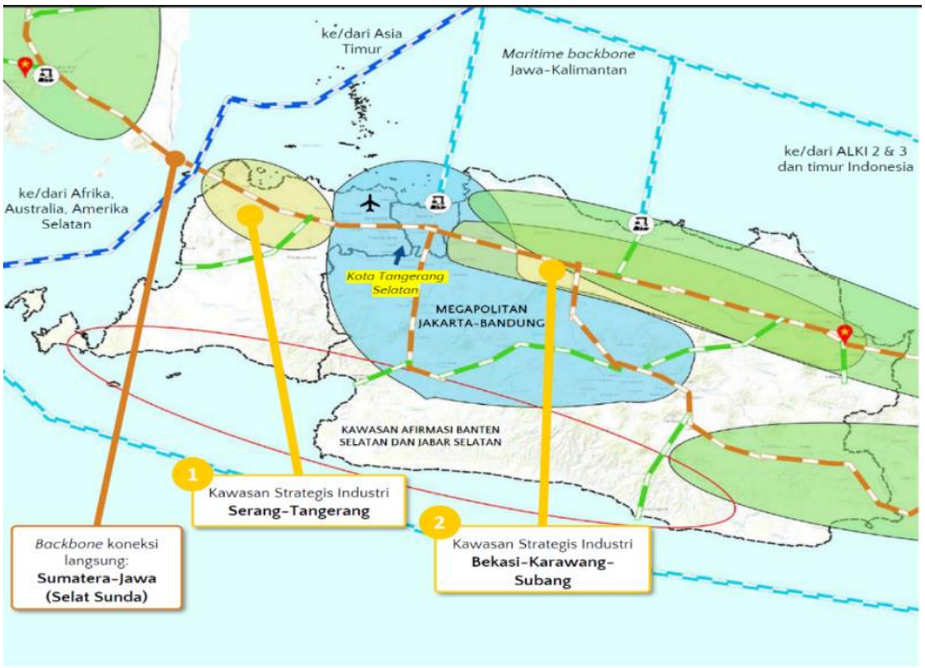
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan perkotaan. Walaupun dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Kota Tangerang Selatan tidak disebutkan secara eksplisit dalam rencana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, namun rencana pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan yang terletak pada bagian utara Banten, merupakan bagian *Functional Region* Banten Bagian Utara. Selain itu, posisi Kota Tangerang Selatan yang menghubungkan Provinsi Banten dan Provinsi Jakarta, menempatkan Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari aglomerasi Banten-Jakarta-Jawa Barat. Gambaran *Functional Region* Sumatra-Jawa dan integrasinya dengan *Backbone System* Banten-DKI-Jawa Barat disajikan dalam Gambar 2.55-Gambar 2.57 di bawah ini.



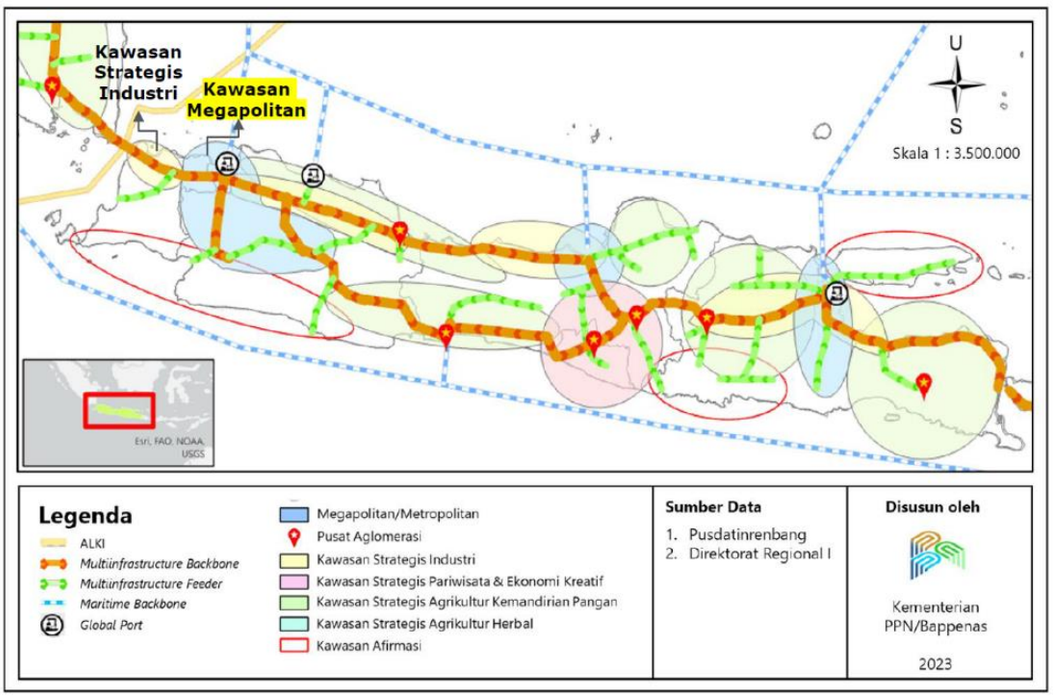
Gambar 2.55. *Functional Region* Sumatra-Jawa

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045



Gambar 2.56. Integrasi antara *Functional Region* Sumatra-Jawa dengan *Backbone System* Banten-DKI-Jawa Barat

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045



Gambar 2.57. Rencana Pengembangan Pulau Jawa

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 2.55-Gambar 2.57 di atas memperlihatkan bahwa dalam perspektif makroregional, Sumatra dan Jawa merupakan koridor terintegrasi dan *seamless* di masa depan. Sumatra berperan sebagai *hitterland* dan *supply ground* atas aglomerasi penduduk di Pulau Jawa, sementara itu Semenanjung Malaya-Singapura-RRT berperan sebagai *market/demand* generator. Dengan kebijakan tersebut, pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung *logistic flux* di Sumatra-Jawa merupakan hal yang mutlak

diperlukan. Dengan *logistic flux* yang lancar akan menurunkan *logistic cost* secara signifikan dan meningkatkan daya saing/keunggulan kompetitif daerah. Kota Tangerang Selatan yang juga merupakan bagian dari kawasan megapolitan Jakarta-Bandung akan menjadi salah satu *backbone* pengembangan infrastruktur strategis. Hal ini akan menjadi potensi pengembangan sektor jasa dan perdagangan di Kota Tangerang terhubung dengan rantai nasional dan global.

Dengan rencana pengembangan Pulau Jawa yang bertemakan "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan", arah kebijakan kewilayahan Pulau Jawa yang dapat mempengaruhi Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari aglomerasi di dalamnya dan sebagai wilayah pendukung pengembangan adalah:

(1) Penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan di tingkat nasional, regional, dan global dibangun dengan meningkatkan keterkaitan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital antar kota dalam metropolitan, antar kota dengan kabupaten sekitarnya, dan kota dengan hub regional dan global lainnya.

(2) Penerapan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan dengan referensi antara lain konsep IKN, melalui:

   a) Perwujudan kota layak huni, inklusif, dan berbudaya utamanya dengan membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi, transportasi multimoda, pengelolaan sampah dan limbah, pendidikan, dan kesehatan berbasis akses pada platform pembelajaran digital dan akses online pada pelayanan digital kesehatan terpadu, penyediaan energi berbasis energi baru dan terbarukan, serta mendorong penerapan budaya berkota yang disiplin dan sehat;

   b) Perwujudan kota hijau dan berketahanan dicapai melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial, serta penyediaan ruang terbuka hijau publik yang aman dan inklusif. Hal tersebut terintegrasi dengan tata kelola sumber daya air terpadu dan pengendalian banjir, sistem peringatan real time terhadap kualitas udara, air, dan kejadian bencana;

   c) Perwujudan kota maju dan menyejahterakan utamanya melalui penerapan *compact city* dalam penyediaan layanan perkotaan, implementasi integrasi aktivitas dan transportasi antarmoda (TOD), pembangunan *green and smart infrastructure, walkable city*, peningkatan aktivitas berdaya ungkit tinggi (produktif), penyiapan talenta multi keahlian termasuk untuk pengembangan TIK, riset dan inovasi (R&D), dan klaster industri masa depan.

(3) Pengembangan kelembagaan dan regulasi pengelolaan perkotaan wilayah metropolitan, lintas kota, dan kabupaten untuk mengoptimalkan kerja sama dalam penyelenggaraan tata kelola perkotaan yang kolaboratif dan inovatif antar pemangku kepentingan.

(4) Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pengembangan keenam klaster didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Provinsi Kalimantan Timur serta pengembangan baru sektor-sektor maju yang berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Kebijakan integrasi sistem transportasi dengan mobilitas yang tinggi di kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana tertuang dalam angka (1) di atas jika tidak disikapi dan antisipasi dengan baik hanya akan mendatangkan dampak negatif terhadap mobilitas internal di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu kebijakan pada angka (2) dan (3) dapat menjadi arahan dan acuan untuk arah pengembangan Kota Tangerang Selatan di masa datang agar lebih terstruktur. Kebijakan dalam rangka Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi sebagaimana tertuang dalam angka (4), walaupun secara langsung Kota Tangerang Selatan tidak memiliki keterkaitan, namun secara prinsip dan konsep pengembangan tetap dapat menjadi acuan untuk diterapkan di Kota Tangerang Selatan dalam rangka mewujudkan kota yang berdaya saing dan inovatif,

Untuk mendukung kebijakan kewilayahan untuk pengembangan Pulau Jawa sebagaimana diuraikan di atas, arah kebijakan yang perlu dituangkan dalam perencanaan Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM berdaya saing global, serta percepatan pengentasan kemiskinan;
2. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan massal perkotaan yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang;
3. Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan *urban farming*, penggunaan *Internet of Things* (*IoT*), pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta penerapan *creative financing*;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja;
6. Pengembangan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif - *Cultural and Creative Industry* (*CCI*) *Hub* juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting*, *Incentives*, *Conferences*, *and Exhibitions* (*MICE*) di wilayah-wilayah perkotaan;
7. Pengembangan potensi *urban & health/ medical tourism*;
8. Pengelolaan lintas wilayah *transboundary management* dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*).

Pengembangan pusat- pusat pertumbuhan wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045 difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan. Dalam hal ini, yang dapat

terkait dengan pengembangan Kota Tangerang Selatan ke depan yaitu (i) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; dan (ii) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Sebagai bagian dari kawasan perkotaan, arah kebijakan sarana dan prasarana perkotaan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang perlu dituangkan dalam perencanaan Kota Tangerang Selatan adalah:

1. Arah kebijakan sarana dan prasarana yang mendukung transformasi ekonomi, meliputi:
    - Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan dengan upaya: (i) Mendorong penyusunan rencana mobilitas perkotaan yang terstandar serta mengimplementasikan pendekatan *Transport Demand Management,* termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan, pengembangan skema integrasi pendanaan serta kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal; dan (ii) Mendorong *e-mobility* serta pengembangan ekosistem kendaraan berbasis EBT.
    - Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi dengan menerapkan prinsip simpan air, jaga air, dan hemat air pada setiap wilayah sungai yang akan dilaksanakan melalui Perlindungan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi risiko bencana daya rusak air. Upaya yang dilakukan utamanya melalui (i) Merancang dan memanfaatkan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir; (ii) Pengembangan strategi pengendalian banjir dan pengelolaan tata ruang yang mempertimbangkan karakteristik wilayah; (iii) Integrasi pendekatan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan dari bencana akibat daya rusak air, dengan periode kala ulang banjir minimal 100 tahun; (iv) Pengembangan *smart water management* untuk pengelolaan air di wilayah perkotaan yang mengintegrasikan sistem penyediaan air minum dan sanitasi; serta (v) Perlindungan kawasan permukiman padat penduduk dari risiko banjir.
2. Arah kebijakan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung transformasi sosial meliputi:
    - Pemenuhan akses air minum di masa yang akan datang diarahkan untuk penyediaan akses air minum yang aman dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari domestik rumah tangga dan aktivitas di area publik. Untuk mencapai hal ini, yang harus diutamakan adalah penyediaan akses air minum melalui sistem jaringan perpipaan dan di daerah perkotaan diharapkan dapat menyediakan akses perpipaan siap minum.
    - Pemenuhan layanan pengelolaan sanitasi diarahkan pada penyediaan layanan pengelolaan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif untuk kebutuhan domestik rumah tangga serta aktivitas di area publik.

Upaya ini dilakukan melalui pemenuhan rantai layanan sanitasi (*blackwater, greywater*, dan lumpur tinja) yang aman dan sesuai dengan karakteristik daerah dengan penyediaan sistem terpusat menjadi prioritas di daerah perkotaan.

- Penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan perumahan, kebijakan difokuskan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB. Kebijakan dilakukan melalui: (i) penyediaan perumahan layak dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah; (ii) pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan; (iii) penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kota secara inklusif;

2.7.2. Pusat Pertumbuhan dan Arahan Kewilayahan berdasarkan Rencana Tata Ruang

2.7.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. Wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang Selatan meliputi 7 kecamatan dan 54 kelurahan, meliputi:

a. Kecamatan Serpong meliputi:
   1. Kelurahan Lengkong Wetan;
   2. Kelurahan Lengkong Gudang;
   3. Kelurahan Lengkong Gudang Timur;
   4. Kelurahan Cilenggang;
   5. Kelurahan Rawa Buntu;
   6. Kelurahan Rawa Mekar Jaya;
   7. Kelurahan Serpong;
   8. Kelurahan Ciater; dan
   9. Kelurahan Buaran

b. Kecamatan Serpong Utara meliputi:
   1. Kelurahan Pakualam;
   2. Kelurahan Pakujaya;
   3. Kelurahan Pakulonan;
   4. Kelurahan Pondok Jagung Timur;
   5. Kelurahan Pondok Jagung;
   6. Kelurahan Jelupang; dan
   7. Kelurahan Lengkong Karya

c. Kecamatan Pondok Aren meliputi:
   1. Kelurahan Pondok Kacang;
   2. Kelurahan Pondok Kacang Timur;
   3. Kelurahan Parigi Baru;
   4. Kelurahan Parigi Lama;
   5. Kelurahan Pondok Pucung;
   6. Kelurahan Pondok Jaya;
   7. Kelurahan Jurang Mangu Timur;
   8. Kelurahan Jurang Mangu Barat;
   9. Kelurahan Pondok Karya;
   10. Kelurahan Pondok Betung; dan
   11. Kelurahan Pondok Aren

d. Kecamatan Ciputat meliputi:
   1. Kelurahan Jombang;
   2. Kelurahan Serua;
   3. Kelurahan Serua Indah;
   4. Kelurahan Sawah Lama;
   5. Kelurahan Sawah Baru;
   6. Kelurahan Ciputat; dan
   7. Kelurahan Cipayung

e. Kecamatan Ciputat Timur meliputi:
   1. Kelurahan Pondok Ranji;
   2. Kelurahan Rengas;
   3. Kelurahan Rempoa;
   4. Kelurahan Cempaka Putih;
   5. Kelurahan Cireundeu; dan
   6. Kelurahan Pisangan

f. Kecamatan Pamulang meliputi:
   1. Kelurahan Benda Baru;
   2. Kelurahan Bambu Apus;
   3. Kelurahan Pondok Benda;
   4. Kelurahan Pamulang Barat;
   5. Kelurahan Pamulang Timur;
   6. Kelurahan Kedaung;
   7. Kelurahan Pondok Cabe Udik; dan
   8. Kelurahan Pondok Cabe Ilir

g. Kecamatan Setu meliputi:
   1. Kelurahan Muncul;
   2. Kelurahan Kranggan;
   3. Kelurahan Kademangan;
   4. Kelurahan Setu;
   5. Kelurahan Bhakti Jaya; dan
   6. Kelurahan Babakan.

Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, berskala regional dan nasional yang mandiri, aman,

nyaman, asri, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan serta berkeadilan dalam mendukung Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kebijakan struktur ruang Kota Tangerang Selatan adalah:

a. pemantapan peran Kota dalam sistem nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani kegiatan skala nasional;
b. peningkatan aksesibilitas pusat pelayanan Kota yang terintegrasi dan berhierarki sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, berskala regional dan nasional, yang aman, nyaman, religius, produktif, berdaya saing, serta berkelanjutan
c. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
d. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem infrastruktur Kota, prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, merata dan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup

Kebijakan Pola Ruang Kota Tangerang Selatan, adalah:

a. pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya;
b. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara

Pusat-pusat pelayanan yang direncanakan dalam RTRW Kota Tangerang Selatan terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) terdiri atas:

a. PPK I sebagai pusat pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Ciputat;
b. PPK II memiliki fungsi sebagai kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Serpong; dan
c. PPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Pondok Aren

Subpusat Pelayanan Kota (SPK) terdiri atas:

a. SPK I memiliki fungsi sebagai pelayanan umum, perdagangan dan jasa, dan perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Serpong Utara
b. SPK II memiliki fungsi sebagai perkantoran pemerintahan, dan perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Setu

c. SPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, dan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Ciputat Timur
d. SPK IV memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa dan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Pamulang

Pusat Lingkungan terdiri atas:

a. PL memiliki fungsi sebagai kegiatan ekonomi ditetapkan di :
   1. Kelurahan Pondok Jagung, Kelurahan Paku Alam, Kelurahan Jelupang, dan Kelurahan Lengkong Karya pada Kecamatan Serpong Utara; dan
   2. Kelurahan Muncul dan Kelurahan Setu pada Kecamatan Setu
b. PL memiliki fungsi sebagai kegiatan pendidikan ditetapkan di :
   1. Kelurahan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kelurahan Pondok Karya, Kelurahan Parigi Baru, Kelurahan Parigi di Kecamatan Pondok Aren;
   2. Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur;
   3. Kelurahan Ciputat dan Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat;
   4. Kelurahan Pamulang Barat dan Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang; dan
   5. Kelurahan Rawa Buntu, Kelurahan Serpong, dan Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong.
c. PL kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan terletak di Kelurahan Pamulang Barat dan Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang;
d. PL kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan terletak di sekitar Kelurahan Ciputat dan Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat;
e. PL kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan terletak di Kelurahan Rawa Buntu, Kelurahan Serpong, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong; dan
f. PL kegiatan ekonomi lokal terletak di lokasi pertigaan Puspiptek hingga perempatan Muncul, Kelurahan Muncul dan Kelurahan Setu, Kecamatan Setu.

2.7.2.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043. RTRW Provinsi Banten memiliki tiga Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam hal pengembangan wilayah. Kota Tangerang Selatan termasuk ke dalam WKP 1 bersama dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. WKP 1 memiliki arahan fungsi dan peranan sebagai penyangga Kawasan perkotaan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan permukiman atau perumahan, dan Pendidikan.

2.7.2.3. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020. Kota Tangerang Selatan menjadi bagian dari kawasan perkotaan tersebut dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sehingga penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan juga perlu memedomani dokumen RTR Kawasan Jabodetabek-Punjur.

RTR Jabodetabekpunjur memiliki tujuan penataan ruang untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan memiliki keterpaduan pengelolaan. Kebijakan terkait perkotaan dalam RTR Kawasan Jabodetabekpunjur adalah menjadikan kawasan perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan melalui pengembangan, pemantapan, pengendalian sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya. Dengan kebijakan ini, Kota Tangerang Selatan perlu menyikapinya dengan perencanaan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang mengusung konsep keterpaduan antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan. Untuk pemantapan peran Kota Tangerang Selatan dalam sistem nasional sebagai PKN dan dalam sistem Provinsi Banten sebagai WKP 1, maka hal-hal yang perlu diarusutamakan dalam kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan adalah:

a. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala regional dan nasional;
b. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan skala regional dan nasional; dan
c. memperkuat kota agar dapat berfungsi dan berpotensi sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan skala regional dan nasional serta perumahan atau permukiman.

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat terlepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan. Permasalahan pembangunan daerah disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan daerah untuk RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dirumuskan dari hasil *FGD*/penjaringan aspirasi dengan masyarakat dan para *stakeholder*, hasil evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 dan hasil KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi gambaran akar masalah yang kemudian dirumuskan menjadi permasalahan yang bersifat dominan/permasalahan pokok yang menjadi permasalahan pembangunan daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

<table>
<tr><th>Hasil FGD/</th><th>Hasil Evaluasi RPJPD</th><th>Hasil KLHS RPJPD</th><th rowspan="2">Rumusan Permasalahan Daerah</th></tr>
<tr><th>Penjaringan aspirasi</th><th>Tahun 2005-2025</th><th>Tahun 2025-2045</th></tr>
<tr><td>Masih rendahnya SDM berkualitas unggul dan berdaya saing global berbasis pendidikan sepanjang hayat</td><td>Belum optimalnya daya saing SDM di level nasional dan internasional</td><td></td><td rowspan="5">Kualitas SDM Belum Unggul dan Berdaya Saing Global</td></tr>
<tr><td>Belum Optimalnya Upaya Kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah</td><td rowspan="4">Laju IPM yang melambat</td><td rowspan="2">Belum Optimalnya Upaya Kesehatan Daerah</td></tr>
<tr><td>Belum meratanya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Belum optimalnya percepatan penuntasan kemiskinan dan perluasan perlindungan untuk semua</td><td>Belum optimalnya percepatan penuntasan kemiskinan dan perluasan perlindungan untuk semua</td></tr>
<tr><td>Belum optimalnya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya MBR</td></tr>
<tr><td>Belum terwujudnya ekosistem lingkungan ramah usia lanjut, wanita, anak, penyandang disabilitas, dan</td><td></td><td></td><td>Infrastruktur Dan Layanan Perkotaan Belum Sesuai Standar, Terintegrasi Dan Inklusif</td></tr>
</table>

Hasil *FGD*/ Penjaringan aspirasi	**Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025**	**Hasil KLHS RPJPD Tahun 2025-2045**	**Rumusan Permasalahan Daerah**
kelompok rentan lainnya			
Belum optimalnya kerja sama *multihelix* dalam tata kelola pemerintahan	Belum efektifnya pelaksanaan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif penyediaan sarana prasarana perkotaan yang membutuhkan biaya sangat besar dan teknologi tinggi	Belum optimalnya kerja sama pembiayaan pembangunan	Tata Kelola Yang Profesional dan Kolaboratif Belum Optimal
	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		
Belum optimalnya tata kelola yang akuntabel, transparan dan pelayanan publik yang berkualitas	Belum optimalnya akuntabilitas dan profesionalisme ASN dalam pelaksanaan program-program pemerintah	Rendahnya riset/ kelitbangan dan pemanfaatan TIK dalam tata kelola	
	Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan daerah		
	Akses pelayanan publik masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, walaupun sudah memanfaatkan teknologi informasi		
	Ketersediaan dan validitas data sektoral belum akuntabel dan terintegrasi, terutama untuk perencanaan pembangunan dan penentuan sasaran pembangunan		
	Belum optimalnya pemanfaatan data dan konsistensi hasil evaluasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan		
	Belum optimalnya Penerapan manajemen kinerja melalui		

Hasil *FGD*/ Penjaringan aspirasi	Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	Hasil KLHS RPJPD Tahun 2025-2045	Rumusan Permasalahan Daerah
	perencanaan kinerja berbasis outcome, evaluasi dan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil kinerja		
	Belum optimalnya pelayanan prima yang cepat tanggap dan efektif dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan pelayanan publik		
Adanya ketimpangan ekonomi dan tingginya biaya hidup masyarakat	kesenjangan pendapatan antar penduduk		Pengembangan Perekonomian Kota Belum Optimal, Berdaya Saing Global Dan Berkeadilan
Kurangnya produktivitas tenaga kerja		Produktivitas tenaga kerja belum berdaya saing global	
Masih rendahnya pengembangan potensi unggulan dan daya tarik daerah	Belum optimalnya pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif	Belum optimalnya pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah	
Belum Optimalnya Peran Riset, Inovasi dan Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah			
Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana dan utilitas permukiman sesuai standar	Belum optimalnya penyediaan dan layanan infrastruktur dasar	Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan	Infrastruktur, layanan perkotaan dan pemenuhan PSU kawasan permukiman belum sesuai standar, terintegrasi dan inklusif
		Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	
		Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau	
	Terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan		

Hasil *FGD*/ Penjaringan aspirasi	Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	Hasil KLHS RPJPD Tahun 2025-2045	Rumusan Permasalahan Daerah
Belum terpenuhinya RTH publik sesuai standar	untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan sesuai standar	Belum terpenuhinya RTH publik sesuai standar	
	Tingginya harga lahan yang menyebabkan terkendalanya kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan		
Infrastruktur perkotaan belum terintegrasi dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat		Rendahnya pengguna moda transportasi umum	
Belum optimalnya penataan ruang yang terintegrasi, berkeadilan dan berkelanjutan			
Belum optimalnya pengelolaan persampahan yang terpadu dan ramah lingkungan	Penurunan daya dukung lingkungan, permasalahan persampahan, dan ketahanan bencana	Belum optimalnya daur ulang sampah	
Kualitas lingkungan hidup menurun		Menurunnya kualitas air sungai sebagai air baku	Ketahanan sosial, budaya dan ekologi belum optimal
Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim global		Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	
Penguatan Ketersediaan dan Kecukupan Pangan yang Belum Optimal		Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan dan tingkat konsumsi ikan	
Masih lemahnya penguatan norma keluarga dan masyarakat	Belum optimalnya pengembangan olahraga, pemuda, dan keluarga		

Berdasarkan Tabel 3.1, terdapat 5 (lima) rumusan permasalahan daerah yaitu kualitas SDM belum unggul dan berdaya saing global; pengembangan perekonomian kota belum optimal, berdaya saing global dan berkeadilan; infrastruktur dan layanan perkotaan belum sesuai standar, terintegrasi dan inklusif; ketahanan sosial, budaya dan ekologi belum optimal serta tata kelola yang profesional dan kolaboratif belum optimal, dengan uraian sebagai berikut:

3.1.1. Kualitas SDM Belum Unggul dan Berdaya Saing Global

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

1. Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Belum Merata;

Akreditasi sekolah merupakan salah satu bentuk penilaian kualitas pendidikan yang diselenggarakan suatu sekolah. Berdasarkan data BANSM tahun 2023, terdapat 1.409 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK berakreditasi A, 521 sekolah berakreditasi B, 44 sekolah berakreditasi C dan 8 sekolah belum berakreditasi. Jenjang SMK merupakan sekolah dengan persentase akreditasi di bawah A tertinggi, yaitu sebesar 71,71 persen, disusul oleh jenjang SMA sebesar 42,54 persen. Sementara itu, untuk jenjang SD dan SMP yang berakreditasi di bawah A adalah sebesar masing-masing 23,22 persen dan 21,76 persen.

Kualitas layanan pendidikan dapat dinilai dari kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Pada tahun 2024, kualitas pembelajaran jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan masih berkategori sedang. Skor kualitas pembelajaran jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan tahun 2024 tercatat masing-masing sebesar 64 dan 63,03, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2020-2023) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 11,82 tahun sampai dengan 11,85 tahun. Dengan kata lain pendidikan masyarakat Kota Tangerang Selatan setara SMA kelas dua. Begitu pun dengan indikator harapan lama sekolah dalam kurun waktu tahun 2020-2023 juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 14,66 tahun sampai dengan 14,68 tahun. Hal tersebut berarti bahwa harapan masyarakat untuk bersekolah hanya mampu mencapai sekolah di akademi/perguruan tinggi di tingkat tiga (D-III).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) peserta didik usia 5-6 tahun di Kota Tangerang Selatan tahun 2024, tercatat masih dalam kategori rendah, yaitu sebesar 65,49%, yang disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan usia dini. Angka Partisipasi Sekolah (APS) peserta didik usia 16-18 tahun di Kota Tangerang Selatan tahun 2024 juga tercatat masih rendah, yaitu sebesar 77,59%. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi, mengingat terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya. Selain itu, kendala biaya personil peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendukung berpartisipasinya siswa dalam pendidikan masih ditemui terutama pada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau berpenghasilan rendah.

2. Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau Belum Merata;

Secara umum Kota Tangerang Selatan memiliki fasilitas dan angka capaian kesehatan yang membaik, namun masih dihadapkan dengan tantangan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta% tantangan gaya hidup perkotaan. Masih terdapat anak dan ibu yang mengalami permasalahan gizi makro dan mikro, seperti

prevalensi stunting pada tahun 2023 yang mencapai 9,2%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

Berdasarkan data angka kesakitan tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa masih terdapat penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama TBC dan Kusta. Penderita TBC di Kota Tangerang Selatan tercatat sejumlah 4.051 kasus dengan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage/TC*) sebesar 69,9%. Pada tahun 2022, ditemukan 59 kasus baru penyakit kusta di Kota Tangerang Selatan. Selain penyakit menular, terdapat angka kesakitan yang tinggi untuk penyakit tidak menular hipertensi dan diabetes melitus, yaitu masing-masing sejumlah 282.923 penderita dan 38.066 penderita. Nilai prevalensi obesitas sentral pada tahun 2022 mencapai angka 39,84%. Perkembangan penyakit tidak menular salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat perkotaan di Kota Tangerang Selatan.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2022 telah mencapai 83,5% yang menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Namun yang menjadi perhatian adalah dengan semakin berkembangnya penduduk dan gaya hidup, persebaran fasilitas dan akses terhadap kesehatan perlu upaya peningkatan. Selain itu diperlukan pembangunan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif, terutama respons terhadap kedaruratan kesehatan.

3. Percepatan Penuntasan Kemiskinan dan Perluasan Perlindungan yang Adaptif Belum Optimal;

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 2,57 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,50 persen. Sejalan dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebanyak 46,31 ribu jiwa. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 44,29 ribu jiwa.

Dalam lingkup pelayanan perlindungan sosial, belum digunakannya satu data sasaran yang valid dan terintegrasi menyebabkan upaya perlindungan sosial terfragmentasi dan berpotensi terjadi kesalahan sasaran yang masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan sosial belum adaptif sesuai kerentanan dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan-perubahan, termasuk perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

3.1.2. Pengembangan Perekonomian Kota Belum Optimal, Berdaya Saing Global dan Berkeadilan

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

1. Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal

Salah satu cara mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja adalah dengan menggunakan pendekatan jam kerja dan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk yang bekerja. Pendekatan jam kerja dilakukan dengan asumsi semakin lama jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja, akan semakin banyak jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Pada tahun 2022, persentase pekerja berkategori pekerja penuh di Kota Tangerang Selatan sebesar 70,75 persen, setengah penganggur sebesar 4,2 persen, pekerja paruh waktu sebesar 16,96 persen dan pengangguran terbuka sebesar 8,09 persen.

Pendekatan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk bekerja dilakukan dengan asumsi Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat diasumsikan semakin tinggi kualitasnya produktivitasnya. tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pada tahun 2022, terdapat penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sampai dengan SD sebesar 92.593 orang (15,02 persen), sampai dengan SMP sebesar 85.359 orang (14,22 persen) dan sampai dengan SMA sebesar 292.521 (44,45 persen). Sementara itu jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar 292.932 (26,31 persen).

Kemudian jika ditinjau produktivitas berdasarkan gender, maka pada tahun 2022 pemberdayaan gender di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu semula 73,08 menjadi 72,67. Penurunan paling signifikan adalah pada peran perempuan dalam angkatan kerja yang bekerja sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknis. Penurunan pemberdayaan perempuan di Kota Tangerang Selatan dimungkinkan mempengaruhi kemampuan ekonomi perempuan dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat pengangguran perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 7,05 persen dibandingkan 6,33 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2022 tercatat hanya sebesar 1,59 persen.

2. Pengembangan Potensi Ekonomi dan Daya Tarik Daerah Berbasis Riset Belum Optimal

Berdasarkan analisa dengan menggunakan matriks tipologi Klassen, terdapat perubahan tipologi pada sektor basis konstruksi; real estate dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang semula merupakan sektor prima turun menjadi sektor potensial. Sementara itu, terdapat sektor basis lainnya yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju

pertumbuhan rerata PDRB namun kontribusinya di bawah kontribusi rerata PDRB, yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa perusahaan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan masih adanya potensi ekonomi dan daya tarik daerah yang belum optimal dikembangkan.

Pada tahun 2022, tingkat penghunian kamar hotel di Kota Tangerang Selatan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, yaitu sebesar 62,81 persen. Namun demikian, jumlah tamu yang menginap, baik tamu asing dan domestik pada usaha akomodasi mengalami penurunan dan rata-rata lama menginap juga cenderung tidak meningkat signifikan.

Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan meningkat menjadi sebesar 3,69 dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 2,97. Namun peningkatan tersebut, belum secara signifikasi meningkatkan kontribusi kewirausahaan terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut dapat disebabkan karena masih rendahnya produktivitas wirausaha. Pada sektor UMKM, rendahnya produktivitas dapat disebabkan karena sebagian besar pekerja UMKM berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) serta rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha. Selain itu, sektor UMKM banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, belum memiliki kapasitas pengelolaan yang tinggi dan belum berpartisipasi secara optimal dalam rantai nilai produksi. Pada sektor ekonomi kreatif, belum optimalnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi menjadi penyebab rendahnya produktivitas sektor ekonomi kreatif, contoh: pelaku ekonomi kreatif dalam bidang digital yang banyak tumbuh di Kota Tangerang Selatan belum didorong pengembangannya secara optimal.

Ditinjau dari iklim investasi, nilai *ICOR* di Kota Tangerang Selatan yang masih lebih besar dari 4 (empat) menggambarkan iklim investasi di Kota Tangerang Selatan yang belum efisien. Kondisi tersebut dapat berpotensi menurunkan daya tarik investasi di Kota Tangerang Selatan.

3. Belum Optimalnya Peran Riset, Inovasi dan Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2023, indeks kapabilitas inovasi daerah di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 3,48 pada tahun 2023 dibandingkan 3,92 pada tahun 2022. Inovasi sangat penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi. Pusat riset dan inovasi nasional berlokasi di Kota Tangerang Selatan, namun jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019.

Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi yang mendukung produktivitas tenaga kerja masih lemah. Hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama

lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445, jauh tertinggal dari Malaysia (1.863), Singapura (9.766), dan Korea Selatan (267.527) pada tahun 2021. Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi dalam pengembangan riset dan inovasi seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

Kapasitas dan kapabilitas teknologi saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan adalah kesiapan kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi, dan keamanan siber belum memadai. Terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi akan menyebabkan rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi yang akan berdampak pada kurangnya penciptaan nilai tambah ekonomi.

3.1.3. Tata Kelola yang Profesional dan Kolaboratif Belum Optimal

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

1. Kerja sama *Multihelix* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada tahun 2022, terdapat 20 (dua puluh) kerja sama yang diselenggarakan dalam tata kelola di Kota Tangerang Selatan. Kerja sama dilakukan baik antar Pemerintah Daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri. Dari 20 (dua puluh) kerja sama tersebut, baru 65 persen yang sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan. Ditinjau dari permasalahan daerah yang dihadapi, jumlah dan kualitas kerja sama yang kolaboratif, lintas wilayah dan lintas sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk kerja sama pembiayaan pembangunan yang merupakan inovasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Kota Tangerang Selatan yang pada perkembangannya telah menjadi salah satu daerah pusat lembaga pendidikan tinggi dan riset bertaraf nasional, namun potensi tersebut belum optimal dimanfaatkan dalam kolaborasi pembangunan di berbagai sektor. Kerja sama dalam hal pelibatan masyarakat dalam pembangunan juga dinilai belum optimal. Kelompok masyarakat belum dimaksimalkan sebagai mitra strategis dalam setiap proses-proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan pembangunan. Pada skema multipihak, berbagai inovasi

bentuk kerja sama masih perlu ditingkatkan terutama dalam proses mendorong alternatif pembiayaan pembangunan.

2. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik Belum optimal

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Walaupun pada tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih perlu berupaya untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme tata kelola pemerintahannya agar hasil kinerja program pembangunan daerah dirasakan dapat menangani permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih perlu berupaya untuk meningkatkan persepsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menuju kondisi *zero corruption*.

Dalam penerapan *Smart City* di Kota Tangerang Selatan masih menghadapi permasalahan diantaranya yaitu keberadaan inovasi yang masih cenderung per sektor sesuai tupoksinya masing-masing, atau masih berfokus pada aplikasi saja serta belum optimalnya pengembangan inovasi daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan daerah.

3.1.4. Infrastruktur dan Layanan Perkotaan Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

1. Infrastruktur, Layanan Perkotaan dan Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Kota Tangerang Selatan memiliki infrastruktur dan layanan perkotaan yang cukup lengkap, terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan SDA, dan infrastruktur perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem drainase, fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, fasilitas perparkiran, tempat evakuasi bencana, fasilitas pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Permasalahan yang dihadapi terkait infrastruktur dan layanan perkotaan tersebut adalah seluruh infrastruktur tersebut belum terintegrasi dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat. Belum terintegrasinya antara jaringan jalan, fasilitas perparkiran dengan sistem transportasi menyebabkan terjadinya 36 titik kemacetan pada tahun 2023. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan sistem jaringan SDA menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami genangan bahkan banjir.

Belum terintegrasinya sistem evakuasi bencana dan sistem proteksi kebakaran dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti sistem jaringan jalan, menyebabkan ketahanan daerah terhadap bencana rendah. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang ramah dapat diakses oleh kelompok rentan seperti disabilitas, lanjut usia, wanita dan anak-anak, masih menjadi permasalahan yang dirasakan di Kota Tangerang Selatan.

Jumlah rumah tangga (RT) yang belum terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik setempat dan terpusat tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan sejumlah 1.388 RT atau 0,50 persen dari jumlah seluruh rumah tangga (275.800 RT). Sementara itu, jumlah rumah yang belum terlayani Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) tahun 2022 sebesar 995 RT atau 0,36 persen dari seluruh jumlah rumah tangga. Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani SPALD dan SPAM menggambarkan bahwa belum semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 mengakses sanitasi dan air minum yang layak dan aman. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena pelayanan air limbah dan air minum merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Dalam rangka menjaga konservasi air tanah, pelayanan SPAM di kawasan perkotaan didorong melalui standar SPAM Jaringan Perpipaan. Adapun jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan pada tahun 2022 baru mencapai 38.472 RT atau 13,95 persen dari jumlah seluruh rumah tangga.

Ditinjau dari standar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat, terdapat 2.671 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan. Masih adanya RUTLH menggambarkan bahwa masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan yang perlu diintervensi. Sementara itu, ditinjau dari pemenuhan layanan pemakaman sebagai bagian dari PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, persentase TPU per satuan penduduk di Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2022 adalah 1,17 persen atau 16.155 petak makan yang tersedia dari jumlah penduduk 1.378.466 jiwa. Jika mengacu pada PERMENKUMHAN No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM, di mana persentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada daerah yang peduli HAM adalah >80%, cukup peduli HAM adalah 70-80 persen, mulai peduli HAM adalah 60-70 persen dan tidak peduli HAM adalah <60 persen, maka Kota Tangerang Selatan masuk ke dalam kategori ke tiga (<60 persen). Hal ini disebabkan karena minimnya lahan yang tersedia dan tingginya harga lahan di Kota Tangerang Selatan menjadi permasalahan dalam penyediaan petak makam yang tersedia di perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian PSU perumahan dan kawasan permukiman yang harus disediakan sesuai standar. Sampai dengan tahun 2022, realisasi penyediaan RTH di Kota Tangerang Selatan sebesar 4,30 persen dari keseluruhan wilayah kota atau setara dengan 708,86 ha dari standar penyediaan RTH publik sebesar 30 persen. Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik dan tingginya harga lahan

merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam penyediaan RTH publik sesuai standar di Kota Tangerang Selatan.

2. Pengelolaan Persampahan yang Terpadu dan Ramah Lingkungan Belum Optimal

Timbulan sampah sampai dengan tahun 2023 di Kota Tangerang Selatan mencapai 369.177,5 ton per tahun. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah keterbatasan lahan TPA Cipeucang. Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah melalui daur ulang tercatat pada tahun 2023 sebesar 27,51 persen, sementara itu penanganan sampah yang tidak terdaur ulang pada tahun 2023 sebesar 71,84 persen dibuang ke TPA Cipeucang. Besarnya timbulan sampah yang dibuang ke TPA Cipeucang tersebut menjadikan TPA Cipeucang yang lahannya terbatas menjadi penuh.

3. Penataan Ruang yang Belum Terintegrasi, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Sebagai fungsi hunian, perkembangan kawasan perumahan di Kota Tangerang Selatan sangat pesat, terlihat dari kontribusi tertinggi struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan adalah sektor Real Estate dan Konstruksi. Kawasan perumahan di Kota Tangerang Selatan berkembang dalam bentuk klaster-klaster perumahan baik skala besar dan skala kecil. Perumahan klaster besar dibangun sebagai kota-kota mandiri di mana fasilitas dan infrastruktur dengan kuantitas yang memadai dan berkualitas tinggi secara umum hanya dapat diakses dan digunakan oleh para penghuninya. Hal ini kemudian memicu terjadinya fenomena yang disebut *gated community* yang dapat diartikan munculnya kawasan-kawasan permukiman yang membentuk ruang-ruang privat yang tidak bisa diakses oleh publik secara umum.

Perkembangan klaster-klaster perumahan dalam bentuk kota-kota mandiri juga menyebabkan harga tanah menjadi tinggi, sehingga akses terhadap ruang pada akhirnya hanya akan dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Sementara untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah akan semakin sulit mengakses ruang-ruang yang sudah dikuasai oleh pengembang. Hal ini juga memicu berkembangnya permukiman-permukiman illegal dan kumuh dengan kondisi infrastruktur dan sanitasi yang buruk. Selain itu penyediaan ruang-ruang publik oleh pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pelayanan lainnya menjadi sulit dilakukan pada kondisi harga tanah yang tinggi.

Demikian pula banyak ditemukan lahan-lahan kosong yang sulit untuk dibangun dan dimanfaatkan karena telah dikuasai oleh pengembang. Kondisi ini juga menyebabkan pemanfaatan ruang dan lahan di Kota

Tangerang Selatan menjadi tidak optimal karena adanya lahan-lahan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi, maupun lingkungan di tengah kebutuhan akan ruang dan lahan yang semakin tinggi. Hal ini diperparah dengan ketidaktaatan para pengembang untuk menyerahkan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah dibangun kepada pemerintah daerah, karena fasilitas-fasilitas ini memang dikelola secara mandiri sebagai nilai jual untuk memenuhi kebutuhan penghuni.

3.1.5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Belum Optimal

Akar masalah dari permasalahan utama ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Menurun

Berdasarkan KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, diinformasikan bahwa kecenderungan ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan semakin hari semakin menurun, daya dukung dan daya tampung air Kota Tangerang Selatan telah terlampaui sebanyak 99,22% dari keseluruhan luas wilayahnya. Untuk daya dukung pangan, jika mengacu pada selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan di mana jumlah ketersediaan pangan berdasarkan nilai kalori pada tahun 2022 sebesar 505.101.987 kkal sedangkan kebutuhan pangan sebesar 20.991.309.200 kkal menunjukkan defisit pangan. Dengan demikian, perlunya memaksimalkan ketersediaan logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan di Kota Tangerang Selatan karena Kota Tangerang Selatan hanya memiliki sedikit lahan pertanian sehingga sebesar (99%) pasokan komoditinya seperti beras, daging sapi dan daging ayam masih dipasok dari luar daerah, sehingga ke depan sangat perlu untuk selalu memastikan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan terpenuhi di Kota Tangerang Selatan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tangerang Selatan tahun 2022 mengalami penurunan peringkat dibandingkan tahun 2021, yaitu semula sebesar 83,74 menjadi 78,74, yang disebabkan penurunan dari seluruh indikator pembentuk IKP. Indikator keterjangkauan semula 99,27 menurun menjadi 97,04 sedangkan indikator pemanfaatan semula 71,04 menurun menjadi 63,77. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk dengan golongan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp. 1.500.000 pada tahun 2022 mencatatkan nilai terendah sebesar 53,7 dan nilai tertinggi 84,6. Jika mengacu pada target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebesar 92,5, maka kualitas konsumsi pangan terutama untuk MBR perlu mendapatkan perhatian.

Ditinjau dari kinerja jasa lingkungan di Kota Tangerang Selatan yang dianalisa berdasarkan basis data tahun 2018, menunjukkan bahwa kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air, kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan, kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air, kinerja jasa lingkungan pengaturan kualitas udara, kinerja jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir, dan kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim berkategori rendah.

2. Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Belum Optimal

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2023 di Kota Tangerang Selatan, diinformasikan bahwa ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi bencana, berada pada kategori sedang. Ditinjau dari aspek kerentanan, Kota Tangerang Selatan sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, konflik sosial, dan pandemi Covid-19 di mana potensi penduduk yang akan terpapar dalam kategori tinggi. Terdapat 3 (tiga) kegiatan pengkajian risiko bencana di Kota Tangerang Selatan yang masih tergolong rendah yaitu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas tersebut di atas. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian bencana. Dalam hal kesiapsiagaan Masyarakat terhadap kejadian bencana menunjukkan bahwa kesiapsiagaan secara keseluruhan wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kategori rendah.

Ditinjau dari adaptasi Perubahan iklim, Dari beberapa penelitian mengenai Urban Heat Island/UHI di Kota Tangerang Selatan, yang dilakukan oleh Stella Oktavianingrum et al., 2020, bahwa selama periode 2005-2018 telah terjadi kenaikan suhu permukaan lahan di mana sebagai akibat dari perubahan tutupan vegetasi selama periode waktu penelitian. Perubahan tutupan lahan yang terjadi mempengaruhi meningkatnya suhu permukaan tanah di Kota Tangerang Selatan, dengan peningkatan rata-rata suhu permukaan sekitar 0,4 - 0,70°C setiap tahunnya.

3. Penguatan Norma Keluarga dan Masyarakat Belum Optimal;

Pada tahun 2022, 85,16 persen penduduk Kota Tangerang Selatan mengakses internet. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan melek teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan arus informasi global yang masuk dalam kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan memiliki 2 mata sisi dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi, pada prosesnya dapat mendorong kebebasan masyarakat yang kadang tanpa mengenal batas di tengah peningkatan ancaman negatif budaya global. Akibatnya terjadi perubahan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya, seperti sifat individualistis dan apatis. Akses terhadap

media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga.

3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, maka dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Identifikasi isu strategis daerah untuk RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan melalui identifikasi isu strategis dalam RPJPN Tahun 2025-2045, isu regional Provinsi Banten, dan isu berdasarkan KLHS RPJD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Identifikasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah Kota Tangerang Selatan.

3.2.1. Isu Global dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global yang dapat mempengaruhi perkembangan Kota Tangerang Selatan, yaitu:

1. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan

memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

2. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Selama masa pandemi Covid-19, disrupsi teknologi terakselerasi di berbagai bidang. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang.

Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (*AI*) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan *AI*, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri

media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

3. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

4. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan.

5. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (*IoT*), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (*AI*), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

6. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan

teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual–metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

7. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

8. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (*BaU*) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor dan penerapan ekonomi sirkuler. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global.

3.2.2. Isu Nasional dan Tantangan Perkotaan dalam RPJPN Tahun 2025-2045

1. Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional

Rendahnya peran perkotaan dalam kontribusi ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan Tiongkok mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

2. Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak

Peningkatan jumlah penduduk di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dan urbanisasi menyebabkan peningkatan proporsi penduduk perkotaan. Perubahan komposisi penduduk yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan distribusi yang tidak merata antar wilayah telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan berkembang menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Harga lahan dan hunian di pusat kota semakin tidak terjangkau sehingga memicu terjadinya *urban sprawl,* permukiman kumuh, serta permukiman ilegal. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

3. Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif

Rumah tangga perkotaan di Indonesia yang mendiami rumah layak huni hanya sebesar 63,45 persen dan dengan akses air minum layak sebesar 41,95 persen. Keterbatasan pasokan air perkotaan dari wilayah sungai setempat mengakibatkan upaya penyediaan air harus dilakukan melalui pendekatan lintas wilayah sungai. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, seperti contoh bahwa hanya daerah perkotaan di 14 provinsi memiliki akses < 0,5 km terhadap shelter angkutan umum. Kondisi lain yaitu belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana, khususnya di perkotaan. Sampah kota yang belum terkelola rata-rata masih sebesar 17,6 persen dan luasan RTH kota hanya sebesar 3,54 persen.

4. Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan

Pada tahun 2022 triwulan II, 3 (tiga) provinsi di Pulau Jawa masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional, di antaranya Provinsi Jawa Barat (8,31 persen; peringkat 1), Provinsi Banten (8,09 persen; peringkat 3), dan Provinsi DKI Jakarta (7,18 persen; peringkat 4). Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan. Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perkotaan tercatat sebesar 7,74 persen, proporsi lapangan kerja informal di wilayah perkotaan tercatat sebesar 47,62 persen, angka rasio gini perkotaan sebesar 0,409 dan tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,29 persen. Selanjutnya wilayah metropolitan (WM) di Jawa seperti WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya masih menghadapi berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh. Permasalahan perkotaan ini berdampak pada kerugian ekonomi.

Dua provinsi memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di bawah angka nasional (51,9) pada tahun 2021, yaitu Provinsi Banten (47,47) dan Provinsi Jawa Barat (50,78). Indeks tersebut menggambarkan

rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang saksama. Di samping itu, belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia juga perlu diperhatikan dalam pembangunan Wilayah Jawa 20 tahun mendatang.

5. Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana

Kondisi kualitas udara di lingkungan perkotaan umumnya telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan. Sepanjang tahun 2021 misalnya, hasil evaluasi kualitas udara di DKI Jakarta dilihat dari indeks standar pencemar udara (ISPU) terdapat hanya 2 persen hari sehat, 68 persen hari sedang, dan sisanya hari tidak sehat. Kondisi lain adalah terdapat sekitar 75 persen Kawasan Perkotaan berada di daerah pesisir, rentan banjir, dan kenaikan muka air.

Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam. Wilayah ini memiliki risiko gempa bumi. Kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana menjadi isu yang perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

6. Tata Kelola yang Belum Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif

Isu yang terkait tata kelola adalah penegakan hukum, pengelolaan eksternalitas antarwilayah, dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum masih menjadi isu penting di Wilayah Jawa, seperti masalah korupsi, pelanggaran pemanfaatan ruang, dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Mengantisipasi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu sebesar 72,9 persen pada tahun 2045, diperlukan tata kelola pembangunan yang dapat mengimbangi tuntutan peningkatan kualitas pelayanannya. Tingkat kompleksitas di Wilayah Metropolitan (WM) seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya memerlukan tata kelola yang lebih andal. Tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Jawa semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat. Ruang untuk mengekspresikan aspirasi dan ide masyarakat perlu terus dibuka.

3.2.3. Isu Regional Provinsi Banten

1. Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia dibentuk dari berbagai aspek, beberapa diantaranya adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek perlindungan sosial. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2050 dari BPS Nasional, piramida penduduk Banten mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda menjadi piramida penduduk stasioner. Pada tahun 2025-2035 menjadi momentum bonus demografi Banten dengan *dependency ratio* sebesar 43,31 persen. Kemudian pada tahun 2040-2055 terjadi pergeseran di mana penduduk usia 65+ mengalami peningkatan signifikan dengan angka *dependency ratio* diproyeksikan sebesar 49,10 persen pada tahun 2045. Maka dari itu diperlukan strategi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi angkatan tenaga kerja produktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten, aspek pendidikan memiliki kualitas yang belum merata, aspek kesehatan masih belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, dan aspek perlindungan sosial masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

2. Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal

Perekonomian yang baik dapat dilihat dari meratanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merata terbentuk dari optimalnya pengelolaan sektor-sektor unggulan serta inovasi dan investasi yang kuat. Di Provinsi Banten, hal-hal tersebut dinilai belum optimal karena pertumbuhan ekonomi daerah utara dan selatan masih belum sama, sektor-sektor unggulan belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi masih perlu ditingkatkan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan tata kelola pemerintah Banten antara lain indeks persepsi anti korupsi yang rendah yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik. Selain itu, tantangan tata kelola pemerintah Banten adalah pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah yang masih perlu perbaikan. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. DDF Provinsi Banten berada dalam kategori “baik”, tetapi dalam 10 tahun terakhir DDF Banten fluktuatif dan cenderung menurun.

4. Manajemen Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Kondisi Lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa aspek, beberapa diantaranya adalah aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten dilihat dari aspek daya dukungnya dinilai belum dikelola dengan optimal, dari aspek kualitasnya juga dinilai belum optimal, dan dari aspek kebencanaannya memiliki risiko bencana yang masih tinggi.

3.2.4. Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Isu strategis yang diidentifikasi dalam KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pilar Sosial meliputi: Kota Layak Huni, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2. Pilar Ekonomi, meliputi: daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha khususnya MBR, pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah
3. Pilar Lingkungan, meliputi: penanganan efek gas rumah kaca
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, meliputi: tata kelola pemerintahan yang baik berbasis riset/kelitbangan dan pemanfaatan TIK, peningkatan alternatif pembiayaan pembangunan/sumber pembiayaan non APBD.

3.2.5. Potensi Daerah/Modalitas Daerah

1. Geografi dan Geostrategis

Kota Tangerang Selatan berada pada posisi strategis dalam konstelasi nasional, yaitu menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Dengan posisi tersebut, Kota Tangerang Selatan berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani kegiatan skala nasional. Selain itu, Kota Tangerang Selatan menjadi tujuan hunian modern megapolitan Jabodetabek.

Kota Tangerang Selatan memiliki konektivitas dan aksesibilitas yang lengkap dan terhubung dengan kawasan Jabodetabek. Kota Tangerang Selatan dilalui jaringan tol JORR 2 dan tol Serpong-Balaraja, memiliki 5 (lima) stasiun KA, 1 (satu) terminal tipe A yang melayani jaringan bus antar kota antar provinsi dan 1 (satu) Bandar Udara Pondok Cabe. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga memiliki fasilitas riset berupa Kawasan sains dan teknologi nasional (BRIN/Puspiptek) dan memiliki banyak universitas.

2. Potensi Ekonomi Daerah

Sebagai kota dengan fungsi permukiman, Kota Tangerang Selatan memiliki sarana dan prasarana lengkap seperti tempat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan perkantoran. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat, dengan sektor ekonomi penggerak terdapat pada sektor tersier perdagangan dan jasa.

3. Potensi Sosial Budaya

Kota Tangerang Selatan telah mendapatkan bonus demografi di mana penduduk Kota Tangerang Selatan didominasi oleh usia produktif (sebesar 71,15 persen pada tahun 2022) yang merupakan Generasi X dan Generasi Milenial. Rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan menamatkan pendidikan menengah dengan harapan melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma (Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023 sebesar 11,85 tahun dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 sebesar 14,68 Tahun). Penduduk Kota Tangerang Selatan juga memiliki tingkat kesehatan yang tinggi di mana harapan hidup penduduknya pada tahun 2023 tercatat mencapai 73,11 Tahun.

Pembangunan manusia dan pembangunan gender di Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (IPM > 80 dan IPG > 90) serta pemberdayaan gender dalam kategori tinggi (IDG > 70). Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan juga tercatat sangat rendah secara nasional, yaitu di bawah 5 persen. Rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan melek teknologi informasi di mana pada tahun 2022, 85,16 persen penduduknya mengakses internet.

3.2.6. Isu Strategis Daerah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan identifikasi isu-isu global, nasional, regional dan isu berdasarkan KLHS serta potensi/modalitas yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan, maka dirumuskan isu strategis daerah yang disajikan dalam Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Perumusan Isu Strategis Daerah RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Isu Berdasarkan Permasalahan Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Provinsi Banten	Isu KLHS RPJPD	Rumusan Isu Strategis Daerah
Kualitas dan daya saing SDM yang Unggul	Demografi Global	Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan	Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas	Peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Kota Layak Huni	Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global
	Perkembangan Teknologi			Peningkatan kualitas pendidikan	
	Urbanisasi Dunia			Peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Kota Layak Huni	
Infrastruktur Dan Layanan	Demografi Global	Pemenuhan Layanan	Manajemen Tata Ruang	Kota Layak Huni	Penyediaan infrastruktur

Isu Berdasarkan Permasalahan Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Provinsi Banten	Isu KLHS RPJPD	Rumusan Isu Strategis Daerah
Perkotaan yang Sesuai Standar, Terintegrasi Dan Inklusif		Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal		dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas
	Urbanisasi Dunia	Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak			
Ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Perubahan Iklim	Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana		Penanganan efek gas rumah kaca	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
	Persaingan Sumber Daya Alam				
Tata Kelola Yang Profesional dan Kolaboratif	Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola yang Belum Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Tata kelola pemerintahan yang baik berbasis riset/kelitbangan dan pemanfaatan TIK	Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif
				Peningkatan alternatif pembiayaan pembangunan/sumber pembiayaan non APBD	
Pengembangan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing Global Dan Berkeadilan	Pertumbuhan Kelas Menengah	Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional	Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha khususnya MBR	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan;
	Tata Kelola Keuangan Global			Pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah	
	Konstelasi Perdagangan Global				Hunian modern dan nyaman bagi kawasan megapolitan Jabodetabek
	Perkembangan Teknologi				

Rumusan isu strategis daerah berdasarkan penapisan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2. adalah:

1. **Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global;**

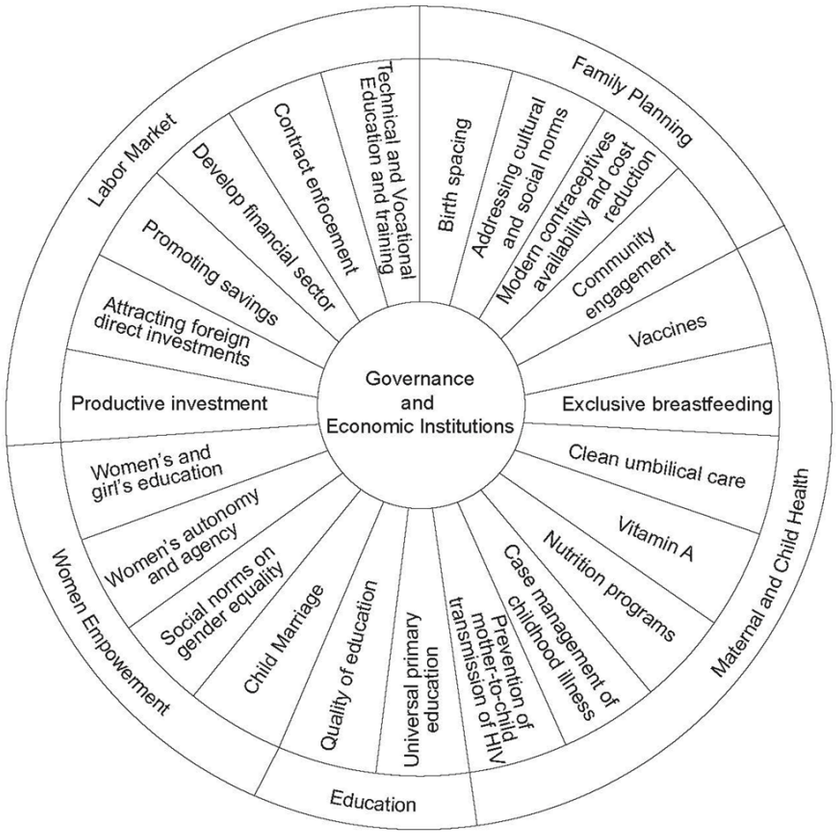
Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, menuntut sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas

tinggi. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sesuai tuntutan zaman akan mendorong keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Kota Tangerang Selatan memiliki bonus demografi, yang dicirikan dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang rendah. berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, periode bonus demografi akan lebih panjang untuk dinikmati karena hingga tahun 2045 rasio ketergantungan diproyeksikan masih sebesar 48, meskipun juga semakin mendekati 50.

Bonus demografi memiliki periode waktu (*window of opportunity*) yang terbatas sehingga perlu manfaatkan secara optimal. Situasi bonus demografi dapat memberikan dampak yang positif khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Tetapi, bonus ini tidak serta merta mewujud pada manfaat riil yang diterima melainkan membutuhkan upaya sehingga bonus ini dapat benar-benar berbuah positif seperti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menggunakan bahasa (Chen et al. (2023), bonus demografi perlu dikapitalisasi untuk dapat meraih manfaat yang ditawarkannya.

Fase-fase dalam kerangka bonus demografi penting untuk diidentifikasi karena masing-masing fase membutuhkan kebijakan yang tepat guna dapat merealisasikan secara maksimal manfaat positif yang ditawarkan oleh bonus demografi. Seberapa jauh negara dan daerah dapat memanfaatkan bonus demografi akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan (Chen et al., 2023). Menggunakan kerangka kerja *Demographic Dividend Framework* yang disusun oleh Cardona et al. (2020), terdapat enam sektor yang perlu diintervensi untuk dapat mengkapitalisasi bonus demografi meliputi 1) tata kelola dan kelembagaan ekonomi, 2) keluarga berencana, 3) kesehatan ibu dan anak, 4) pendidikan, 5) pemberdayaan perempuan, dan 6) ketenagakerjaan. Intervensi yang dilakukan hanya pada salah satu atau beberapa dari keenam sektor tersebut adalah perlu namun tidak cukup (*necessary but insufficient*) untuk dapat memaksimalkan potensi bonus demografi, melainkan membutuhkan intervensi multisektoral (Cardona et al., 2020). Masing-masing sektor tersebut kemudian dilengkapi dengan program dan intervensi spesifik yang dibutuhkan sehingga *Demographic Dividend Framework* tersebut dapat memberikan panduan kebijakan hingga ke level yang detail.



Gambar 3.1. Kerangka kerja bonus demografi (*Demographic Dividend Framework*) yang memuat sektor dan subsektor yang perlu diintervensi untuk mengkapitalisasi bonus demografi

Sumber: Cardona et al., (2020)

Terdapat berbagai persoalan yang menjadi konsen pada setiap fase dalam kerangka bonus demografi di Kota Tangerang Selatan yaitu sektor keluarga berencana (KB), kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan masih memiliki masalah-masalah yang perlu diatasi pada periode 20 tahun mendatang. Intervensi-intervensi spesifik pada sektor KB sebagaimana dianjurkan oleh *Demographic Dividend Framework* memiliki kaitan dengan masalah-masalah di atas, misalnya adalah menargetkan norma budaya dan sosial (*addressing cultural and social norms*) yang menyiratkan perlunya program-program KB untuk senantiasa dikontekstualkan sesuai perkembangan zaman, khususnya ketika terjadi pergeseran norma budaya dan sosial di mana salah satunya adalah berkembangnya prinsip *child free* yang akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan generasi di Kota Tangerang Selatan. Program KB yang semula menyasar pada pembatasan jumlah anak perlu diubah menyasar penguatan keluarga, kampanye kesadaran pernikahan dan sosialisasi mengenai pentingnya menikah pada usia yang tepat dan membangun keluarga.

Dari sektor kesehatan, biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas masih dinilai mahal menurut hasil *FGD*, terlepas dari proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan yang realisasi pencapaiannya telah mencapai 97,31% dari target 95%. *Universal Health Coverage* (*UHC*) perlu diprioritaskan pemenuhannya. *UHC* ini menjadi penting karena menjadi target global dan menjadi bagian dari *Sustainable*

Development Goals 2030. *UHC* memastikan bahwa setiap warga dalam populasi memiliki akses terhadap berbagai pelayanan kesehatan yang bermutu yang dibutuhkan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif), kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkan, secara terjangkau. Dua elemen kunci dari *UHC* yang perlu dijamin oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu serta perlindungan atas risiko finansial ketika warga mengakses pelayanan tersebut.

Masalah berikutnya dijumpai dari sisi kesehatan anak. Hasil KLHS menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Balita, dan prevalensi malnutrisi balita, masih menjadi masalah yang perlu dituntaskan segera. Kesemua masalah tersebut memiliki keterkaitan dan dapat dijawab dengan intervensi-intervensi spesifik dari *Demographic Dividend Framework* yaitu pemberian vaksin dan ASI eksklusif, pelayanan neonatal esensial, pemberian vitamin A dan nutrisi, serta penanganan penyakit anak (*childhood illness*). Sementara itu, berkembangnya penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan karena pola hidup warga kota cenderung menjadi semakin tidak sehat dengan pergeseran pola konsumsi dan berkurangnya aktivitas fisik, juga menjadi isu di bidang Kesehatan. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi lingkungan yang juga menjadi semakin tidak sehat karena berbagai bentuk pencemaran lingkungan khususnya udara dan air.

Dalam hal pelayanan kesehatan, tata kelola rumah sakit yang dinilai belum optimal dan birokrasi pelayanan di rumah sakit yang dinilai masih cukup rumit juga menjadi isu bidang kesehatan.

Pada sektor pendidikan, Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik namun juga masih memiliki sejumlah tantangan. Kota Tangerang selatan memiliki persoalan tingkat pendidikan penduduk usia produktif yang didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah atas sebesar 47,25% dan 25,91% berpendidikan SD dan SMP. Tingkat pendidikan SMA sederajat yang ditamatkan pada berbagai generasi menunjukkan angka sebesar 54,32% pada Generasi Milenial, 40,56% pada Generasi X, dan 30,41% pada *Baby Boomer* (BPS,2020). Hal ini terjadi karena belum meratanya kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

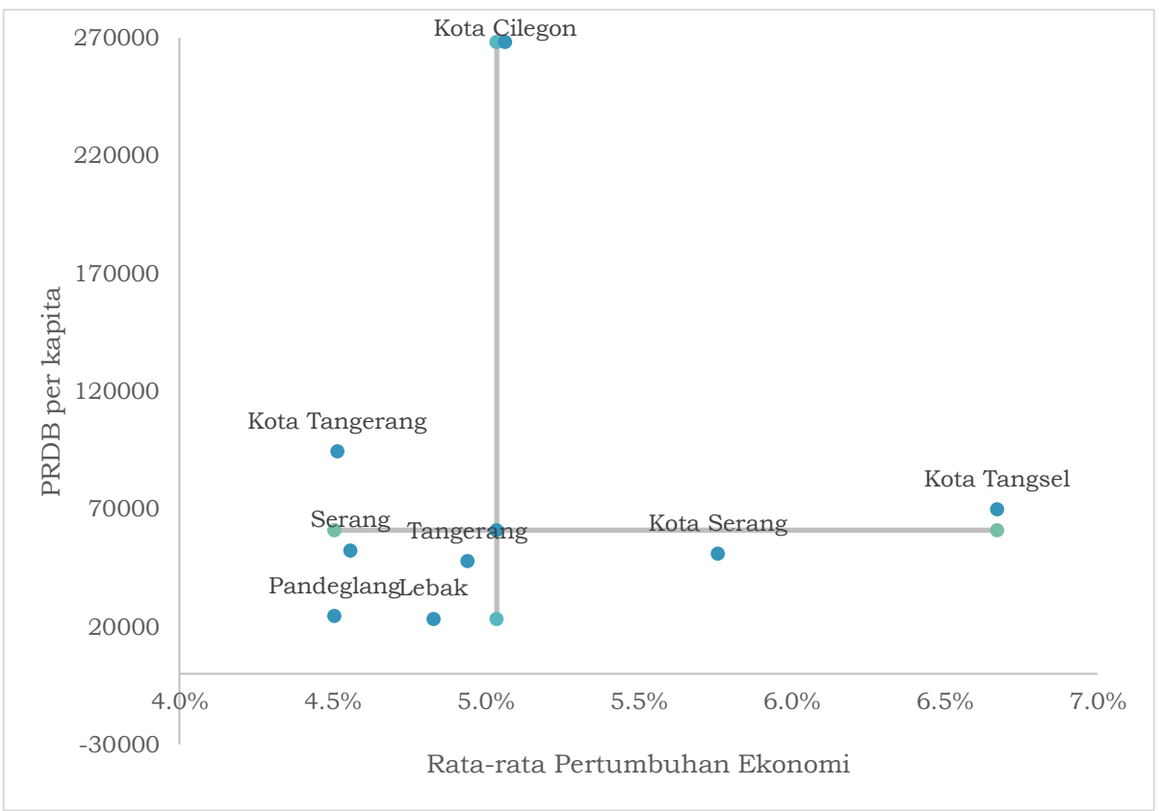
Dari sisi sektor ketenagakerjaan, masalah utama yang teridentifikasi adalah masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Masalah ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas tenaga kerja akibat keterampilan dan pengetahuannya yang terbatas. Rendahnya daya saing ini kemudian menyebabkan tenaga kerja menggeluti sektor informal yang tidak menuntut keterampilan dan pengetahuan khusus. Terdapat korelasi antara pendidikan dan daya saing tenaga kerja. Pencari kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih luas.

Situasi ini akan dapat jauh lebih menantang dengan semakin berkembangnya teknologi yang dalam beberapa hal, dapat menggantikan peran manusia. Oleh karena itu, peningkatan daya saing menjadi keniscayaan bagi Kota Tangerang Selatan. Hanya melalui tenaga kerja yang berdaya saing maka bonus demografi dapat benar-benar menjadi bonus.

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan;

Pada tahun 2045, Indonesia menargetkan posisinya sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Profil indonesia 2045 menjadi peta jalan (*roadmap*) yang harus diejawantahkan oleh seluruh daerah termasuk Kota Tangerang Selatan. Pemerintah daerah secara konsisten mendayagunakan seluruh sumberdayanya untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Nasional menargetkan pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$23.000-30.300. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang sangat baik karena berada di atas rata-rata Provinsi Banten dan nasional. Pendapatan per kapita Kota Tangerang Selatan sebesar 69,74 juta rupiah per tahun pada tahun 2023 atau setara dengan US$4.520,64. Kota Tangerang Selatan menjadi yang tertinggi ketiga terpaut dua level dibawah Kota Cilegon dan Kota Tangerang, sedangkan pada tingkat nasional menempati peringkat ke-23.



Gambar 3.2. Korelasi pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/kota di Provinsi Banten 2022

Kota Tangerang Selatan masih memiliki sejumlah tantangan dalam mencapai target PDRB per kapita nasional hingga tahun 2045 diantaranya adalah 1) Daya saing SDM dan kesempatan kerja yang terbatas, 2) Kurangnya pengelolaan potensi dan upaya peningkatan daya tarik daerah, dan 3) Transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial.

Nasional memberikan pesan yang cukup kuat dalam pembangunan ekonomi yaitu tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memperhatikan keadilan dan pemerataan. Ditargetkan, ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377-0,320. Kota Tangerang selatan memiliki tingkat ketimpangan dengan kategori sedang yaitu 0,359 di tahun 2023. Meski berkategori sedang, namun Kota Tangerang Selatan memiliki tantangan rasio ketergantungan yang diperkirakan akan terus meningkat. Rasio ketergantungan Kota Tangsel akan semakin meningkat memiliki konsekuensi dalam jangka panjang *(in the long run)* terjadi penurunan kesejahteraan disebabkan penurunan produktivitas, pengangguran, penurunan kesehatan hingga pada akhirnya berpengaruh pada ketimpangan pendapatan per kapita. Tingkat ketergantungan yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan (Wulan S.D dan Taresh A.A, 2021. Pada akhirnya kondisi ini berpotensi meningkatkan ketimpangan daerah.

Nasional mengarahkan transformasi ekonomi yang difokuskan pada peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam *Global Value Chain*, penguasaan teknologi menengah dan tinggi. Jika transformasi yang dimaksud oleh nasional menitikberatkan pada industrialisasi, maka dalam konteks Kota Tangerang Selatan akan bertransformasi menuju perdagangan dan jasa, UMKM dan Ekraf. Analisis terhadap struktur PDRB menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor yang merupakan basis dengan kontribusinya yang besar terhadap PDRB namun belum berstatus prima. Dari sembilan sektor basis, dalam kurun waktu tahun 2011-2022 terdapat empat sektor lapangan usaha yang berstatus prima yaitu konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, dan real estate. Sektor konstruksi diperkirakan akan menurun kinerjanya disebabkan karena daya dukung lahan yang semakin terbatas. Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan upaya cepat mempersiapkan transformasi di bidang ekonomi *shifting* dari sektor konstruksi ke sektor perdagangan dan jasa dengan salah satu caranya memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif. Di antara modalitas yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan untuk menggerakkan UMKM dan Ekraf adalah potensi daya saing daerah. Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat kedua se-provinsi berdasarkan tingkat keterampilan, menempati peringkat pertama se-provinsi pada pilar pasar produk dan peringkat kedua pada pilar kapabilitas inovasi. Ketiga pilar tersebut merupakan fondasi yang cukup kuat dalam mengoptimalkan kinerja UMKM dan Ekraf pada masa mendatang.

Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Kota Tangerang Selatan bersama Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

3. Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif;

Tata kelola diperlukan dalam rangka agar Pemerintah Daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang efektif, kebijakan yang transparan, dan administrasi publik yang responsif memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Belum optimalnya implementasi manajemen aparatur sipil negara, reformasi akuntabilitas kinerja dan belum optimalnya penataan kelembagaan serta proses bisnis untuk transformasi pelayanan publik merupakan kondisi atau hal yang ke depannya menjadi perhatian dalam perencananan pembangunan ke depan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus memiliki inovasi dan pemikiran jangka panjang guna beradaptasi dengan kompleksitas permasalahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah organisasi publik sangat membutuhkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien sehingga roda organisasi dapat bergerak dengan cepat dan taktis secara komprehensif dengan tujuan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Sistem birokrasi yang baik tidak memiliki format baku yang tetap, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituntut agar terus melakukan inovasi positif guna menyesuaikan dinamika perubahan di masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Perkembangan teknologi saat ini dan ke depan berdampak besar terhadap cara kerja pemerintahan daerah. Teknologi membuka peluang baru dalam transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumberdaya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan akan merubah interaksi di antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Digitalisasi pemerintahan menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola keamanan, keterpaduan data dan informasi serta belum meratanya literasi digital. Komplesitas digitalisasi semakin dirasakan terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Memanfaatkan potensi dan keberadaan berbagai perguruan tinggi, lembaga kajian, swasta dan para profesional yang ada di Kota Tangerang Selatan menjadi modal tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat melakukan kerja sama untuk menjawab dan beradaptasi terhadap tantangan

ke depan. Kerja sama *multihelix*, termasuk kerja sama dalam pembiayaan pembangunan ini akan membantu dan meringankan kerja pemerintahan dalam menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang.

Pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggungjawab adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

4. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas;

Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terjadinya *gated community* harus mulai diantisipasi agar tidak terus meningkat ke depannya. Sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan harus diwujudkan terutama melalui integrasi kawasan-kawasan permukiman di mana fasilitas dan infrastruktur yang saat ini hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh penghuni perumahan harus mulai diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Integrasi pengelolaan faslitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur ini menjadi penting agar tidak terjadi segregasi sosial. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur publik akan dapat memicu konflik sosial yang akan mengancam keberlanjutan kerukunan. Dalam hal ini integrasi kawasan permukiman diharapkan dapat menciptakan keadilan, karena pada prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal ini maka penataan ruang akan menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting. Melalui penataan ruang, integrasi dan penataan kawasan permukiman dapat diwujudkan terutama agar tidak terjadi lagi fragmentasi dan segmentasi pemanfaatan dari fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun. Tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman yang ekslusif dan *enclave* harus diminimalisasi, Penataan ruang harus diarahkan untuk membangun ruang kota yang inklusif yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian membutuhkan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang memadai atau sesuai standar untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas. Kebutuhan terhadap infrastruktur akan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Namun di sisi lain, luas lahan perkotaan juga semakin terbatas. Karena itu perlu desain infrastruktur yang terintegrasi baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi. Infrastruktur dasar terkait dengan

pelayanan perkotaan seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur ekonomi terkait dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai salah satu sektor unggulan di Kota Tangerang Selatan terutama UMKM yang harus didukung oleh ketersediaan air bersih, transportasi, komunikasi, energi, dan sebagainya.

Dengan kondisi lahan yang terbatas, maka struktur ruang yang kompak menjadi salah satu strategi yang harus diupayakan. Sayangnya, tidak meratanya kualitas infrastruktur yang ada saat ini menghambat aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi sehingga struktur ruang kota menjadi timpang dan terfragmentasi. Beban kawasan dengan infrastruktur dasar dan ekonomi yang berkualitas akan semakin tinggi karena terjadi penumpukan aktivitas di kawasan tertentu. Hal ini tentunya kan mengurangi kenyamanan dan sekaligus akan mengurangi produktivitas.

Selain pemerataan standarisasi dan integrasi infrastruktur, hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya kinerja *smart city* terutama dalam memantau kebutuhan infrastruktur berdasarkan pola mobilitas penduduk. Ke depan pemanfaatan teknologi digital ini akan sangat penting. Bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan kota. Teknologi digital akan mempermudah, mempercepat, dan meringankan kinerja pelayanan serta akan meningkatkan kapasitas infrastruktur baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, setiap persoalan bisa secara cepat diketahui dan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga dapat segera direspon. *Smart city* juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perkotaan.

5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi;

Wilayah perkotaan ke depan dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim merupakan bagian penting yang perlu diantisipasi. Laju pembangunan kota terus didorong guna mencapai target pertumbuhan, menjadikan wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis terhadap wilayah disekitarnya, khususnya hub ekonomi bagi Jakarta. Dalam perkembangan skala kawasan, kawasan mega-urban Jakarta-Bandung diprediksi akan berkembang pesat di masa mendatang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perkembangan kota ke depan akan semakin beragam dan berkembang pesat. Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan terus mendorong penataan lingkungan wilayah perkotaan yang selaras dengan menghadirkan karakter lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan di daerah perlu dengan cermat memperhitungkan perkiraan dampak serta risiko lingkungan.

Kualitas lingkungan perkotaan merupakan salah satu isu strategis yang perlu ditelaah. Sektor pelayanan terhadap sanitasi dan kesehatan

lingkungan penting perlu terus ditingkatkan kinerjanya, baik terhadap akses sanitasi dan kebersihan lingkungan yang memadai, kualitas air baku serta ketersediaan prasarana pendukung yang prima dalam lingkungan perkotaan ke depan. Kualitas lingkungan di samping tingkat pelayanan kesehatan masyarakat, juga perlu diperhatikan ke depan adalah kualitas lingkungan udara perkotaan. Isu ini juga menjadi faktor penting mengingat dinamika perubahan iklim yang semakin besar ke depan, sementara aktivitas masyarakat dalam penggunaan bahan pembakaran dari fosil yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, menyebabkan potensi penurunan kualitas udara yang juga akan semakin buruk dirasakan dimasa mendatang. Perlu upaya mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan yang mampu mengurangi dampak penurunan kualitas udara perkotaan. Disamping itu juga beberapa faktor-faktor utama pendorong penurunan kualitas udara perkotaan antara lain dari beberapa sumber aktivitas perkotaan yang juga ke depan perlu diantisipasi, antara lain ketersediaan ruang terbuka hijau yang perlu dipertahankan. Data dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tangerang Selatan 2022-2042 menunjukan alokasi RTH sekitar 4,31%. Beberapa perkembangan bangunan telah mengokupasi beberapa area peruntukan taman kota, taman kecamatan, taman rukun warga, pemakaman, dan jalur hijau. Sebagian lahan ruang terbuka hijau, terutama pada daerah sempadan sungai dan situ beralih fungsi menjadi permukiman.

Beberapa program penguatan lingkungan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dilakukan antara lain meluncurkan program "Tangsel *Green and Clean* 2023" untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Program Kampung Iklim (ProKlim) melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, untuk memberikan pemahaman adapatasi dan mitigasi perubahan iklim melalui aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah ramah lingkungan (3R), pengendalian penyakit menular sebagai dampak dari perubahan iklim, pengendalian kekeringan, banjir dan bencana alam, antisipasi kenaikan muka air, intrusi, peningkatan tutupan vegetasi dengan model kebun vertikal, pengendalian sumber-sumber emisi dan GRK di beberapa wilayah di Kampung Ginting, kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat, Kompleks Pondok Pucung Indah-I, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren dan Perumahan Althia Park, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren. Program ini terus dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, untuk seluruh wilayah kampung di setiap RT/RW Kota Tangerang Selatan.

Program-program kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dengan memotivasi lebih aktif dan peduli dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peran aktif kesadaran masyarakat terhadap pencegahan lingkungan perlu didorong lebih masif. Peran Pemerintah Daerah melalui kegiatan rencana aksi memerlukan upaya yang berkelanjutan. Kesadaran ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang tindakan nyata seperti tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan reboisasi. Dengan demikian, setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Fokus Kota Tangerang Selatan berikutnya adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim telah menjadi isu sentral dalam berbagai sektor kehidupan. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global akibat meningkatnya gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Tantangan global yang menjadi perhatian dunia ke depan adalah dinamika perubahan iklim dengan variabilitas suhu permukaan yang terus meningkat akibat menurunnya fungsi serapan CO_2 dari vegetasi alami dari dampak tingginya perubahan tutupan/penggunaan lahan terbangun dan aktivitas dan atau kegiatan kolektif yang memproduksi emisi tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Alston dan Whittenbury (2013), memperkirakan akan adanya krisis bencana alam dari perubahan iklim yang tidak terkendali di mana pada tahun 2030, variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air karena pada saat itu populasi dunia sudah menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan mencapai 50% lebih besar dari kondisi saat ini, 45% lebih banyak energi yang dibutuhkan dan 30% lebih banyak air bersih yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tantangan terberat dalam implementasinya adalah mencari terobosan atau inovasi untuk bertransformasi atau ber-transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi bersumber dari alam yang bersifat regeneratif.

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global di Kota Tangerang Selatan saat ini perlu menjadi fokus utama yang perlu diantisipasi. Kota tangguh bencana dan berketahanan perubahan iklim menjadi salah satu upaya besar Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi risiko bencana, dengan memasukan aspek kebencanaan dalam rencana tata ruang. Program-program pengurangan risiko bencana dan program adaptasi perubahan iklim di Kota Tangerang Selatan harus merupakan program-program yang diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang baik dalam struktur ruang, pola ruang dan ketentuan khusus dalam pemanfaatan ruang. Kawasan rawan bencana juga termasuk yang harus diintegrasikan dalam penataan ruang wilayah perkotaan Tangerang Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tahun 2021 melalui kajian inventarisasi gas rumah kaca (GRK) menunjukan bahwa sektor energi, industri dan pengelolaan limbah cair berkontribusi besar terhadap emisi GRK di Kota Tangerang Selatan. Energi terbesar dari konsumsi listrik oleh rumah tangga dan industri, sementara sektor industri adalah pengguna terbesar sumber bahan bakar fosil. Upaya penataan kebijakan dengan mengarusutamakan perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, mendorong aktivitas ramah lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan, pengelolaan limbah dengan teknologi ramah lingkungan.

Berikutnya, pengembangan kota di masa mendatang juga mengedepankan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Memanfaatkan sumber-sumber energi yang tersedia dari alam sangat dibutuhkan mengingat ketergantungan yang sangat tinggi yang mencapai 100% pada energi listrik (BPS Provinsi Banten, 2021). Secara nasional, pemerintah saat ini sedang memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan di mana akselerasi terhadap upaya

transisi menuju energi non fosil ini terus digencarkan di mana target 2025 pemanfaatannya sudah mencapai 23%. Hal ini tentu perlu secara cermat di pertimbangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi program Energi Baru Terbarukan (EBT) tersebut. Kerja sama multi pihak dengan perguruan tinggi dan swasta dalam riset dan pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan modal besar yang saat ini dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan. Upaya percepatan program transisi energi sangat bisa dilakukan di Kota Tangerang Selatan.

Pengelolaan sampah perkotaan di Kota Tangerang Selatan yang juga perlu diantisipasi di masa mendatang. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya memiliki 1 TPA di Cipeucang, terdapat 38 TPS 3R, dan 333 Bank Sampah. Persoalan persampahan yang dihadapi Kota Tangerang Selatan adalah jumlah timbunan sampah yang mencapai 90,7% (2022), sementara kapasitas TPA Cipeucang dalam mengelola sampah pada tahun 2023 hanya sebesar 400 ton/hari dan dalam keadaan over kapasitas. Selain itu, proses daur ulang belum optimal dilakukan di mana data menunjukan hanya 25% (2022) sampah mampu dilakukan daur ulang.

Upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait persampahan yang telah dibuat, antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No.13 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Wali Kota No. 83 Tahun 2022 tentang pengurangan sampah plastik. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga terus mengupayakan kerja sama daerah dalam pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi *over* kapasitas TPA Cipeucang.

Upaya kolobarasi dengan wilayah sekitarnya dalam pengelolaan sampah bersama, serta optimalisasi TPS3R dan Bank sampah perkotaan serta program pemberdayaan sampah merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di masa mendatang.

6. Hunian modern dan nyaman bagi kawasan Megapolitan Jabodetabek.

Dalam konstalasi ruang megapolitan Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan menjadi tempat yang menarik menjadi kawasan permukiman kelas menengah atas dibandingkan dengan kota-kota satelit yang lainnya. Hal ini karena kedekatannya dengan Jakarta sebagai tempat aktivitas bekerja dan berusaha, sehingga penghuni kawasan-kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan dapat dengan mudah melaju dari rumah ke kantor.

Dari satu sisi, keberadaan kawasan hunian akan mendorong perekonomian Kota Tangerang Selatan melalui pertumbuhan konsumsi. Banyak pekerja di Jakarta yang akan membelanjakan pendapatannya di Kota Tangerang Selatan sebagai tempat tinggalnya. Kondisi ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas-aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelayanan dan jasa seperti sekolah, rumah sakit, pertokoan, hiburan, pasar, mall, kuliner, dan sebagainya. Keunggulan ini tentunya harus dioptimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Di sisi lain, kawasan hunian dalam bentuk kota-kota mandiri juga menciptakan segregasi sosial dengan masyarakat lokal. Fasilitas sosial dan fasilitas umum di kota-kota mandiri hanya diperuntukkan untuk penghuni sehingga membatasi akses masyarakat lokal untuk mengakses. Fragmentasi ruang seperti ini tentunya perlu menjadi isu strategis yang harus diatasi.

Ke depan segregasi sosial ini perlu diatasi agar Kota Tangerang Selatan dapat bertransformasi menjadi kota hunian yang nyaman dan berkelanjutan. Peran Kota Tangerang Selatan sebagai penyangga Jakarta dalam konteks hunian akan menjadi semakin penting. Penataan ruang permukiman menjadi kunci untuk menghadapi peningkatan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Studi terkait daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian. Selain itu pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi juga menjadi penting untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan. Integrasi infrastruktur abu-abu (*grey infrastructure*) dan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota hunian yang modern dan berkelanjutan. Di kota-kota pada negara maju, hal ini sudah banyak dilakukan dengan pendekatan yang dinamakan dengan NBS (*Nature Based Solutions*).

BAB 4
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang Selatan adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kota Tangerang Selatan yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun. Perumusan pokok-pokok visi didasarkan pada masalah utama dan/atau isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan dan memperhatikan Visi pembangunan jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045. Rumusan pokok-pokok visi pembangunan jangka Panjang Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Perumusan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

No.	Isu Strategis	Pokok-Pokok Visi
1.	Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global	Unggul, Berdaya Saing, Adaptif, Inovatif
2.	Penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas	Nyaman, Modern, Berkelanjutan, Inklusif, Terintegrasi, Berkualitas
3.	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Lestari, Berkelanjutan, Tangguh
4.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan;	Maju, Tangguh, Berkeadilan, Sejahtera
5.	Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif	Inovatif, Profesional, kolaboratif
6.	Hunian modern dan nyaman bagi kawasan Megapolitan Jabodetabek	Hunian yang modern dan nyaman

Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 juga dirumuskan dalam proses partisipatif dengan masyarakat dengan menggunakan cara *Foresight Planning* di mana harapan masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 digambarkan dalam *wordcloud* sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Rumusan Visi berdasarkan *FGD Foresight Planning*

Dengan memperhatikan rumusan pokok-pokok visi, hasil *FGD Foresight Planning* dan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 ”Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” maka Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045 adalah:

“Hunian Nyaman, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- **Hunian Nyaman**

  Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta-Bandung, Kota Tangerang Selatan berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di mana pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan memperkuat sistem huniannya dengan sistem layanan yang saling terintergrasi untuk mendukung produktivitas masyarakat yang berhuni di dalamnya dan menjadi daya tarik berkembangnya investasi pada sektor perdagangan dan jasa, termasuk dalam perkembangannya menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai *urban* & *health tourism* bagi kawasan megapolitan Jabodetabek. Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Layak Huni yang dilayani dengan infrastruktur berkualitas (*Green and Smart Infrastucture*) dan layanan perkotaan yang terintegrasi serta inklusif untuk mendukung produktivitas daerah.

- **Maju**

  Pada tahun 2045, dengan berlandaskan nilai religiusitas dan akar budaya, Kota Tangerang Selatan menjadi kota maju, modern, tangguh, dan inovatif berbasis riset dan teknologi, berdaya saing tinggi di kancah nasional dan global serta memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global.

- **Sejahtera**

  Pada tahun 2045, penduduk Kota Tangerang Selatan memiliki *human well being* yang tinggi, mencakup kecukupan kebutuhan material, relasi yang baik dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan, kesehatan emosional dan fisik, hingga aspek spiritual. Penduduk Kota Tangerang Selatan menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dalam segala aspek kehidupan dan memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan.

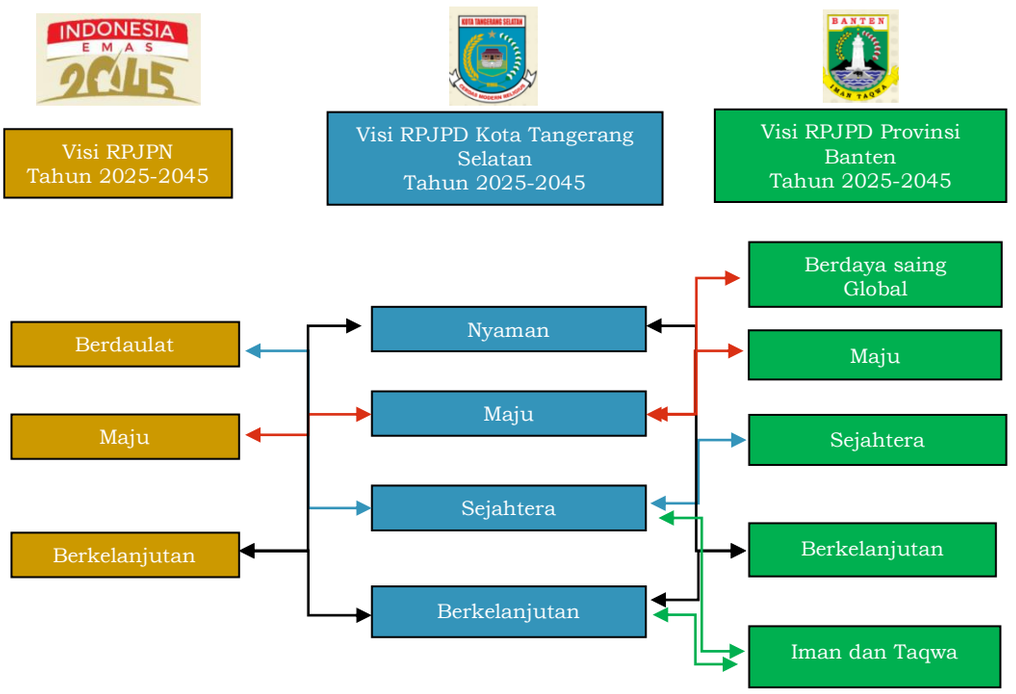
- **Berkelanjutan**

  Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Banten, berupaya mendukung pencapaian visi provinsi yang juga secara bersama-sama berupaya untuk mendukung pencapaian visi nasional dengan upaya penyelarasan antara visi kota dengan visi nasional dan visi provinsi sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2 dan Gambar 4.2.

Tabel 4.2. Penyelarasan Visi Kota Tangerang Selatan dengan Nasional dan Provinsi Banten

Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Hunian Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Banten Berdaya Saing Global, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa



Gambar 4.2. Penyelarasan Visi Kota Tangerang Selatan dengan Nasional dan Provinsi Banten

4.1.1. Sasaran Visi

Mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan pemetaan terhadap visinya disajikan dalam Tabel 4.3 dan 4.4.

Tabel 4.3. Sasaran Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

No.	RPJP Nasional				RPJPD Provinsi Banten				RPJPD Kota Tangerang Selatan			
	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Perkapita (USD)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	72,21-72,42	348,94-415,51	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB (ADHB) per kapita (Rp Juta)	79,00-81,80	404,50-415
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,10	15,00		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI)	25,62	98,90		Kontribusi PDRB Perdagangan dan Jasa (%)	51,50	60,00
		c. Kontribusi PDB Marnufaktur (%)	20,80	28,00		c. Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13				
2	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,00-8,00	0,50-0,80	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	1,91-2,41	0,10-0,20
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		b. Rasio Gini (Indeks)	0,344-0,365	0,300-0,351		Rasio Gini (indeks)	0,336-0,353	0,280-0,300
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,40	28,50		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,94	3,43		Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten (%)	13,00	15,00
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,33	5,89-6,89		Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) (%)	5,50-5,98	6,10-7,10
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Kepemimpinan daerah sebagai hub integrasi ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,70-3,90	4,50-4,80	Kepemimpinan dan pengaruh daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,81	4,50

No.	RPJP Nasional				RPJPD Provinsi Banten				RPJPD Kota Tangerang Selatan			
	Sasaran Visi	**Indikator**	**Target 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Target 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Target 2025**	**Target 2045**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,54	0,71	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	84,68	87,00
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,60	93,50	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,56	93,42	Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	2,71	23,80
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	66,92	74,92		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	48,23	54,08

Tabel 4.4. Pemetaan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi

Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	Sasaran Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	
Hunian Nyaman	Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	
Maju	Kepemimpinan dan pengaruh daerah meningkat	Daya saing sumber daya manusia meningkat
Sejahtera	Peningkatan Pendapatan per kapita	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang
Berkelanjutan	Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	

4.1.2. Metadata dan Definisi Operasional Indikator Sasaran Visi

4.1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. Metadata PDRB per kapita bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang tersedia tahunan dan dihitung dengan rumus:

$$\text{PDRB per kapita (Rp Juta)} = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$$

Keterangan:

$PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
populasi = jumlah penduduk
t = periode

4.1.2.2. Kontribusi PDRB Perdagangan dan Jasa

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Perdagangan dan Jasa (yang terdiri dari sektor: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya) atas dasar harga berlaku, yang mencerminkan proporsi nilai tambah semua sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh semua sektor Perdagangan dan Jasa, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah. Metadata kontribusi PDRB bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang tersedia tahunan dan dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PDRB Perdagangan dan Jasa (\%)} = \frac{Nilai\ tambah\ semua\ sektor\ industri\ Perdagangan\ dan\ Jasa\ ADHB}{Nilai\ PDRB\ \text{ADHB}\ Kota} \ x\ 100\%$$

4.1.2.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Metadata tingkat kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang tersedia dua kali per tahun pada bulan Maret dan bulan September. Tingkat kemiskinan dihitung dengan rumus:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$

Keterangan:

α = 0

z = garis kemiskinan

y_i = *Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...., q),* $y_i < z$

q = *Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan*

n = *jumlah penduduk*

4.1.2.4. Rasio Gini

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Metadata rasio gini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang tersedia dua kali per tahun pada bulan Maret dan bulan September. Rasio gini dihitung dengan rumus:

$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(y_i - y_{i-1})$$

di mana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i
Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i
n = jumlah observasi

4.1.2.5. Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten

Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan adalah share PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten, sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Metadata kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang tersedia tahunan dan dihitung dengan rumus:

$$Kontribusi\ PDRB\ ADHB\ _{Tangerang\ Selatan}(\%) = \frac{PDRB\ ADHB_{Tangerang\ Selatan}}{PDRB\ ADHB_{Provinsi\ Banten}}\ x\ 100\%$$

4.1.2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menunjukkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dalam sasaran visi Metadata pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersedia tahunan dan dihitung dari peningkatan PDRB atas dasar harga konstan, dengan rumus:

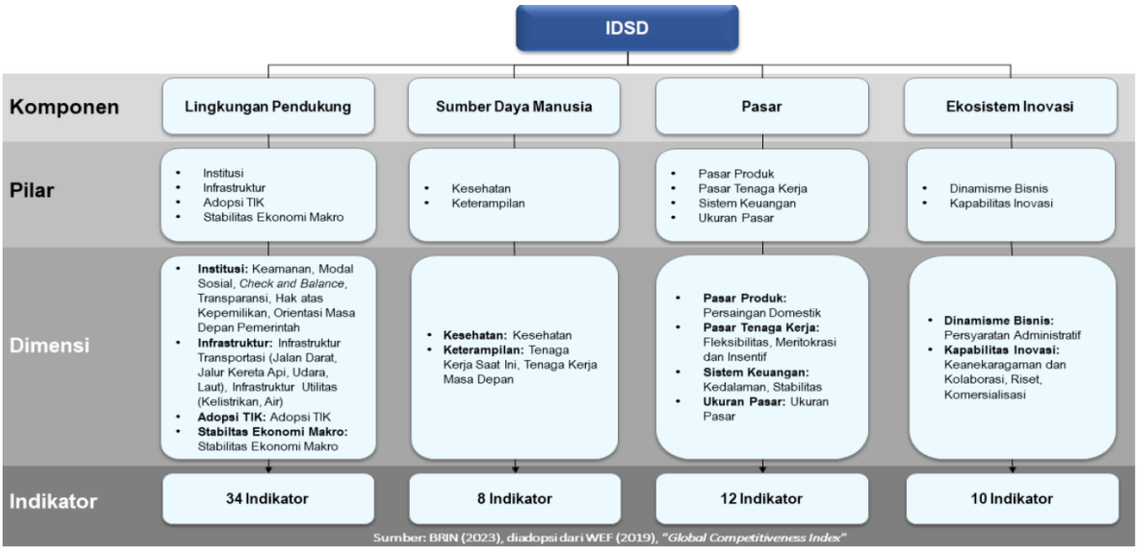
$$R_{(t-1,\ t)} = (PDRB_t - PDRB_{t-1})/PDRB_{t-1}\ x\ 100\%$$

di mana:

R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%)
$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto ADHK pada tahun t
$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto ADHK pada tahun t-1

4.1.2.7. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada Gambar 4.3 di bawah ini.



Gambar 4.3. Komponen Pembentuk Indeks Daya Saing Daerah
Sumber: BRIN, 2023

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandardisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0–5 pada seluruh indikator. Rumus perhitungan IDSD 2023 adalah sebagai berikut:

$$Skor\ i,d = (Ni,d - NRi/NTi - NRi) \times 5,$$

Skor i,d adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Ni,d adalah nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d NRi adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NTi adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).

4.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: IPM < 60
2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70
3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80
4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80

Metadata IPM bersumber dari Badan Pusat Statistik, yang tersedia tahunan dengan rumus:

- Indeks Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah
RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

4.1.2.9. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

$$\%PEK = \sum_{i=base\ layer}^{t} PE_t \Big/ \sum_{i=base\ layer}^{t} EB_t$$

$\%PEK$	: persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif.
$\sum_{i=base\ layer}^{t} PE_t$	: akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t
$\sum_{i=base\ layer}^{t} EB_t$	: akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t
t	: titik tahun perhitungan
i	: base year

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem AKSARA Bappenas.

4.1.2.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan indikator ini adalah:

IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Perhitungan IKA menggunakan perubahan rumusan IKA-Indeks Pencemar (Ika-Ip) menjadi IKA-modifikasi NSF WQI (IKA-INA)

Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya parameter baru yaitu *Particulate Matter* 2,5 Mikron (PM 2,5)

Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4.2. Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan hingga Tahun 2045. Perumusan misi pembangunan jangka Panjang Kota Tangerang Selatan mengacu pada permasalahan pokok yang dirumuskan pada bab 3 dan mempertimbangkan agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Perumusan dan penjelasan misi RPJPD terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.Perumusan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Masalah Utama	Masalah Pokok	Misi Daerah
3.1.1. Kualitas SDM Belum Unggul dan Berdaya Saing Global	1. Layanan Pendidikan yang Berkualitas Belum Merata	Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing
	2. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau belum merata	
	3. Percepatan Penuntasan Kemiskinan dan Perluasan Perlindungan yang Adaptif Belum Optimal	
3.1.2. Pengembangan Perekonomian Kota	1. Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal	Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi

Masalah Utama	Masalah Pokok	Misi Daerah
Belum Optimal, Berdaya Saing Global dan Berkeadilan	2. Pengembangan Potensi Ekonomi dan Daya Tarik Daerah Belum Optimal	untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
	3. Belum Optimalnya Peran Riset, Inovasi dan Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah	
3.1.3. Tata Kelola Yang Profesional dan Kolaboratif Belum Optimal	1. Kerja sama *Multihelix* dalam Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah
	2. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik Belum optimal	
3.1.4. Infrastruktur Dan Layanan Perkotaan Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif	1. Infrastruktur, Layanan Perkotaan dan Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif Sesuai Kebutuhan Masyarakat	Misi 4. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi
	2. Pengelolaan Persampahan yang Terpadu dan Ramah Lingkungan Belum Optimal	
	3. Penataan Ruang yang Terintegrasi, Berkeadilan dan Berkelanjutan	
3.1.5. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi belum optimal	1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Menurun	
	2. Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Global Belum Optimal	
	3. Penguatan Ketersediaan dan Kecukupan Pangan yang Belum Optimal	
	4. Penguatan Norma Keluarga Dan Masyarakat Belum Optimal	

Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing

Pembangunan Kota Tangerang Selatan selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan

budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk: (i) mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; (ii) mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan; (iii) mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; (iv) membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; (v) membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; dan (vi) melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya visi Indonesia Emas 2045, transformasi sosial di Kota Tangerang Selatan ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang menyeluruh berdasarkan siklus hidup yang diarahkan pada terwujudnya: (i) kesehatan untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas yang merata, serta (iii) perlindungan sosial yang adaptif.

Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

Perkembangan ekonomi Kota Tangerang Selatan di masa depan akan dihadapkan pada beberapa perubahan besar seperti perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi, yang menuntut perlu dilakukannya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi merupakan kunci untuk mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Kota Tangerang Selatan setara dengan negara maju, sesuai dengan sasaran visi Indonesia Emas Tahun 2045. Transformasi ekonomi di Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi berbasis produk unggulan daerah, penerapan teknologi informasi, investasi dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur.

Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas yang mendukung karakter perkotaan. Selain bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan,

perekonomian didorong kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*) berbasis inovasi dan keterampilan tinggi. Untuk itu dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja, UMKM dan Koperasi. Tenaga kerja dibentuk menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global. UMKM dan koperasi akan menjadi penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, percepatan transformasi digital dilaksanakan dan diarusutamakan dalam berbagai sektor ekonomi yang disertai dengan penguatan talenta digital untuk meningkatkan akses terhadap layanan digital berkualitas, memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi dampak negatif disrupsi teknologi digital seperti kesenjangan digital (*digital divide*) dan peningkatan pengangguran akibat hilangnya sejumlah pekerjaan. Mendukung hal tersebut maka penerapan teknologi informasi disertai dengan investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.

Ekonomi Kota Tangerang Selatan harus terintegrasi dan terhubung secara nasional dan global melalui dukungan infrastruktur konektivitas yang baik, memperkuat akses ke pasar regional dan mengurangi biaya logistik. Iptek dan inovasi menjadi pendorong keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dalam jangka panjang. Ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru menjadi barometer ekonomi kreatif nasional dan global dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta Kota Tangerang Selatan ke tingkat global. Upaya yang besar tersebut memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam transformasi ekonomi, dilakukan upaya untuk mendukung penerapan ekonomi sirkuler agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga berkelanjutan dan dapat mewujudkan Kota Tangerang Selatan *zero waste*.

Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan

pelayanan publik yang berkualitas di tengah perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang bergerak begitu pesat. Kebutuhan masyarakat perkotaan seperti halnya di Kota Tangerang Selatan, akan menuntut pelayanan yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan kedekatan. Hal tersebut membutuhkan peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat, penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu yang didukung dengan percepatan digitalisasi layanan publik, serta pelaksanaan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

Transformasi tata kelola di Kota Tangerang Selatan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah. Sehingga pada penerapannya perlu diupayakan melalui optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah. Tidak hanya itu, dalam mendukung ketercapaian pembangunan diperlukan juga kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan kerja sama dan keterlibatan berbagai pihak (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat). Kemudian dalam menjamin integritas aparatur dan pemerintah daerah, dilakukan upaya peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, pengembangan karier, manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta promosi mutasi ASN.

Untuk meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah diupayakan melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam menghadapi dampak kompleksitas ancaman seperti perubahan iklim dan bencana, perbaikan kualitas lembaga demokrasi dan peran partai politik yang akuntabel, peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas, penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Misi 4 : Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara holistik, pembangunan kewilayahan menjadi pilar penting untuk mewujudkan agenda transformasi. Pembangunan kewilayahan berupa dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dilakukan dengan pendekatan inklusif, bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure governance*).

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berketahanan air dan kemandirian pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Keterkaitan misi dengan sasaran visi yang akan dicapai dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6. Keterkaitan Misi dengan Sasaran Visi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Kata Kunci Visi	Sasaran Visi	Indikator	Misi
Sejahtera	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB (ADHB) per kapita (Rp Juta)	Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
		Kontribusi PDRB Perdagangan dan Jasa (%)	
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing
		Rasio Gini (indeks)	
		Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten (%)	Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
Maju	Kepemimpinan dan pengaruh daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah
	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing
Hunian Nyaman, Berkelanjutan	Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	Misi 4. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	

Penyelarasan misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dengan misi RPJPN Tahun 2025-2045, disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Penyelarasan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2045

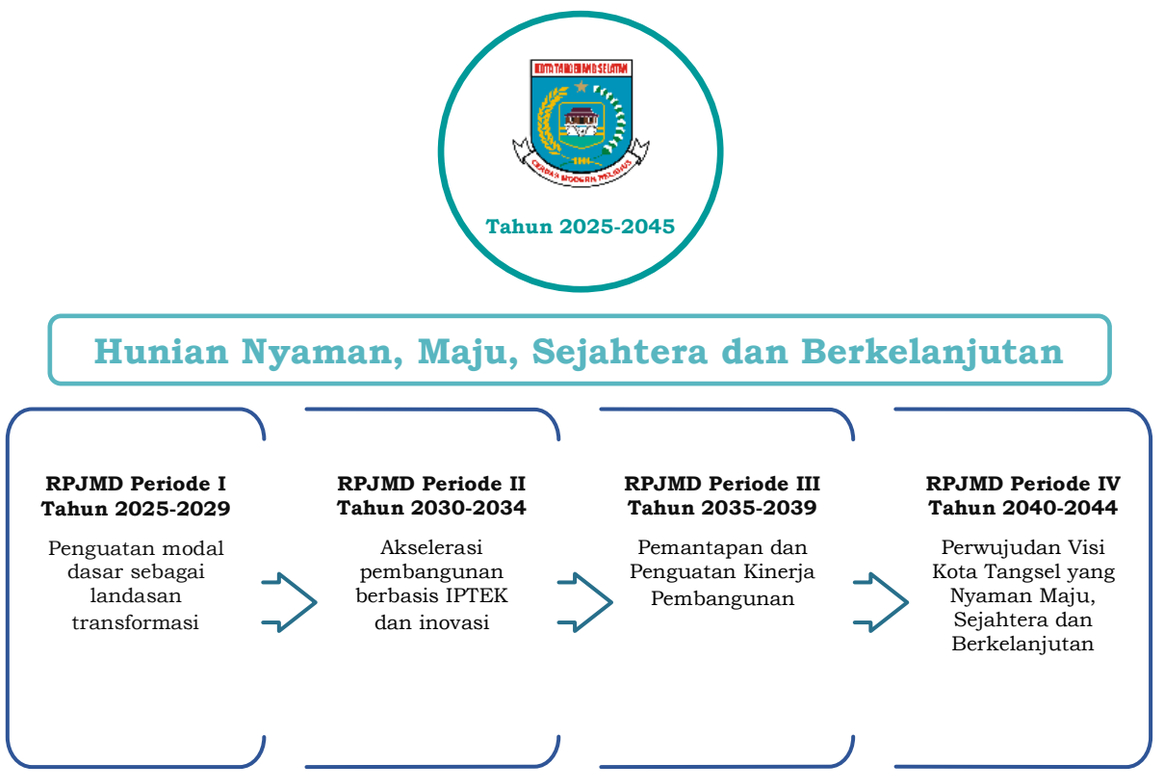
No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing
2.		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
3.		Transformasi tata Kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah
4.	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	
5.		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi yang Lestari	Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi
6.	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Perkuatan Pemerataan, dan Interkoneksi Pembangunan	
7.		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Banten yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan	
8.		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Banten yang Inovatif dan Berdaya Saing Global	

BAB 5
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja pembangunan daerah per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dan pelaksanaan misi daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang Selatan dirumuskan berdasarkan permasalahan daerah, isu strategis daerah, rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, rekomendasi KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka Nasional Tahun 2025-2045.

Arah kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dibagi dalam 4 (empat) tahapan mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan Misi ke-1 “Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing” , yaitu:

1. Penuntasan Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Yang Merata dan Berkualitas (RPJMD Periode I Tahun 2025-2029);

2. Percepatan Pembangunan SDM Kota Tangerang Selatan Berkualitas dan Inklusif (RPJMD Periode II Tahun 2030-2034);
3. Penguatan Daya Saing SDM Kota Tangerang Selatan Unggul (RPJMD Periode III Tahun 2035-2039);
4. Perwujudan SDM Kota Tangerang Selatan Sehat, Cerdas, Kreatif dan Berdaya Saing (RPJMD Periode IV Tahun 2040-2044).

Arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan Misi ke-2 "Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan", yaitu:

1. Pengembangan potensi sektor-sektor basis ekonomi Kota Tangerang Selatan berdasarkan riset dan inovasi (RPJMD Periode I Tahun 2025-2029);
2. Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi (RPJMD Periode II Tahun 2030-2034);
3. Penguatan ekonomi Kota Tangerang Selatan yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh (RPJMD Periode III Tahun RPJMD 2039);
4. Perwujudan Kota Tangerang Selatan berpendapatan tinggi, sejahtera dan berkeadilan (RPJMD Periode IV Tahun 2040-2044).

Arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan Misi ke-3 "Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah", yaitu:

1. Membangun tata kelola dan regulasi yang adaptif dan berintegritas untuk penguatan pondasi tata kelola menuju transformasi (RPJMD Periode I Tahun 2025-2029);
2. Percepatan peningkatan kualitas tata kelola dan regulasi yang adaptif dan berintegritas (RPJMD Periode II Tahun 2030-2034);
3. Penguatan kualitas tata kelola dan regulasi yang adaptif dan berintegritas hingga berstandar nasional (RPJMD Periode III Tahun 2035-2039);
4. Perwujudan tata kelola dan regulasi yang adaptif dan berintegritas (RPJMD Periode IV Tahun 2040-2044).

Arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan Misi ke-4 "Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi", yaitu:

1. Pembangunan kewilayahan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi (RPJMD Periode I Tahun 2025-2029);

2. Percepatan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berketahanan sosial, budaya serta ekologi (RPJMD Periode II Tahun 2030-2034);
3. Pengembangan perkotaan dengan layanannya yang modern dan berkelanjutan (RPJMD Periode III Tahun 2035-2039);
4. Perwujudan Kota Tangerang Selatan yang modern, nyaman, inklusif dan berkelanjutan (RPJMD Periode IV Tahun 2040-2044).

5.1.1. Fokus Arah Kebijakan Periode I (Tahun 2025-2029)

Misi 1 "Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing" , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas pada seluruh satuan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan;
2. Penetapan sistem penjaminan mutu pendidikan daerah dalam hal standar kurikulum daerah dan standar pengajaran untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas global;
3. Pengelolaan Sekolah yang efektif untuk mendukung tujuan pendidikan, mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien, kepemimpinan yang kuat, dan keterlibatan semua *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan;
4. Penerapan penilaian Berbasis Kompetensi yang dapat memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara holistik dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan;
5. Pelatihan guru yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengajaran, yang dapat mencakup pelatihan penggunaan teknologi pendidikan, strategi pengajaran yang inovatif, dan pendekatan pedagogi terbaik;
6. Peningkatan akses dan partisipasi sekolah wajib pendidikan 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) melalui peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan usia dini, program bantuan finansial yang inklusif (beasiswa prestasi dan bantuan pendidikan) dan dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus;
7. Penerapan kurikulum daerah yang relevan dengan tuntutan zaman, kebutuhan siswa dan DUDI, salah satunya melalui adopsi pembelajaran *STEAM* (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*);
8. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran siswa, yang dapat dilakukan melalui program-program seperti mentoring siswa, program sukarelawan, atau kerja sama dengan perusahaan lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang berbasis pada dunia nyata;

9. Penggunaan teknologi pendidikan secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran dan memfasilitasi akses pendidikan yang lebih luas;
10. Pemenuhan layanan dasar kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk penyediaan fasilitas medis, dan tenaga kerja kesehatan, untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dalam jangka panjang;
11. Penguatan sistem kesehatan primer sebagai pintu masuk utama ke sistem kesehatan, dengan fokus pada pencegahan, pemantauan kondisi kesehatan, dan manajemen penyakit kronis, untuk membantu mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan yang lebih mahal dan kompleks;
12. Peningkatan kualitas program kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian kasus gizi makro-mikro, penyakit menular dan tidak menular serta penyakit tropis terabaikan (terutama TBC dan Kusta);
13. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif;
14. Peningkatan tata kelola kesehatan, termasuk tata kelola pembiayaan untuk membangun sistem kesehatan daerah yang tangguh dan sistem kedaruratan yang responsif;
15. Peningkatan nilai manfaat dari program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan dan keamanan ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin;
16. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan sosial melalui transformasi akurasi data dengan menggunakan satu data regsosek yang terupdate dan tervalidasi;
17. Pemberian akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
18. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan kelompok rentan Melalui program-program bantuan produktif, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuan ekonominya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial;
19. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengelola dan mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan dengan lebih efektif dan efisien;

Misi 2 “Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan” , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses tenaga kerja terhadap pasar kerja, terutama pemuda dan perempuan

2. Peningkatan kualitas tenaga kerja pada usia produktif melalui peningkatan jenjang pendidikan, *upskilling* maupun *reskilling*, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI;
3. Memastikan lingkungan kerja yang mendukung kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisien;
4. Pengembangan beragam sektor ekonomi (diversifikasi ekonomi) untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, mengurangi risiko ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja serta meningkatkan pendapatan per kapita;
5. Peningkatan produktivitas Usaha Mikro dan Industri Mikro Kecil berbasis produk unggulan daerah. serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan;
6. Peningkatan promosi pariwisata dan memperkuat *MICE CITY* sebagai daya tarik wisata;
7. Penyediaan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi;
8. Menumbuhkan kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, fasilitasi akses terhadap Modal, dan insentif pajak untuk memulai bisnis;
9. Perbaikan iklim investasi menjadi lebih efisien untuk mendorong peningkatan investasi dengan penerapan regulasi yang ringkas, dan pelayanan perijinan berusaha yang cepat dan bebas pungutan liar;
10. Mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal;
11. Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi;
12. Penciptaan ekosistem penerapan teknologi dan digitalisasi pada sektor strategis ekonomi melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan peningkatan kapasitas SDM digital dan *AI*;
13. Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD;
14. Penguatan kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas, Institusi Riset, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis sebagai inisiasi *Innovation Valley* Kota Tangerang Selatan;
15. Mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan (*start up*) yang berfokus pada pengembangan produk dan solusi inovatif;
16. Kolaborasi dan kerja sama antara universitas dan lembaga riset dengan pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung transfer teknologi, pengembangan produk, dan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan pasar;

17. Peningkatan dukungan digitalisasi dalam ekosistem riset dan inovasi;
18. Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan di bidang ekonomi fokus pada pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan;

Misi 3 "Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah" , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi yang efektif;
2. Penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif;
3. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit;
4. Penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif
5. Penerapan *smart government* berbasis teknologi informasi pada pelayanan publik dalam platform yang terintegrasi;
6. Transformasi tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah;
7. Melindungi hak-hak sipil masyarakat seperti mengakses informasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat;
8. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
9. Peningkatan stabilitas daerah dan stabilitas ekonomi sebagai daya tarik ekonomi;
10. Penerapan sistem pencegahan korupsi yang efektif dan akuntabel;
11. Penataan regulasi kerja sama dan menguatkan kerja sama *multihelix* daerah dalam berbagai bidang pembangunan;
12. Penerapan inovasi dan *creative financing* yang berkelanjutan untuk prioritas pembangunan sektor strategis;
13. Penguatan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, dan lain-lain sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat;
14. Membangun kesadaran, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka.

Misi 4 "Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi" , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan akses sanitasi yang aman melalui pendekatan aspek keterjangkauan, keberlanjutan, aman dan inklusif serta inisiasi SPALD Tingkat Kota;
2. Percepatan penyediaan dan pengembangan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan untuk meningkatkan akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan yang berkualitas dan terjangkau;
3. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
4. Pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
5. Penyediaan PSU Perumahan lainnya sesuai standar dan terintegrasi;
6. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sekaligus Ruang Publik untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan dan mendorong interaksi sosial yang positif;
7. Penyediaan infrastruktur layanan perkotaan, termasuk amenitas perkotaan, yang terintegrasi dan bertahap inklusif;
8. Penggunaan *Internet of Things* (IoT) pada layanan infrastruktur perkotaan strategis untuk mendukung pembangunan kota cerdas;
9. Penyediaan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan bangkitan perjalanan;
10. Pengelolaan Krisis dan Bencana melalui pengembangan rencana tanggap darurat yang efektif dan pelaksanaan strategi mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bencana alam atau krisis lainnya terhadap masyarakat perkotaan;
11. Penyediaan infrastruktur pengelolaan (Pengolahan dan Pemilahan/Pengurangan) sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan;
12. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler;
13. Kerja sama pengelolaan sampah
14. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta perubahan iklim;
15. Penegakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
16. Penerapan insentif dan disinsentif tata ruang;
17. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
18. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam penanganan banjir melalui konservasi SDA, pengendalian daya rusak SDA, dan sebagainya;

19. Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
20. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan (termasuk standarisasi dan regulasi) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
21. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
22. Percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK;
23. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana;
24. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan *urban farming* dan penguatan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
25. Pengarusutamaan nilai budaya positif dan nilai agama dalam keluarga dan masyarakat untuk meminimalkan pengaruh kebudayaan luar di era globalisasi;
26. Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan pendukung untuk masyarakat yang berketahanan sosial;
27. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
28. Penyediaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
29. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;

5.1.2. Fokus Arah Kebijakan Periode II (Tahun 2030-2034)

Misi 1 "Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing", dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas pada seluruh satuan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis manajemen talenta untuk menghasilkan siswa yang berprestasi di timgkat nasional dan global;

3. Peningkatan kualitas pengelolaan sekolah menjadi semakin efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pendidikan;
4. Peningkatan standar penilaian berbasis kompetensi untuk menghasilkan daya saing siswa yang unggul di tingkat nasional dan global;
5. Pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berkelanjutan;
6. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah setara Pendidikan Tinggi termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus, melalui peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan tinggi dan program bantuan finansial yang inklusif hingga pendidikan tinggi;
7. Pengembangan kurikulum daerah berbasis kompetensi, keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital untuk mempersiapkan siswa adaptif terhadap tantangan masa depan;
8. Peningkatan kemitraan dan pelibatan tri-pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam integrasi *soft skills, social skills, life skills* dalam pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter siswa
9. Perluasan penggunaan dan pengembangan teknologi pendidikan secara efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan;
10. Revitalisasi pendidikan non formal (pendidikan masyarakat) melalui pengembangan ekosistem dengan memberi ruang bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan;
11. Mendorong penelitian dan inovasi dalam pendidikan untuk terus meningkatkan praktik dan kebijakan pendidikan yang baik;
12. Pemenuhan layanan dasar kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk penyediaan fasilitas medis, dan tenaga kerja kesehatan, untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dalam jangka panjang;
13. Peningkatan mutu layanan sistem kesehatan primer dengan memanfaatkan TIK yang dapat membantu masyarakat untuk memantau kesehatan mereka, mendapatkan informasi tentang kesehatan dan memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dari jarak jauh;
14. Perluasan jangkauan pelayanan program kesehatan masyarakat yang berkualitas untuk peluasan upaya pencegahan dan pengendalian kasus gizi makro-mikro, penyakit menular dan tidak menular serta penyakit tropis terabaikan (terutama TBC dan Kusta);
15. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif;
16. Peningkatan efektivitas tata kelola kesehatan yang memanfaatkan TIK, inovasi serta kolaborasi dengan Swasta dan Organisasi Non-

Pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan daerah yang unggul dan tangguh, termasuk sistem kedaruratan yang responsif;

17. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian pembiayaan rumah sakit Pemerintah Daerah;
18. Pengembangan riset dan inovasi bidang kesehatan berbasis rumah sakit;
19. Perluasan jenis perlindungan sosial sesuai dengan kerentanan dan perubahan ekonomi serta sosial masyarakat;
20. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan sosial melalui transformasi akurasi data dengan menggunakan satu data regsosek yang terupdate dan tervalidasi;
21. Pemberian akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
22. Peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan sepanjang hayat;
23. Mendorong kolaborasi yang kuat antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif dan merangkul partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
24. Mendorong akses masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan keuangan formal seperti bank, lembaga keuangan mikro, dan teknologi keuangan digital untuk memfasilitasi penyimpanan, pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya;

Misi 2 “Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan” , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses tenaga kerja terhadap pasar kerja, terutama pemuda dan perempuan;
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja pada usia produktif melalui peningkatan jenjang pendidikan, *upskilling* maupun *reskilling*, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI;
3. Peningkatan kualitas lingkungan kerja yang mendukung kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisien;
4. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui peningkatan efisiensi dan menciptakan produk berkualitas dan berteknologi tinggi;

5. Percepatan pembangunan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional;
6. Peningkatan daya tarik pariwisata yang mengintegrasikan *urban tourism* (termasuk *urban health tourism*) dengan industri kreatif ;
7. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Swasta untuk mendorong kemitraan publik-swasta dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik serta pengembangan proyek-proyek strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi;
8. Menciptakan ekosistem pendukung yang mendorong produktivitas kewirausahaan termasuk memfasilitasi peluang berjejaring dan memberikan akses terhadap pasar, baik domestik maupun internasional;
9. Peningkatan kemudahan berusaha dan investasi yang efisien didukung dengan kepastian hukum untuk meningkatkan realisasi investasi;
10. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal;
11. Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi;
12. Penciptaan ekosistem penerapan teknologi dan digitalisasi pada sektor strategis ekonomi melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan peningkatan kapasitas SDM digital dan *AI*;
13. Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD;
14. Inisiasi jaringan pasar domestik dan global untuk produk unggulan daerah;
15. Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan fokus pada peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI);
16. Penguatan *Innovation valley* Kota Tangerang Selatan;

Misi 3 “Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah” , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas regulasi lebih adaptif dan transformasi regulasi berbasis teknologi informatif;
2. Peningkatan kualitas kelembagaan yang akuntabel, kolaboratif dan adaptif;
3. Peningkatan kualitas ASN lebih profesional dan berintegritas;

4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan berbasis bukti, kualitas penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif;
5. Peningkatan kualitas *smart government* berbasis teknologi informasi dan inklusif dalam platform yang terintegrasi;
6. Transformasi tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah;
7. Melindungi hak-hak sipil masyarakat seperti mengakses informasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat;
8. Peningkatan pengelolaan fiskal daerah yang adaptif dan optimal untuk meningkatkan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah;
9. Peningkatan stabilitas daerah dan stabilitas ekonomi sebagai daya tarik ekonomi;
10. Peningkatan kualitas sistem pencegahan korupsi;
11. Pengembangan kerja sama daerah dengan jaringan regional, nasional dan global yang sinergis;
12. Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan *creative financing* bersumber dari dana non pemerintah;
13. Peningkatan Kualitas Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadayamasyarakat, karang taruna dan lain-lain sebagai wahana penyaluran aspirasi masyarakat;
14. Peningkatan kualitas kesadaran, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka;

Misi 4 “Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi” , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Perluasan akses sanitasi yang aman dan pelayanan SPLAD Tingkat Kota melalui pendekatan aspek keterjangkauan, keberlanjutan, dan inklusif;
2. Perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan SPAM jaringan perpipaan yang terjangkau dan berkelanjutan;
3. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
4. Pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
5. Penyediaan PSU Perumahan lainnya sesuai standar dan terintegrasi
6. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sekaligus Ruang Publik untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan dan mendorong interaksi sosial yang positif;

7. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur layanan perkotaan dan amenitas perkotaan, termasuk cakupan integrasi dan inklusifitasnya;
8. Percepatan pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan dengan perluasan cakupan infrastruktur layanan perkotaan yang menggunakan *Internet of Things* (IoT);
9. Penyediaan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan bangkitan perjalanan;
10. Pengelolaan Krisis dan Bencana melalui pengembangan rencana tanggap darurat yang efektif dan pelaksanaan strategi mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bencana alam atau krisis lainnya terhadap masyarakat perkotaan;
11. Penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengelolaan (pengolahan dan pemilahan/pengurangan) sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan;
12. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler;
13. Penegakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
14. Penerapan insentif dan disinsentif tata ruang;
15. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
16. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam penanganan banjir melalui konservasi SDA, pengendalian daya rusak SDA, dan sebagainya;
17. Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
18. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan (termasuk standarisasi dan regulasi) pengelolaan sumber daya alam
19. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup;
20. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
21. Mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK;
22. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana;

23. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan *urban farming* dan penguatan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
24. Pengarusutamaan nilai budaya positif dan nilai agama dalam keluarga dan masyarakat untuk meminimalkan pengaruh kebudayaan luar di era globalisasi;
25. Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan pendukung untuk masyarakat yang berketahanan sosial;
26. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
27. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;

5.1.3. Fokus Arah Kebijakan Periode III (Tahun 2035-2039)

Misi 1 "Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing" , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemantapan pelaksanaan arah kebijakan periode I dan periode II terkait (i) pemenuhan layanan dasar pendidikan yang merata dan berkualitas; (ii) sistem penjaminan mutu; (iii) pengelolaan sekolah; (iv) kompetensi dan profesionalisme pendidik; (v) peningkatan RLS dan HLS hingga pendidikan tinggi; (vi) kemitraan pendidikan; (vii) pemanfaatan teknologi pendidikan; (viii) kurikulum adaptif dan sistem asesmen berbasis kompetensi; serta (ix) riset dan inovasi pendidikan, dalam rangka mewujudkan ekosistem pendidikan yang unggul, inovatif dan adaptif;
2. Pembudayaan kebiasaan berpikir kritis dan inovatif serta kebiasaan belajar yang aktif, reflektif dan kolaboratif pada guru dan siswa;
3. Penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan *life skills*;
4. Pemenuhan layanan dasar kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, dan tenaga kerja kesehatan untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dalam jangka panjang;
5. Peningkatan mutu layanan sistem kesehatan primer dengan memanfaatkan TIK yang dapat membantu masyarakat untuk memantau kesehatan mereka, mendapatkan informasi tentang kesehatan dan memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dari jarak jauh;

6. Pemantapan mutu pelayanan program kesehatan masyarakat yang berkualitas dan lebih inklusif berbasis riset dan inovasi kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian kasus gizi makro-mikro, penyakit menular dan tidak menular serta penyakit tropis terabaikan (terutama TBC dan Kusta);
7. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif;
8. Peningkatan efektivitas tata kelola kesehatan yang memanfaatkan TIK, inovasi serta kolaborasi dengan Swasta dan Organisasi Non-Pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan daerah yang unggul dan tangguh, termasuk sistem kedaruratan yang responsif;
9. Peningkatan secara siginifikan inovasi pembiayaan kesehatan bersumber non pemerintah yang berkelanjutan;
10. Pengembangan riset dan inovasi bidang kesehatan berbasis rumah sakit;
11. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial, seperti dalam menghadapi krisis atau bencana alam, dengan mempercepat respons dan penyesuaian program-program perlindungan sosial;
12. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan sosial melalui transformasi akurasi data dengan menggunakan satu data regsosek yang terupdate dan tervalidasi;
13. Pemberian akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
14. Peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan sepanjang hayat;
15. Peningkatan kolaborasi yang kuat antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif dan merangkul partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
16. Peningkatan akses masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan keuangan formal seperti bank, lembaga keuangan mikro, dan teknologi keuangan digital untuk memfasilitasi penyimpanan, pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya;

Misi 2 "Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan", dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses tenaga kerja terhadap pasar kerja, terutama pemuda dan perempuan;
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja pada usia produktif melalui peningkatan jenjang pendidikan, *upskilling* maupun *reskilling*, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang mendukung kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisien;
4. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis produk unggulan daerah dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*);
5. Pamantapan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif yang produktif dan bernilai tambah tinggi;
6. Peningkatan daya tarik pariwisata yang mengintegrasikan *urban tourism* (termasuk *urban health tourism*) dengan industri kreatif;
7. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Swasta untuk mendorong kemitraan publik-swasta dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik serta pengembangan proyek-proyek strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi;
8. Peningkatan kualitas fasilitasi peluang berjejaring dan peluasan akses terhadap pasar, baik domestik maupun internasional untuk pemantapan ekosistem yang mendorong produktivitas kewirausahaan;
9. Pemantapan iklim investasi yang efisien sebagai daya tarik dan mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi keuntungan tinggi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja tinggi;
10. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal;
11. Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi;
12. Perluasan dan peningkatan digitalisasi di berbagai sektor strategis ekonomi;
13. Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD
14. Penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (*National and Global Value Chain*);
15. Pemantapan *innovation valley* Kota Tangerang Selatan bertaraf nasional;

Misi 3 "Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah", dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas regulasi lebih adaptif dan transformasi regulasi berbasis teknologi informatif;
2. Peningkatan kualitas kelembagaan yang akuntabel, kolaboratif dan adaptif;
3. Peningkatan kualitas ASN lebih profesional dan berintegritas;
4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan berbasis bukti, kualitas penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif;
5. Peningkatan kualitas *smart government* berbasis teknologi informasi dan inklusif dalam platform yang terintegrasi;
6. Transformasi tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah;
7. Melindungi hak-hak sipil masyarakat seperti mengakses informasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat;
8. Peningkatan pengelolaan fiskal daerah yang adaptif dan optimal untuk meningkatkan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah;
9. Pemantapan stabilitas daerah dan stabilitas ekonomi sebagai daya tarik global, politik, dan ekonomi;
10. Mengokohkan sistem pencegahan korupsi yang berkualitas;
11. Penguatan kerja sama daerah dengan jaringan regional, nasional dan global yang sinergis;
12. Peningkatan pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan *creative financing* bersumber dari dana non pemerintah;
13. Peningkatan kualitas organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat, karang taruna dan lain-lain sebagai wahana penyaluran aspirasi masyarakat;
14. Peningkatan kualitas kesadaran, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka;

Misi 4 “Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi” , dengan fokus arah kebijakan sebagai berikut:

1. Perluasan akses sanitasi aman dan pengelolaan SPLAD Tingkat Kota yang menjangkau seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan, inklusif dan berkelanjutan;
2. Perluasan pelayanan SPAM jaringan perpipaan yang berkualitas dan menjangkau seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan;
3. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;

4. Pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
5. Penyediaan PSU Perumahan lainnya sesuai standar dan terintegrasi
6. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sekaligus Ruang Publik untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan dan mendorong interaksi sosial yang positif;
7. Pemantapan kualitas infrastruktur layanan perkotaan dan amenitas perkotaan yang saling terkoneksi dan inklusif dengan didukung oleh *Internet of Thing* (*IoT*) dan pengelolaan kawasan yang berkualitas untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan;
8. Penyediaan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan bangkitan perjalanan;
9. Pengelolaan Krisis dan Bencana melalui pengembangan rencana tanggap darurat yang efektif dan pelaksanaan strategi mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bencana alam atau krisis lainnya terhadap masyarakat perkotaan;
10. Penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengelolaan (pengolahan dan pemilahan/pengurangan) sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan;
11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler;
12. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta perubahan iklim;
13. Penegakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
14. penerapan insentif dan disinsentif tata ruang;
15. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
16. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam penanganan banjir melalui konservasi SDA, pengendalian daya rusak SDA, dan sebagainya;
17. Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
18. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan (termasuk standarisasi dan regulasi) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
19. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi pencemaran lingkungan;

20. Mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK;
21. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana;
22. Pemantapan kualitas ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
23. Pengarusutamaan nilai budaya positif dan nilai agama dalam keluarga dan masyarakat untuk meminimalkan pengaruh kebudayaan luar di era globalisasi;
24. Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan pendukung untuk masyarakat yang berketahanan sosial;
25. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
26. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

5.1.4. Fokus Arah Kebijakan Periode IV (Tahun 2040-2044)

Misi 1 "Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing", dengan fokus arah kebijakan adalah:

1. Penguatan kualitas seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan mencakup (i) layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk semua dan berkeadilan, (ii) sistem penjaminan mutu yang berdaya saing global, (iii) tata kelola sekolah yang profesional, (iv) kompetensi dan profesionalisme pendidik yang unggul, (v) RLS dan HLS mencapai pendidikan tinggi, (vi) kemitraan pendidikan hingga level global, (vii) pemanfaatan teknologi pendidikan, (viii) kurikulum dan sistem assesmen berbasis kompetensi yang berdaya saing global, serta (ix) riset dan inovasi pendidikan yang berkualitas global, dalam rangka untuk mewujudkan SDM yang cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing global;
2. Pembudayaan kebiasaan berpikir kritis dan inovatif serta kebiasaan belajar yang aktif, reflektif dan kolaboratif pada guru dan siswa;
3. Penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan *life skills*;
4. Penguatan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan yang terjangkau untuk semua pada seluruh siklus kehidupan;

5. Penguatan mutu layanan sistem kesehatan primer yang terintegrasi dengan TIK, yang dapat membantu masyarakat untuk memantau kesehatan mereka, mendapatkan informasi tentang kesehatan dan memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dari jarak jauh;
6. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif;
7. Penguatan tata kelola kesehatan yang memanfaatkan TIK, inovasi serta kolaborasi dengan Swasta dan Organisasi Non-Pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan daerah yang unggul dan tangguh, termasuk sistem kedaruratan yang responsif;
8. Peningkatan secara siginifikan inovasi pembiayaan kesehatan bersumber non pemerintah yang berkelanjutan;
9. Pengembangan riset dan inovasi bidang kesehatan berbasis rumah sakit;
10. Penguatan sistem perlindungan sosial menjadi adaptif dan lebih inklusif serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat;
11. Penguatan kualitas pelayanan perlindungan sosial yang akurat dan tepat sasaran;
12. Perluasan akses bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan yang terjangkau dan sektor ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
13. Peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan sepanjang hayat;
14. Peningkatan kolaborasi yang kuat antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif dan merangkul partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
15. Peningkatan akses masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan keuangan formal seperti bank, lembaga keuangan mikro, dan teknologi keuangan digital untuk memfasilitasi penyimpanan, pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya.

Misi 2 "Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan", dengan fokus arah kebijakan adalah:

1. Perluasan akses tenaga kerja terhadap pasar kerja global, terutama pemuda dan perempuan;
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja pada usia produktif melalui *upskilling* maupun *reskilling*, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI level global;

3. Peningkatan kualitas lingkungan kerja yang mendukung kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisien;
4. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis produk unggulan daerah dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*) yang berkelanjutan;
5. Penguatan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif yang produktif, bernilai tambah tinggi dan berdaya saing ekspor;
6. Penguatan daya tarik pariwisata hingga level global yang mengintegrasikan *urban tourism* (termasuk *urban health tourism*) dengan industri kreatif;
7. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Swasta untuk mendorong kemitraan publik-swasta dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik serta pengembangan proyek-proyek strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi;
8. Perluasan akses dan jejaring kewirausahaan terhadap pasar, baik domestik maupun internasional untuk pemantapan ekosistem yang mendorong produktivitas kewirausahaan;
9. Penguatan iklim investasi yang efisien sebagai daya tarik dan mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi keuntungan tinggi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja tinggi;
10. Perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal;
11. Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi;
12. Perluasan dan peningkatan digitalisasi di berbagai sektor strategis ekonomi;
13. Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD;
14. Penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (*National and Global Value Chain*);
15. Pemantapan innovation valley Kota Tangerang Selatan bertaraf nasional.

Misi 3 "Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah" , dengan fokus arah kebijakan adalah:

1. Penguatan kualitas regulasi yang adaptif dan transformasi regulasi berbasis teknologi informatif;
2. Penguatan kualitas kelembagaan yang akuntabel, kolaboratif dan adaptif;
3. Penguatan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas;

4. Penguatan kualitas kebijakan pembangunan berbasis bukti, kualitas penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif;
5. Penguatan kualitas *smart government* berbasis teknologi informasi dan inklusif dalam platform yang terintegrasi;
6. Pemantapan kualitas tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah;
7. Melindungi hak-hak sipil masyarakat seperti mengakses informasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat;
8. Peningkatan pengelolaan fiskal daerah yang adaptif dan optimal untuk meningkatkan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah.

Misi 4 "Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi", dengan fokus arah kebijakan adalah:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan SPLAD Tingkat Kota yang melayani seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan secara profesional, inklusif dan berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan SPAM jaringan perpipaan yang melayani seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan secara profesional dan berkelanjutan;
3. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
4. Pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
5. Penyediaan PSU Perumahan lainnya sesuai standar dan terintegrasi
6. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sekaligus Ruang Publik untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan dan mendorong interaksi sosial yang positif;
7. Penguatan kualitas infrastruktur layanan perkotaan dan amenitas perkotaan yang saling terkoneksi dan inklusif dengan didukung oleh *Internet of Thing* (IoT) dan pengelolaan kawasan yang berkualitas untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan;
8. Peningkatan kualitas layanan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan bangkitan perjalanan;
9. Pemantapan sistem mitigasi dan pengelolaan krisis/bencana yang efektif dan adaptif;
10. Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur pengelolaan (pengolahan dan pemilahan/pengurangan) sampah yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan;

11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler;
12. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta perubahan iklim;
13. Penegakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
14. Penerapan insentif dan disinsentif tata ruang;
15. Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
16. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam penanganan banjir melalui konservasi SDA, pengendalian daya rusak SDA, dan sebagainya;
17. Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
18. Pemantapan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan (termasuk standarisasi dan regulasi) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
19. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
20. Perwujudan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK;
21. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana serta memantapkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana;
22. Penguatan kualitas ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
23. Pengarusutamaan nilai budaya positif dan nilai agama dalam keluarga dan masyarakat untuk meminimalkan pengaruh kebudayaan luar di era globalisasi;
24. Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan pendukung untuk masyarakat yang berketahanan sosial;
25. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
26. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 mempedomani RPJP Nasional sebagaimana diatur pada Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan SEB Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Buku II). Sasaran pokok RPJPD Kota Tangerang Selatan memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformatif dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik Kota Tangerang Selatan yang mencerminkan keotonomian daerah.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan penyelarasannya dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045

No.	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045		RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	**Arah Pembangunan**	**Misi**	**Arah Pembangunan**	**Misi**	**Arah Pembangunan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	Kesehatan untuk semua	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing	Kesehatan berkualitas untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan berkualitas untuk semua
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial yang adaptif		Perlindungan sosial yang adaptif
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan	Iptek, Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau		
		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		Transformasi Digital
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial		Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan		Ketangguhan Pengaruh Daerah

No.	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045		RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	**Arah Pembangunan**	**Misi**	**Arah Pembangunan**	**Misi**	**Arah Pembangunan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
		Berdaya Gentar Kawasan		Berdaya Gentar Kawasan		
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi yang Lestari	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Lingkungan Hidup Berkualitas		Kualitas Perkotaan Meningkat
						Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6.	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan		Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Perkuatan Pemerataan, dan Interkoneksi Pembangunan			
7.	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Mewujudkan Sarana dan Prasarana Banten yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan			
8.	Kesinambungan Pembangunan		Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Banten yang Inovatif dan Berdaya Saing Global			

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi turunan dari RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik (*highlight* intervensi super prioritas) sesuai dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dirumuskan mengacu rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan transformasi menurut Provinsi Banten yang diamanatkan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Arah kebijakan transformasi pada masing-masing transformasi akan dijabarkan pada bagian berikut.

1. **Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing**
   - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
   - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
   - Peningkatan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
   - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
   - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
   - Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan;
   - Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
   - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
   - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
   - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
   - Penataan tata kelola Rumah Sakit dalam rangka penyediaan layanan kesehatan berkelas dunia;
   - Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kesehatan mental;
   - Pengembangan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk lanjut usia dan disabilitas berupa perawatan medis khusus, terapi dan dukungan kesehatan mental;
   - Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus ketergantungan obat;
   - Pengembangan konsep *health tourism,* yang diselaraskan dengan pengembangan daya tarik wisata perkotaan;
   - Percepatan wajib belajar 13 tahun yang inklusif (1 tahun pra sekolah, 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   - Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah hingga pendidikan tinggi antara lain dengan cara pemberian beasiswa;

- Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan adopsi pembelajaran *STEAM* (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) pada seluruh jenjang pendidikan baik milik Pemerintah dan Swasta;
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar, inklusif dan aman bencana, termasuk sarana transportasi khusus peserta didik yang inklusif dapat diakses oleh siswa dengan disabilitas;
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan pada jenjang PAUD, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan dan non formal;
- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan non formal berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
- Pengembangan *Center of Excellence* (*CoE*) sebagai ruang untuk pengembangan keahlian khusus pada suatu bidang spesifik serta pemerataan dan peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*);
- Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK;
- Penyediaan akses pendidikan yang setara, berkualitas dan terjangkau di sekolah untuk disabilitas;
- Percepatan penuntasan kemiskinan;
- Penyediaan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
- Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya terutama bagi kelompok rentan;
- Perluasan penyediaan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua;
- Pengembangan program komunitas untuk lansia, berupa kegiatan sosial dan rekreasi untuk lansia serta pusat komunitas.

2. **Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan**
   - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui *upskilling maupun reskilling,* terintegrasi dengan kebutuhan DUDI;
   - Penyediaan program pelatihan dan penempatan kerja untuk disabilitas;
   - *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism* dan *health tourism*;
   - Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif melalui pendekatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amenitas, *anciallary*, dan *available package*);
   - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
   - Peningkatan konektivitas antara kawasan strategis pariwisata dengan kawasan strategis/pertumbuhan ekonomi;
   - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global;
   - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
   - Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
   - Pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
   - Peningkatan keterkaitan usaha mikro, industri mikro dan industri kecil pada rantai nilai domestik dan global sehingga produk-produknya berorientasi ekspor, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
   - Penguatan proses bisnis usaha mikro, industri mikro dan industri kecil melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
   - Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversitas BUMD.

3. **Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah**
   - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;

- Percepatan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan respons terhadap laporan masyarakat dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;
- Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*;
- Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW;
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar daerah untuk pengelolaan kawasan perkotaan;
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.

4. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi

- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan dan sanitasi yang aman;
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau;
- Peningkatan konektivitas dan kemantapan infrastruktur akses jalan yang terhubung pada jalan provinsi, nasional, jalan tol serta terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memperlancar aktivitas logistik/barang/jasa
- Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan;
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan;
- Percepatan penyediaan SPAM jaringan perpipaan;
- Percepatan penyediaan SPALD Tingkat Kota, termasuk IPLT Kota;

- Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/ atau berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan, termasuk kawasan *TOD*;
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal;
- Penyediaan perumahan yang layak;
- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- Penguatan pengendalian inflasi daerah;
- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila;
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)*;
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana;
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap ketersediaan air;
- Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan guna mendukung ketahanan energi;
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan ;
- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy* melalui arah kebijakan pengurangan penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material dan peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi pada sektor

prioritas (pangan, retail, elektronik, konstruksi, tekstil dan sebagainya);

- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim;
- Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, *trust*, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas;
- Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Sasaran Pokok

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Tabel 5.2 di bawah ini menyajikan Indikator Utama Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045. Selain itu, juga menyajikan sasaran pokok yang dirumuskan dari arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kota Tangerang Selatan dengan RPJPD Provinsi Banten dan RPJPN Tahun 2025-2045 sesuai karakteristik Kota Tangerang Selatan yang mencerminkan keotonomian daerah.

Tabel 5.2. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Kesehatan berkualitas untuk Semua			
	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	75,64 (2023)	76,21	82,30
	2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
	a) Angka Kematian Ibu	28,95 (2023)	27,46	10,00
	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9,2 (2023)	7,00	2,50
	3. Penanganan Tuberkulosis:			
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	69,9 (2022)	90,00	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk:			
	- Sensitif Obat (*SO treatment success rate*) (%)	88 (2022)	90,00	100
	- Resisten Obat (*RO* treatment success rate) (%)	N/A	80,00	90,00
	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,60 (2023)	99,71	100
2. Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pendidikan	Pendidikan Berkualitas untuk semua			
	5. Hasil pembelajaran:			
	a) Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	i) Literasi Membaca (%)	82,22 (2023)	85,78	95,00
	ii) Numerasi (%)	75,38 (2023)	77,89	92,00
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	i) Literasi Membaca (%)	69,11 (2023)	77,01	95,00
	ii) Numerasi (%)	54,47 (2023)	65,65	92,00
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,85 (2023)	12,04	15,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d) Harapan lama sekolah (tahun)	14,68 (2023)	15,12	17,00
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Menengah ke atas (%)	64,43 (2023)	64,53	85,00
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja (%)	72,58 (2023)	73,58	85,98
3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Perlindungan sosial yang adaptif			
	8. Tingkat Kemiskinan (%)	2,57 (2023)	1,91-2,41	0,10-0,20
	9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,71 (2023)	45,00	92,52
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja(%)	N/A	26,00	65,00
4. Berkembangnya potensi ekonomi unggulan yang berbasis IPTEK dan inovasi untuk peningkatan produktivitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
	11. Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa (%)	51,33 (2023)	51,50	60,00
	12. Pengembangan Pariwisata:			
	a) Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,87 (2023)	3,00	4,70
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	399,00 (2023)	400,00	900,00
	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	5,00-6,00	11,00-12,00
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kota (%)	N/A	11,90	18,52
	b) Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kota (%)	N/A	5,33	10,00
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,69 (2023)	4,91	9,10
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,46 (2023)	0,46	0,70
	e) *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	-5,28 (2022)	1,23	7,31
	15. Penciptaan lapangan pekerjaan yang baik			
	a). Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,81 (2023)	4,75-4,95	4,00-4,15

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b). Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	N/A	56,00	85,00
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,15 (2023)	42,15	64,71
	17. Tingkat Penguasaan Iptek:			
	a) Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi (% terhadap APBD)	0,02 (2023)	0,02	0,20
	b) Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah (indeks)	3,48 (2023)	3,75	4,50
5. Terwujudnya transformasi digital pada seluruh sektor strategis	Transformasi Digital			
	18. Indeks literasi digital (indeks)	N/A	3,00	4,50
6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	47,79 (2023)	49,05	55,00
	20. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	64,21 (2023)	66,00	75,00
	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
	21. Nilai *ICOR* (indeks)	7,19 (2022)	4,66	3,00
	22. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Triliun)	7,44 (2023)	8,70	32,51
	23. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur (%)	2,21 (2023)	2,00	4,00
	24. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Berkelanjutan (%)	99,25 (2022)	99,25	100
7. Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas, adaptif dan kolaboratif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
	25. Indeks Reformasi Hukum (indeks)	N/A	80,00	100
	26. Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	76,79 (2023)	78,79	85,00
	27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,18 (2023)	3,47	5,00
	28. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3,90 (2023)	3,95	5,00
	29. Anti Korupsi:			
	a) Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) (angka)	73,32 (2023)	78,00	88,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
	30. Capaian aksi HAM (%)	90,48 (2023)	91,00	95,00
	31. Indeks Rasa Aman (indeks)	73,50 (2023)	73,50	87,62
	32. Indeks Demokrasi (indeks)	Tinggi (2023)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)
9. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	Stabilitas Ekonomi Makro			
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:			
	a) Total Kredit/PDRB (%)	28 (2023)	31,54	66,80
	34. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,72 (2023)	2,78	4,98
10. Kepemimpinan dan pengaruh daerah meningkat	Ketangguhan Pengaruh Daerah			
	35. Hubungan Kerja sama Antar Pemerintah Kota/ Sister City (Jumlah)	0	1,00	1,00
	36. Indeks institusi (indeks)	4,14 (2023)	4,14	4,70
11. Meningkatnya kualitas hidup beragama dan berbudaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	52,50 (2023)	52,70	65,00
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (indeks)	72,39 (2023)	72,54	80,00
12. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif			
	39. Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)	64,22 (2023)	65,34	77,90
	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	0,20 (2023)	0,19	0,11
	41. Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	54,33 (2023)	55,20	68,00
	42. Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0,58 (2023)	0,60	0,87
	Kualitas Perkotaan Meningkat			
	43. Indeks Kota Layak Huni (indeks)	69,50 (2023)	69,50	85,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	44. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (indeks)	5,75 (2023)	7,08	9,00
	Lingkungan Hidup Berkualitas			
	45. Kualitas Lingkungan Hidup:			
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	61,83 (2023)	48,23*	54,08*
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	16,00 (2022)	16,00	70,00
	c) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	N/A	70,00	100
	d) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	71,84% terolah;27,51% terdaur ulang (2023)	71,84% terolah; 28,16% terdaur ulang	64% terolah; 36% terdaur ulang
14. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan			
	46. Ketahanan energi, air, dan pangan:			
	a) Ketahanan Energi			
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.677,29 (2022)	2.988,01	3.270,00
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	1,92 (2023)	1,38	0,51
	c) Ketahanan Air			
	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	948,77 (2023)	1.220,71	8.110,36
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	19,74 (2024)	21,41	100
15. Daerah yang berketahanan bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
	47. Indeks Risiko Bencana (indeks)	70 (2023)	63,2-58,27	13,91-18,84
	48. Persentase Penurunan Emisi GRK (%):			
	a) Kumulatif	N/A	2,71	23,80
	b) Tahunan	N/A	6,39	47,21

*): perhitungan berdasarkan parameter baru dari Kementerian LHK RI

5.2.4. Metadata dan Definisi Operasional Indikator Utama Pembangunan

5.2.4.1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia Harapan Hidup Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Metadata usia harapan hidup didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk (SP) 10 tahunan dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 10 tahunan.

5.2.4.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.

5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Rumus perhitungan AKI adalah Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

AKI=(JKI/JLH) x 100.000

Keterangan:

AKI: Angka kematian ibu

JKI: Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu

JLH: Jumlah kelahiran hidup

Metadata Angka Kematian Ibu didapatkan dari:

a. Dinas Kesehatan
b. Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk (SP) 10 tahunan dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 10 tahunan

5.2.4.3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-*score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

a. Sangat pendek: Zscore < -3,0
b. Pendek: Z*score* ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.

Cara perhitungan (1)

Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\text{JAB(5)P } stunting(\%) = \frac{JAB(5)P\ stunting}{\text{JAB(5)}} x\ 100\%$$

Keterangan

PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)

JAB(5) P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (2)

Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\text{JAB(5)SP } stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{\text{JAB(5)}} x\ 100\%$$

Keterangan

PAB (5) : Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting)

JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu

JAB(5): Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (3)

Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP

Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:

1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan melalui SGI tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia 5 tahunan.

5.2.4.4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan secara tahunan.

5.2.4.5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap, yang dihitung dengan rumus Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

Indikator ini digunakan dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan secara tahunan.

5.2.4.6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian *Universal Health Coverage* (*UHC*): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage* (*UHC*), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan dan BPJS secara tahunan. Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten dikali 100%.

$$Persentase\ cakupan\ kepesertaan\ JKN\ (\%) = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{Jumlah\ penduduk\ Kota}\ x\ 100\%$$

5.2.4.7. Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi)

Indikator yang merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk penilaian asesmen kompetensi literasi dan numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Semakin tinggi nilai Ketercapaian AKM di suatu daerah, maka semakin tinggi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi/numerasi pada daerah tersebut. Rumus perhitungan indikator ini adalah jumlah peserta didik di kabupaten/kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah peserta didik di kabupaten/kota X. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit peserta didik memiliki level hasil belajar minimal "cakap". Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah peserta didik dari seluruh

Metadata didapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara tahunan.

5.2.4.8. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi)

Indikator ini merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk penilaian asesmen kompetensi literasi/numerasi pada satuan pendidikan. Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota X. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag, kecuali sekolah terbuka

Metadata didapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara tahunan.

5.2.4.9. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:

1. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
2. SD = 6 tahun;
3. SMP = 9 tahun;
4. SMA = 12 tahun;
5. D1/D2 = 14 tahun;
6. D3 = 15 tahun;
7. D4 = 16 tahun;
8. S1 = 17 tahun;
9. S2 = 19 tahun;
10. S3 = 22 tahun.

Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:

1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1

Rumus perhitungan:

$$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15 + (tahun) = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$$

Keterangan:

P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

X_i = Lama sekolah penduduk ke- i

Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik secara Tahunan berdasarkan hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya.

5.2.4.10. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik secara Tahunan berdasarkan hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Harapan\ Lama\ Sekolah\ (tahun) = \text{FK} \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

FK = Faktor koreksi pesantren

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (7, 8, ..., n)

5.2.4.11. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Menengah ke atas

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidkan Menengah ke atas adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SMA/SMK/MA ke atas. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan SMA/SMK). Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi SMA/MA/SMK ke atas menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan di suatu daerah semakin baik. Metadata

didapatkan dari Badan Pusat Statistik secara Tahunan. Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$Proporsi\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ke\ atas\ yang\ berkualifikasi\ Pendidikan\ Menengah\ ke\ atas = \frac{Jumlah\ Penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas, yang\ lulus/berijazah\ SMA/MA/SMK di\ suatu\ daerah}{Jumlah\ Penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas\ di\ suatu\ daerah} x100$$

5.2.4.12. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/Paket A • SMP/MTs/SMPLB/Paket B	• SMA/MA/SMLB/Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*). Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik dalam dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus. Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada tahun T di}\frac{\text{Kab}}{\text{Kota}}\text{X}}{\text{Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun T di}\frac{\text{kab}}{\text{kota}}\text{X}} \text{ x } 100\%$$

5.2.4.13. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Rumus perhitungannya adalah:

$$Cakupan\ Jamsos\ Naker = \frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah

Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Metadata didapatkan dari:

a. Dinas Ketenagakerjaan,
b. BPJS Ketenagakerjaan, dan
c. BPS

Frekuensi ketersediaan data adalah setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

5.2.4.14. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah sampai dengan parah. Persentase penyandang disabilitas bekerja adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori ringan dan sedang. Penyandang disabilitas yang bekerja mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Metadata didapatkan dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik melalui Sakernas dalam setahun sebanyak dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$\%\ PD = \frac{\sum \mathrm{PD}}{\sum AKPD}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

PD = Pekerja penyandang disabilitas
$AKPD$ = Angkatan kerja penyandang disabilitas

5.2.4.15. Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Perdagangan dan Jasa yang terdiri dari sektor: Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya. Indikator ini mencerminkan proporsi nilai tambah semua sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh semua sektor Perdagangan dan Jasa, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik secara tahunan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa (\%)} = \frac{Nilai\ tambah\ semua\ sektor\ industri\ Perdagangan\ dan\ Jasa}{Nilai\ PDRB\ Kota}\ x\ 100\%$$

5.2.4.16. Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:

1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan
2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum

Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, *ceteris paribus*. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. Metadata didapatkan dari Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin\ (\%) = \frac{Nilai\ tambah\ penyedian\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Kota}\ x\ 100\%$$

5.2.4.17. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang)

Definisi indikator ini adalah Jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Metadata didapatkan dari Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan.

5.2.4.18. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:

1. Fesyen
2. Kuliner
3. Kriya
4. Film, Animasi dan Video
5. Pengembang Permainan
6. Aplikasi
7. Musik
8. Seni Pertunjukan
9. Fotografi
10. Desain Komunikasi Visual
11. Televisi dan Radio
12. Seni Rupa
13. Desain Produk
14. Periklanan
15. Penerbitan
16. Arsitektur
17. Desain Interior

Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB daerah. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi. Metadata didapatkan dari Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus perhitungan :

$$Proporsi\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ (\%) = \frac{\sum PDRB\ 17\ Subsektor\ Ekonomi\ Kreatif\ Regional}{PDRB\ Kota}\ x\ 100\%$$

5.2.4.19. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kota

Proporsi jumlah usaha Mikro non pertanian pada level kota merupakan perbandingan jumlah unit usaha Mikro non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama di level kota. Usaha mikro merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Metadata didapatkan dari:

1. Badan Pusat Statistik : Sensus Ekonomi (10 tahun sekali).
2. Kementerian Koperasi dan UKM : Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM
3. Dinas Koperasi dan UMKM : Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Proporsi\ Usaha\ Mikro = \frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Mikro\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha\ non\ pertanian}\ x\ 100\%$$

5.2.4.20. Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kota

Proporsi jumlah industri kecil pada level kota merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama di level kota, dengan rumus perhitungan:

$$Proporsi\ Industri\ Kecil\ (\%) = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ \text{Mikro dan}\ Kecil}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri}\ x\ 100\%$$

Industri kecil merepresentasikan bagian dari industri mikro dan kecil yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi industri kecil yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Metadata didapatkan secara tahunan dari :

1. Badan Pusat Statistik : Survei Industri Kecil dan Menengah
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5.2.4.21. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah\ (\%) = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ Daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

5.2.4.22. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Rumus perhitungan indikator ini adalah :

$$Rasio\ Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB\ \text{Kota}\ ADHB}\ x\ 100\%$$

Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi dan UMKM (Volume usaha koperasi daerah)

5.2.4.23. *Return on Asset* (*ROA*) BUMD

Return On Aset (*ROA*) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (*ROA*) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

$$Return\ on\ Asset\ (\ ROA\ )(\%) = \frac{Laba\ bersih}{Total\ Aset}\ x\ 100\%$$

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Metadata didapatkan secara tahunan dari BUMD (Laporan keuangan BUMD), BKAD, dan SETDA.

5.2.4.24. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali per tahun (Februari dan Agustus). Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP = Jumlah pengangguran (orang)

PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)

5.2.4.25. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merujuk pada pengukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar bagian dari total lapangan kerja yang dihasilkan dalam suatu ekonomi atau wilayah yang tergolong sebagai lapangan kerja formal. Dalam konteks ini, "lapangan kerja formal" biasanya mengacu pada pekerjaan yang terdaftar secara resmi dan biasanyan terikat oleh peraturan ketenagakerjaan, memiliki kontrak kerja dan memiliki perlindungan hukum. Sebaliknya "lapangan kerja informal" termasuk pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak memiliki perlindungan hukum yang sama. Indikator ini dapat menggambarkan tentang kualitas dan struktur pasar kerja di suatu daerah

Definisi operasionalnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Lapangan Kerja Formal dan Informal:
   a. Lapangan kerja formal: pekerjaan yang tercatat dalam sistema administrasi ketenagakerjaan resmi, biasanya dengan kontrak yang sah dan diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan, contoh: pegawai negeri, pekerja perusahaan swasta yang terdaftar, dll.
   b. Lapangan kerja informal: pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi, seringkali tidak memiliki kontrak tertulis, contoh: pekerja harian, pekerja lepas tanpa kontrak tetap, dll.

2. Pengukuran proporsi:
   a. Hitung jumlah lapangan kerja formal yang tercipta dalam periode waktu tertentu
   b. Hitung total jumlah lapangan kerja (formal + informal) yang tercipta dalam periode waktu yang sama

   c. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal dihitung dengan rumus:

$$Proporsi\ Penciptaan\ Lapangan\ Kerja\ Formal = \frac{Jumlah\ Lapangan\ Kerja\ formal}{Jumlah\ Total\ Lapangan\ Kerja} x\ 100\%$$

Metadata indikator ini didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja atau Badan Pusat Statistik secara tahunan

5.2.4.26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja

perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali per tahun (Februari dan Agustus). Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \; x \; 100\%$$

Keterangan:

$TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)
$P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)

5.2.4.27. Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi (% terhadap APBD)

Definisi indikator ini merupakan proporsi total anggaran belanja daerah terkait penelitian, pengembangan, riset, dan inovasi terhadap APBD daerah tersebut. Semakin tinggi persentase proporsinya, maka semakin baik daerah dalam mengutamakan atau memprioritaskan alokasi dana belanja daerahnya untuk kepentingan penelitian, pengembangan, riset, dan inovasi. Metadata didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah secara tahunan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Proporsi\ anggaran\ belanja\ litbang/riset = \frac{Total\ anggaran\ belanja\ litbang/riset}{Total\ APBD} \; x \; 100\%$$

5.2.4.28. Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah

Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah merupakan salah satu pilar dalam Indeks Daya Saing Daerah, yaitu pilar ke-12, yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Indikator ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas

daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikator ini dihitung dengan menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Keanekaragaman tenaga kerja
2. Publikasi ilmiah
3. Aplikasi kekayaan intelektual
4. Belanja riset
5. Indeks keunggulan lembaga riset
6. Aplikasi merek dagang

Metadata indikator ini didapatkan secara tahunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

5.2.4.29. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan indeks yang dapat memberikan gambaran umum tentang pola penggunaan teknologi dan media digital berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, indeks ini juga dapat memahami kemampuan masyarakat untuk mengenali hoaks (informasi bohong) dan membantu perumusan strategi pengendalian hoaks. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam *Road Map* Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020). Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture*:

a. *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
b. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
c. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan *user* (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
d. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Semakin tinggi literasi digital, maka penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital masyarakat di suatu daerah semakin tinggi. Metadata didapatkan secara tahunan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.2.4.30. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan

tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kota. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ \text{ADHK}}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)

$PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik.

5.2.4.31. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa\ (\%PDRB) = \frac{Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Ekspor Barang dan Jasa	=	Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)
PDRB ADHK	=	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan daerah juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal untuk dapat bersaing di pasar global. Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik.

5.2.4.32. Nilai *ICOR*

Incremental Capital Output Ratio (*ICOR*) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran *ICOR* diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan *output*. Karena unit kapital berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). *ICOR* dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

Metode yang digunakan adalah metode penyusutan yakni nilai investasi diperoleh dengan cara menghitung nilai penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun tertentu. Nilai penyusutan ini diperoleh dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rumus perhitungan indikator ini yaitu:

$$\mathbf{ICOR} = \frac{\Delta \mathbf{K}}{\Delta \mathbf{Y}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

Dimana :

ΔK = Penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang.

ΔY = Perubahan/pertambahan output.

$$\mathbf{ICOR} = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{\Delta Y}} \quad \text{..... (2)}$$

Dimana :

R = Penyusutan

Δ Y = Perubahan output

Nilai *ICOR* menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Acuan ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu daerah. Dalam hal ini, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar nilai *ICOR* tersebut. Maka semakin kecil nilai *ICOR* akan semakin efisien peningkatan investasi per pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik.

5.2.4.33. Nilai investasi (PMDN dan PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Rumus nilai realisasi PMA dan PMDN dihitung dari PMA dikalikan (Kurs) ditambah dengan PMDN, sebagai berikut:

Nilai realisasi PMA dan PMDN = PMA × (kurs) + PMDN

*Catatan: Kurs yang digunakan mengacu pada kurs APBN sebagaimana dalam rilis realisasi investasi triwulanan dari BKPM.

Semakin tinggi nilai PMDN atau PMA, maka semakin tinggi kegiatan penanaman modal di suatu daerah. Metadata didapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijian Satu Pintu dan Badan Pusat Statistik, baik secara triwulanan atau tahunan.

5.2.4.34. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta/Jabodetabekjur

PDRB WM yang dilakukan dengan menggunakan data di tingkat kota berpeluang bernilai lebih tinggi (*overestimate*). Semakin tinggi nilai proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur, maka semakin maju dan berkembang perekonomiannya. Rumus perhitungan indikator ini adalah

$$\frac{\sum(PDRB\ Kota\ Tangerang\ Selatan)}{\sum PDRB\ Jabodetabekjur}\ x\ 100\%$$

Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik.

5.2.4.35. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m².
3. Memiliki akses air minum layak.
4. Memiliki akses sanitasi layak.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PHLB = \frac{JRTHLB}{JRT\ x\ 100}$$

Keterangan:

PHLB = Persentase rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRTHLB = jumlah rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRT = Jumlah rumah tangga

2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

$$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB(proksi)}{JRT\ x\ 100}$$

Keterangan:

PHLB (proksi)= Persentase rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRTHLB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRT = Jumlah rumah tangga

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

5.2.4.36. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan

verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Metadata didapatkan secara tahunan dari SETDA dan Kementerian Hukum dan HAM.

5.2.4.37. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan *(business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan Permen PANRB No. 26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada dua komponen utama, yakni pengungkit (60 persen), dengan rincian aspek pemenuhan (20 persen), aspek hasil antara (10 persen), aspek reform (30 persen), dan hasil (40 persen), yang terdiri aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan (10 persen), aspek kualitas pelayanan publik (10 persen), pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10 persen), dan aspek kinerja organisasi (10 persen).

Perhitungan Indeks dilakukan melalui tahapan a. penjumlahan nilai pada setiap sub komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu, b. penyimpulan indikator melalui nilai rata-rata, dan c. penjumlahan seluruh nilai sub komponen sehingga ditemukan angka tertentu. Indeks reformasi birokrasi diklasifikasikan ke dalam 7 kategori, yakni:

a. 0 - 30 : Kategori D/Sangat Buruk
b. >30 - 50 : Kategori C/Buruk
c. >50 - 60 : Kategori CC/Cukup
d. >60 - 70 : Kategori B/Cukup Baik
e. >70 - 80 : Kategori BB/Baik
f. >80 - 90 : Kategori A/Sangat Baik
g. >90 - 100 : Kategori AA/Istimewa

Metadata didapatkan secara tahunan dari SETDA dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5.2.4.38. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai

indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$$

Keterangan:

NDj adalah nilai indeks domain ke-j;
BDj adalah nilai bobot domain ke-j.

Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5.2.4.39. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator

$$Nilai\ per\ indikator: \left(\frac{nilai\ FO1 + nilai\ FO2 + nilai\ FO3}{3}\right) x\ bobot\ per\ indikator$$

2. Menentukan nilai setiap aspek

$$Nilai\ per\ aspek: \sum nilai\ per\ indikator$$

3. Menentukan indeks

$$Nilai\ indeks: \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$$

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (*Fairness*);
2. Partisipasi (*Participation*);
3. Akuntabilitas (*Accountability*);
4. Transparansi (*Transparency*);
5. Berdayaguna (*Useful*);
6. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

Range nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Metadata didapatkan secara tahunan dari SETDA dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5.2.4.40. Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)

Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime,* satu kategori dengan terorisme dan kejahatan narkoba. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki fungsi pencegahan korupsi, bekerja sama dengan BPS menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas. Survei ini memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Nilai hasil SPI adalah 0-72,9 termasuk dalam kategori rentan, 73-77,9 termasuk dalam kategori waspada dan 78-100 dalam kategori terJAGA

Metadata didapatkan secara tahunan dari APIP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5.2.4.41. Capaian Aksi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, HAM harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupatenlkota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Capaian Aksi HAM merupakan nilai pencapaian Aksi HAM dalam pelaporan Aksi HAM sesuai RANHAM. Metadata Capaian Aksi HAM didapatkan secara tahunan dari Panitia Nasional RANHAM atau Kementerian Hukum dan HAM RI.

5.2.4.42. Indeks Rasa Aman

Rasa aman adalah hak setiap individu untuk menjalani aktivitasnya tanpa gangguan, intimidasi, atau hambatan lainnya. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab. Indeks Rasa Aman ditunjukkan dalam bentuk indeks komposit dalam skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan capaian rasa aman yang lebih baik, begitu juga sebaliknya. Metadata didapatkan secara tahunan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor.

5.2.4.43. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di wilayah. Indeks demokrasi diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran indeks demokrasi mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada indeks demokrasi 2009 s.d. 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada indeks demokrasi metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. Indeks demokrasi 2021 merupakan indeks demokrasi pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.

Indeks demokrasi metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:

1. Aspek Kebebasan (7 indikator);
2. Aspek Kesetaraan (7 indikator);
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).

Metode penghitungan indeks demokrasi menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses *web scrapping* dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Data ini kemudian dikoding.

Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui *FGD* yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator indeks demokrasi. Indeks demokrasi dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers. Makin tinggi nilai indeks demokrasi, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai:

1. Kategori Tinggi (>80)
2. Kategori Sedang (60-80)
3. Kategori Rendah (<60)

Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Pusat Statistik

5.2.4.44. Total Kredit/PDRB

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu wilayah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Total\ Kredit\ /\ PDRB\ (\%) = \frac{Total\ kredit}{PDRB}\ x\ 100$$

Keterangan:

Total Kredit = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing unit wilayah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)

Total Kredit /PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di suatu wilayah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian di wilayah tersebut. Metadata didapatkan dari:

1. Bank Indonesia (Total Kredit/Pinjaman) secara bulanan
2. Badan Pusat Statistik (PDRB) secara tahunan.

5.2.4.45. Rasio pajak daerah terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\mathrm{RPDRB}_t = \frac{\mathrm{Penerimaan\ Pajak\ Daerah}_t}{\mathrm{PDRB}_t}\ x\ 100\%$$

Keterangan: RPDRB_t: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan semakin tinggi penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Metadata didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik, secara triwulanan dan tahunan.

5.2.4.46. Hubungan Kerja Sama Antara Pemerintah Kota/sister city

Hubungan kerja sama antara Pemerintah Kota/*Sister City* adalah sebuah bentuk kolaborasi antara dua kota yang berbeda negara atau daerah, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Hubungan ini biasanya melibatkan pertukaran informasi, program pendidikan, promosi pariwisata, serta kerja sama dalam bidang pembangunan dan kebijakan publik. Metadata indikator ini didapatkan dari SETDA Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah secara tahunan.

5.2.4.47. Indeks Institusi

Indeks institusi merupakan salah satu pilar (pilar ke-1) dalam Indeks Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pengukuran IDSD merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *global competitiveness index* (*GCI*) 2019 dari *World Economic Forum* (*WEF*), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD selaras dengan *GCI* sehingga bisa digunakan *stakeholder* global untuk mengukur *GCI* bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Penyusunan IDSD dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD di standardisasi dengan metode *min-max*. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmetika.

Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal.

Pelaku ekonomi akan berinvestasi di suatu daerah yang memiliki institusi yang membentuk iklim bisnis yang kondusif. Sehingga semakin tinggi nilai indeks institusi (pilar institusi pada IDSD) di suatu daerah, maka akan semakin tinggi daya tarik ekonomi dan investasi daerah tersebut.

Metadata Indeks Institusi didapatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara tahunan

5.2.4.48. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender, yang diukur melalui 31 indikator, yaitu:

1. Dimensi ekonomi budaya;
   a. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)
2. Dimensi pendidikan;
   a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+
   b. Harapan lama sekolah penduduk usia 7+
   c. Angka Kesiapan Sekolah
   d. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian
   e. Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah
   f. Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
   a. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal
   b. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal
   c. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama
   d. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku
   e. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir
   f. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong
   g. Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir
   h. Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga
4. Dimensi warisan budaya;

a. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
b. Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
c. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari
d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni
e. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
f. Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional

5. Dimensi ekspresi budaya;
   a. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
   b. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi
   c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukan seni
   d. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
6. Dimensi budaya literasi;
   a. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir
   b. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
   c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat
7. Dimensi kesetaraan gender;
   a. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki
   b. Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat
   c. Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$IPK = \sum_{j=1}^{7} \left(W_j \; x \; indeks \; D_j \right)$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan

W_j = Bobot dimensi ke-j

D_j = Dimensi ke-j

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):

$$Indeks\ D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ij}}{n_j}\right) x\ 100$$

Keterangan:

D_j = *Dimensi ke-j*

SX_{ij} = *Nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi*

n_j = Jumlah indikator dimensi ke-*j*

Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu:

a. 0,00 – 20,00 sangat rendah;
b. 20,01 – 40,00 rendah;
c. 40,01 – 60,00 sedang;
d. 60,01 – 80,00 tinggi;
e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek

5.2.4.49. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$$

Keterangan:

$IKUB$ = Indeks Kerukunan Umat Beragama

D_j = Dimensi ke-*j*

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):

$$Indeks\ D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

D_j = *Dimensi ke-j*

SX_{ij} = *Nilai indikator i pada dimensi ke- j*

n_j = Jumlah indikator dimensi ke-*j*

Angka IKUB menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu:

f. 0,00 – 20,00 sangat rendah;
g. 20,01 – 40,00 rendah;
h. 40,01 – 60,00 sedang;
i. 60,01 – 80,00 tinggi;
j. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.

Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kementerian Agama.

5.2.4.50. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Metadata didapatkan secara tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA.

5.2.4.51. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki

$$G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0{,}005}{MTF} x \frac{0{,}01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} x\ (PR_P\ x\ SE_P)^{\frac{1}{2}} x\ TPAK_P}$$

$$G_L = \sqrt[3]{1\ x\ (PR_L\ x\ SE_L)^{\frac{1}{2}} x\ TPAK_L}$$

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic

$$HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$$

3. Menghitung indeks masing-masing dimensi

$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF} x \frac{0{,}01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$$

$$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$$

$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P x SE_P} + \sqrt{PR_L x SE_L}\right)}{2}$$

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik

$$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR\ x\ IP\ x\ IPK}$$

5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

$$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$

Keterangan:

G_P	=	*Indeks Perempuan*
G_L	=	*Indeks Laki-laki*
MTF	=	*Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan*
$MHPK20$	=	*Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun*
PR_P	=	*Persentase perempuan di legislatif*
PR_L	=	*Persentase laki-laki di legislatif*
SE_P	=	*Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas*
SE_L	=	*Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas*

$TPAK_P$ = *Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja*

$TPAK_L$ = *Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja*

$HARM(G_P, G_L)$ = *Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik*

IKR = *Indeks dimensi kesehatan reproduksi*

IP = *Indeks dimensi pemberdayaan*

IPK = *Indeks dimensi pasar tenaga kerja*

$G_{P,L}$ = *Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik*

IKG = *Indeks Ketimpangan Gender*

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Metadata didapatkan secara tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB dan Badan Pusat Statistik

5.2.4.52. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Perhitungan IPP dilakukan melalui tahapan:

1. Menetapkan nilai skor/nilai subindeks setiap indikator (nilai transformasi indikator)
   a. $\text{Skor indikator}_{ji} = \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$
   b. $\text{Skor indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$
2. Menghitung nilai indeks domain

   $\text{Indeks Domain}_j = \frac{\text{skor X1} + \text{skor X2} + \cdots + \text{skor Xn}}{n} \times 10$
3. Menghitung nilai IPP

   $\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \cdots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$

Keterangan:
n : jumlah indikator setiap domain

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan pemuda. Semakin tinggi nilai IPP di suatu wilayah, maka semakin tinggi keberhasilan dalam pembangunan pemuda di suatu wilayah tersebut. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Pusat Statistik.

5.2.4.53. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek

kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan juga meningkat. Sehingga semakin tinggi nilai IKS di suatu wilayah, maka semakin tinggi kualitas hidup sehat di keluarga pada wilayah tersebut. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Kesehatan

5.2.4.54. Indeks Kota Layak Huni

Kota Layak Huni menggambarkan kenyamanan lingkungan dan suasana kota sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas, yang dilihat dari aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya), maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya). Sebuah kota layak huni dapat dikatakan sebagai kota ideal berdasarkan indikator-indikator yang diberikan, yakni:

a. Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya)
b. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya)
c. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas
d. Keamanan dan keselamatan
e. Kualitas lingkungan
f. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota
g. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indeks Kota Layak Huni (IKLH) merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan huni suatu kota atau wilayah. Indeks ini mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan ketersediaan layanan dasar di dalam kota. Nilai Indeks Kota Layak Huni terbagi atas 5 kelompok yaitu:

a. Nilai indeks 81-100 = sangat baik
b. Nilai indeks 61-80 = baik
c. Nilai indeks 41-60 = cukup
d. Nilai indeks 21-40 = buruk
e. Nilai indeks 0-20 = sangat buruk

Semakin tinggi nilai indeks kota layak huni di suatu wilayah, maka kota di suatu wilayah tersebut semakin layak, aman, dan nyaman untuk dihuni. Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

5.2.4.55. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan

infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. IKLI berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan pandangan masyarakat yang objektif, komprehensif, dan dapat dipercaya, baik dari segi pembangunan fisik maupun manfaat yang dihasilkan. Variabel dalam IKLI yang diukur yaitu 5 variabel umum, yaitu 1) jalan dan jembatan kota dengan variabel khusus jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan lingkungan, 2) Transportasi Umum dengan variabel khusus yaitu bus, kereta api, ojek dan angkutan kota, 3) Infrastruktur air bersih dengan variabel khusus sumber air baku, unit pengolahan air, unit transmisi dan unit pelayanan, 4) Infrastruktur perumahan dengan variabel khusus persampahan, sanitasi, drainase, kelistrikan dan telekomunikasi, 5) infrastruktur ruang publik dengan variabel khusus kawasan pedestrian dan taman kota. Indikator pada variabel tersebut yang akan dinilai meliputi:

a. Ketersediaan Fisik
b. Kualitas Fisik
c. Kesesuaian
d. Efektivitas Pemanfaatan
e. Kontribusi Ekonomi

Proses pengukuran variabel penelitian dengan cara melakukan survei dan proses wawancara langsung dengan sampel tertentu yang mempresentasikan populasi.

No	Responden	Unsur per Aspek				
		U1	U2	U3	U4	U5
1	1					
2	2					
3	3					
...	...					
...	...					
n	n					
∑ nilai/unsur						
NRR /Unsur						
NRR tertimbang /Unsur x 0,2						
Total Nilai 5 Unsur IKLI *)						
Nilai IKLI (Konversi pada Skala 10) **) per variabel						
Nilai IKLI Kecamatan 2 variabel (Jalan Jembatan dan Transportasi Darat)						

Keterangan :

- U1 s.d. U5 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR /Unsur = Nilai rata-rata per Unsur
- NRR tertimbang /Unsur = NRR / Unsur x 0,2
- Total Nilai 5 Unsur IKLI *) = Jumlah NRR tertimbang
- Nilai IKLI (Konversi pada Skala 10) per variabel = Jumlah NRR Tertimbang x 2
- Nilai IKLI Kecamatan 2 Variabel = Rata-rata nilai IKLI

Kemudian nilai IKLI pada semua kecamatan di daerah X dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di daerah tersebut untuk menghasilkan nilai IKLI pada daerah X. IKLI yang tinggi mencerminkan tingginya kualitas *output* dan *outcome* dari penyediaan layanan infrastruktur, begitu sebaliknya. Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

5.2.4.56. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Perhitungan IKA menggunakan perubahan rumusan IKA-Indeks Pencemar (Ika-Ip) menjadi IKA-modifikasi NSF WQI (IKA-INA)

Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya parameter baru yaitu Particulate Matter 2,5 Mikron (PM 2,5)

Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5.2.4.57. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumus Perhitungan:

$$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

PSA	:	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman
JRTSPAL	:	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T
JRTIPLT	:	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
JRTS	:	Jumlah rumah tangga seluruhnya

Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang dan Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

5.2.4.58. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang

a. Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
b. Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a)

Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.

Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

Cara Perhitungan:

$$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah
JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber: Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 dan Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di daerah. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup.

5.2.4.59. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;

a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.
b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Mengacu pada definisi global dari *UN-Habitat*, bahwa makna dari *waste recovery* sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (*recovery*) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas.

Rumus Perhitungan yaitu:

Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah

Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:

Cara (1)

$$SO = ST - MFPA + RDP$$

Keterangan:

SO : Sampah terolah (ton/hari)
ST : Sampah terkumpul (ton/hari)
MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)
RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)

Cara (2)

$$SO = MFPA + DPA - RDP$$

Keterangan:

SO : Sampah terolah (ton/hari)
MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari)
DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)
RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)

Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah

$$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$$

Keterangan:

TS : Timbulan sampah (kg/hari)
TP : Total populasi (orang)
TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)
TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)

Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.

$$TS = 70\%\ dari\ rumah\ tangga + 30\%\ dari\ non - rumah\ tangga$$

$$TS = \frac{TSRT}{70\%}$$

Keterangan:

TS : Timbulan sampah (ton/hari)
TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT

Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah

$$\%SO = \frac{SO}{TS}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

%SO : Tingkat sampah terolah (%)
SO : Sampah terolah (ton/hari)
TS : Timbulan sampah (ton/hari)

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di daerah. Metadata didapatkan secara tahunan dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR Badan Pusat Statistik dan Podes (masih dalam proses uji coba)
3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Sistem Informasi INSAN Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.2.4.60. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah *kWh* (*kilowatt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan rumus perhitungan:

$$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$$

Keterangan:

KLpk : Konsumsi listrik per kapita

KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN

KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN

P : Jumlah penduduk

Catatan:

1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;
2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN

Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Metadata didapatkan secara tahunan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Badan Pusat Statistik

5.2.4.61. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/*PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\, dx$$

Keterangan:

PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.

MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*).

f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu

Indikator ini mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang

direkomendasikan. Semakin tinggi nilai *PoU* mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Badan Pusat Statistik.

5.2.4.62. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)

Kapasitas Air Baku adalah Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Kapasitas air baku dihitung dengan cara menjumlahkan kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.

5.2.4.63. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan

JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan

Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Metadata didapatkan secara tahunan dari :

1. Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
2. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan
3. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR Badan Pusat Statistik

5.2.4.64. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Keterangan:

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:

a. lndeks <13 adalah Rendah
b. lndeks 13 - 144 adalah Sedang
c. lndeks >144 adalah Tinggi

Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

5.2.4.65. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan

adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

a. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif

$$\%PEK = \sum_{i=base\ layer}^{t} PE_t \Big/ \sum_{i=base\ layer}^{t} EB_t$$

$\%PEK$: persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif.

$\sum_{i=base\ layer}^{t} PE_t$: akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun t

$\sum_{i=base\ layer}^{t} EB_t$: akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode base year hingga tahun t

t : titik tahun perhitungan

i : *base year*

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem AKSARA Bappenas.

BAB 6
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 20 (dua) puluh tahun sebagai bentuk penjabaran dan/atau mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

Perwujudan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045 dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pendanaan pembangunan yang memadai sebagaimana disajikan dalam Gambar 6.1. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi Daerah dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi seluruh pemangku pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Upaya mewujudkan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045 juga memerlukan lingkungan pendanaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.



Gambar 6.1. Kerangka Pengawalan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJPD Kota Tangerang Selatan harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kota Tangerang Selatan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan daerah yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan daerah dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pelaku non pemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.1.1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Konsistensi antara RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan. Substansi misi pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJMD Kota Tangerang Selatan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan memuat upaya transformatif untuk mencapai Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan;
3. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan;

4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kota Tangerang Selatan menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan yang merupakan rencana kerja tahunan, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kota Tangerang Selatan juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja PD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
7. Dokumen RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD Kota Tangerang Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah seperti rencana induk/*Master Plan*/*Grand Design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah;
8. Dokumen RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota DPRD kota;

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. HaI ini salah satunya harus tercermin melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan oleh program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD dan RKPD Kota Tangerang Selatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan daerah.

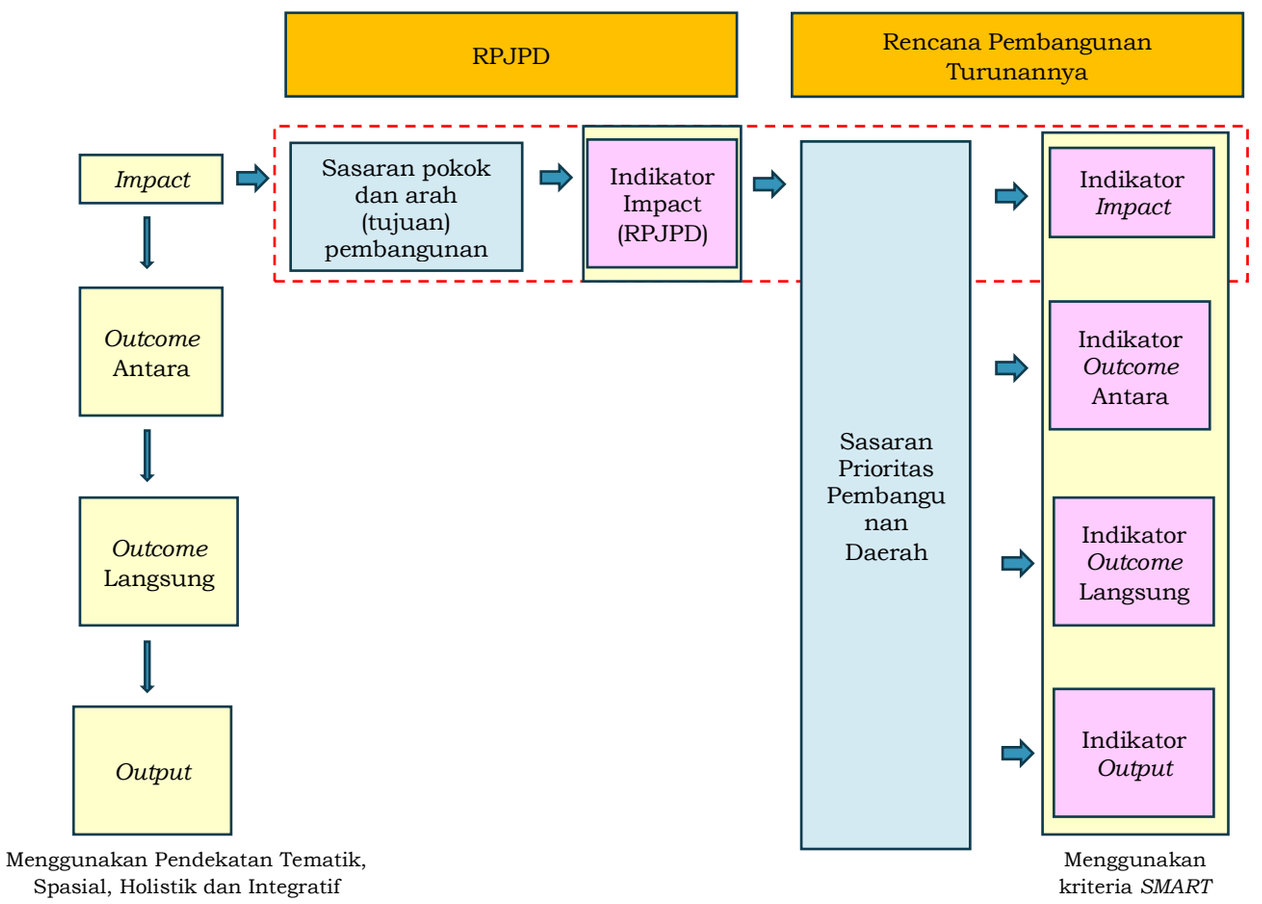
6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan pembangunan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan daerah;
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah;
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan;
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-*output-outcome-impact*. Sasaran pokok pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tahunan, sebagaimana disajikan dalam Gambar 6.2.



Gambar 6.2. Kerangka Kerja Logis RPJPD-Dokumen Turunannya

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant,* dan *Time-Bound* (*SMART*) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJMD Kota Tangerang Selatan, dan seluruh indikator RPJPMD Kota Tangerang Selatan harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

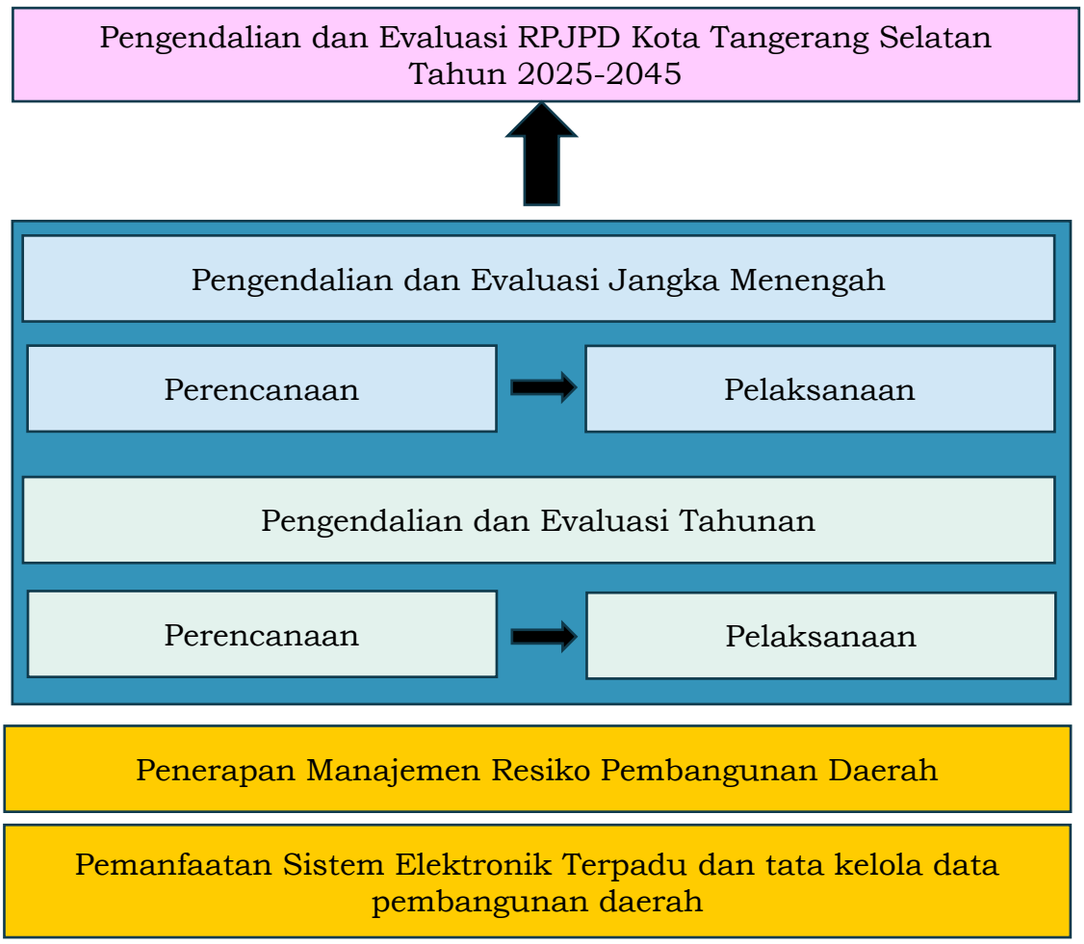
Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Tangerang Selatan dan RKPD Kota Tangerang Selatan perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah (pusat dan daerah) maupun non pemerintah sevara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja daerah serta pendanaan dan pembiayaan prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan tahapan pembangunan daerah. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja daerah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah dan penerbitan Surat Berharga Daerah, serta memanfaatkan sumber dan skema pendanaan inovatif termasuk *blended financing* untuk penganggaran pencapaian priotitas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dalam kerangka manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian dan evaluasi didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan daerah yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 disajikan dalam Gambar 6.3.



Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pengendalian dan evaluasi perencanaan. Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas program dan kegiatan prioritas pembangunan serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

   Pengendalian dan evaluasi jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dan dokumen RPJMD ke dokumen rencana strategis Perangkat Daerah; (ii) kesiapan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko dan mitigasinya.
   Pengendalian dan evaluasi tahunan mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana kerja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko dan mitigasinya.

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Perangkat Daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Kerangka kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam rangka penjaminan terpadu atas pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah, dapat dilakukan salah satunya melalui sinergi pengendalian dan pengawasan

6.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, kelompok masyarakat dan pelaku lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator-indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan termasuk data statistik pemerintah dan swasta pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan daerah.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal ” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Perangkat Daerah dilakukan melalui musyarawah atau rapat koordinasi agar Perangkat Daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah. Sedangkan komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

6.2. Pendanaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2045 memerlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan, yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pendanaan yang meliputi penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pendanaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama antar daerah/antar pemangku kepentingan dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan, terutama pendanaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan usaha lokal dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan *Sovereign Wealth Fund*), (ii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non-publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non-publik diperkuat dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pendanaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE